





RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

2025 2029

KABUPATEN KEDIRI

InUse Book 1.indb 1 10/19/2025 12:12:28 AM



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

InDesc Book 1.indb 2 10/19/2025 12:12:28 AM

SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

InUse Book 1.indb 4 10/19/2025 12:12:29 AM

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

InUse Book 1.indb 5 10/19/2025 12:12:29 AM

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

InUse Book 1.indb 6 10/19/2025 12:12:29 AM

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

InUse Book 1.indb 7 10/19/2025 12:12:29 AM

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023– 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 127);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 – 2029.

InUse Book 1.indb 8 10/19/2025 12:12:29 AM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kediri.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

InUse Book 1.indb 9 10/19/2025 12:12:29 AM

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

(1) RPJMD Kabupaten Kediri merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029.

InUse Book 1.indb 10 10/19/2025 12:12:29 AM

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis; dan
d. atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).

Pasal 4

Perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

a. holistik-tematik;
b. integratif; dan
c. spasial.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RPJMD, meliputi :

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. BAB V : Penutup.

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

(1) RPJMD menjadi pedoman bagi :
    a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

b. Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun RKPD Tahun 2025 – 2029.

(2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

InUse Book 1.indb 12 10/19/2025 12:12:29 AM

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka perubahan capaian sasaran RPJMD akan dimuat dan dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal terdapat perubahan Nomenklatur dan/atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak merubah RPJMD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 - 8 - 2025

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 - 8 - 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 139-4/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH,

MOHAMAD SOLIKIN

InUse Book 1.indb 14 10/19/2025 12:12:29 AM

DAFTAR ISI

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 iii
Daftar Isi xv
Daftar Tabel xix
Daftar Gambar xxii

Bab I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan 2
1.2 Dasar Hukum 6
1.3 Hubungan Antardokumen 12
1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025–2029 13
1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RTRW Nasional 16
1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 17
1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2043 21
1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 24
1.3.6 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 26
1.3.7 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 30
1.3.8 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 31
1.3.9 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah 32
1.4 Maksud dan Tujuan 33
1.4.1 Maksud 33
1.4.2 Tujuan 33
1.5 Sistematika RPJMD Tahun 2025–2029 34

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah 35
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 36
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 36
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 36
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 37
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 40
2.1.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air 40
2.1.1.3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan 42
2.1.1.3.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Fungsi Lindung 46

InUse Book 1.indb 15 10/19/2025 12:12:29 AM

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 47
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 50
2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 52
2.1.1.7 Demografi 56
2.1.1.8 Proyeksi Demografi Lima Tahun ke Depan 62
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 63
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 63
2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 63
2.1.2.1.2 Kemiskinan 66
2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita 69
2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka 70
2.1.2.1.5 Indeks Gini (Gini Ratio) 71
2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia 72
2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua 73
2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup 73
2.1.2.2.2 Kesehatan Keluarga 74
2.1.2.2.3 Stunting 75
2.1.2.2.4 Jaminan Kesehatan 76
2.1.2.2.5 Angka Kematian Ibu 77
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 78
2.1.2.4 Keluarga Berkualitas 82
2.1.3 Aspek Daya Saing 83
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 83
2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 84
2.1.3.2.1 Struktur Ekonomi 84
2.1.3.2.2 Rasio Kewirausahaan 88
2.1.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 89
2.1.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 90
2.1.3.2.5 Indeks Inovasi Daerah 90
2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 92
2.1.3.3.1 Lingkungan Hidup Berkelanjutan 92
2.1.3.3.2 PDRB Nonmigas 92
2.1.3.4 Transformasi Digital 93
2.1.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia 93
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Dosmetik dan Global 94
2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto 94
2.1.3.5.2 Net Ekspor 95
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 97
2.1.3.6.1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih 97
2.1.3.6.2 Rasio Ketersediaan Daya Listrik 98
2.1.3.6.3 Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik 99
2.1.3.6.4 Desa Mandiri 99
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro 100
2.1.3.7.1 *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) 100
2.1.3.7.2 Tingkat Kriminalitas 101

InUse Book 1.indb 16 10/19/2025 12:12:29 AM

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 102
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 102
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 103
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 103
2.1.4.4 Urusan Pemerintahan Wajib 105
2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimum 122
2.1.4.5.1 Pendidikan 122
2.1.4.5.2 Kesehatan 123
2.2 Gambaran Kondisi Keuangan Kabupaten Kediri 123
2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir 124
2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 124
2.2.1.1.1 Pendapatan Daerah 126
2.2.1.1.2 Belanja Daerah dan Transfer 131
2.2.1.1.3 Pembiayaan Daerah 134
2.2.1.2 Neraca Daerah 134
2.2.1.3 Proporsi Penggunaan Anggaran 139
2.2.1.4 Analisis Pembiayaan 140
2.2.1.4.1 Ruang Fiskal Daerah 143
2.2.1.4.2 Kapasitas Fiskal Daerah 145
2.2.1.4.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah 147
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan 147
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis 153
2.3.1 Permasalahan 153
2.3.1.1 Permasalahan Kluster Sumber Daya Manusia 153
3.2.1.2 Permasalahan Kluster Ekonomi 156
3.2.1.3 Permasalahan Kluster Lingkungan dan Infrastruktur 156
3.2.1.3 Permasalahan Kluster Tata kelola Pemerintah 162
2.3.2 Isu Strategis 181
2.3.2.1 Isu Strategis Global 181
2.3.2.2 Isu Strategis Nasional 182
2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur 186
2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Kediri 187

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 197

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 199
3.1.1 Visi 199
3.1.2 Misi 201
3.1.3 Tujuan dan Sasaran 204
3.1.4 Prioritas Pembangunan Daerah 207
3.1.5 Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 212
3.1.6 Keselarasan Target Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan Target Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur 213

InUse Book 1.indb 17 10/19/2025 12:12:29 AM

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah 214
3.2.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Penahapan Pembangunan 214
3.2.1.1 Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing serta Nasionalis Religius 214
3.2.1.2 Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan melalui Pemanfaatan Potensi Lokal 215
3.2.1.3 Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 216
3.2.1.4 Misi 4: Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur 217
3.2.1.5 Misi 5: Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda 219
3.2.1.6 Misi 6: Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan 221
3.2.1.7 Misi 7: Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat 222
3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 227
3.2.1.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Tahap 1 RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 227
3.2.1.2 Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Kediri 238
3.2.1.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 254
3.2.1.4 Pengarusutamaan Pembangunan 260
3.2.1.4.1 Pengarusutamaan SDGs 260
3.2.3 Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 260

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 295
4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 296
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 388
4.2.1 Indikator Kinerja Utama 388
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) 388

Bab V Penutup 397

InUse Book 1.indb 18 10/19/2025 12:12:29 AM

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan RPJMN Tahun 2025–2029	15
Tabel 1.2	Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029	19
Tabel 1.3	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029	20
Tabel 1.4	Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 Terkait Pengembangan Kabupaten Kediri	22
Tabel 1.5	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan Misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045	24
Tabel 1.6	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043	27
Tabel 2.1	Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kediri Tahun 2024	37
Tabel 2.2	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2019-2024	40
Tabel 2.3	Status Daya Dukung Air Sistem Grid Kabupaten Kediri	41
Tabel 2.4	Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Kediri Tahun 2029	43
Tabel 2.5	Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Beras di Kabupaten Kediri Tahun 2020–2024	43
Tabel 2.6	Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Kediri Tahun 2024	44
Tabel 2.7	Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Kediri Tahun 2029	46
Tabel 2.8	Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	46
Tabel 2.9	Koefisien Lindung Kabupaten Kediri	47
Tabel 2.10	Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029	47
Tabel 2.11	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2025	56
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2025	57
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021-2025	57
Tabel 2.14	Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024	58
Tabel 2.15	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024	59
Tabel 2.16	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024	60
Tabel 2.17	Rasio Ketergantungan Kabupaten Kediri Tahun 2020–2024	62
Tabel 2.18	Proyeksi Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029	62
Tabel 2.19	Proyeksi Kelompok Penduduk Berdasarkan Persentase Komposisi Usia	62
Tabel 2.20	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024	65
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran di Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024	66
Tabel 2.22	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kediri Tahun 2020–2024	67
Tabel 2.23	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024	73
Tabel 2.24	Struktur Ekonomi di Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024	85
Tabel 2.25	Struktur Perekonomian Kabupaten Kediri Berdasarkan Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2020-2024	88
Tabel 2.26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024	92

InUse Book 1.indb 19 10/19/2025 12:12:29 AM

Tabel 2.27 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Berdasarkan Komoditas (USD) di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023 96
Tabel 2.28 Jumlah Pelanggan Air Bersih di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023 98
Tabel 2.31 Capaian Desa Maju dan Desa Mandiri Kabupaten Kediri Tahun 2019-2024 100
Tabel 2.32 Kriminalitas - Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk Berdasarkan Kepolisian Resort di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2024 101
Tabel 2.33 Perkembangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2019-2024 103
Tabel 2.34 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022-2024 104
Tabel 2.35 Perbandingan 12 Pilar IDSD Kabupaten Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional 104
Tabel 2.36 Capaian Indikator Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib 106
Tabel 2.37 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan 122
Tabel 2.38 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan 123
Tabel 2.39 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp) 125
Tabel 2.40 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp) 127
Tabel 2.41 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 130
Tabel 2.42 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp) 132
Tabel 2.43 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 133
Tabel 2.44 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp) 135
Tabel 2.45 Neraca Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp) 137
Tabel 2.46 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp) 138
Tabel 2.47 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 140
Tabel 2.48 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp) 141
Tabel 2.49 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp) 141
Tabel 2.50 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kediri (Rp) 142
Tabel 2.51 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp) 144
Tabel 2.52 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 145
Tabel 2.53 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Beradasarkan IKFD 145
Tabel 2.54 Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan RKFD 146
Tabel 2.55 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp) 148
Tabel 2.56 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2030 (Rp) 150
Tabel 2.57 Identifikasi Permasalahan Kluster Sumber Daya Manusia 153
Tabel 2.58 Identifikasi Permasalahan Kluster Ekonomi 157
Tabel 2.59 Identifikasi Permasalahan Kluster Lingkungan dan Infrastruktur 161
Tabel 2.60 Identifikasi Permasalahan Kluster Tata Kelola Pemerintah 163
Tabel 2.61 Permasalahan Berdasarkan Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 164
Tabel 2.62 Perumusan Isu Strategis Daerah 193
Tabel 2.63 Kriteria Pembobotan Isu Strategis 195
Tabel 2.64 Penilaian Skala Urgensi Isu Strategis Berdasarkan Skor 195

InUse Book 1.indb 20 10/19/2025 12:12:29 AM

Tabel 3.1 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dan Misi Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 204
Tabel 3.2 Tujuan Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 205
Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran beserta Indikator, dan Target Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 208
Tabel 3.4 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 Berdasarkan Misi 211
Tabel 3.5 Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 212
Tabel 3.6 Perbandingan Target Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan Target Sasaran Ekonomi Makro RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 214
Tabel 3.7 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 224
Tabel 3.8 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2026–2030 226
Tabel 3.9 Arah Kebijakan Tahap 1 Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 230
Tabel 3.10 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2026–2030 239
Tabel 3.11 Rincian Kluster Pembangunan di Kabupaten Kediri 256
Tabel 3.12 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat-Pusat Lain di Kabupaten Kediri 257
Tabel 3.13 Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap II (2025–2029) 261
Tabel 3.14 Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Kediri dalam RPJMD Tahun 2025–2029 269
Tabel 3.15 Program Prioritas Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 290
Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kediri 297
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kediri 389
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kediri 390

InUse Book 1.indb 21 10/19/2025 12:12:29 AM

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Keterkaitan Antardokumen Rencana Pembangunan Daerah 13
Gambar 1.2 Alur Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 30
Gambar 1.3 Alur Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 31
Gambar 1.4 Alur Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah beserta Dokumen Perencanaan Lain 32
Gambar 2.1 Peta Status Kebutuhan Air Kabupaten Kediri 42
Gambar 2.2 Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Beras di Kabupaten Kediri Tahun 2016–2020 43
Gambar 2.3 Peta Status Kebutuhan Bahan Pangan Beras Kabupaten Kediri 45
Gambar 2.4 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 47
Gambar 2.5 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%) Kabupaten Kediri, 2020-2024 48
Gambar 2.6 Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Berdasarkan Kab./Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 49
Gambar 2.7 Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (kWh Per Kapita) 49
Gambar 2.8 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 50
Gambar 2.9 Capaian Persentase Penanganan Persampahan Tahun 2021–2024 51
Gambar 2.10 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 52
Gambar 2.11 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi 53
Gambar 2.12 Peta Risiko Bencana Banjir 53
Gambar 2.13 Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api 54
Gambar 2.14 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan 54
Gambar 2.15 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor 55
Gambar 2.16 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 56
Gambar 2.17 Piramida Penduduk Kebupaten Kediri Tahun 2024 57
Gambar 2.18 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016–2024 60
Gambar 2.19 Laju Pertumbuhan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024 61
Gambar 2.20 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 64
Gambar 2.21 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional (%) Tahun 2020–2024 64
Gambar 2.22 Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 67
Gambar 2.23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020–2024 68
Gambar 2.24 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Kediri Tahun 2020–2024 69

InUse Book 1.indb 22 10/19/2025 12:12:30 AM

Gambar 2.25 PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Kediri (Juta Rupiah) Tahun 2020–2024 70
Gambar 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kediri (%) Tahun 2020–2024 71
Gambar 2.27 Indeks Gini Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 72
Gambar 2.28 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 72
Gambar 2.29 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 74
Gambar 2.30 Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2024 75
Gambar 2.31 Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 76
Gambar 2.32 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) 77
Gambar 2.33 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 78
Gambar 2.34 Rata-Rata Lama Sekolah Usia di Atas 25 Tahun di Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 78
Gambar 2.35 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 79
Gambar 2.36 Indeks Masyarakat Digital Tahun 2022-2023 80
Gambar 2.37 Siswa yang Memenuhi Kompetensi Literasi dan Numerasi Minimum Tahun 2021-2024 81
Gambar 2.38 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023 83
Gambar 2.39 Angka Ketergantungan Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 84
Gambar 2.40 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Tahun 2020-2024 86
Gambar 2.41 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) 87
Gambar 2.42 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 89
Gambar 2.43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 89
Gambar 2.44 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024 90
Gambar 2.45 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 91
Gambar 2.46 Perkembangan PDRB Nonmigas Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp Miliar) 93
Gambar 2.47 Perkembangan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024 93
Gambar 2.48 Nilai dan Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB ADHK (Rp Miliar) 94
Gambar 2.49 Nilai Ekspor Daerah dan Pertumbuhan Ekspor Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023 95
Gambar 2.50 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2020-2024 97
Gambar 2.51 Produksi Air Minum yang Disalurkan di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2024 98
Gambar 2.52 Nilai ICOR Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023 100
Gambar 2.53 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kediri Tahun 2020–2024 102
Gambar 2.54 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 129
Gambar 2.55 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 130
Gambar 2.56 Struktur Belanja Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 133
Gambar 2.57 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 133
Gambar 2.58 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 149
Gambar 3.1 Misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045 198
Gambar 3.2 Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 201

InUse Book 1.indb 23 10/19/2025 12:12:30 AM

Gambar 3.3 Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2045 254
Gambar 3.4 Kluster Pembangunan di Kabupaten Kediri 255
Gambar 3.5 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 258
Gambar 3.6 Rencana Pola Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 258
Gambar 3.7 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kediri 259

InUse Book 1.indb 24 10/19/2025 12:12:30 AM



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah, dan pendek (tahunan).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pasal 2 ayat (4) dalam UU 25/2004 menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk: (1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar-ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Sementara itu, dokumen perencanaan perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut juga telah dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan mempertimbangkan Rencana

InUse Book 1.indb 2 10/19/2025 12:12:30 AM

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat 3 (tiga), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Kemudian, berdasarkan waktu penetapan pelaksanaan dokumen RPJMD, Pasal 264 ayat (1), RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana pada ayat (4) dinyatakan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus juga merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

RPJMD menekankan pentingnya menerjemahkan visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut.

1. Pendekatan politis yang memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

InUse Book 1.indb 3 10/19/2025 12:12:30 AM

2. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan atas-bawah *(top down)* dan bawah-atas *(bottom up)* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Selain itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut.

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan terfokus pada kebijakan yang relevan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah.
3. Pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan pembangunan di lapangan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 telah menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2025–2029, yaitu ”Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut selanjutnya diejawantahkan dalam 8 misi pembangunan yang disebut Asta Cita. Kedelapan misi pembangunan nasional tersebut selanjutnya dijabarkan dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah dan tujuh belas program prioritas nasional. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta indikator dan target pembangunan jangka menengah Kabupaten Kediri dirumuskan selaras dan mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi. Sesuai dengan uraian di atas, RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Kediri periode 2025–2029, yaitu Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Maria Ulfa yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Kediri tersebut akan diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029,

InUse Book 1.indb 4 10/19/2025 12:12:30 AM

RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2023–2043.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045, daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, di mana sebagian substansinya menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029. Sebagian substansi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa di samping RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 menjabarkan visi, misi, dan program bupati, dan wakil bupati terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025–2029. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berpikir sistem, dan sistem dinamik.

Visi pembangunan Kabupaten Kediri pada periode 2025–2029 adalah ”Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” di mana untuk pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu Misi 1: Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius; Misi 2: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal; Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; Misi 4: Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur; Misi 5: Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda; Misi 6: Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan; dan Misi 7: Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. Pembangunan Kabupaten Kediri dalam periode 2025–2029 akan berfokus pada pembangunan berbasis desa dan pertanian yang menjadi ciri khas ekonomi Kabupaten Kediri. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bagian keempat, disampaikan bahwa proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun

InUse Book 1.indb 5 10/19/2025 12:12:30 AM

2025–2029 dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai penyusunan RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 sebagai tahapan pertama dalam pembangunan jangka panjang daerah akan memiliki keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 selanjutnya juga dijadikan pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kediri pada setiap tahun (sepanjang periode RPJMD) dan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025–2029.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri 2025–2029 dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan berikut.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

InUse Book 1.indb 6 10/19/2025 12:12:30 AM

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

InUse Book 1.indb 7 10/19/2025 12:12:30 AM

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
18. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

InUse Book 1.indb 8 10/19/2025 12:12:30 AM

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

InUse Book 1.indb 9 10/19/2025 12:12:30 AM

32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
43. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

InUse Book 1.indb 10 10/19/2025 12:12:30 AM

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
47. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89).
48. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
56. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

InUse Book 1.indb 11 10/19/2025 12:12:30 AM

58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 190).

1.3 Hubungan Antardokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan RPJMD kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan lainnya diatur dalam Pasal 5, yaitu sebagai berikut.

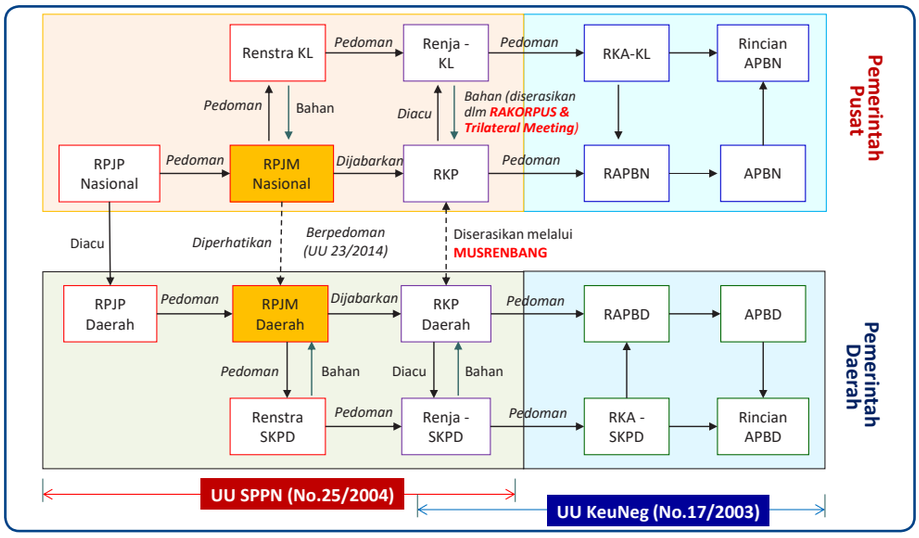
1. RPJMD kabupaten/kota merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJMD provinsi dan RPJM nasional.
2. RPJMD kabupaten/kota memperhatikan rencana tata ruang yang ada.
3. RPJMD kabupaten/kota menjadi pedoman penyusunan rencana strategis perangkat daerah.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan program pembangunan selama 5 (lima) tahun, perencanaannya harus berpedoman kepada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun, selain itu, penyusunan RPJMD Kabupatern Kediri juga mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat meminimalkan atau menghindari terjadinya dampak dan risiko lingkungan hidup akibat pembangunan dan keseimbangan

InUse Book 1.indb 12 10/19/2025 12:12:30 AM

GAMBAR 1.1
Alur Keterkaitan Antardokumen Rencana Pembangunan Daerah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017



antara pelaksanaan pembangunan pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam dapat terwujud, dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun rencana strategis yang berdurasi 5 (lima) tahun dan rencana kerja yang berdurasi 1 (satu) tahun. Sejalan dengan itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 berpedoman kepada: (1) RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045, dan (2) RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 juga memperhatikan beberapa dokumen lain seperti: (1) RPJMN Tahun 2025–2029, (2) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, dan (3) RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043.

1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025–2029

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, terdapat 4 (empat) lampiran yang memuat: (a) Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yang memuat evaluasi dan tantangan pembangunan, kebijakan pembangunan, prioritas nasional, arah pembangunan wilayah, pendanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan (Lampiran I), (b) Matriks pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lampiran II), (c) Matriks kementerian/lembaga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lampiran III), dan (d) Arah Pembangunan Kewilayahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lampiran IV). Visi pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan misi presiden yang dituangkan dalam delapan *Asta Cita*.

InUse Book 1.indb 13 10/19/2025 12:12:31 AM

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari presiden. Setiap prioritas nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha (BUMN, swasta). Prioritas nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional.

Ketujuh belas program prioritas tersebut diwujudkan dalam 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yaitu: 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten; 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi; 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut; 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara; 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi balk untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 memperhatikan misi dan agenda pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Hal ini dilakukan untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan kebijakan pembangunan nasional. Agar RPJMN Tahun 2025–2029 mampu dioperasionalkan secara optimal dan tercipta harmonisasi dalam pembangunan, RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 wajib mengacu "Prioritas Nasional" tersebut. Pada konteks inilah pendekatan atas-bawah (*top-down*) diimplementasikan dalam penyusunan RPJMD. Beberapa program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yang relevan dengan kewenangan Kabupaten Kediri nantinya akan diadopsi ke dalam berbagai program pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029.

InUse Book 1.indb 14 10/19/2025 12:12:31 AM

InUse Book 1.indb 15

TABEL 1.1
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan RPJMN Tahun 2025–2029

Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029	Misi RPJMN Tahun 2025–2029	Prioritas Nasional Pembangunan	Program Prioritas
Misi 1: Pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing, serta nasionalis-religius	Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Menjamin tesedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
			Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
			Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
Misi 5: Pengembangan pariwisata, seni budaya, olahraga, dan kreativitas pemuda	Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga
Misi 2: Pengembangan ekonomi kerakyatan, revitalisasi pertanian melalui pemanfaatan potensi lokal	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
			Penyempurnaan sistem penerimaan negara
			Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
			Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
	Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
Misi 3: Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
			Pencegahan dan pemberantasan korupsi
			Pencegahan dan pemberantasan narkoba
Misi 4: Pembangunan wilayah dan infrastruktur	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
			Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lainnya
Misi 6: Penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan	Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Menjamin pelestarian lingkungan hidup
			Memastikan kerukunan antarumat beragama, Kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
Misi 7: Kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat	Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pemberantasan kemiskinan

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029

10/19/2025 12:12:31 AM

1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RTRW Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Tujuan penataan ruang wilayah nasional sebagaimana dicantumkan pada Pasal 2 (dua) adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
3. Mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
4. Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Mewujudkan keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
6. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
8. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
9. Mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Pasal 5 (lima) ayat 2 (dua) menguraikan strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi: (a) Menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; (b) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; (c) Mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan; (d) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitamya; (e) Mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan (f) Mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) ayat 2 (dua) PP 13/2017, strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup dengan mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi eksosistemnya serta tersebar secara proporsional. Dalam RTRWN, Kabupaten Kediri bersama Kota Kediri dalam kaitannya dengan sistem perkotaan, telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Timur.

InUse Book 1.indb 16 10/19/2025 12:12:31 AM

PKW dalam Pasal 14 (empat belas) ayat 2 (dua) ditetapkan dengan kriteria: (a) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN); (b) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; (c) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau (d) Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional. Kebijakan dalam RTRWN di atas akan menjadi acuan dalam pembangunan Kabupaten Kediri selama 20 tahun ke depan. Secara spesifik, penyebutan Kabupaten Kediri dalam dokumen RTRWN tercantum dalam beberapa lampiran, yaitu sebagai berikut.

1. Lampiran II Sistem Perkotaan Nasional. Kabupaten Kediri sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama Kota Kediri (II/C/1).
2. Lampiran III Jaringan Jalan Bebas Hambatan. Terdapat pembangunan jalan bebas hambatan yang melewati Kabupaten Kediri, yaitu Jalan Tol Kertosono – Kediri (III/6).
3. Lampiran IX Kawasan Andalan. Kawasan Andalan Kediri-Tulungagung-Blitar (III/A/2; II/B/2; II/D/2; III/F/2; dan III/E/2) dengan sektor unggulannya, yaitu sektor pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029

Penyusunan tahun 2025–2029 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029. Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025–2029 adalah ”Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat 9 (sembilan) misi pembangunan daerah yang dikenal dengan *Nawa Bhakti Satya*, yaitu:

a. Misi 1: Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan **(Jatim Sejahtera)**;
b. Misi 2: Memperluas lapangan kerja yang berkualitas **(Jatim Kerja)**;
c. Misi 3: Memperkuat infrastruktur konektivitas antarwilayah dan intra-aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan **(Jatim Akses)**;
d. Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan **(Jatim Agro)**;
e. Misi 5: Memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan **(Jatim Cerdas)**;
f. Misi 6: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan **(Jatim Sehat)**;
g. Misi 7: Memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, efektif, berdaya guna, dan partisipatif **(Jatim Berkah Amanah)**;
h. Misi 8: Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif **(Jatim Harmoni)**; dan

InUse Book 1.indb 17 10/19/2025 12:12:31 AM

i. Misi 9: Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan **(Jatim Lestari)**.

Misi pembangunan yang telah diuraikan tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2025–2029 meliputi 9 (sembilan) hal, yaitu:

1. Rendahnya produktivitas dan nilai tambahnya sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah.
2. Kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan belum merata.
3. Sarana prasarana pelayanan dasar publik serta konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah belum merata.
4. Potensi konflik sosial dan relatif tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perkawinan anak.
5. Tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong masih rendah.
6. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.
7. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal.
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
9. Perlunya peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih dan adaptif.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025–2029 sebagaimana dipaparkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 berkaitan dengan 6 (enam) aspek, yaitu: (1) Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah; (2) Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; (3) Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak dan berkualitas; (4) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik; (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan (6) Kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Dalam rangka menjawab isu strategis tersebut, terdapat beberapa tujuan dan sasaran di masing-masing misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025–2029.

Misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator kinerja pada masing-masing tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025–2029 telah diadopsi sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 khususnya dalam misi dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, indikator kinerja RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 juga akan menjadi acuan dalam penentuan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029. Setelah penelaahan terhadap misi pembangunan provinsi, berikut adalah keterkaitan misi pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Kediri selama periode 2025–2029.

InUse Book 1.indb 18 10/19/2025 12:12:31 AM

TABEL 1.2
Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu	Tujuan 1: Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan	Sasaran 1: Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif
		Sasaran 2: Meningkatnya akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan
		Sasaran 3: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Misi 2: Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (*start-up*) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (*21st century skills*) yang berdaya saing	Tujuan 2: Terwujudnya lapangan kerja yang berkualitas, stabilitas ekonomi, dan peningkatan kewirausahaan serta pengembangan ekonomi kreatif didukung dengan pengembangan konektivitas antarwilayah	Sasaran 4: Meningkatnya kemajuan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi
		Sasaran 5: Meningkatnya integrasi ekonomi domestik dan global
		Sasaran 6: Terjaganya stabilitas ekonomi makro daerah
		Sasaran 7: Meningkatnya daya saing investasi
		Sasaran 8: Meningkatnya transformasi digital
Misi 5: Memperkuat konektivitas antarwilayah dan intra-aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan		Sasaran 9: Meningkatnya penyediaan jaringan transportasi
Misi 3: Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (*education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif, merata, berkeadilan, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat	Sasaran 10: Meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata
Misi 4: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC)		Sasaran 10: Meningkatnya layanan dan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat
Misi 6: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila	Tujuan 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas serta terciptanya masyarakat yang aman, tentram, tertib dan berdemokrasi dengan menjunjung nilai Pancasila	Sasaran 11: Meningkatnya stabilitas, demokrasi dan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat daerah
		Sasaran 12: Meningkatnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
Misi 7: Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional	Tujuan 5: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan melalui tata niaga yang berkeadilan, akses optimal terhadap sarana produksi dan pembiayaan, serta dukungan infrastruktur pertanian guna memperkuat Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional	Sasaran 13: Meningkatnya kedaulatan pangan

InUse Book 1.indb 19 10/19/2025 12:12:31 AM

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 8: Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga	Tujuan 6: Terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadilan dalam keberagaman melalui penguatan nilai-nilai kebhinekaan, kesetaraan gender, serta kemajuan seni, budaya, dan olahraga	Sasaran 14: Meningkatnya masyarakat yang harmonis, beragama maslahat dan berkebudayaan serta daya saing olahraga
		Sasaran 15: Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
Misi 9: Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral	Tujuan 7: Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	Sasaran 16: Meningkatnya penerapan ekonomi hijau
		Sasaran 17: Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
		Sasaran 18: Meningkatnya lingkungan hidup berkualitas

TABEL 1.3
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029

Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029	Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029
Misi 1: Pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing, serta nasionalis-religius	Misi 3: Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (*education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan
	Misi 4: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC)
	Misi 8: Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga
Misi 2: Pengembangan ekonomi kerakyatan, revitalisasi pertanian melalui pemanfaatan potensi lokal	Misi 2: Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (*start-up*) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (*21st century skills*) yang berdaya saing
	Misi 7: Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional
Misi 3: Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Misi 6: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila
Misi 4: Pembangunan wilayah dan infrastruktur	Misi 5: Memperkuat konektivitas antarwilayah dan intra-aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan
Misi 5: Pengembangan pariwisata, seni budaya, olahraga, dan kreativitas pemuda	Misi 8: Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga

InUse Book 1.indb 20 10/19/2025 12:12:31 AM

Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029	Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029
Misi 6: Penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan	Misi 9: Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral
Misi 7: Kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat	Misi 1: Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu

1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2043

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur diatur secara eksplisit dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dicantumkan pada Pasal 3 (tiga) adalah untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan serta pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi:

1. Penguatan peran kawasan metropolitan terintegrasi dengan hierarki sistem pusat permukiman yang nyaman hingga wilayah pembangunan terkecil agropolitan dan/atau gugusan kawasan pegunungan (*smart valley development*);
2. Pengintegrasian antarkoridor pertumbuhan wilayah daratan yang hierarkis dengan sentra pertumbuhan kelautan di WP-3-K bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antarwilayah dan mengurangi disparitas wilayah;
3. Peningkatan keterpaduan dan interkonektivitas jaringan infrastruktur dengan sistem permukiman (*transit oriented development*) sebagai upaya mengurangi dampak aglomerasi (*backwash effect*) dan meningkatkan pemerataan pengembangan wilayah (*spread effect*);
4. Pemantapan penyediaan infrastruktur wilayah dasar dan pengelolaan ekoregion dalam optimalnya variasi pengembangan satuan wilayah sungai, danau, dan laut;
5. Peningkatan upaya preservasi dan konservasi pada kawasan lindung dengan prinsip penguatan biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan;
6. Optimalisasi kawasan budi daya guna menjadikannya ruang yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi, daya dukung, dan daya tampung lingkungannya;
7. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
8. Pemaduserasian kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan kawasan pertahanan dan keamanan melalui pengaturan pengembangan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dengan memperhatikan terhadap kerawanan bencana dan rencana kontinjensi; dan

InUse Book 1.indb 21 10/19/2025 12:12:31 AM

9. Perwujudan KSP yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan Kabupaten Kediri akan menjadi dasar bagi pengembangan wilayah Kabupaten Kediri dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029. Berikut adalah telaahan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 yang secara spesifik memuat pengembangan wilayah di Kabupaten Kediri.

TABEL 1.4
Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 Terkait Pengembangan Kabupaten Kediri

No.	Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur	Pengembangan Kabupaten Kediri
1.	Sistem Pusat Permukiman	Kawasan Perkotaan Pare, Kawasan Perkotaan Ngasem, Kawasan Perkotaan Grogol, dan Perkotaan Ngadiluwih sebagai PKL di Provinsi Jawa Timur
2.	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan ➢ Jalan arteri primer (Batas Kabupaten Kediri – Batas Kota Jombang; Kertosono – Batas Kota Kediri; Batas Kota Kediri – Batas Kabupaten Tulungagung; Batas Kabupaten Kediri - Ngantru) ➢ Jalan kolektor primer (Batas Kabupaten Kediri – Srengat; Batas Kabupaten Nganjuk – Batas Kota Kediri; Batas Kota Kediri – Batas Kabupaten Blitar; Batas Kabupaten Jombang – Batas Kota Pare; Jalan Cokroaminoto Pare; Jalan Veteran Pare; Jalan Ki Hajar Dewantara Pare; Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Pare; Jalan Gajah Mada Pare; Jalan Panglima Polim Pare; Kandangan – Batas Kota Pare; Jalan Mayor Bismo Pare; Jalan Letjen Sutoyo Pare; Jalan WR Supratman Pare; Jalan P. Sudirman Pare; Jalan Pahlawan Pare; Jalan dr. Soetomo Pare; Jalan Soekarno Hatta Pare; Batas Kota Pare – Batas Kota Kediri; Batas Kota Batu – Batas Kabupaten Kediri; Pulorejo – Pare; Pulorejo – Kandangan; Batas Kota Nganjuk Simpang Empat Candi – Batas Kabupaten Kediri) ➢ Jalan Nasional Bukan Jalan Tol (Akses Bandar Udara Kediri) ➢ Jalan tol (Kertosono - Kediri; Sukrejo – Batu – Kediri; Kediri - Tulungagung) ➢ Terminal penumpang (Terminal Pare sebagai Terminal penumpang Tipe B) Sistem Jaringan Kereta Api ➢ Jaringan jalur kereta api (Jalur Bangil – Malang – Blitar – Kertosono) ➢ Stasiun kereta api (Stasiun kereta di Kabupaten Kediri) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus ➢ Bandar Udara Dhoho (Kabupaten Kediri)
3.	Sistem Jaringan Energi	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ➢ SUTET Kediri – Pedan; SUTET Inc. Bangil (Paiton Kediri); SUTET Paiton – Kediri; SUTET PLTA Gerindulu Inc. Pedan Kediri; SUTT Kediri – Banaran; SUTT Kediri – Pedan ➢ Gardu Listrik Surya Zig Zag; Gardu Listrik Pare Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan ➢ Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya (PLTA Mendalan; PLTA Siman)
4.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir ➢ Jaringan pengendalian banjir Sungai Bendo Krosok ➢ Bangunan pengendali banjir dan bangunan sumber daya air (Bendungan Babadan; Bendungan Damarwulan; Bendungan Kacangan; Bendungan Siman; Waduk Karanglo; Waduk Kaliboto Utara; Waduk Sumberagung)

InUse Book 1.indb 22 10/19/2025 12:12:31 AM

No.	Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur	Pengembangan Kabupaten Kediri
5.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	SPAM ➢ SPAM Regional Lintas Tengah yang melayani Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Jombang Sistem Jaringan Persampahan ➢ TPA Regional Kediri yang melayani Kota Kediri dan Kabupaten Kediri
6.	Kawasan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya ➢ Hutan lindung di Kabupaten Kediri Kawasan Konservasi ➢ Hutan konservasi di Kabupaten Kediri
7.	Kawasan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi ➢ Kawasan hutan produksi di Kabupaten Kediri Kawasan Perkebunan Rakyat ➢ Kawasan perkebunan rakyat di Kabupaten Kediri Kawasan Pertanian ➢ Kawasan pertanian di Kabupaten Kediri Kawasan Peruntukan Industri ➢ Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kediri Kawasan Transportasi ➢ Kawasan transportasi di Kabupaten Kediri Kawasan Pertahanan dan Keamanan ➢ Daerah Latihan Militer Yonif-521/DY Gunung Klotok di Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol
8.	Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan Strategis Provinsi ➢ Sistem Agropolitan Wilis (Lawu – Wilis) meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung ➢ Sistem Agropolitan Kelud meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar
9.	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ➢ Kawasan keselamatan operasi penerbangan di Kabupaten Kediri
10.	Kawasan Rawan Bencana	Kawasan Rawan Bencana ➢ Kawasan rawan bencana letusan gunung api di Kabupaten Kediri ➢ Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Kediri ➢ Kawasan rawan bencana likuefaksi di Kabupaten Kediri ➢ Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Kediri ➢ Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Kediri ➢ Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kediri
11.	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya ➢ Pelestarian bangunan pabrik gula di Kabupaten Kediri ➢ Petilasan Sri Aji Joyoboyo
12.	Kawasan Sempadan	Kawasan Sempadan ➢ Kawasan sempadan di Kabupaten Kediri

InUse Book 1.indb 23 10/19/2025 12:12:31 AM

1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045

RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029. RPJMD merupakan penjabaran teknis RPJPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD akan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJPD 2025–2045. Hubungan nyata RPJPD dan RPJMD diwujudkan melalui kesamaaan indikator kinerja antara indikator kinerja sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD ke dalam indikator tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah pada dokumen RPJMD. Indikator kinerja yang diuraikan dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dalam periode tersebut. IKU selain menggambarkan indikator dan target kinerja tugas dan fungsi pemerintah daerah, juga sebagai sebuah alat ukur komprehensif bagaimana target kinerja pemerintah daerah didukung oleh indikator dan target kinerja perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 merupakan RPJMD pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 adalah Kediri Berbudaya Luhur 2045 (Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan). Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2025–2029, juga berpedoman pada visi, misi, arah pembangunan, dan sasaran pokok yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Keterkaitan misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 ditampilkan pada Tabel 1.5.

TABEL 1.5
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan Misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045

Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029	Misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
Misi 1: Pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing, serta nasionalis-religius	Misi 1: Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing	KL 1: Keterjangkauan layanan kesehatan	Sasaran Pokok 1: Penyediaan akses dan layanan kesehatan yang bermutu dan merata
		KL 2: Pendidikan inklusif dan terjangkau	Sasaran Pokok 2: Penguatan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan inklusif yang terjangkau
Misi 5: Pengembangan pariwisata, seni budaya, olahraga, dan kreativitas pemuda	Misi 5: Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan	KL 13: Masyarakat yang unggul, nasionalis, dan religius	Sasaran Pokok 13: Masyarakat yang unggul, nasionalis, religius
		KL 14: Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Sasaran Pokok 14: Keluarga berkualitas yang berkeadilan gender

InUse Book 1.indb 24 10/19/2025 12:12:31 AM

Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029	Misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
Misi 2: Pengembangan ekonomi kerakyatan, revitalisasi pertanian melalui pemanfaatan potensi lokal	Misi 2: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	KL 4: Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi berbasis potensi lokal	Sasaran Pokok 4: Peningkatan efektivitas iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi berbasis potensi lokal
		KL5: Penguatan ekonomi hijau berdaya saing	Sasaran Pokok 5: Keseimbangan pemerataan ekonomi dan perlindungan lingkungan
		KL 6: Transformasi digital	Sasaran Pokok 6: Digitalisasi pelayanan masyarakat
		KL 7: Integrasi ekonomi domestik dan nasional	Sasaran Pokok 7: Integrasi ekonomi domestik, regional, dan nasional
	Misi 4: Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah	KL 11: Stabilitas ekonomi makro daerah	Sasaran Pokok 11: Stabilitas ekonomi makro daerah
		KL 12: Daya saing dan daya tarik investasi	Sasaran Pokok 12: Iklim investasi yang kompetitif dan berdaya saing
Misi 3: Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Misi 3: Mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel	KL 9: Tata kelola yang responsif, adaptif, dan profesional	Sasaran Pokok 9: Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif dan profesional
	Misi 4: Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah	KL 10: Hukum berkeadilan, demokrasi, dan ketahanan wilayah	Sasaran Pokok 10: Hukum berkeadilan, demokrasi, dan ketahanan wilayah
	Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan		
Misi 4: Pembangunan wilayah dan infrastruktur	Misi 6: Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan		
	Misi 7: Dukungan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang berkualitas dan ramah lingkungan		
Misi 6: Penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan	Misi 5: Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan	KL 15: Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan	Sasaran Pokok 15: Pembangunan lingkungan dan ruang hidup layak berkelanjutan
		KL 16: Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Sasaran Pokok 16: Pelestarian lingkungan mendukung ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
		KL 17: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Sasaran Pokok 17: Tangguh bencana dan perubahan iklim

InUse Book 1.indb 25 10/19/2025 12:12:31 AM

Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029	Misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
Misi 7: Kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat	Misi 1: Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing	KL 3: Perlindungan sosial bagi kelompok rentan	Sasaran Pokok 3: Pemerataan ekonomi dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan
	Misi 2: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	KL 8: Pemerataan dan pembangunan berbasis klusterisasi wilayah	Sasaran Pokok 8: Kemandirian ekonomi lokal berdaya saing melalui pembangunan berbasis klusterisasi wilayah

1.3.6 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023–2043 sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Kediri. RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043, tujuan penataan ruang Kabupaten Kediri tahun 2023-2043 adalah mewujudkan wilayah kabupaten sebagai basis pertanian didukung pariwisata, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Kediri terbagi menjadi 9 (sembilan) kebijakan, yaitu: (1) Pengembangan kawasan agropolitan; (2) Pengembangan pariwisata dan industri, yang mendukung sektor pertanian; (3) Pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat; (4) Pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana; (5) Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah; (6) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan; (7) Pengendalian fungsi kawasan lindung; (8) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; dan (9) Pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup. Secara rinci, perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023–2043 akan dilakukan melalui pemetaan detail perwujudannya dengan program pembangunan daerah dalam kurun waktu 2025–2029.

InUse Book 1.indb 26 10/19/2025 12:12:32 AM

TABEL 1.6
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

Kebijakan	Strategi
Pengembangan kawasan agropolitan	Mengembangkan pusat agropolitan
	Mempertahankan secara ketat pertanian
Pengembangan pariwisata dan industri, yang mendukung sektor pertanian	Mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan
	Mengendalikan perkembangan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian
	Memantapkan dan meningkatkan pusat kegiatan penggerak ekonomi wilayah
Pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat	Memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan kegiatan di wilayah timur;
	Meningkatkan kegiatan yang sudah ada di wilayah barat dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal serta mengendalikan perkembangannya
	Mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hierarkis melalui penentuan Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan, terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang sudah ditentukan dalam RTRW provinsi
	Memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan, dan prospeknya
	Mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi pusat kegiatan
	Mengintegrasikan kawasan perkotaan di wilayah perbatasan Kota Kediri
Pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana	Menetapkan kawasan rawan bencana
	Mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana
Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah	Mengembangkan sistem transportasi yang menghubungkan wilayah barat dan timur
	Mengembangkan sistem transportasi antarpusat kegiatan dan wilayah pelayanannya
	Mengembangkan sistem transportasi terpadu antara transportasi jalan, kereta api, dan udara
	Mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari hulu ke hilir
	Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan bagi distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya
	Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian menuju dan dari daerah tujuan wisata, serta antardaerah tujuan wisata di dalam maupun di luar kabupaten
	Menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas, dan tingkat pelayanannya
	Mengembangkan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan angkutan regional, barang, dan pergerakan komuter
	Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi udara untuk keperluan penyelenggaraan kebandarudaraan
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan	Meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal
	Mengembangkan jaringan telekomunikasi
	Menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan air baku irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai

InUse Book 1.indb 27 10/19/2025 12:12:32 AM

Kebijakan	Strategi
	Mengembangkan sistem jaringan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan
	Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
	Mengembangkan sistem jaringan pengelolaan air limbah di kawasan permukiman
	Mengembangkan sistem jaringan drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana lainnya
Pengendalian fungsi kawasan lindung	Mengendalikan dan mempertahankan kawasan hutan lindung
	Memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya
	Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan
Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan	Mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi
	Mempertahankan lahan sawah beririgasi sebagai KP2B dan mengendalikan perubahannya
	Mengembangkan kawasan peruntukan industri
	Mengembangkan kawasan permukiman yang didukung prasarana dan sarana
	Menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikt seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat
	Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen)
Pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup	Mengembangkan sentra agropolitan dan koridor ekonomi
	Mengembangkan pariwisata terpadu

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 sepenuhnya memperhatikan dan mengacu pada arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2023–2043. Integrasi ini bersifat fundamental, mengingat tata ruang wilayah bukan hanya menjadi panduan spasial untuk penentuan lokasi pembangunan, tetapi juga sebagai kerangka strategis yang mengarahkan pemanfaatan sumber daya dan penataan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Visi penataan ruang Kabupaten Kediri, yaitu *Mewujudkan Wilayah Kabupaten sebagai Basis Pertanian yang Didukung Pariwisata dan Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan*, memiliki keterkaitan langsung dengan visi RPJMD, yakni *Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan*. Keselarasan ini dioperasionalkan dalam tujuh misi RPJMD, yang mencakup penguatan sektor pertanian modern, pengembangan pariwisata dan industri pengolahan, pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, penguatan ketahanan bencana, pelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan ekonomi kreatif dan inovatif.

Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana diatur dalam RTRW, yang menekankan pembentukan pusat agropolitan dan perlindungan

InUse Book 1.indb 28 10/19/2025 12:12:32 AM

ketat terhadap lahan pertanian, diakomodasi dalam RPJMD melalui misi penguatan sektor pertanian yang berdaya saing. Hal ini diwujudkan dalam tujuan peningkatan produktivitas komoditas unggulan, pembentukan kluster pertanian, hilirisasi hasil, serta regenerasi petani melalui program petani milenial. Sementara itu, kebijakan pengembangan pariwisata dan industri yang mendukung sektor pertanian dalam RTRW, seperti pengembangan pariwisata religi, alam, dan buatan, pengendalian industri berbasis pengolahan hasil pertanian, serta pemantapan pusat kegiatan ekonomi, tercermin dalam misi diversifikasi ekonomi daerah dan sasaran peningkatan jumlah wisatawan serta penguatan industri agro dan kreatif.

Kebijakan pengembangan wilayah timur dan barat secara berimbang, yang dalam RTRW diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan di wilayah timur dan mengoptimalkan potensi wilayah barat, diterjemahkan dalam RPJMD sebagai sasaran pemerataan infrastruktur, pemerataan pelayanan publik, dan pemerataan investasi lintas wilayah. RPJMD juga mengadopsi strategi pengembangan sistem pusat kegiatan secara hierarkis, integrasi pusat pelayanan kawasan dan lingkungan, serta pengembangan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal.

Pengembangan manajemen risiko kawasan rawan bencana sebagaimana diatur dalam RTRW, termasuk penetapan kawasan rawan dan pembangunan sistem jaringan evakuasi, diintegrasikan dalam misi pelestarian lingkungan dan penguatan ketangguhan daerah. Hal ini diwujudkan melalui sasaran peningkatan kapasitas peringatan dini, penataan kawasan rawan bencana, serta pendidikan, mitigasi bencana dan simulasi kebencanaan di tingkat masyarakat. Kebijakan pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana dalam RTRW, seperti penghubung wilayah timur–barat, sistem transportasi terpadu darat–kereta api–udara, prasarana distribusi hasil pertanian, dan akses ke destinasi wisata, selaras dengan sasaran RPJMD untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta memperluas aksesibilitas wisatawan.

Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air dalam RTRW diakomodasi dalam sasaran RPJMD terkait pemerataan akses listrik, air bersih, telekomunikasi, dan internet hingga ke desa-desa. Program ini dilengkapi dengan pengembangan pengelolaan sampah ramah lingkungan, pengolahan air limbah, dan sistem drainase terpadu. Selanjutnya, pengendalian fungsi kawasan lindung yang diamanatkan RTRW—meliputi pengendalian hutan lindung, pemulihan fungsi lindung, dan peningkatan nilai ekonomi ramah lingkungan—dijabarkan dalam RPJMD melalui sasaran rehabilitasi kawasan lindung, penguatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan pengembangan ekowisata.

Kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan dalam RTRW, termasuk mempertahankan hutan produksi, melindungi lahan sawah beririgasi, pengembangan kawasan industri dan permukiman, serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% di perkotaan, sepenuhnya diintegrasikan dalam RPJMD. Sasaran terkait meliputi optimalisasi lahan produktif, pengendalian alih fungsi, penyediaan RTH publik dan privat, serta pemeliharaan proporsi RTH jika telah melebihi batas minimal.

InUse Book 1.indb 29 10/19/2025 12:12:32 AM

Akhirnya, kebijakan pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, termasuk pengembangan sentra agropolitan, koridor ekonomi, dan pariwisata terpadu, diakomodasi dalam RPJMD melalui sasaran pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru, pengembangan koridor ekonomi di wilayah barat, dan integrasi dengan kawasan strategis provinsi maupun nasional. Dengan integrasi menyeluruh ini, RPJMD Kabupaten Kediri 2025–2029 tidak hanya memenuhi prinsip keselarasan normatif dengan RTRW 2023–2043, tetapi juga mengoperasionalkannya secara langsung ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas. Hal ini memastikan pembangunan daerah berlangsung terarah, berlandaskan tata ruang yang berkelanjutan, serta mampu mengoptimalkan potensi wilayah secara adil dan merata.

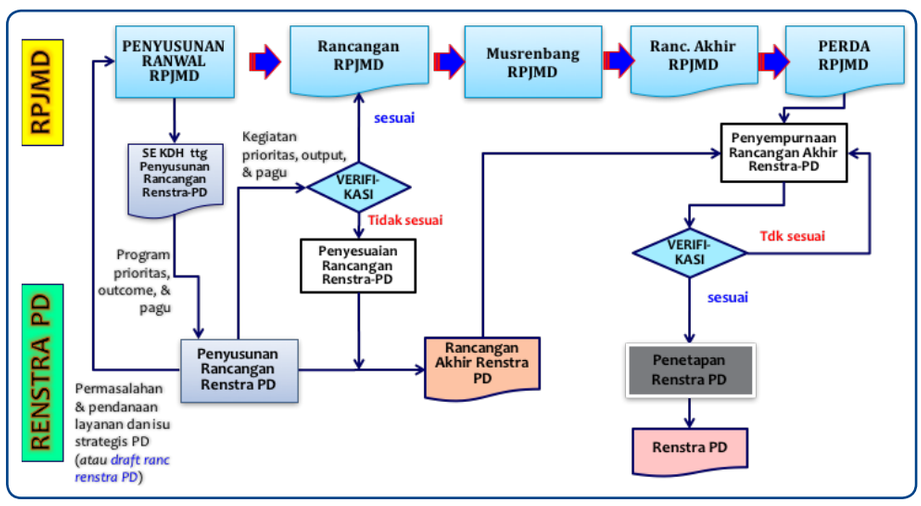
1.3.7 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri. Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk ketercapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam rencana kerja perangkat daerah dan

GAMBAR 1.2
Alur Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2017



InUse Book 1.indb 30 10/19/2025 12:12:32 AM

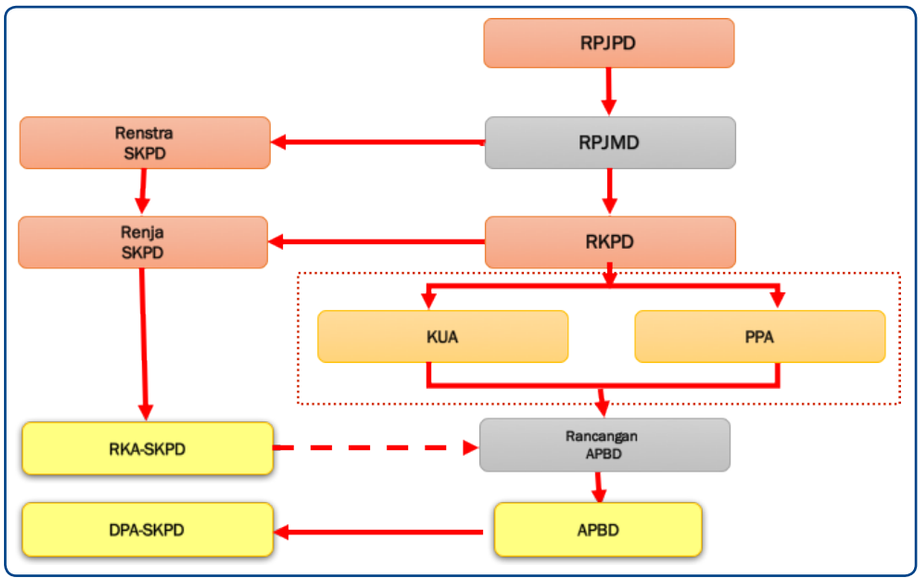
Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Hubungan nyata RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah diwujudkan melalui pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan pemerintah kota. IKU selain menggambarkan indikator dan target kinerja tugas dan fungsi perangkat daerah, juga sebagai sebuah alat ukur komprehensif bagaimana target kinerja pemerintah daerah didukung oleh indikator dan target kinerja perangkat daerah.

1.3.8 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berpedoman pada RPJMD. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Kediri yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorentasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

GAMBAR 1.3
Alur Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2017



InUse Book 1.indb 31 10/19/2025 12:12:32 AM

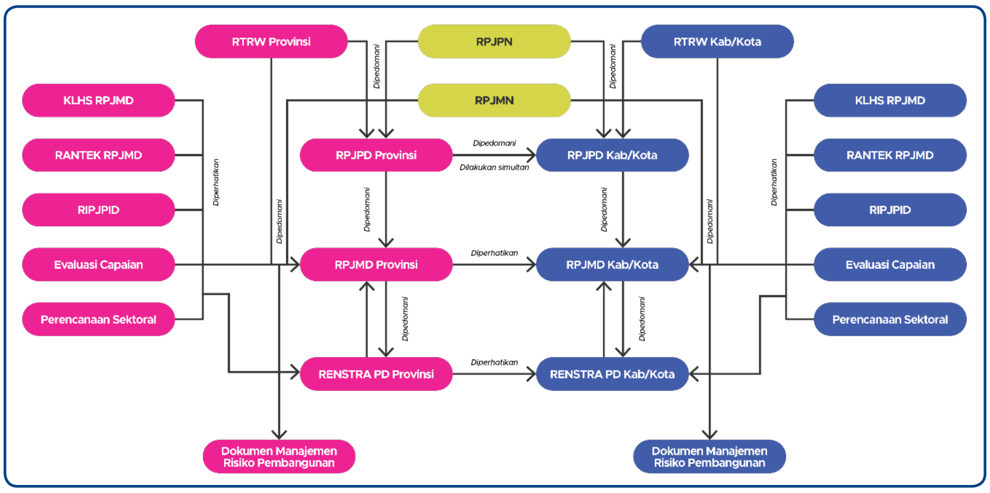
1.3.9 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) beserta riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Periode berlaku RIPJPID adalah selama 5 (lima) tahun mengikuti jangka waktu RPJMD. Penyusunannya sendiri didasarkan pada program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk mempercepat ketercapaian target program.

RIPJPID disusun dengan tujuan untuk (1) menjelaskan gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi daerah, (2) menetapkan dan menjelaskan tema prioritas riset dan inovasi di daerah, (3) menetapkan dan menjelaskan tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah, (4) menetapkan dan menjelaskan kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah, (5) menetapkan dan menjelaskan strategi riset dan inovasi di daerah, dan (6) menetapkan dan menjelaskan peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi daerah Kabupaten Kediri yang relevan, terpadu, dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya di Kabupaten Kediri, utamanya RPJMD dengan tema prioritas riset utama percepatan dan penguatan bidang sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola berbasis riset dan inovasi di daerah sebagai upaya pemajuan iptek untuk pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.

Melalui dokumen ini, riset dioptimalkan untuk mendukung kebijakan yang efektif guna mencapai tujuan pembangunan dan kebijakan publik yang tepat sasaran. Adapun fungsi riset di daerah dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 5 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Ditinjau dari fungsi risetnya, penelitian sendiri memiliki beberapa tujuan utama, yakni (1) meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah; (3) memberdayakan masyarakat dan mengaktifkan partisipasinya; (4) meningkatkan daya saing daerah; dan (5)

GAMBAR 1.4
Alur Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah beserta Dokumen Perencanaan Lain



InUse Book 1.indb 32 10/19/2025 12:12:33 AM

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari tujuan ini, maka telah semestinya riset dan inovasi menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan publik, salah satunya adalah menjadi katalis terlaksananya program prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kediri. Adapun berikut merupakan keterkaitan RIPJPID serta dokumen pembangunan lain dengan RPJMD di tingkat kabupaten dan kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri 2025–2029 ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun, pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kediri sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Kediri masa bakti 2025–2029, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan harmonis.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah lima tahun ke depan;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah periode 2025–2029;
3. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan lima tahun ke depan;
4. Menerjemahkan visi dan misi bupati dan wakil bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025–2029, yang disertai dengan program prioritas pembangunan untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2025–2029;
5. Menetapkan berbagai program prioritas pembangunan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025–2029;
6. Menetapkan indikator kinerja daerah Kabupaten Kediri sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kediri periode 2025–2029;
7. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2025-2030;
8. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih;
9. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program kepala daerah;
10. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kediri; dan

InUse Book 1.indb 33 10/19/2025 12:12:33 AM

11. Menjadi pedoman DPRD Kabupaten Kediri dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

1.5 Sistematika RPJMD Tahun 2025–2029

Penyusunan RPJMD mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan data statistik dan gambaran umum kondisi saat ini di daerah dengan tujuan untuk memahami situasi di berbagai sektor dan aspek pembangunan yang akan diperbaiki melalui kebijakan dan program daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Adapun pembagian urusannya diuraikan ke dalam empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Selain itu, bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah dan ditutup dengan jabaran mengenai permasalahan dan isu strategis daerah yang diidentifikasi dari berbagai dokumen pembangunan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan tentang visi dan misi dari kepala daerah yang diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran. Lebih lanjut, dimuat pula strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program perangkat daerah untuk periode lima tahun ke depan dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah serta indikator program, target, dan pagu indikatifnya. Pada bagian kedua bab ini terdapat uraian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang didukung menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi ketentuan mengenai aturan peralihan dan kaidah pelaksanaan. Aturan peralihan menyampaikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan perencanaan, sedangkan kaidah pelaksanaan menyampaikan berbagai petunjuk penggunaan dokumen RPJMD bagi aparatur pemerintah maupun *stakeholders* pembangunan lainnya.

InUse Book 1.indb 34 10/19/2025 12:12:33 AM



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis aspek geografi dan demografi dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi geografis dan kependudukan di suatu wilayah. Kedua aspek tersebut menjadi informasi dasar yang penting untuk mengenali dan menggali berbagai potensi sumber daya alam maupun manusia untuk merencanakan pembangunan wilayah yang maju dan berkelanjutan. Oleh karena itu, berikut dijabarkan lebih rinci terkait dengan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi di Kabupaten Kediri.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Wilayah Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 152.356 ha. Kabupaten Kediri terdiri atas 26 kecamatan, 343 desa, dan 1 kelurahan. Dari 26 kecamatan yang ada, Kecamatan Purwoasri menjadi kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Kediri, yaitu sebanyak 23 desa. Selain itu, pada urutan kedua terdapat Kecamatan Mojo yang terdiri atas 20 desa, kemudian Kecamatan Papar yang terdiri atas 17 desa, dan Kecamatan Plemahan yang juga terdiri atas 17 desa. Kabupaten Kediri memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

a. Utara : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang
b. Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung
c. Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk
d. Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang
e. Tengah : Kota Kediri

Secara lebih lanjut, luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Kediri disajikan pada Tabel 2.1.

Secara astronomis, Kabupaten Kediri terletak antara 7°36’12” – 8°0’32” Lintang Selatan dan 111°47’05” – 112°18’20” Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Kediri terletak pada bagian Barat-Tengah Provinsi Jawa Timur. Letaknya yang berada di tengah-tengah dan dikelilingi daerah lain menjadikan Kabupaten Kediri memiliki potensi ekonomi yang strategis, selain itu juga memiliki jaringan transportasi darat yang baik, yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan di semua sektor. Keberadaan potensi wisata dan pertanian yang kuat juga menjadi pendorong bagi pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Kediri ke depannya. Kabupaten Kediri juga memiliki kontribusi terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas seperti jaringan infrastruktur keciptakaryaan di antaranya SPAM, IPAL/IPLT, dan persampahan.

Kontribusi ekonomi Kabupaten Kediri berdasarkan data kontribusi sektoral terhadap PDRB Kabupaten Kediri periode 2020–2024, terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor paling dominan. Rata-rata kontribusinya mencapai 22,61 persen, meskipun mengalami tren penurunan dari 23,56 persen pada tahun 2020 menjadi 21,33 persen pada tahun 2024. Selain itu, sektor industri pengolahan juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar dengan rata-rata sebesar 22,01 persen, bahkan mengalami

InUse Book 1.indb 36 10/19/2025 12:12:33 AM

TABEL 2.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kediri Tahun 2024

Sumber: Perda RTRW Tahun 2023-2043

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)
1.	Mojo	Mojo	149,946
2.	Semen	Semen	68,097
3.	Ngadiluwih	Purwokerto	45,057
4.	Kras	Kras	50,436
5.	Ringinrejo	Ringinrejo	45,175
6.	Kandat	Kandat	55,119
7.	Wates	Wonorejo	73,709
8.	Ngancar	Ngancar	101,313
9.	Plosoklaten	Ploso Lor	105,179
10.	Gurah	Gurah	58,533
11.	Puncu	Puncu	114,057
12.	Kepung	Kepung	91,049
13.	Kandangan	Kandangan	60,399
14.	Pare	Pare	52,273
15.	Badas	Badas	42,916
16.	Kunjang	Kapi	31,457
17.	Plemahan	Bogo Kidul	55,363
18.	Purwoasri	Purwoasri	47,099
19.	Papar	Papar	40,156
20.	Pagu	Sitimerto	28,120
21.	Kayenkidul	Kayen Kidul	38,472
22.	Gampengrejo	Gampeng	19,985
23.	Ngasem	Ngasem	23,745
24.	Banyakan	Banyakan	74,217
25.	Grogol	Grogol	41,942
26.	Tarokan	Tarokan	49,608
	Kabupaten Kediri		**1.523,56**

tren peningkatan signifikan pada tahun 2024 sebesar 23,06 persen. Hal ini menandakan bahwa sektor industri menjadi salah satu penggerak ekonomi yang semakin penting di daerah ini.

Sektor lain yang memberikan kontribusi relatif besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata 19,88 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya seperti transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan memiliki kontribusi yang lebih kecil, yakni di bawah 6 persen, dan sebagian besar sektor lainnya berada di bawah 5 persen.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Kediri memiliki topografi wilayah yang beragam dengan ketinggian tanah rata-rata antara 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut (dpl). Bagian Utara-Selatan wilayah ini terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 200 meter dpl, sedangkan bagian Barat-Timur merupakan wilayah yang berbukit dan bergelombang. Wilayah Kabupaten Kediri terbagi menjadi empat kategori luas wilayah berdasarkan ketinggiannya, yaitu:

InUse Book 1.indb 37 10/19/2025 12:12:33 AM

a. Wilayah dengan ketinggian di atas 0 meter hingga 100 meter dpl mencakup sekitar 32,45% dari total luas wilayah.
b. Wilayah dengan ketinggian di atas 100 meter hingga 500 meter dpl mencakup sekitar 53,83% dari total luas wilayah.
c. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter hingga 1.000 meter dpl mencakup sekitar 9,98% dari total luas wilayah.
d. Wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 meter dpl mencakup sekitar 3,73% dari total luas wilayah.

Keadaan kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Kediri tidak menunjukkan pola yang sangat ekstrem. Wilayah dengan kemiringan lahan antara 0 hingga 2% mencakup sekitar 86.420 ha (62,35%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kediri tergolong datar atau dataran. Wilayah dengan kemiringan lahan antara 2 hingga 15% mencakup sekitar 31.131 ha (22,46%), sedangkan wilayah yang agak landai dengan kemiringan lahan antara 15 hingga 40% mencakup sekitar 9.314 ha (6,72%) di Kabupaten Kediri. Selanjutnya, terdapat wilayah yang relatif curam dengan kemiringan lahan lebih dari 40%, mencakup sebesar 11.740 ha (8,47%).

Wilayah Kabupaten Kediri terletak di antara dua gunung dengan sifat yang berbeda, yaitu Gunung Kelud di sebelah Timur yang memiliki karakter vulkanik, dan Gunung Wilis di sebelah Barat yang bersifat nonvulkanik. Kondisi ini menyebabkan variasi dalam jenis tanah di Kabupaten Kediri. Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) golongan sebagai berikut.

a. Regosol cokelat kekelabuan seluas 77.397 ha atau 55,84%, merupakan jenis tanah yang sebagian besar ada di wilayah Kecamatan Kepung, Puncu, Ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, Kandangan, Kandat, Ringinrejo, Kras, Papar, Purwoasri, Pagu, Plemahan, Kunjang, dan Gampengrejo.
b. Aluvial kelabu cokelat seluas 28,178 ha atau 20,33%, merupakan jenis tanah yang dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Papar, Tarokan, dan Kandangan.
c. Andosol cokelat kuning, regosol cokelat kuning, litosol seluas 4.408 ha atau 3,18%, dijumpai di daerah ketinggian di atas 1.000 mdpl seperti Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen, dan Mojo.
d. Mediteran cokelat merah, grumosol kelabu seluas 13.556 ha atau 9,78%, terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, Plemahan, Pare, dan Kunjang.
e. Litosol cokelat kemerahan seluas 15.066 ha atau 10,87%, terdapat di Kecamatan Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Kandangan.

Bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri dilintasi oleh Sungai Brantas, yang bermuara di Laut Jawa dan bersumber dari mata air Sumber Brantas. Sungai yang memiliki aliran yang besar ini membagi Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yakni bagian Barat dan Timur. Di Kabupaten Kediri bagian Barat, Sungai Brantas mengalir melalui daerah perbukitan dengan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok. Sementara itu, Kabupaten Kediri bagian Timur merupakan daerah yang cukup subur dengan topografi yang beragam, meliputi dataran rendah dan pegunungan, khususnya terdapat Gunung Kelud.

InUse Book 1.indb 38 10/19/2025 12:12:33 AM

Selain Sungai Brantas, wilayah Kabupaten Kediri juga dialiri oleh sungai-sungai lain yang mengalir sepanjang tahun, seperti Kali Konto, Kali Tunggorono, Kali Brangi, dan Kali Sedayu. Keberadaan banyak sungai ini menyebabkan wilayah Kabupaten Kediri memiliki beberapa daerah yang berfungsi sebagai waduk atau bendungan, yang memiliki peran penting dalam irigasi dan pengendalian banjir.

Iklim di wilayah Kabupaten Kediri pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu secara umum beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau, suhu rata-rata maksimum mencapai sekitar 30,7 ˚C dan suhu rata-rata minimum sekitar 23,8 ˚C. Sedangkan pada musim penghujan, suhu rata-rata sekitar 27,2 ˚C. Kelembaban udara rata-rata sepanjang tahun sekitar 85,5%, dan kelembaban nisbi (relatif) berkisar antara 74 hingga 86%.

a. Kecepatan angin rata-rata pada musim kemarau berkisar antara 12 hingga 13 knot, sedangkan pada musim penghujan rata-rata kecepatan angin mencapai 17 hingga 20 knot.
b. Musim kemarau berlangsung selama 6 hingga 7 bulan, yakni sekitar bulan Mei hingga November, sementara musim penghujan berlangsung selama 4 hingga 5 bulan, yakni pada bulan Desember hingga April setiap tahunnya.
c. Curah hujan rata-rata per tahun sekitar 130 hingga 150 mm, dengan jumlah hari hujan rata-rata sekitar 6 hingga 15 hari per bulan.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Kediri didominasi oleh lahan pertanian untuk tanaman pangan (sawah), yang mencakup sekitar 47.160 ha atau sekitar 34,02% dari total luas wilayah. Selanjutnya, ladang/tegal mencakup sekitar 26.887 ha (± 19,40%), hutan rakyat mencakup sekitar 929 ha (± 0,67%), perkebunan mencakup sekitar 5.292 ha (± 3,82%), dan lahan pertanian lainnya mencakup total seluas 1.318 ha (± 0,95%). Terakhir, guna lahan hutan negara mencakup sekitar 20.002 ha (± 14,43%).

Data yang digunakan untuk menganalisis ini diperoleh dari izin pemanfaatan penggunaan lahan yang menunjukkan perubahan dari luas lahan sawah yang dialihfungsikan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, luas lahan sawah yang mengalami alih fungsi adalah 37.784 m^2 (3,78 ha), yang meningkat menjadi 41.961 m^2 (4,20 ha) pada tahun 2023, dan mencapai 74.282 m^2 (7,43 ha) pada tahun 2024. Rata-rata luas alih fungsi lahan sawah sebesar 5,14 ha atau 0,01% dari luas sawah keseluruhan sehingga tidak berpengaruh signifikan, namun Kabupaten Kediri tetap berkomitmen untuk melindungi lahan pertanian. Alih fungsi lahan sawah ini dapat berdampak pada kualitas tutupan lahan serta ketersediaan pangan dari sawah. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara pengembangan lahan dan keberlanjutan pertanian. Untuk itu, perlu adanya kebijakan perencanaan tata ruang yang efektif, seperti penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta dukungan terhadap program perlindungan lahan pertanian.

Di Kabupaten Kediri, peraturan daerah mengatur penggunaan lokasi melalui penataan ruang, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap lokasi digunakan sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, sekitar 85 persen pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang diatur oleh peraturan daerah. Persentase ini meningkat menjadi 100 persen dari

InUse Book 1.indb 39 10/19/2025 12:12:33 AM

tahun 2018 hingga 2020. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 70,60 persen dalam ketaatan terhadap RTR. Pada tahun 2023 telah ditetapkan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Kediri tahun 2023-2043. Perubahan perda RTRW tersebut di samping untuk mengakomodasi perkembangan wilayah, rencana pembangunan, kebencanaan juga untuk mengakomodasi investasi terutama dengan adanya bandar udara dan jalan tol.

Pada tahun 2022, terjadi perubahan dengan adanya perubahan RPJMD dan Renstra Indikator Kinerja Utama, sehingga tidak dilakukan pengukuran sesuai dengan indikator seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2019-2020 nilai 100% adalah kesesuaian pemanfaatan ruang (izin lokasi/KKPR) yang dikeluarkan dengan perda RTRW 2011. Sedangkan persentase pada tahun 2021-2022 diperoleh dari penilaian SIWASTEK yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2022, Kabupaten Kediri meraih skor 79,33 dan menduduki peringkat keenam terbaik di Jawa Timur dalam evaluasi yang dilakukan setiap dua tahun sekali. Sedangkan pada tahun 2024 Kabupaten Kediri meraih skor 91,09.

TABEL 2.2
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2019-2024

Aspek	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan	%	100	100	70,60	79,33	85	91,09

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2024

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pertambahan penduduk dan pesatnya pembangunan menyebabkan konsep daya dukung dan daya tampung penting untuk dikaji agar kondisi lingkungan hidup tetap terjaga. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya tampung yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk ke dalamnya.

Analisis daya dukung dan daya tampung didasarkan pada kemampuan wilayah terutama terkait dengan aspek-aspek esensial yang menopang kehidupan penduduk di Kabupaten Kediri, yakni lahan, pangan, air, serta fungsi lindung berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun isu strategis dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan skenario pembangunan di Kabupaten Kediri pada 5 tahun mendatang.

2.1.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kelestarian air perlu untuk dijaga karena air sangat peka terhadap penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kuantitas dan kualitas air dapat berdampak besar bagi kehidupan manusia. Daya dukung air, yaitu kemampuan ekosistem dalam memberikan manfaat berupa tersedianya air bersih. Daya dukung air dapat dihitung dengan sistem grid atau membandingkan antara ketersediaan dan

InUse Book 1.indb 40 10/19/2025 12:12:33 AM

kebutuhan air. Ketersediaan air andalan atau jumlah air yang dapat digunakan diasumsikan senilai 80% dari ketersediaan air tiap WAS. Kebutuhan air diketahui berdasarkan kebutuhan untuk rumah tangga dan kegiatan ekonomi penduduk. Daya dukung air yang bernilai lebih dari 1 menandakan bahwa terjadi surplus atau ketersediaan air lebih besar dari kebutuhan. Jika ketersediaan air kurang dari kebutuhan air maka terjadi defisit.

Berdasarkan Tabel 2.3, Kabupaten Kediri memiliki status daya dukung air yang belum terlampaui atau jumlah ketersediaan air di Kabupaten Kediri masih dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat. Akan tetapi, sejumlah 14 dari 26 kecamatan di Kabupaten Kediri memiliki status daya dukung air yang telah terlampaui. Kecamatan Wates, Gurah, Kandat, Papar, Pagu, Ngadiluwih, Kayen Kidul, Purwoasri, Ngasem, Kunjang, Gampengrejo, Ringinrejo, Pare, dan Kras memiliki kebutuhan air yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan air pada wilayah tersebut.

TABEL 2.3
Status Daya Dukung Air Sistem Grid Kabupaten Kediri

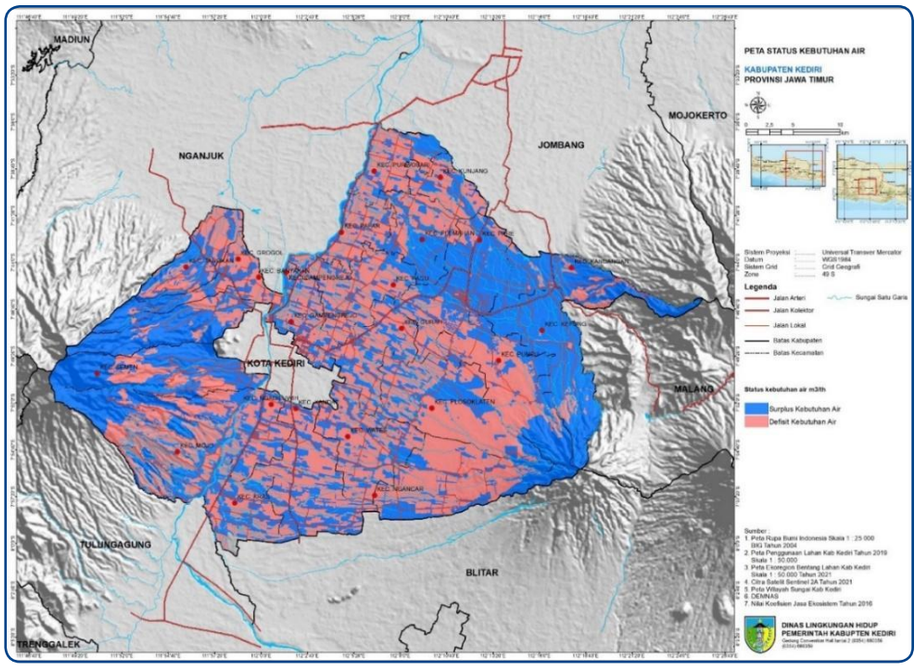
Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri, 2021

Kecamatan	Ambang Batas Penduduk Sistem Grid (100 × 100 M)	Ketersediaan Air (M^3/Tahun)	Kebutuhan Air Total (M^3/Tahun)	Status Kebutuhan Air	Status Daya Dukung Air
Wates	82.467	52.368.067	59.011.669	-6.643.601	Terlampaui
Gurah	75,82	38.462.675	43.865.447	-5.402.772	Terlampaui
Kandat	56.057	39.215.486	44.194.519	-4.979.033	Terlampaui
Papar	46.408	26.124.554	30.918.182	-4.793.629	Terlampaui
Pagu	34.675	19.184.201	23.586.335	-4.402.134	Terlampaui
Ngadiluwih	74.763	29.262.649	33.471.676	-4.209.028	Terlampaui
Kayenkidul	41.983	30.028.006	34.161.731	-4.133.725	Terlampaui
Purwoasri	54.059	32.982.889	36.907.533	-3.924.644	Terlampaui
Ngasem	62,18	15.461.144	19.296.682	-3.835.538	Terlampaui
Kunjang	33.539	23.997.165	26.577.899	-2.580.734	Terlampaui
Gampengrejo	33.623	17.281.303	18.804.959	-1.523.657	Terlampaui
Ringinrejo	55.963	23.685.641	24.439.789	-754.148	Terlampaui
Pare	105.446	32.806.278	33.255.097	-448,82	Terlampaui
Kras	62.533	34.896.690	34.963.036	-66.346	Terlampaui
Plemahan	63.266	37.014.875	34.926.411	2.088.465	Belum Terlampaui
Tarokan	66,61	34.276.326	30.846.911	3.429.415	Belum Terlampaui
Plosoklaten	79.965	78.037.783	73.492.939	4.544.844	Belum Terlampaui
Badas	75.418	29.708.761	23.203.246	6.505.516	Belum Terlampaui
Ngancar	59.978	70.732.681	63.080.463	7.652.217	Belum Terlampaui
Grogol	59.923	29.561.651	19.645.418	9.916.233	Belum Terlampaui
Puncu	84.937	69.481.512	52.459.354	17.022.157	Belum Terlampaui
Kandangan	81.772	46.623.338	22.552.374	24.070.964	Belum Terlampaui
Banyakan	91.863	44.818.993	18.148.362	26.670.631	Belum Terlampaui
Mojo	118.199	99.889.768	69.024.158	30.865.610	Belum Terlampaui
Kepung	128.581	67.900.542	33.388.126	34.512.416	Belum Terlampaui
Semen	99.232	67.197.030	31.605.197	35.591.832	Belum Terlampaui
Kab. Kediri	**1.829.260**	**1.091.000.010**	**935.827.517**	**155.172.493**	**Belum Terlampaui**

InUse Book 1.indb 41 10/19/2025 12:12:33 AM

GAMBAR 2.1
Peta Status Kebutuhan Air Kabupaten Kediri

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri, 2021



Berdasarkan Tabel 2.4 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Kediri Tahun 2029, terlihat bahwa ketersediaan air di setiap kecamatan bervariasi, baik dari segi volume maupun rasio daya dukung terhadap jumlah penduduk. Kategori daya dukung menunjukkan perbandingan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air penduduk, di mana nilai di atas 1 menandakan kondisi surplus dan nilai di bawah 1 mengindikasikan defisit. Dari 15 kecamatan yang tercatat, terdapat 7 kecamatan yang diproyeksikan mengalami surplus ketersediaan air, yaitu Kecamatan Semen, Mojo, Kandat, Ngancar, Puncu, Plosoklaten, dan Grogol. Surplus tertinggi terdapat di Kecamatan Ngancar dengan daya dukung 2,34, menunjukkan ketersediaan air lebih dari dua kali lipat kebutuhan penduduk.

Sebaliknya, ada 8 kecamatan lainnya diproyeksikan mengalami defisit air, dengan rasio daya dukung di bawah 1. Defisit terendah terjadi di Kecamatan Ngadiluwih dengan daya dukung 0,61, yang berarti ketersediaan air hanya mencukupi sekitar 61% dari kebutuhan penduduk. Kondisi defisit ini dapat mengindikasikan potensi masalah ketersediaan air di masa depan jika tidak dilakukan pengelolaan dan distribusi sumber daya air yang optimal. Secara keseluruhan, data ini menegaskan pentingnya perencanaan pengelolaan air di Kabupaten Kediri agar ketimpangan ketersediaan antarwilayah dapat diatasi, terutama bagi kecamatan yang diproyeksikan mengalami defisit.

2.1.1.3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Daya dukung pangan, yaitu perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan di suatu daerah (Widodo, 2015). Analisis daya dukung pangan sangat penting karena pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan atau kebutuhan terhadap tanaman pangan juga meningkat, sedangkan luas lahan pertanian terus menurun. Analisis daya dukung pangan berguna untuk mempersiapkan strategi pemenuhan kebutuhan pangan penduduk di masa kini dan masa depan.

InUse Book 1.indb 42 10/19/2025 12:12:34 AM

Salah satu konsep daya dukung pertanian, yaitu berkaitan dengan swasembada pangan dikemukakan oleh Odum, Howard, dan Issard. Swasembada pangan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan membudidayakan tanaman pangan secara mandiri (Muta'ali, 2015). Daya dukung pangan beras dinilai dari komponen kebutuhan dan ketersediaan beras (Muta'ali, 2015). Daya dukung pangan beras berbanding lurus dengan luas lahan pertanian dan berbanding terbalik dengan jumlah kebutuhan pangan penduduk. Daya dukung pangan juga dapat diidentifikasi dengan pendekatan spasial dengan menggunakan data kemampuan ekosistem menyediakan jasa penyediaan bahan pangan dan data tabular terkait jumlah penduduk, produksi padi, dan pola konsumsi beras setiap rumah tangga.

TABEL 2.4
Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Kediri Tahun 2029

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

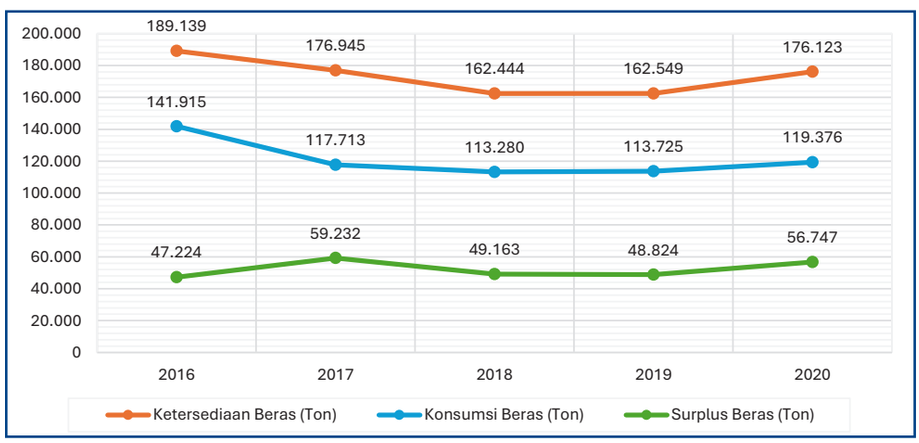
No.	Kecamatan	Ketersediaan Air (M^3)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Daya Dukung	Status Ketersediaan Air
1.	Semen	67.197.030	59.541	2,06	SURPLUS
2.	Mojo	99.889.768	86.480	2,11	SURPLUS
3.	Kras	34.896.690	68.445	0,93	DEFISIT
4.	Ngadiluwih	29.262.649	87.011	0,61	DEFISIT
5.	Kandat	39.215.486	68.101	1,05	SURPLUS
6.	Wates	52.368.067	98.639	0,97	DEFISIT
7.	Ngancar	70.732.681	55.274	2,34	SURPLUS
8.	Puncu	69.481.512	69.277	1,83	SURPLUS
9.	Plosoklaten	78.037.783	81.064	1,76	SURPLUS
10.	Gurah	38.462.675	89.352	0,79	DEFISIT
11.	Pagu	19.184.201	43.745	0,80	DEFISIT
12.	Gampengrejo	17.281.303	38.873	0,81	DEFISIT
13.	Grogol	29.561.651	51.416	1,05	SURPLUS
14.	Papar	19.645.418	56.833	0,63	DEFISIT
15.	Purwoasri	32.982.889	64.038	0,941	DEFISIT

TABEL 2.5
Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Beras di Kabupaten Kediri Tahun 2020–2024

Padi	2020	2021	2022	2023	2024*
Ketersediaan Beras (Ton)	176.123	241.905	196.758	215.745	215.745
Konsumsi Beras (Ton)	119.376	120.869	120.989	121.685	121.685
Surplus Beras (Ton)	56.747	121.036	75.769	94.060	94.060

GAMBAR 2.2
Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Beras di Kabupaten Kediri Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2024



InUse Book 1.indb 43 10/19/2025 12:12:34 AM

Ketersediaan beras dan konsumsi beras di Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi pada tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2018 dan 2019, terjadi penurunan surplus beras. Penurunan ketersediaan beras dapat terjadi karena adanya penurunan luas lahan pertanian dan faktor lain, seperti perubahan iklim. Penurunan ketersediaan beras juga diikuti dengan penurunan surplus beras. Penurunan surplus beras harus segera diatasi karena seiring dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya akan diikuti dengan peningkatan konsumsi beras.

Pada peta status kebutuhan bahan pangan beras Kabupaten Kediri memiliki daya dukung pangan senilai 1,48. Nilai daya dukung yang lebih besar dari 1 menandakan bahwa ambang batas daya dukung pangan di Kabupaten Kediri belum terlampaui atau terjadi surplus bahan pangan beras. Akan tetapi, sejumlah 9 dari 26 kecamatan masih memiliki daya dukung pangan yang telah terlampaui atau mengalami defisit bahan pangan beras. Daerah yang mengalami defisit bahan pangan beras terbesar, yaitu Kecamatan Ngadiluwih. Kecamatan Ngadiluwih memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, tetapi ketersediaan beras pada

TABEL 2.6
Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Kediri Tahun 2024

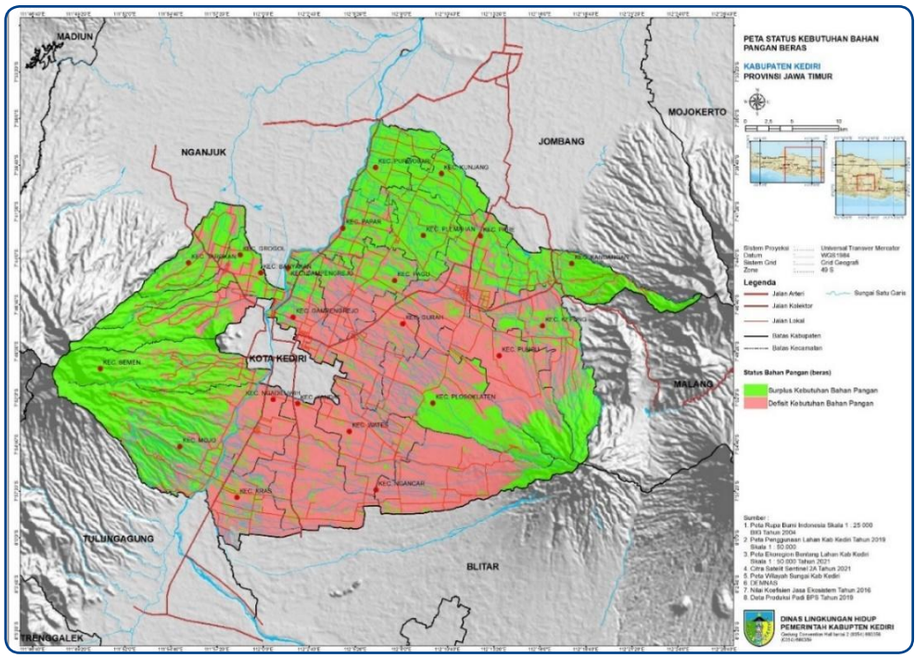
Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Kebutuhan Beras (Kg/Tahun)	Ketersediaan Beras (Kg/Tahun)	Daya Dukung Pangan	Keterangan Daya Dukung
Ngadiluwih	54.623	4.911.878	361.500	0,07	Defisit
Puncu	81.769	3.469.544	514.020	0,15	Defisit
Ngancar	64.385	4.570.968	1.265.340	0,28	Defisit
Pagu	81.155	2.683.845	764.940	0,29	Defisit
Kandat	63.587	3.772.859	1.254.780	0,33	Defisit
Ringinrejo	92.719	4.546.513	1.844.820	0,41	Defisit
Kras	52.342	6.237.120	3.040.380	0,49	Defisit
Gurah	65.943	6.027.829	3.571.500	0,59	Defisit
Wates	76.604	4.272.325	2.692.740	0,63	Defisit
Ngasem	84.406	3.441.950	3.318.660	0,96	Defisit
Papar	41.144	7.738.511	8.767.860	1,13	Surplus
Kayenkidul	34.006	3.680.149	4.226.820	1,15	Surplus
Plosoklaten	49.023	5.812.041	7.088.280	1,22	Surplus
Gampengrejo	54.867	3.825.200	4.978.680	1,3	Surplus
Kepung	61.652	5.841.752	8.753.700	1,5	Surplus
Grogol	62.922	5.422.732	8.502.000	1,57	Surplus
Mojo	108.997	4.889.102	9.451.080	1,93	Surplus
Pare	87.575	2.593.544	5.101.680	1,97	Surplus
Semen	52.782	4.647.107	9.669.240	2,08	Surplus
Tarokan	65.187	4.427.815	10.494.600	2,37	Surplus
Badas	38.381	4.304.445	11.637.180	2,7	Surplus
Banyakan	59.749	2.932.994	7.947.660	2,71	Surplus
Kunjang	59.037	4.154.138	11.605.380	2,79	Surplus
Purwoasri	48.947	6.626.356	19.377.600	2,92	Surplus
Kandangan	63.579	4.549.579	14.473.800	3,18	Surplus
Plemahan	69.437	3.996.166	15.418.620	3,86	Surplus
Kab. Kediri	**1.674.818**	**119.376.462**	**176.122.860**	**1,48**	**Surplus**

InUse Book 1.indb 44 10/19/2025 12:12:34 AM

GAMBAR 2.3
Peta Status Kebutuhan Bahan Pangan Beras Kabupaten Kediri

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021



daerah tersebut tergolong kecil. Kecamatan Pare memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Kediri, tetapi mengalami surplus bahan pangan beras. Hal tersebut terjadi karena Kecamatan Pare menyuplai beras dari daerah lain di Kabupaten Kediri sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduknya.

Berdasarkan Tabel 2.7 Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Kediri Tahun 2029, terlihat bahwa secara keseluruhan Kabupaten Kediri diproyeksikan memiliki ketersediaan beras sebesar 215.745.000 kg untuk memenuhi kebutuhan pangan 1.779.451 jiwa penduduk, dengan rata-rata daya dukung 1,06 yang mengindikasikan status surplus pada skala kabupaten. Namun, jika dianalisis lebih rinci per kecamatan, kondisi tersebut tidak merata. Terdapat 16 kecamatan yang diproyeksikan mengalami surplus ketersediaan beras, seperti Purwoasri (4,74), Kunjang (4,19), Plemahan (3,99), dan Kandangan (3,84) yang memiliki rasio daya dukung jauh di atas 1, artinya produksi beras mampu mencukupi hingga lebih dari tiga kali lipat kebutuhan penduduknya.

Sebaliknya, terdapat 10 kecamatan yang diproyeksikan mengalami defisit, dengan daya dukung di bawah 1. Kecamatan Puncu menunjukkan rasio terendah (0,08), diikuti Ngadiluwih (0,09), Kandat (0,23), dan Pagu (0,32), yang berarti ketersediaan beras di wilayah tersebut hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan penduduk. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya konsentrasi produksi beras di wilayah tertentu dan keterbatasan di wilayah lain, sehingga diperlukan upaya distribusi yang lebih merata, peningkatan produktivitas pertanian di wilayah defisit, serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan teknologi budi daya. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun secara total Kabupaten Kediri berada dalam kondisi surplus pangan, keberlanjutan ketahanan pangan perlu dijaga melalui strategi pengelolaan dan pemerataan pasokan antarkecamatan.

InUse Book 1.indb 45 10/19/2025 12:12:34 AM

TABEL 2.7
Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Kediri Tahun 2029

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

No.	Kecamatan	Ketersediaan Beras (Kg)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)	Proyeksi Daya Dukung	Status Ketersediaan Beras
1.	Semen	15.099.000	59.541	2,22	SURPLUS
2.	Mojo	11.843.000	86.480	1,20	SURPLUS
3.	Kras	3.951.000	68.445	0,51	DEFISIT
4.	Ngadiluwih	911.000	87.011	0,09	DEFISIT
5.	Kandat	1.810.000	68.101	0,23	DEFISIT
6.	Wates	4.772.000	98.639	0,42	DEFISIT
7.	Ngancar	2.316.000	55.274	0,37	DEFISIT
8.	Puncu	645.000	69.277	0,08	DEFISIT
9.	Plosoklaten	11.225.000	81.064	1,21	SURPLUS
10.	Gurah	8.108.000	89.352	0,80	DEFISIT
11.	Pagu	1.606.000	43.745	0,32	DEFISIT
12.	Gampengrejo	19.930.000	38.873	2,24	SURPLUS
13.	Grogol	13.924.000	51.416	2,38	SURPLUS
14.	Papar	14.118.000	56.833	2,18	SURPLUS
15.	Purwoasri	34.579.000	64.038	4,74	SURPLUS
16.	Plemahan	29.993.000	65.909	3,99	SURPLUS
17.	Pare	8.028.000	114.877	0,61	DEFISIT
18.	Kepung	15.903.000	92.181	1,51	SURPLUS
19.	Kandangan	24.664.000	56.350	3,84	SURPLUS
20.	Tarokan	16.442.000	67.886	2,12	SURPLUS
21.	Kunjang	19.123.000	39.999	4,19	SURPLUS
22.	Banyakan	15.598.000	63.509	2,15	SURPLUS
23.	Ringinrejo	2.980.000	62.692	0,42	DEFISIT
24.	Kayenkidul	7.495.000	51.241	1,28	SURPLUS
25.	Ngasem	5.115.000	68.412	0,66	DEFISIT
26.	Badas	19.023.000	74.058	2,25	SURPLUS
	Kabupaten Kediri	**215.745.000**	**1.779.451**	**1,06**	**SURPLUS**

2.1.1.3.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung diketahui dari luas lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luas wilayah. Nilai daya dukung fungsi lindung berkisar antara 0 hingga 1. Nilai daya dukung fungsi lindung yang mendekati 1 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut semakin baik. Sementara itu, wilayah dengan nilai daya dukung fungsi lindung mendekati 0 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut tergolong rendah atau lebih berfungsi sebagai kawasan budi daya.

TABEL 2.8
Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri, 2021

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat Rendah	0 – 0,20
Rendah	0,20 – 0,40
Sedang	0,40 – 0,60
Baik	0,60 – 0,80
Sangat Baik	0,80 – 1

InUse Book 1.indb 46 10/19/2025 12:12:34 AM

TABEL 2.9
Koefisien Lindung Kabupaten Kediri

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri, 2021

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung (αn)	∑ (ci × Ai)
Bandara	319,03	0,18	57,43
Hamparan Lahar/Lava	302,53	0,01	3,03
Hutan Lahan Rendah Primer	12,34	1	12,34
Hutan Lahan Tinggi Primer	9.036,70	1	9.036,70
Hutan Lahan Tinggi Sekunder	2.366,58	1	2.366,58
Hutan Rakyat	98,53	0,68	67
Hutan Tanaman	2.244,03	1	2.244,03
Industri, Perdagangan, Perkantoran	620,62	0,18	111,71
Kebun Campuran	14.355,54	0,54	7.751,99
Ladang/Tegalan Holtikultura	3.384,28	0,21	710,7
Ladang/Tegalan Palawija	9.007,90	0,21	1.891,66
Lahan Terbuka Lain	163,61	0,01	1,64
Perkebunan Lain	12.553,49	0,42	5.272,47
Perkebunan Tebu	344,95	0,42	144,88
Total	**54.810,13**	**0,54**	**29.672,14**

Berdasarkan tabel di atas, daya dukung fungsi lindung Kabupaten Kediri, yaitu 0,54. Kabupaten Kediri memiliki daya dukung fungsi lindung pada tingkat sedang. Fungsi lindung Kabupaten Kediri didukung dengan adanya lahan hutan dengan luas yang cukup besar. Namun, Kabupaten Kediri juga didominasi dengan lahan budi daya, seperti kebun campuran, tegalan palawija, dan perkebunan lain.

TABEL 2.10
Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

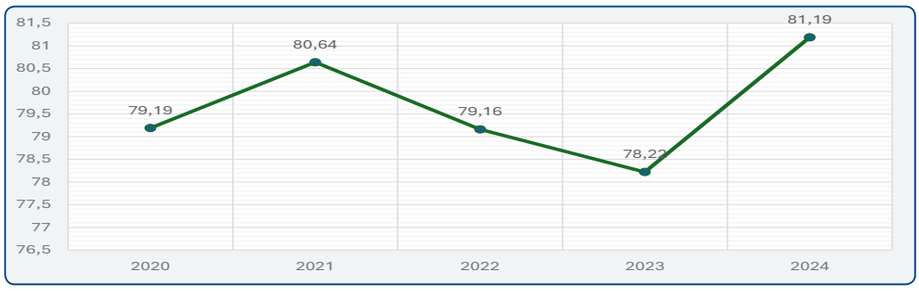
Tahun	Nilai Daya Tampung Wilayah (Ha/Jiwa)	Konsumsi Lahan Minimal (Ha/Jiwa)	Keterangan	Selisih Nilai Daya Tampung (Ha/Jiwa)
2025	0,091	0,061	Memadai	+0,030
2026	0,090	0,061	Memadai	+0,029
2027	0,089	0,061	Memadai	+0,028
2028	0,088	0,061	Memadai	+0,027
2029	0,087	0,061	Memadai	+0,026

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Dalam upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan, peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Kediri menjadi agenda strategis. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tidak hanya mengukur kondisi saat ini, tetapi juga menjadi panduan dalam merancang program dan kegiatan yang mendorong produksi lokal, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bergizi.

GAMBAR 2.4
Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: Bapanas, 2024



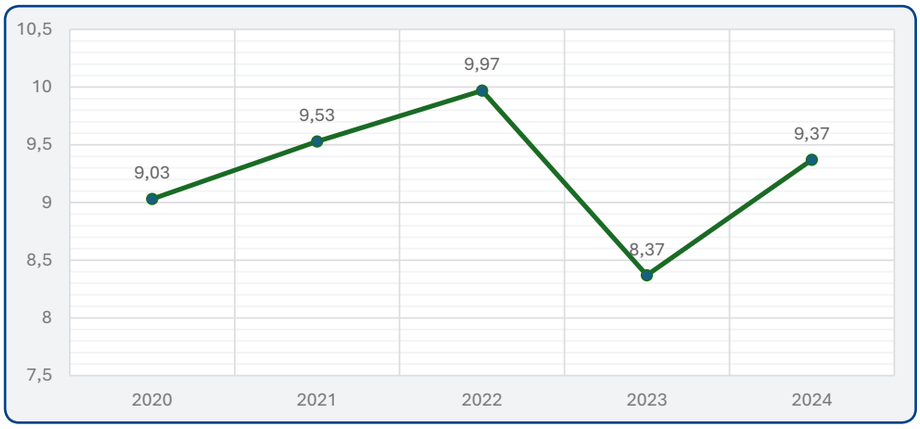
InUse Book 1.indb 47 10/19/2025 12:12:35 AM

Pada tahun 2020, nilai IKP tercatat sebesar 79,19. Nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 80,64, IKP kemudian menunjukkan penurunan menjadi 79,16 pada tahun 2022 dan kembali menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023 dengan nilai 78,22. Namun, tren ini berbalik positif pada tahun 2024, di mana IKP Kabupaten Kediri melonjak tajam menjadi 81,19. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya berbagai faktor yang memengaruhi ketahanan pangan daerah selama periode tersebut, dengan pemulihan dan peningkatan yang cukup signifikan terlihat akhir periode.

Prevalence of Undernourishment (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan pangan merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan aktivitas fisik yang dilakukan.

GAMBAR 2.5
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%) Kabupaten Kediri, 2020-2024

Sumber: BPS, 2025



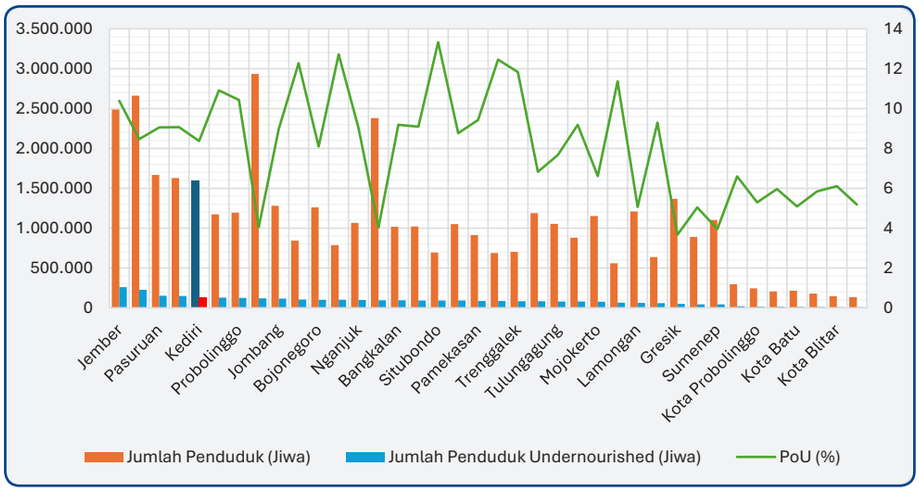
Penghitungan PoU yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan BPS mencatat prevalensi ketidakcukupan pangan atau PoU di Kabupaten Kediri tahun 2020 sebesar 9,03 persen yang terus naik hingga 9,97 persen pada tahun 2022. Kenaikan ini diperkirakan karena peningkatan penduduk miskin yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 Kabupaten Kediri berhasil menurunkan angka PoU menjadi 8,37 persen dengan pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 0,99 persen. Namun, prevalensi ketidakcukupan pangan kembali meningkat hingga 9,37 persen pada 2024. Pertumbuhan tersebut menjadi bagian dari 10 pertumbuhan terendah di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan komitmen daerah dalam penanganan prevalensi ketidakcukupan pangan.

Namun, pada tahun 2024 sendiri jumlah penduduk *undernourished* di Kabupaten Kediri mencapai 133.600 jiwa dari total penduduk 1.596.578 jiwa. Angka ini menjadikan Kabupaten Kediri sebagai daerah dengan penduduk *undernourished* terbanyak kelima di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa peringkat tersebut disebabkan oleh jumlah penduduk yang banyak pula di Kabupaten Kediri.

InUse Book 1.indb 48 10/19/2025 12:12:35 AM

GAMBAR 2.6
Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Berdasarkan Kab./Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

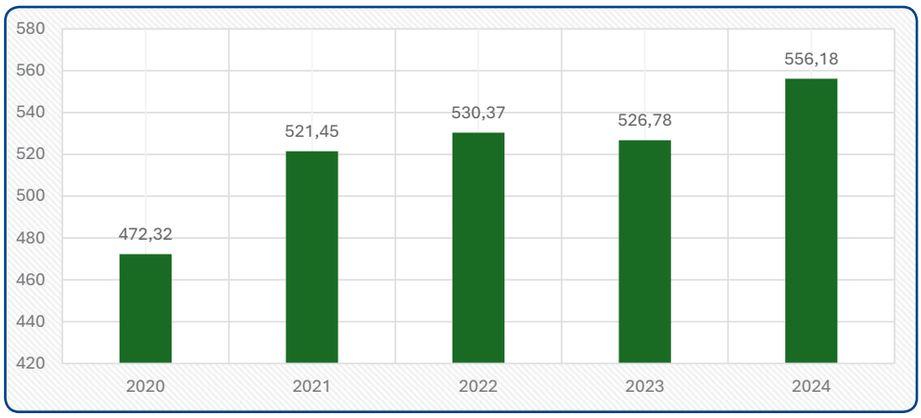


Konsumsi listrik per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan modernisasi suatu wilayah, termasuk Kabupaten Kediri. Semakin tinggi konsumsi listrik per kapita umumnya mengindikasikan peningkatan akses terhadap energi listrik, pertumbuhan industri, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap tren dan proyeksi konsumsi listrik per kapita menjadi krusial dalam perencanaan penyediaan infrastruktur energi dan pengembangan ekonomi daerah.

Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Kediri menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat konsumsi listrik per kapita sebesar 472,32 kWh. Angka ini kemudian mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi 521,45 kWh pada tahun 2021. Meskipun sempat terjadi sedikit penurunan menjadi 530,37 kWh pada tahun 2022 dan 526,78 kWh pada tahun 2023, konsumsi listrik per kapita kembali melonjak tajam pada tahun 2024, mencapai 556,18 kWh. Peningkatan konsumsi listrik per kapita ini mengindikasikan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi, potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kemungkinan adanya perkembangan sektor industri dan komersial di Kabupaten Kediri.

GAMBAR 2.7
Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (kWh Per Kapita)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024



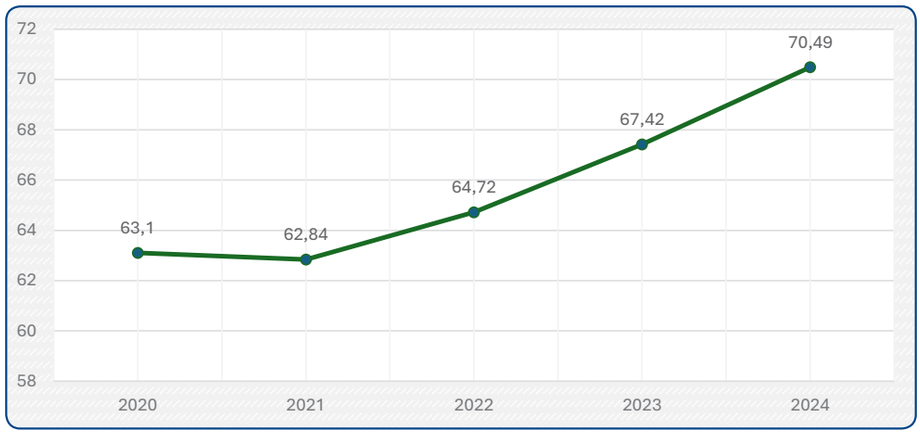
InUse Book 1.indb 49
10/19/2025 12:12:36 AM

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup merupakan fondasi esensial bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator komposit yang krusial dalam mengukur kondisi dan perubahan kualitas lingkungan, mencakup berbagai aspek penting seperti kualitas air, udara, tutupan lahan, dan keanekaragaman hayati. Pemahaman mendalam terhadap dinamika IKLH akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Kediri. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLH dilkakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

GAMBAR 2.8
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Sumber: LKjIP Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024



Berdasarkan grafik di atas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kediri menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai IKLH tercatat sebesar 63,10. Nilai tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 62,84 karena terdapat perubahan pada perhitungan nilai IKLH yang menyebabkan angka capaian IKLH pada tahun 2020-2021 cenderung berbeda dengan angka capaian IKLH pada tahun berikutnya, kemudian IKLH menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, IKLH naik menjadi 64,72, diikuti kenaikan menjadi 67,42 pada tahun 2023, dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 dengan nilai 70,49. Tren positif ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kediri selama periode 2020-2024. IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari peningkatan IKLH tersebut didorong adanya kenaikan IKA dan IKU. Penghitungan IKLH dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan dengan masing-masing bobot indeks sesuai dengan rumus penghitungan IKLH nasional. Perhitungan IKLH nasional dilakukan dengan cara menghitung masing-masing komponen indeks secara nasional (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan dengan bobot (koefisien) masing-masing provinsi dan penjumlahan proporsi masing-masing komponen indeks di semua provinsi.

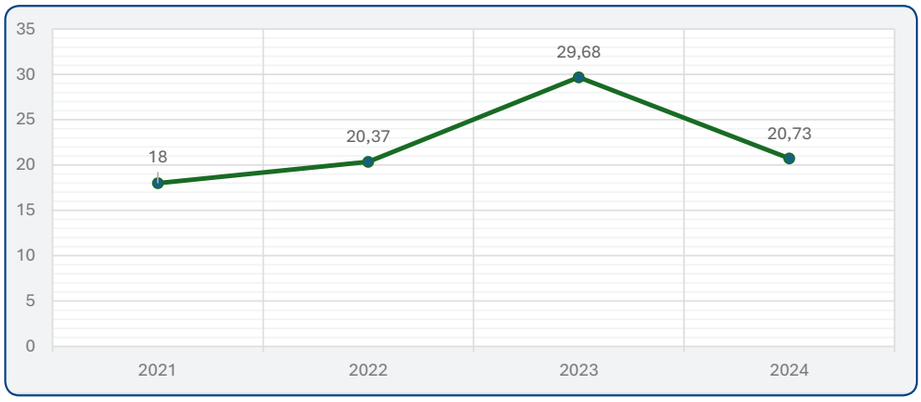
InUse Book 1.indb 50 10/19/2025 12:12:36 AM

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2022 sebesar 62,22; tahun 2023 sebesar 80,94; dan tahun 2024 sebesar 62,97. Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 sebesar 80,94; tahun 2023 sebesar 86,12; dan tahun 2024 sebesar 94,13. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2022 sebesar 39,34; tahun 2023 sebesar 40,49; dan tahun 2024 sebesar 39,34.

Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dengan menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam, pencegahan pencemaran, mencegah perluasan lahan kritis, peningkatan layanan persampahan, dan perlindungan terhadap ruang hijau untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam menghadapi pemanasan global. Salah satu tantangan krusial yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah pengelolaan sampah yang meningkat jumlah sampah yang disebabkan aktivitas sosial dan ekonomi. Berikut adalah capaian penanganan persampahan di Kabupaten Kediri.

GAMBAR 2.9
Capaian Persentase Penanganan Persampahan Tahun 2021–2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, 2024



Dalam upaya meningkatkan pengelolaan persampahan, Kabupaten Kediri menunjukkan perkembangan positif dari tahun 2021 hingga 2024. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemajuan meliputi persentase penanganan persampahan, luas cakupan permukiman yang di layani pengangkutan sampah, serta volume sampah yang terangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Data menunjukkan bahwa realisasi penanganan persampahan terus meningkat, dari 18% pada tahun 2021 menjadi 20,73% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya terus-menerus dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif, mulai dari pengurangan sampah dari sumbernya melalui TPS 3R, Bank Sampah, hingga penanganan oleh pemerintah daerah yang meliputi penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pengangkutan, dan pemrosesan akhir di TPA, serta proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah didefinisikan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) dan dikumpulkan dalam 3 (tiga) atau lebih jenis yang terpisah (contoh: basah (organik), daur ulang, dan residu) dengan syarat: (1) dari pintu ke pintu; atau (2) memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan.

InUse Book 1.indb 51
10/19/2025 12:12:36 AM

Aspek lingkungan lain yang perlu diperhatikan adalah keberadaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP). RTHKP bermanfaat untuk meningkatkan kualitas udara, menyediakan tempat rekreasi, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Ruang hijau juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim, mengurangi efek panas urban, dan memperbaiki estetika kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014, standar pelayanan minimal untuk RTH publik adalah sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Namun, di Kabupaten Kediri, luasan RTHKP yang dikelola saat ini baru mencapai 0,12% dari luas kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan sebagian besar RTH, seperti taman dan *plint* jalan, dikelola oleh masyarakat dan bukan oleh pemerintah daerah.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

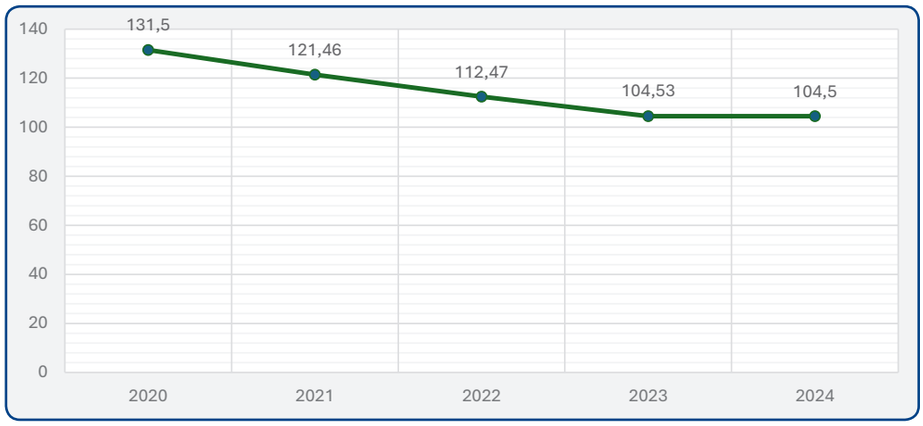
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023 yang disusun oleh BNPB menyebutkan bahwa Kabupaten Kediri merupakan wilayah dengan risiko bencana yang sedang. Risiko bencana yang ada di Kabupaten Kediri meliputi:

a. Bencana gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi;
b. Bencana kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko tinggi;
c. Bencana tanah longsor dengan tingkat risiko sedang;
d. Bencana kekeringan dengan tingkat risiko tinggi; dan
e. Bencana cuaca ekstrem dengan tingkat risiko tinggi.

Gambar di bawah menunjukkan IRB Kabupaten Kediri selama periode 2020 hingga 2024.

GAMBAR 2.10
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: BNPB, 2024



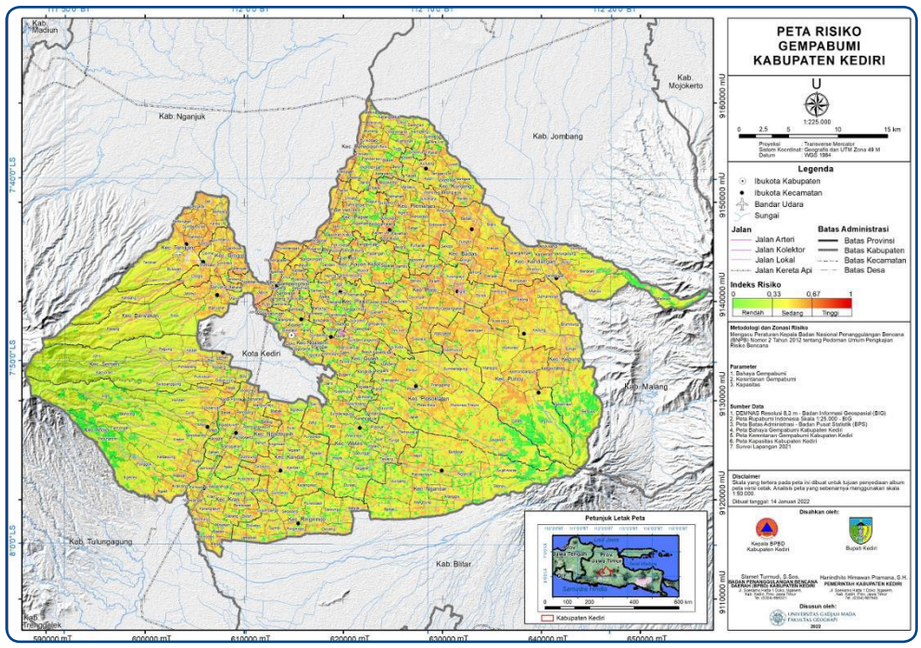
Analisis data Indeks Risiko Bencana (IRB) dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan, mencerminkan peningkatan efektivitas dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana. Pada tahun 2020, indeks ini berada di 131,5 menunjukkan adanya langkah-langkah awal yang efektif dalam pengurangan risiko bencana. Tren penurunan ini berlanjut menjadi 104,5 pada tahun 2024. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa Kabupaten Kediri mengalami penurunan nilai IRB dari tahun 2020 hingga 2024. Data seri tersebut menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Kediri mengalami

InUse Book 1.indb 52 10/19/2025 12:12:36 AM

penurunan dengan adanya upaya yang lebih baik dalam mengelola risiko bencana. Optimalisasi manajemen bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat diperlukan untuk membentuk masyarakat yang tangguh. Penurunan bertahap ini mengindikasikan bahwa upaya berkelanjutan dalam mitigasi bencana, seperti peningkatan infrastruktur, kesiapan masyarakat, dan penanganan darurat, telah memberikan hasil yang positif. Dengan terus mempertahankan dan meningkatkan upaya-upaya ini, diharapkan risiko bencana dapat diminimalisasi lebih lanjut di masa mendatang.

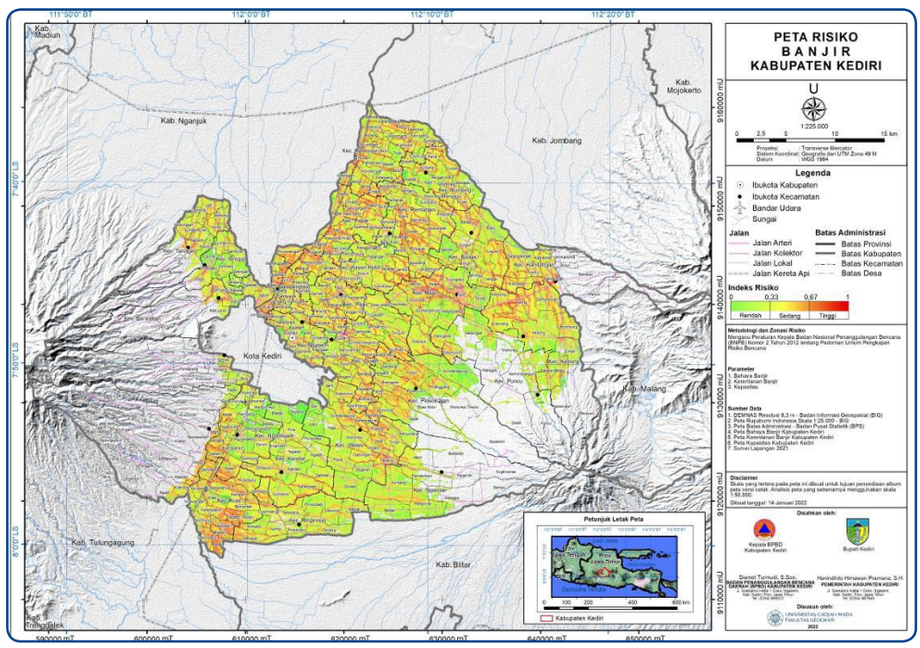
GAMBAR 2.11
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kediri, 2021-2026



GAMBAR 2.12
Peta Risiko Bencana Banjir

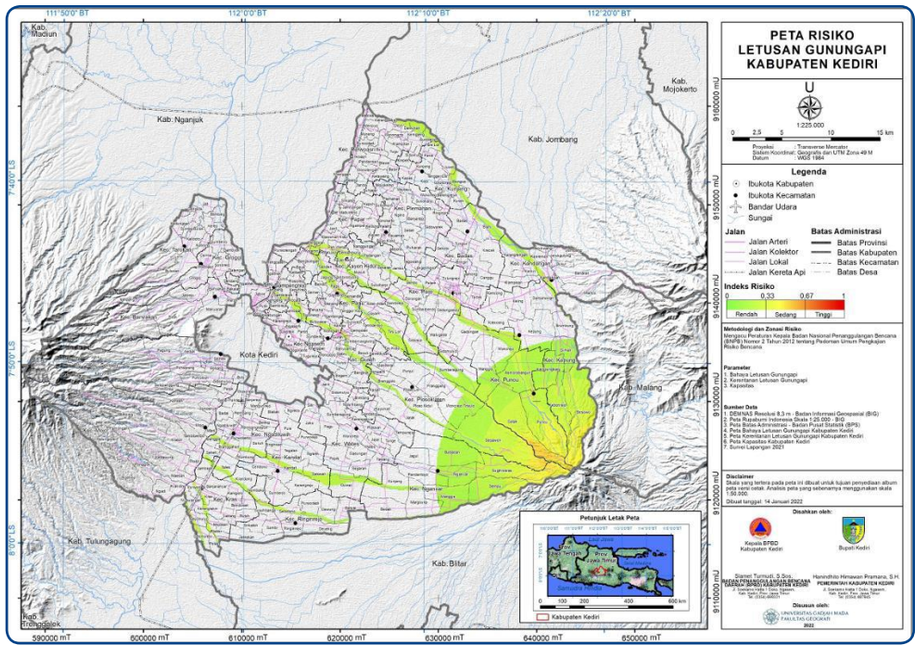
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kediri, 2021-2026



InUse Book 1.indb 53 10/19/2025 12:12:37 AM

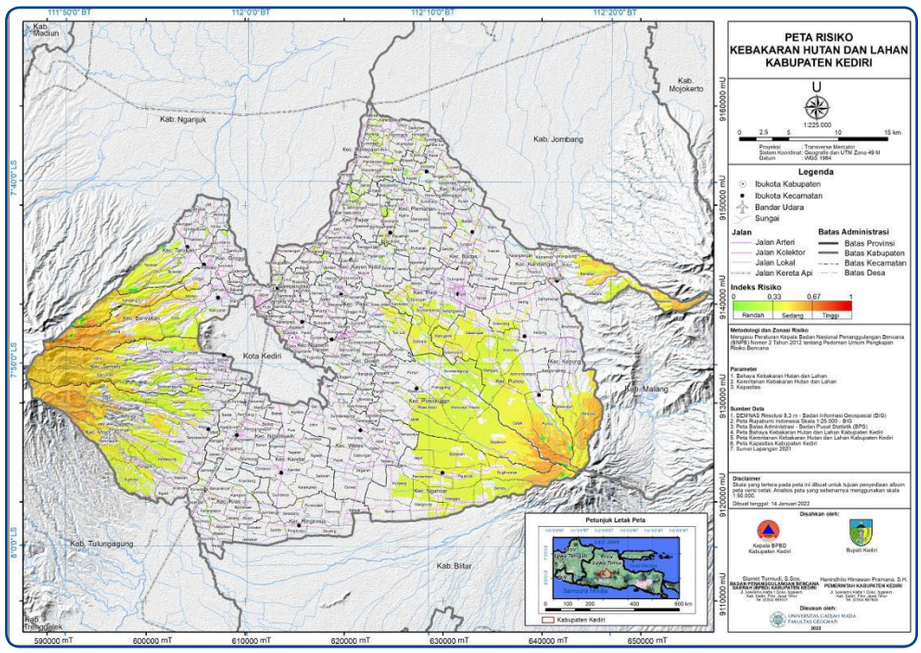
GAMBAR 2.13
Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kediri, 2021-2026



GAMBAR 2.14
Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan

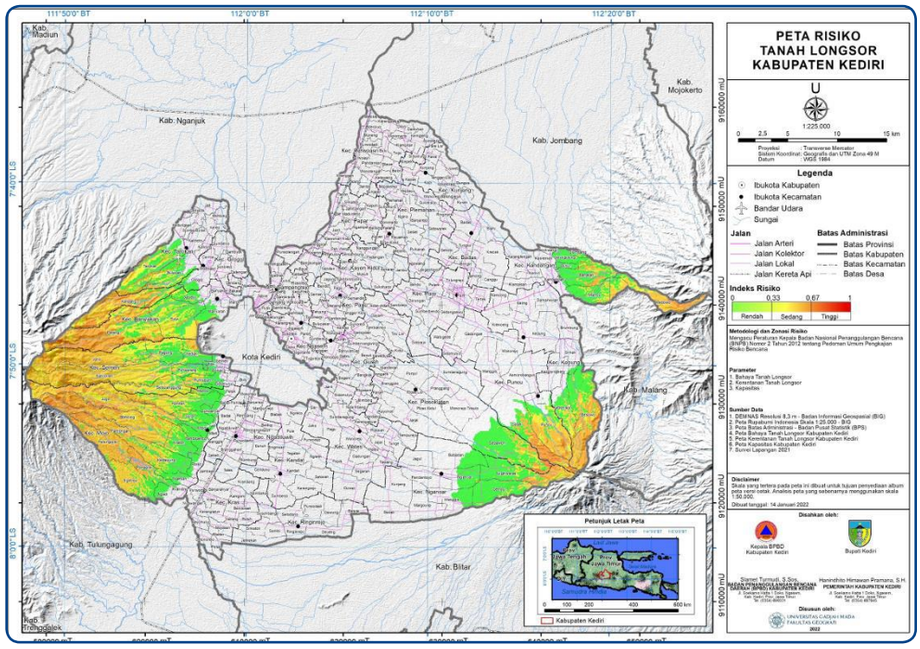
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kediri, 2021-2026



InUse Book 1.indb 54 10/19/2025 12:12:37 AM

GAMBAR 2.15
Peta Risiko Bencana Tanah Longsor

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kediri, 2021-2026



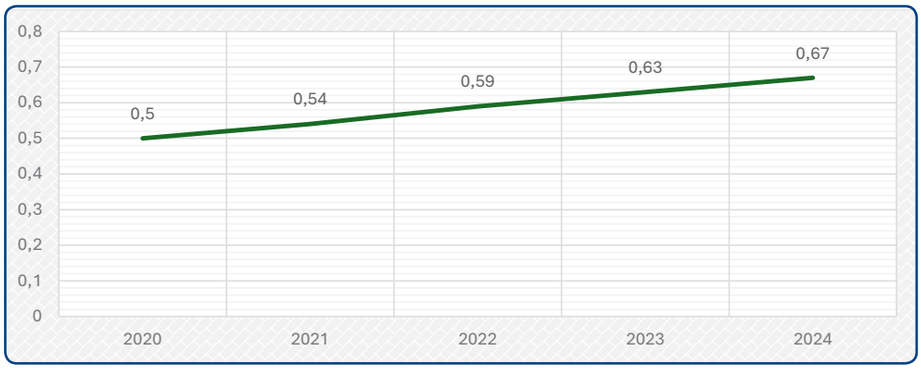
Di luar berbagai fenomena alam, perubahan iklim di Kabupaten Kediri dapat dipicu karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang juga akan meningkatkan penjualan BBM sehingga emisi gas rumah kaca cenderung meningkat. Proses pembakaran BBM akan menghasilkan gas CO2 yang merupakan salah satu emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Pemanasan global dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim, salah satunya pergeseran waktu musim penghujan dan musim kemarau. Selain itu, belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor juga sebagai pemicu yang secara umum dapat memengaruhi perubahan iklim di Kabupaten Kediri. Total pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca Kabupaten Kediri berdasarkan aplikasi AKSARA tahun 2021 sebesar 6.108,74 ton CO2eq, tahun 2022 sebesar 105.021,61 ton CO2eq, tahun 2023 sebesar 200.509,95 ton CO2eq, dan tahun 2024 sebesar 412.164,11ton CO2eq. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kediri dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang semakin kompleks dan beragam, ketahanan daerah memegang peranan krusial dalam menjamin keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kediri. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi tolok ukur esensial untuk memahami kapasitas adaptasi dan mitigasi daerah terhadap berbagai potensi risiko dan tantangan, sekaligus mengidentifikasi area-area strategis yang memerlukan penguatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Berikut capaian IKD Kabupaten Kediri tahun 2020-2024.

InUse Book 1.indb 55
10/19/2025 12:12:38 AM

GAMBAR 2.16
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: LKjIP Pemerintah Kabupaten Kediri, 2024



Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kediri menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai IKD tercatat sebesar 0,50. Selanjutnya, IKD mengalami kenaikan secara bertahap, mencapai 0,54 pada tahun 2021, 0,59 pada tahun 2022, dan terus meningkat hingga 0,63 pada tahun 2023. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana IKD Kabupaten Kediri mencapai angka 0,67. Tren positif ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas dan kemampuan adaptasi Kabupaten Kediri dalam menghadapi berbagai potensi risiko dan tantangan.

2.1.1.7 Demografi

Gambaran kependudukan Kabupaten Kediri dari tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan dinamika pertumbuhan penduduk yang bervariasi yang dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.11
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk	1.635.290	1.644.400	1.656.020	1.677.170	1.689.900	1.702.300
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,84	0,74	0,71	1,28	0,76	0,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebesar 1.635.290 jiwa yang kemudian meningkat menjadi 1.689.900 jiwa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduk juga mengalami fluktuasi; setelah pertumbuhan positif sebesar 0,84% pada 2020, terdapat penurunan pada dua tahun berikutnya sebelum meningkat lebih tajam 1,28% di tahun 2023 dan kembali pada rentang 0,70 di tahun 2024. Dengan demikian, jumlah penduduk Kabupaten Kediri terus meningkat dengan laju pertumbuhan penduduknya yang selalu positif.

Peningkatan jumlah penduduk menunjukkan adanya pertumbuhan demografis yang berkelanjutan, yang dapat memengaruhi berbagai aspek perencanaan daerah, seperti kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial. Fluktuasi dalam laju pertumbuhan penduduk juga menekankan perlunya perencanaan yang adaptif untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan dan mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Di sisi lain, komposisi penduduk merupakan pola persebaran penduduk menurut karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin dan usia. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin kemudian dapat dilihat pada Tabel 2.12.

InUse Book 1.indb 56 10/19/2025 12:12:38 AM

TABEL 2.12
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	825.867	830.315	836.025	846.510	852.724	858.694
Perempuan	809.427	814.085	819.995	830.660	837.192	843.568
Jumlah	1.635.294	1.644.400	1.656.020	1.677.170	1.689.916	1.702.262
Sex ratio (%)	102,03	101,99	101,96	101,85	101,8552	101,7931

Kondisi demografi di Kabupaten Kediri juga dapat digambarkan berdasarkan struktur umur penduduknya. Berdasarkan data pada Tabel 2.13, maka struktur umur penduduk di Kabupaten Kediri bisa membentuk piramida penduduk stasioner, seperti pada Gambar 2.17. Piramida penduduk tersebut menunjukkan arti bahwa jumlah penduduk pada setiap kelompok usia di Kabupaten Kediri cenderung relatif tidak jauh berbeda dari dalam suatu waktu, dengan tingkat kelahiran dan kematian yang hampir seimbang. Adanya struktur umur yang stabil memungkinkan untuk alokasi sumber daya yang lebih efisien.

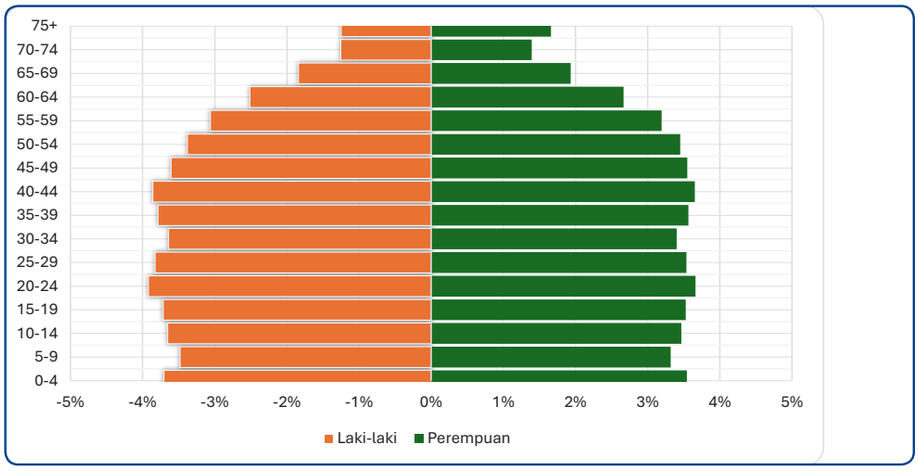
TABEL 2.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

Kelompok Umur	Penduduk (Jiwa)				
	2021	2022	2023	2024	2025
0-4	113.407	113.201	121.560	123.618	123.550
5-9	118.487	117.542	114.050	112.717	113.839
10-14	119.252	119.155	119.350	119.501	119.107
15-19	123.370	124.578	121.470	120.005	118.981
20-24	126.447	125.357	127.170	126.276	125.114
25-29	118.822	118.411	123.500	125.010	126.010
30-34	120.228	119.965	118.140	118.152	118.616
35-39	127.197	127.355	123.270	121.551	120.177
40-44	122.428	122.347	125.960	126.792	126.880
45-49	119.922	121.445	120.020	120.600	121.441
50-54	112.492	113.928	114.570	115.645	116.530
55-59	101.481	104.086	104.840	106.140	107.422
60-64	77.671	80.205	86.870	90.625	93.790
65-69	58.716	61.198	63.250	65.837	68.820
70-74	38.393	40.959	44.390	46.285	48.182
75+	44.087	46.288	48.760	51.162	53.773

GAMBAR 2.17
Piramida Penduduk Kebupaten Kediri Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri



InUse Book 1.indb 57 10/19/2025 12:12:38 AM

Gambaran kondisi demografi di Kabupaten Kediri bisa digambarkan dengan distribusi penduduk berdasarkan kecamatan. Jika dilihat pada Tabel 2.14 di bawah ini, penduduk di Kabupaten Kediri dari tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu terkonsentrasi di Kecamatan Pare, yaitu mencapai lebih dari seratus ribu jiwa atau sekitar 6,46 persen dari total penduduk. Kemudian, wilayah kecamatan dengan distribusi penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kunjang, dengan penduduk yang berjumlah kurang dari empat puluh ribu jiwa atau sekitar 2,25 persen saja dari total penduduk di Kabupaten Kediri.

TABEL 2.14
Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mojo	79.617	80.011	80.512	82.381	82.964
2.	Semen	54.742	55.039	55.407	54.908	55.042
3.	Ngadiluwih	80.024	80.449	80.979	81.551	81.888
4.	Kras	62.616	63.060	63.588	64.881	65.129
5.	Ringinrejo	56.906	57.459	58.091	59.354	59.726
6.	Kandat	62.281	62.730	63.261	63.934	64.227
7.	Wates	90.772	91.236	91.819	92.885	93.256
8.	Ngancar	50.413	50.822	51.299	52.819	53.267
9.	Plosoklaten	74.284	74.769	75.353	77.164	77.670
10.	Gurah	82.573	82.879	83.291	84.965	85.358
11.	Puncu	63.659	64.016	64.456	66.635	67.132
12.	Kepung	85.440	85.672	86.013	88.166	88.701
13.	Kandangan	51.683	52.005	52.395	53.137	53.359
14.	Pare	106.007	106.450	107.032	109.725	110.513
15.	Badas	67.286	67.919	68.644	69.948	70.240
16.	Kunjang	36.765	36.968	37.219	38.564	38.695
17.	Plemahan	60.655	60.964	61.353	63.237	63.489
18.	Purwoasri	58.965	59.255	59.622	62.011	62.047
19.	Papar	52.400	52.634	52.937	55.051	55.189
20.	Pagu	40.178	40.410	40.694	41.317	41.536
21.	Kayenkidul	47.150	47.393	47.697	49.093	49.094
22.	Gampengrejo	35.528	35.792	36.103	34.095	34.150
23.	Ngasem	66.974	67.279	67.670	63.621	63.743
24.	Banyakan	58.525	58.797	59.511	60.080	60.156
25.	Grogol	47.528	47.700	47.932	49.434	49.704
26.	Tarokan	62.323	62.692	63.142	65.498	65.701
	Kabupaten Kediri	**1.635.294**	**1.644.400**	**1.656.020**	**1.684.454**	**1.691.976**

Rasio jenis kelamin yaitu perbandingan antara jumlah laki-laki dengan perempuan dalam suatu populasi. Ketika rasio jenis kelamin lebih dari 100, maka berarti bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan dalam populasi tersebut. Sebaliknya, jika rasio jenis kelamin di bawah 100, maka jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki dalam populasi tersebut. Jika dilihat dari Tabel 2.15 di bawah ini, maka seluruh kecamatan di Kabupaten Kediri memiliki rasio jenis kelamin 100 dan lebih dari 100, hanya Kecamatan Ngasem yang memiliki rasio jenis kelamin kurang dari 100 pada tahun 2020, 2023, dan 2024.

InUse Book 1.indb 58 10/19/2025 12:12:38 AM

TABEL 2.15
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mojo	105,2	105,0	104,02	103,60	103,63
2.	Semen	103,6	104,0	103,31	102,53	102,34
3.	Ngadiluwih	100,1	100,0	100,47	100,31	100,11
4.	Kras	100,5	101,0	100,80	100,73	100,80
5.	Ringinrejo	102,9	103,0	102,87	102,69	102,45
6.	Kandat	101,1	101,0	101,03	101,34	101,20
7.	Wates	101,2	101,0	101,25	101,04	100,94
8.	Ngancar	101,9	102,0	102,42	102,30	102,37
9.	Plosoklaten	102,2	102,0	102,34	102,19	102,10
10.	Gurah	102,0	102,0	101,62	101,41	101,55
11.	Puncu	103,4	103,0	103,59	103,66	103,27
12.	Kepung	104,0	104,0	104,11	103,99	104,13
13.	Kandangan	101,4	102,0	102,22	101,54	101,51
14.	Pare	101,1	101,0	100,83	101,02	101,20
15.	Badas	104,0	104,0	103,64	103,62	102,77
16.	Kunjang	101,4	102,0	101,01	100,99	101,02
17.	Plemahan	101,3	101,0	101,60	101,73	101,74
18.	Purwoasri	99,7	100,0	100,47	100,49	100,63
19.	Papar	100,9	101,0	101,23	101,13	101,21
20.	Pagu	101,1	101,0	101,67	101,52	101,69
21.	Kayenkidul	100,3	100,0	100,92	100,46	100,37
22.	Gampengrejo	102,1	102,0	103,07	102,43	101,83
23.	Ngasem	99,7	100,0	100,01	99,58	99,56
24.	Banyakan	102,9	103,0	102,66	101,99	102,06
25.	Grogol	104,8	105,0	103,19	103,29	103,32
26.	Tarokan	103,8	104,0	104,03	103,61	103,47

Adapun jika dibandingkan dengan luas wilayah per kecamatan, maka dapat diketahui kepadatan penduduk seperti pada Tabel 2.16 di bawah ini. Pada tahun 2024 kepadatan penduduk tertinggi secara berturut-turut terdapat di Kecamatan Ngasem, Kecamatan Pare, dan Kecamatan Gampengrejo. Sementara itu, kepadatan terendah berada di Kecamatan Ngancar, Kecamatan Mojo, dan Kecamatan Puncu.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri dari tahun 2016 hingga 2024 menunjukkan dinamika pertumbuhan penduduk yang bervariasi yang dapat dilihat pada Gambar 2.18 berikut ini. Pada periode 2016 hingga 2019, laju pertumbuhan penduduk mengalami tren penurunan, dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 0,48% pada tahun 2016 dan terus menurun hingga mencapai 0,39% pada tahun 2019. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2020, di mana laju pertumbuhan mencapai 0,84%, kemungkinan disebabkan oleh perubahan metodologi pencatatan atau faktor-faktor lain yang memengaruhi dinamika penduduk. Setelah itu, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2021 dengan laju 0,71%, tren kembali meningkat hingga mencapai 0,88% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk ini mencerminkan dinamika demografis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dengan fluktuasi yang cukup signifikan terutama di tahun 2020.

InUse Book 1.indb 59 10/19/2025 12:12:39 AM

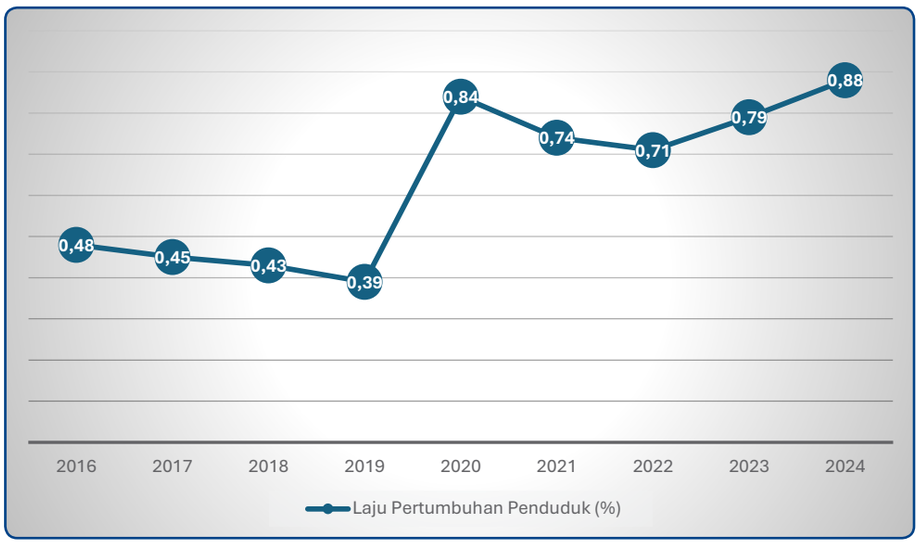
TABEL 2.16
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa Per Km²)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mojo	531	534	537	549	553
2.	Semen	804	808	814	806	808
3.	Ngadiluwih	1.776	1.785	1.797	1.810	1.817
4.	Kras	1.241	1.250	1.261	1.286	1.291
5.	Ringinrejo	1.260	1.272	1.286	1.314	1.322
6.	Kandat	1.130	1.138	1.148	1.160	1.165
7.	Wates	1.231	1.238	1.246	1.260	1.265
8.	Ngancar	498	502	506	521	526
9.	Plosoklaten	706	711	716	734	738
10.	Gurah	965	969	974	1.452	1.458
11.	Puncu	558	561	565	584	589
12.	Kepung	938	941	945	968	974
13.	Kandangan	856	861	867	880	883
14.	Pare	2.028	2.037	2.048	2.099	2.114
15.	Badas	1.568	1.582	1.599	1.630	1.637
16.	Kunjang	1.169	1.175	1.183	1.226	1.230
17.	Plemahan	1.096	1.101	1.108	1.142	1.147
18.	Purwoasri	1.252	1.258	1.266	1.317	1.317
19.	Papar	1.305	1.311	1.318	1.371	1.374
20.	Pagu	1.429	1.437	1.447	1.469	1.477
21.	Kayenkidul	1.226	1.232	1.240	1.276	1.276
22.	Gampengrejo	1.777	1.791	1.806	1.706	1.709
23.	Ngasem	2.820	2.833	2.849	2.679	2.684
24.	Banyakan	789	792	802	810	811
25.	Grogol	1.133	1.137	1.143	1.179	1.185
26.	Tarokan	1.256	1.264	1.273	1.320	1.324
	Kabupaten Kediri	**1.046**	**1.052**	**1.059**	**1.077**	**1.082**

GAMBAR 2.18
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2024



InUse Book 1.indb 60 10/19/2025 12:12:39 AM

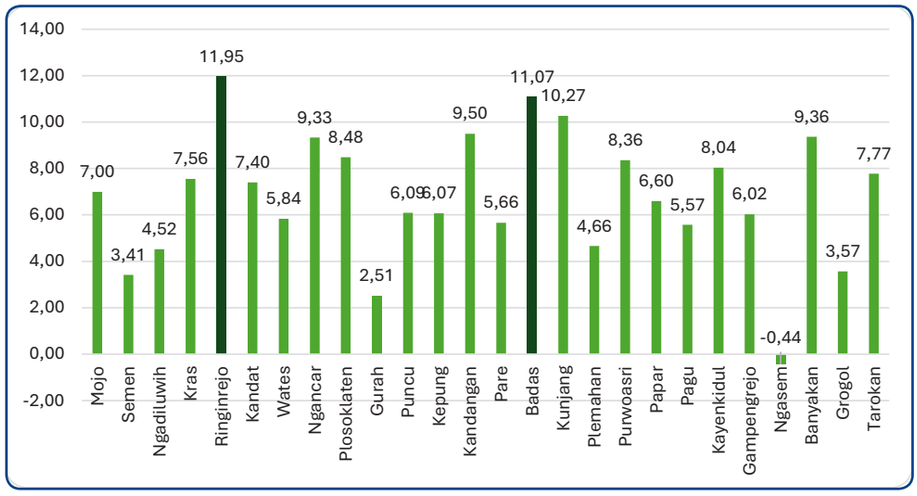
Peningkatan jumlah penduduk menunjukkan adanya pertumbuhan demografis yang berkelanjutan, yang dapat memengaruhi berbagai aspek perencanaan daerah, seperti kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial. Fluktuasi dalam laju pertumbuhan penduduk juga menekankan perlunya perencanaan yang adaptif untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan dan mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024 kepadatan penduduk tertinggi secara berturut-turut terdapat di Kecamatan Ngasem, Kecamatan Pare, dan Kecamatan Gampengrejo. Sementara itu, daerah dengan kepadatan terendah ialah Kecamatan Ngancar, Kecamatan Mojo, dan Kecamatan Puncu.

Secara umum, peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Kediri mengindikasikan adanya urbanisasi dan pertumbuhan demografis, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi, aksesibilitas, serta perkembangan infrastruktur di wilayah ini. Ini juga dapat menandakan perlunya peningkatan layanan publik dan infrastruktur untuk mendukung populasi yang semakin padat di masa depan.

Berdasarkan laju perubahannya selama lima tahun, terdapat beberapa kecamatan dengan pertumbuhan kepadatan yang relatif tinggi serta kecamatan dengan kepadatan yang berkurang. Kecamatan Ringinrejo dan Kecamatan Badas berkembang lebih padat dan lebih cepat dibanding daerah lainnya, sedangkan Kecamatan Gurah memiliki perubahan yang paling lambat. Di sisi lain, kepadatan penduduk dengan pertumbuhan negatif ditemukan di Kecamatan Ngasem akibat berkurangnya penduduk yang mencapai setidaknya 1.808 jiwa di tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Jumlah penduduk di Kecamatan Ngasem kemudian kembali bertambah seiring dengan waktu hingga tahun 2024.

GAMBAR 2.19
Laju Pertumbuhan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024



Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Adapun penduduk yang berusia produktif adalah penduduk yang berusia pada rentang 15-64 tahun sedangkan penduduk yang tidak produktif adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Oleh karena itu, dapat dihitung seberapa besar jumlah penduduk yang bergantung pada penduduk usia kerja pada suatu daerah.

InUse Book 1.indb 61
10/19/2025 12:12:39 AM

TABEL 2.17
Rasio Ketergantungan Kabupaten Kediri Tahun 2020–2024

Sumber: GDPK Kabupaten Kediri, 2023-2045

	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketergantungan (%)	42,85	43,12	43,45	43,86	44,34

Berdasarkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kediri 2023–2045, rasio ketergantungan Kabupaten Kediri tahun 2020 adalah sebesar 42,85 dan terus mengalami peningkatan. Artinya, pada tahun 2020 setiap 100 orang penduduk berusia kerja (usia produktif) memiliki tanggungan sebanyak 43 orang penduduk yang tidak produktif. Perlu menjadi perhatian bahwa sejak 2020 Kabupaten Kediri telah memasuki fase bonus demografi yang aka bertahan hingga pertengahan tahap kedua RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, optimasi bonus demografi harus menjadi modal utama yang difokuskan pada tahap pertama pembangunan jangka panjang Kabupaten Kediri.

2.1.1.8 Proyeksi Demografi Lima Tahun ke Depan

Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan informasi terkini mengenai jumlah penduduk beserta proyeksinya di masa mendatang. Informasi tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi pembangunan yang telah dijalankan dan merumuskan kebijakan pembangunan di masa depan. Proyeksi penduduk dapat digunakan untuk memperhitungkan faktor-faktor demografis seperti kepadatan penduduk, komposisi umur penduduk, rasio jenis kelamin, dan angka ketergantungan. Analisis proyeksi penduduk sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan yang presisi. Oleh karena itu, dilakukan proyeksi penduduk Kabupaten Kediri hingga tahun 2029 yang mana untuk keperluan proyeksi, maka dilakukan pergeseran penduduk dasar dari hasil SP2020 ke pertengahan tahun 2020.

TABEL 2.18
Proyeksi Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

Sumber: *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kediri, 2023
*) BPS Kabupaten Kediri, 2024

Indikator	Eksisting Tahun 2023*)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.677.170	1.702.260	1.714.170	1.725.650	1.736.700	1.747.220
Kepadatan (Jiwa Per Km^2)	1.072,76	1.088,81	1.096,42	1.103,77	1.110,83	1.117,56

Jumlah penduduk pada tahun dasar ialah sebesar 1.677.170 jiwa yang kemudian diperkirakan akan bertambang sebanyak 70.050 jiwa di tahun 2029. Adapun hal ini berpengaruh pada meningkatnya kepadatan penduduk akibat bertambahnya jumlah penduduk di daerah dengan luas wilayah yang tidak berubah. Di sisi lain, terdapat tiga kelompok penduduk apabila diklasifikasikan berdasarkan persentase komposisi usia, yakni penduduk usia nonproduktif di rentang usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas serta penduduk produktif di usia 15-64 tahun seperti tersaji dalam tabel di bawah ini.

TABEL 2.19
Proyeksi Kelompok Penduduk Berdasarkan Persentase Komposisi Usia

Sumber: *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kediri, 2023

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023	Komposisi Penduduk (%)				
		2025	2026	2027	2028	2029
0-14 Tahun	21,16	20,94	20,82	20,69	20,56	20,44
15-64 Tahun	69,51	69,03	68,74	68,45	68,13	67,8
65+ Tahun	9,33	10,03	10,43	10,86	11,31	11,76
Rasio Ketergantungan	43,86	44,87	45,47	46,1	46,77	47,49

InUse Book 1.indb 62 10/19/2025 12:12:39 AM

Menurut persentase komposisinya, terjadi penurunan proporsi penduduk usia 0-14 tahun dan usia 15-64 tahun dalam proyeksi selama lima tahun ke depan. Namun, penambahan proporsi penduduk justru terjadi pada kelompok usia 65 tahun ke atas yang mulanya sebesar 10,03 persen di tahun 2025 menjadi 11,76 persen di tahun 2029. Hal ini mengimplikasikan adanya perkiraan bahwa penduduk usia 65 tahun ke atas akan semakin berumur panjang didukung oleh naiknya kualitas dan akses fasilitas kesehatan di Kabupaten Kediri dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara umum.

Ditinjau berdasarkan proyeksi angka ketergantungan, maka perlu menjadi perhatian bahwa periode RPJMD 2025–2029 merupakan masa paling optimal terakhir bagi Kabupaten Kediri untuk memanfaatkan bonus demografi yang ditandai dengan angka ketergantungan di bawah 50 persen. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif. Dilansir dari proyeksi demografi RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045, Kabupaten Kediri akan kehilangan bonus demografi pada pertengahan periode kedua RPJMD, yakni antara tahun 2030 hingga 2034. Perkiraan tersebut didasari oleh besaran proporsi penduduk usia produktif yang kurang dari dua kali lipat penduduk usia nonproduktif atau nilai rasio ketergantungan lebih dari 50 persen.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus pembangunan daerah, yaitu fokus kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kedua aspek tersebut dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan di suatu wilayah.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam menilai kondisi ekonomi suatu wilayah. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini mengindikasikan peningkatan kondisi ekonomi wilayah tersebut, yang tercermin dalam kenaikan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan nilai tambah dari produksi semua sektor ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

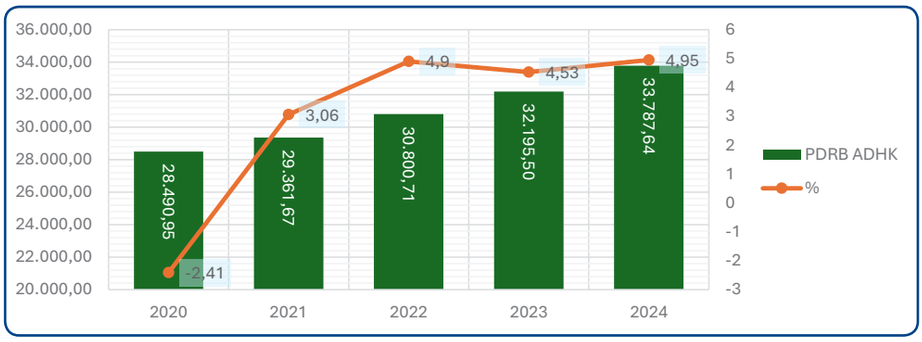
PDRB dapat diinterpretasikan sebagai nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi atau unit ekonomi di wilayah tersebut. Ada dua metode perhitungan PDRB, yaitu: atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB berdasarkan harga berlaku menggunakan harga saat ini untuk menganalisis kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Di sisi lain, PDRB ADHK berdasarkan harga konstan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu, seperti tahun 2010, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi riil yang tidak terpengaruh oleh inflasi atau kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi riil yang dihitung dengan data PDRB ADHK merupakan indikator makro ekonomi yang menjadi barometer keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah.

InUse Book 1.indb 63 10/19/2025 12:12:39 AM

Data PDRB ADHK di Kabupaten Kediri periode 2020–2024 menunjukkan adanya tren peningkatan. Tercatat pada tahun 2020 PDRB mencapai Rp28,49 triliun. Pada tahun-tahun berikutnya, PDRB terus meningkat, hingga mencapai Rp33,79 triliun pada tahun 2024.

GAMBAR 2.20
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025



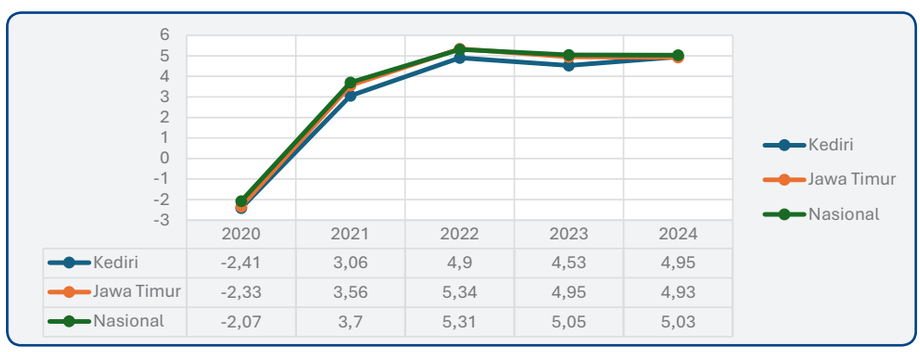
Terjadi fluktuasi pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri selama periode 2020–2024, yang lebih disebabkan karena masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Pada tahun 2020, Kabupaten Kediri mengalami kontraksi ekonomi hingga –2,41 persen, lebih dalam dibanding Provinsi Jawa Timur dan nasional. Meskipun sempat mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2023, namun dalam tiga tahun terakhir terlihat adanya pemulihan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif mencapai 4,95 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah dibanding periode sebelum Covid-19 menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Kediri belum sepenuhnya pulih.

Gambar 2.21 menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri selalu berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Pada akhir periode tahun 2024, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri memiliki selisih 0,02 persen lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, sementara selisihnya dengan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 0,08 persen lebih rendah.

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kabupaten Kediri tahun 2020–2024, terlihat adanya variasi yang signifikan antarsektor lapangan usaha. Pada tahun 2020 saat pandemi Covid, sebagian besar sektor mengalami kontraksi, dengan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mencatat penurunan terdalam sebesar 8,83 persen,

GAMBAR 2.21
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional (%) Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025



	2020	2021	2022	2023	2024
Kediri	-2,41	3,06	4,9	4,53	4,95
Jawa Timur	-2,33	3,56	5,34	4,95	4,93
Nasional	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03

InUse Book 1.indb 64 10/19/2025 12:12:40 AM

TABEL 2.20

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,42	0,84	0,02	3,03	-1,73	0,52
2.	Pertambangan dan Penggalian	-7,2	2,37	1,62	5,6	5,92	1,66
3.	Industri Pengolahan	0,26	2,56	6,48	3,86	7,85	4,20
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,48	4,33	7,56	4,84	4,59	4,36
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,64	4,6	1,93	3,7	7,02	4,38
6.	Konstruksi	-6,7	1,14	6,8	7,15	7,08	3,09
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,83	6,15	6,07	5,42	4,94	2,75
8.	Transportasi dan Pergudangan	-4,99	10,06	14,81	9,96	13,17	8,60
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,56	4,15	12,4	9,79	9,7	5,30
10.	Informasi dan Komunikasi	7,57	6,87	7,46	5,6	5,7	6,64
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,77	1,35	3,18	2,49	4,24	2,10
12.	Real Estat	2,68	2,27	3,62	2,7	2,13	2,68
13.	Jasa Perusahaan	-7,04	1,05	4,1	6,93	5,66	2,14
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2,5	-0,72	0,95	-0,51	7,52	0,95
15.	Jasa Pendidikan	1,76	1,26	2,38	2,3	7	2,94
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06	2,1	2,79	2,09	5,51	4,31
17.	Jasa Lainnya	-14,65	3,4	14,3	9,22	6,08	3,67

diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,56 persen serta transportasi dan pergudangan sebesar 4,99 persen. Sektor konstruksi juga mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebesar 6,7 persen.

Namun, seiring pemulihan ekonomi, mayoritas sektor menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa sektor bahkan mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi, terutama pada tahun 2021 dan 2022. Sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pemulihan yang kuat dengan pertumbuhan dua digit pada tahun 2021 dan 2022. Sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang juga menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten.

Menariknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah dan bahkan sempat mengalami kontraksi pada tahun 2023 sebesar 1,73 persen. Sektor jasa keuangan dan asuransi juga menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung rendah. Secara keseluruhan, sektor sekunder (terutama industri pengolahan) dan tersier (terutama transportasi dan pergudangan, serta pengadaan listrik dan gas) menjadi motor penggerak pertumbuhan PDRB Kabupaten Kediri selama periode 2020–2024, meskipun dengan dinamika yang berbeda di setiap tahunnya.

Berdasarkan data PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran Kabupaten Kediri tahun 2020-2024, secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan positif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 2,41 persen. Pertumbuhan PDRB terus meningkat dari 3,06 persen di tahun 2021 hingga mencapai 4,95 persen di tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,01 persen.

InUse Book 1.indb 65 10/19/2025 12:12:40 AM

TABEL 2.21
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran di Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1,03	2,93	4,21	4,07	4,68	2,97
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,45	2,25	6,34	7,41	12,83	5,86
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-3,99	0,18	0,13	0,91	4,16	0,28
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-4,99	1,57	7,12	6,2	4,94	2,97
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6.	Net Ekspor	-	-	-	-	-	-
7.	PRODUK DOMESTIK BRUTO	-2,41	3,06	4,9	4,53	4,95	3,01

Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan yang stabil dan positif sepanjang periode pemulihan, dengan rata-rata pertumbuhan 2,97 persen. Pengeluaran konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) menunjukkan pertumbuhan yang paling signifikan dan fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 5,86 persen, terutama melonjak pada tahun 2024.

Sebaliknya, pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah dan bahkan sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 3,99 persen, dengan rata-rata pertumbuhan yang paling kecil di antara komponen konsumsi, yaitu 0,28 persen. Pembentukan modal tetap bruto juga mengalami kontraksi di tahun 2020, namun kemudian menunjukkan pertumbuhan positif yang cukup stabil dengan rata-rata 2,97 persen.

Secara umum, pertumbuhan PDRB Kabupaten Kediri menurut pengeluaran didorong kuat oleh konsumsi rumah tangga dan aktivitas lembaga nonprofit, sementara pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi yang lebih kecil. Pembentukan modal tetap bruto juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.2.1.2 Kemiskinan

Salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adalah perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin. Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh dua faktor kunci: pertama, rata-rata pendapatan masyarakat; kedua, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur melalui distribusi pengeluaran riil penduduk.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar. Penduduk dikategorikan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan, yang diukur dari tingkat pengeluarannya. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK), yang terdiri atas garis kemiskinan makanan (kebutuhan energi minimum 2100 kilokalori per kapita per hari) dan garis kemiskinan nonmakanan (kebutuhan pokok seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Data lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 179,93 ribu jiwa (11,40 persen). Angka ini meningkat pada 2021 menjadi 184,49

InUse Book 1.indb 66 10/19/2025 12:12:40 AM

TABEL 2.22
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kediri Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rupiah)
2020	179,93	11,40	324.215
2021	184,49	11,46	335.990
2022	169,46	10,65	353.033
2023	171,18	10,72	385.874
2024	159,27	9,95	403.621

ribu jiwa (11,46 persen) akibat dampak pandemi Covid-19. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi pada 2022, angka kemiskinan turun menjadi 169,46 ribu jiwa (10,65 persen). Namun demikian, pada 2023 terjadi sedikit kenaikan menjadi 171,18 ribu jiwa (10,72 persen), sebelum akhirnya kembali turun signifikan pada 2024 menjadi 159,27 ribu jiwa, dengan persentase kemiskinan sebesar 9,95 persen.

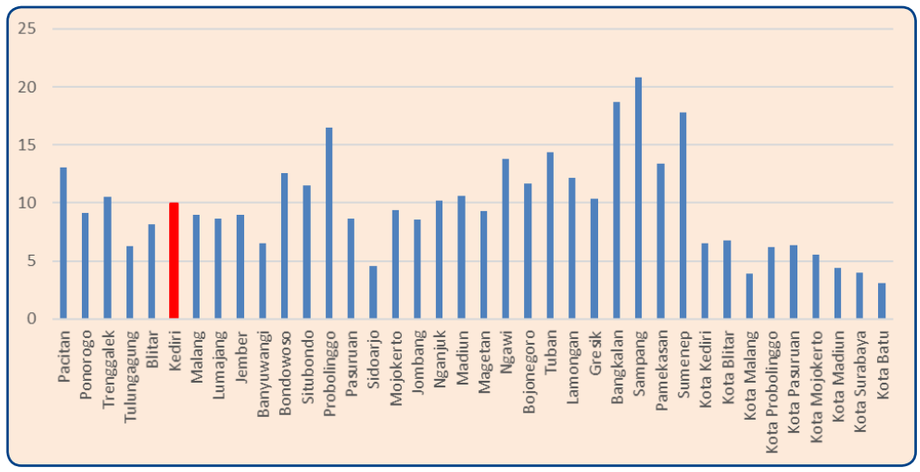
Salah satu faktor yang memengaruhi dinamika ini adalah meningkatnya garis kemiskinan yang tidak selalu diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau konsumsi penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Kediri naik secara konsisten, dari Rp324.215 pada tahun 2020 menjadi Rp403.621 pada 2024. Peningkatan garis kemiskinan ini mencerminkan adanya inflasi kebutuhan dasar yang cukup tinggi, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan.

Meski secara umum terjadi penurunan kemiskinan dalam dua tahun terakhir, angka kemiskinan di tahun 2024 masih belum sepenuhnya pulih ke tingkat sebelum pandemi. Dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin menurun sekitar 20,66 ribu jiwa, dan persentase kemiskinan berkurang sebesar 1,45 poin persentase. Namun, tren fluktuatif menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi kebutuhan pokok.

Pada tahun 2024, Kabupaten Kediri menempati peringkat ke-24 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam hal persentase penduduk miskin terendah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 9,95 persen, lebih tinggi dari beberapa kota besar seperti Kota Surabaya, Kota Batu, dan Kota Malang, namun masih lebih rendah dibanding banyak wilayah lain di Jawa Timur.

GAMBAR 2.22
Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Sumber: BPS Jawa Timur, 2025



InUse Book 1.indb 67 10/19/2025 12:12:41 AM

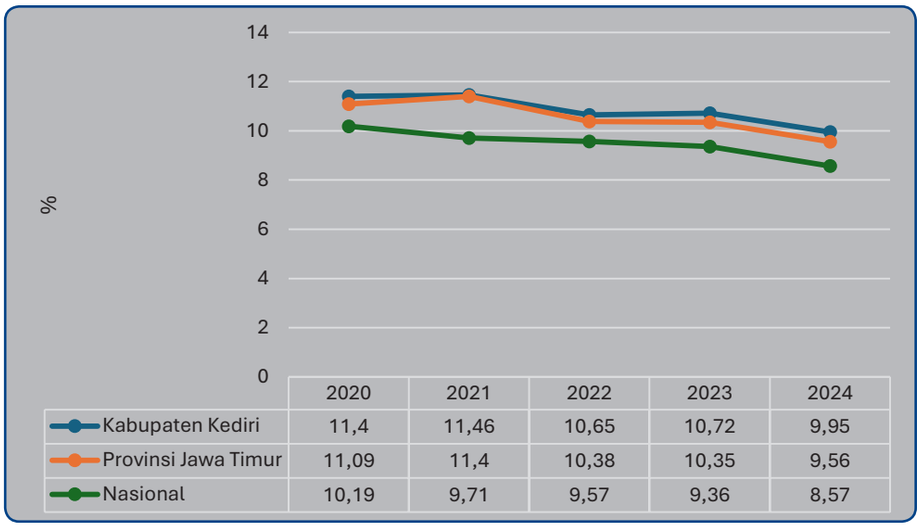
Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur tahun 2024 adalah Kabupaten Sampang, dengan persentase mencapai lebih dari 20 persen, sedangkan yang terendah adalah Kota Batu dengan angka di bawah 5 persen. Dengan posisi tersebut, Kabupaten Kediri masih tergolong dalam kelompok menengah dalam distribusi tingkat kemiskinan provinsi ini.

Sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.23, pola perkembangan kemiskinan di Kabupaten Kediri cenderung sejalan dengan tren di tingkat Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri dalam lima tahun terakhir cenderung lebih tinggi. Bahkan pada tahun-tahun tertentu, seperti 2021 dan 2023, saat tingkat kemiskinan nasional menunjukkan penurunan, Kabupaten Kediri dan sebagian besar wilayah Jawa Timur justru mengalami sedikit kenaikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan pada tahun 2024, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kediri masih menghadapi tantangan struktural yang perlu penanganan lintas sektor dan kebijakan yang lebih terarah, khususnya dalam penguatan perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja produktif, dan pengendalian harga kebutuhan pokok.

GAMBAR 2.23
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Jawa Timur, 2025



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kediri	11,4	11,46	10,65	10,72	9,95
Provinsi Jawa Timur	11,09	11,4	10,38	10,35	9,56
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57

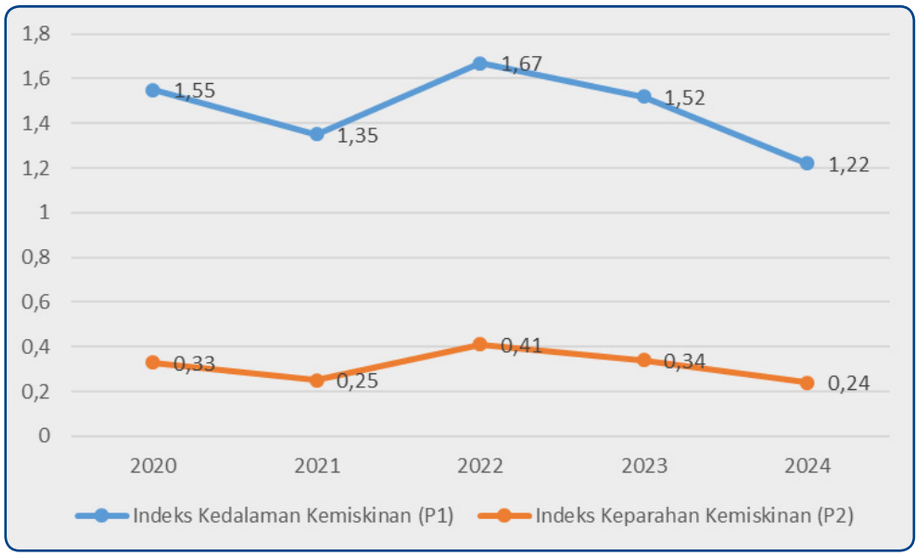
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indikator penting untuk menilai intensitas dan distribusi kemiskinan. Indeks P1 menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan—semakin tinggi angkanya, semakin dalam tingkat kemiskinan. Sementara itu, P2 mengukur ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin—nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang semakin besar.

Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), nilai P1 di Kabupaten Kediri menunjukkan tren menurun meskipun sempat mengalami fluktuasi. P1 tercatat sebesar 1,55 pada tahun 2020, turun menjadi 1,35 di tahun 2021, lalu melonjak ke 1,67 pada tahun 2022. Namun, angka ini kemudian menurun menjadi 1,52 pada 2023 dan kembali turun cukup tajam ke 1,22 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam rata-rata kemampuan ekonomi penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan.

InUse Book 1.indb 68 10/19/2025 12:12:41 AM

GAMBAR 2.24
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Kediri Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Jawa Timur, 2025



Hal serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Nilai P2 mengalami fluktuasi dari 0,33 pada tahun 2020, menurun ke 0,25 pada 2021, meningkat ke 0,41 pada 2022, lalu kembali menurun ke 0,34 di tahun 2023 dan menjadi 0,24 pada 2024. Penurunan nilai P2 pada tahun terakhir mencerminkan perbaikan distribusi pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin, di mana ketimpangan antarmereka semakin kecil.

Secara umum, meskipun sempat memburuk di tahun 2022, kualitas hidup penduduk miskin di Kabupaten Kediri pada tahun 2024 menunjukkan tren membaik, baik dari segi kedalaman maupun keparahan kemiskinan. Namun demikian, fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa ketahanan sosial-ekonomi kelompok rentan masih lemah dan perlu penguatan. Pemerintah daerah perlu terus mendorong kebijakan yang tidak hanya fokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan dan merata.

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita

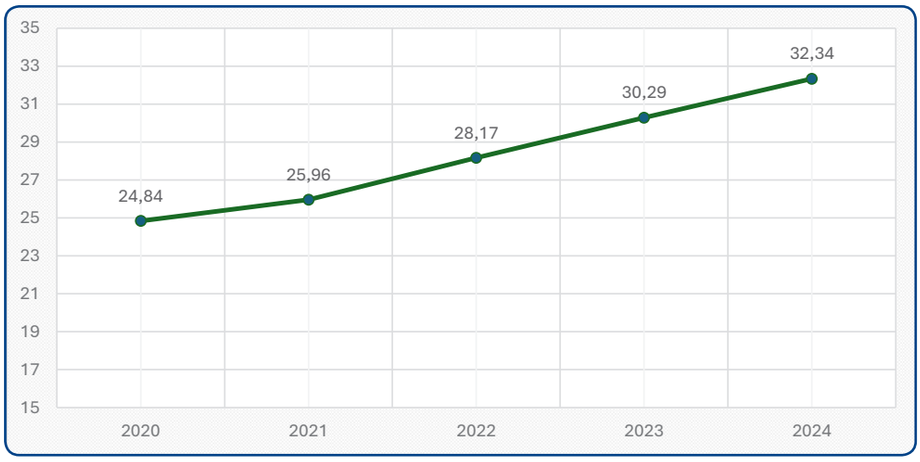
Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diindikasikan melalui pendapatan per kapita, yang mencerminkan rata-rata pendapatan penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar pula potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan.

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, PDRB per kapita Kabupaten Kediri menunjukkan tren meningkat secara konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar 24,84 juta rupiah, kemudian sedikit naik menjadi 25,96 juta rupiah pada 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun-tahun berikutnya: mencapai 28,17 juta rupiah pada tahun 2022; 30,29 juta rupiah pada tahun 2023; dan melonjak menjadi 32,34 juta rupiah pada tahun 2024.

InUse Book 1.indb 69
10/19/2025 12:12:41 AM

GAMBAR 2.25
PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Kediri (Juta Rupiah) Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Kediri dalam Angka, Diolah



Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, sekaligus mengindikasikan meningkatnya kapasitas produksi dan distribusi pendapatan di Kabupaten Kediri. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa PDRB per kapita hanya memberikan gambaran makro ekonomi. Angka ini belum memperhitungkan ketimpangan distribusi pendapatan maupun arus keluar pendapatan ke luar daerah (*transfer out*), sehingga belum mencerminkan pendapatan riil yang dinikmati oleh masyarakat secara langsung.

2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting untuk mengukur persentase jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran yang tercakup termasuk mereka yang aktif mencari kerja, menunggu dimulainya pekerjaan baru, atau yang tidak lagi mencari pekerjaan karena alasan tertentu, seperti merasa tidak ada peluang.

TPT mencerminkan seberapa efektif perekonomian suatu wilayah dalam menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi TPT, semakin besar jumlah penduduk usia kerja yang belum terserap dalam dunia kerja, yang menandakan adanya tekanan dalam pasar tenaga kerja.

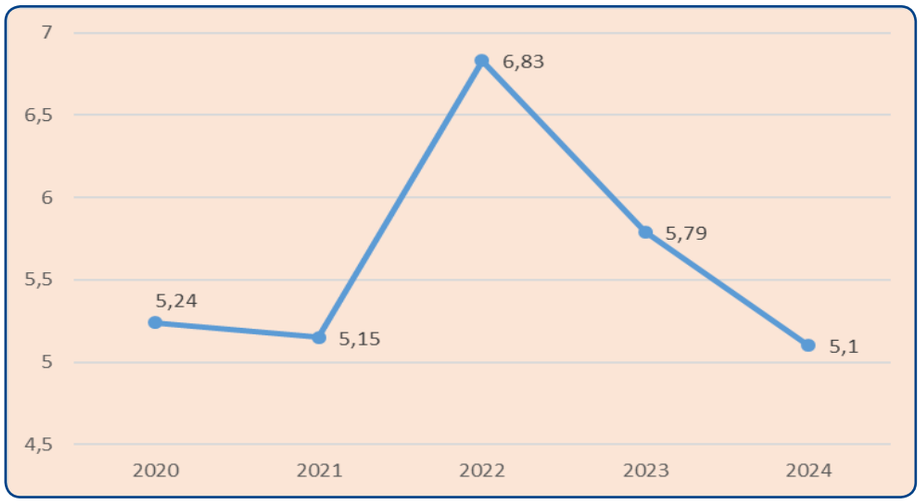
Berdasarkan Gambar 2.26, TPT Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 5,24 persen, kemudian menurun sedikit menjadi 5,15 persen pada 2021. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana TPT meningkat menjadi 6,83 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan mencerminkan dampak lanjutan dari pandemi Covid-19 terhadap pasar tenaga kerja. Setelah itu, pada 2023 TPT menurun menjadi 5,79 persen, dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 5,10 persen.

Penurunan TPT dalam dua tahun terakhir mengindikasikan adanya pemulihan di sektor ketenagakerjaan, meskipun belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi. Meskipun demikian, tingkat pengangguran di tahun 2024 masih relatif tinggi dibandingkan dengan awal dekade ini, yang menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan masih menjadi tantangan penting bagi Kabupaten Kediri.

InUse Book 1.indb 70 10/19/2025 12:12:41 AM

GAMBAR 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kediri (%) Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025



Upaya strategis dibutuhkan untuk meningkatkan daya serap pasar kerja lokal, baik melalui penciptaan wirausaha, penguatan sektor industri dan pertanian, maupun peningkatan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

2.1.2.1.5 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks ini menggunakan koefisien Gini untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, yang dianalisis melalui kurva Lorenz—yakni perbandingan antara distribusi kumulatif penduduk dan distribusi pendapatan. Nilai indeks Gini berada dalam rentang 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sementara nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

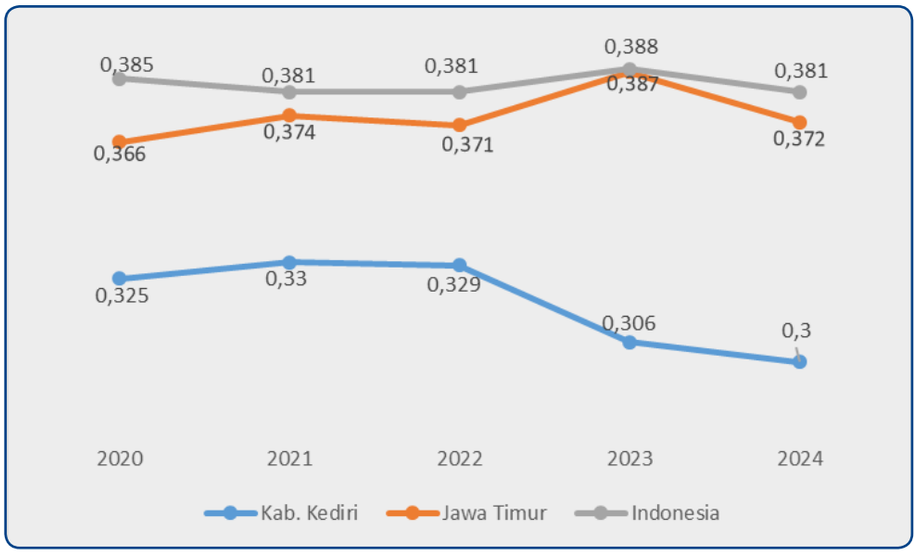
Selama periode 2020 hingga 2024, indeks Gini di Kabupaten Kediri menunjukkan tren yang menurun. Setelah mengalami sedikit peningkatan dari 0,325 di tahun 2020 menjadi 0,330 pada 2021; indeks ini kemudian menurun berturut-turut menjadi 0,329 di tahun 2022; 0,306 di tahun 2023; dan 0,300 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan dalam distribusi pendapatan, terutama setelah masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian, indeks Gini Kabupaten Kediri tahun 2024 masih belum kembali ke angka terendah prapandemi seperti pada 2019.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan rata-rata nasional, ketimpangan di Kabupaten Kediri relatif lebih rendah. Sepanjang lima tahun terakhir, nilai indeks Gini Kabupaten Kediri secara konsisten berada di bawah angka provinsi maupun nasional. Tren di Kabupaten Kediri juga tampak berbeda dengan tren Jawa Timur dan nasional yang cenderung sejalan. Misalnya, pada tahun 2023, indeks Gini Jawa Timur dan nasional mengalami lonjakan masing-masing menjadi 0,387 dan 0,388; sementara Kabupaten Kediri justru mencatat penurunan signifikan. Sampai 2024, indeks Gini Jawa Timur dan nasional kembali menurun menjadi masing-masing 0,372 dan 0,381, namun tetap lebih tinggi dari Kabupaten Kediri. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun masih dalam kategori ketimpangan sedang, distribusi pendapatan di Kabupaten Kediri lebih merata dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

InUse Book 1.indb 71
10/19/2025 12:12:42 AM

GAMBAR 2.27
Indeks Gini Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

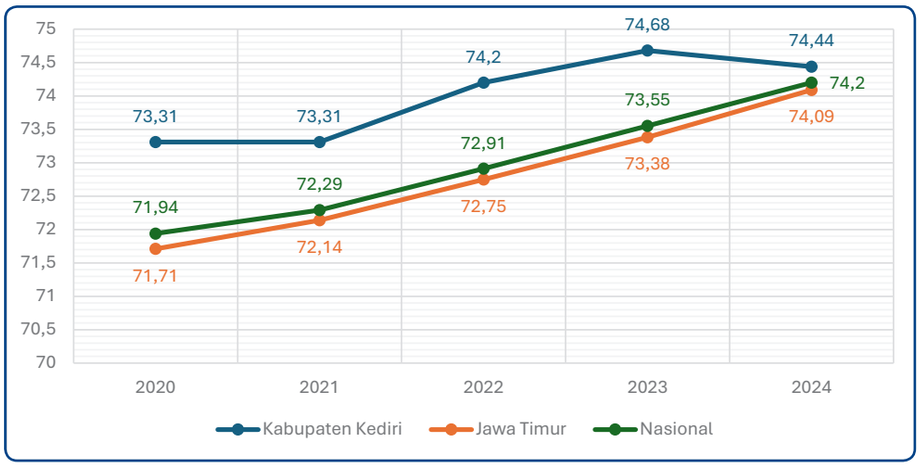


2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas hidup penduduk suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi esensial: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Sebagai indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan daerah, IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai kemajuan dalam aspek sosial dan ekonomi, yang selanjutnya menjadi landasan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

GAMBAR 2.28
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025



Berdasarkan grafik perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020-2024, terlihat bahwa IPM Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan nasional menunjukkan tren peningkatan yang fluktuatif namun secara umum mengarah positif. Capaian IPM Kabupaten Kediri relatif tinggi di tahun 2020 sebesar 73,31, sempat stagnan di tahun 2021 pada angka yang sama, kemudian mengalami kenaikan signifikan menjadi 74,20 di tahun 2022 dan mencapai puncaknya di 74,68 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, IPM Kabupaten Kediri mengalami sedikit penurunan menjadi 74,44. Dinamika ini menunjukkan

InUse Book 1.indb 72 10/19/2025 12:12:42 AM

adanya upaya yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, terutama dalam rentang tahun 2022-2023. Penurunan tipis di tahun 2024 perlu dianalisis lebih lanjut faktor-faktor penyebabnya, meskipun secara keseluruhan capaian IPM Kabupaten Kediri tetap berada di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional pada periode tersebut.

Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan IPM yang lebih stabil. Dimulai dari 71,71 di tahun 2020, terus meningkat menjadi 72,14 di tahun 2021; 72,75 di tahun 2022; 73,38 di tahun 2023; dan mencapai 74,09 di tahun 2024. Peningkatan yang konsisten ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk di tingkat provinsi. IPM nasional juga menunjukkan tren peningkatan yang positif dan cenderung lebih landai dibandingkan Kabupaten Kediri. Pada tahun 2020, capaian IPM sebesar 71,94, meningkat hingga mencapai 74,20 di tahun 2024. Peningkatan yang stabil ini mencerminkan kemajuan pembangunan manusia secara nasional.

Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Kediri cenderung lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jawa Timur dan IPM nasional selama periode 2020-2024, meskipun dengan dinamika pertumbuhan yang sedikit berbeda. Penurunan tipis IPM Kabupaten Kediri di tahun 2024 menjadi catatan penting untuk dievaluasi agar tren positif dapat kembali berlanjut. Adapun perkembangan komponen pembentuk IPM Kabupaten Kediri ditunjukkan oleh tabel di bawah.

TABEL 2.23
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Komponen IPM	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	74,27	74,3	74,58	74,85	73,47
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,15	13,44	13,61	13,62	13,63
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,02	8,08	8,23	8,24	8,26
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.000	11.127	11.565	11.952	12.388
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31	73,31	74,2	74,68	74,44

Secara lebih rinci, komponen angka harapan hidup saat lahir (AHH) menunjukkan tren peningkatan yang stabil hingga tahun 2023, namun mengalami penurunan di tahun 2024. Angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) terus mengalami peningkatan yang konsisten, mengindikasikan adanya perbaikan dalam sektor pendidikan. Sementara itu, pengeluaran per kapita disesuaikan juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan peningkatan standar hidup ekonomi penduduk Kabupaten Kediri. Dengan demikian, meskipun terdapat penurunan tipis pada AHH dan IPM di tahun 2024, secara umum Kabupaten Kediri menunjukkan kemajuan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup selama periode 2020-2024.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup (UHH) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencerminkan perkiraan rata-rata umur yang dapat dicapai seseorang sejak lahir, dengan asumsi kondisi mortalitas saat ini tetap berlangsung. Indikator ini

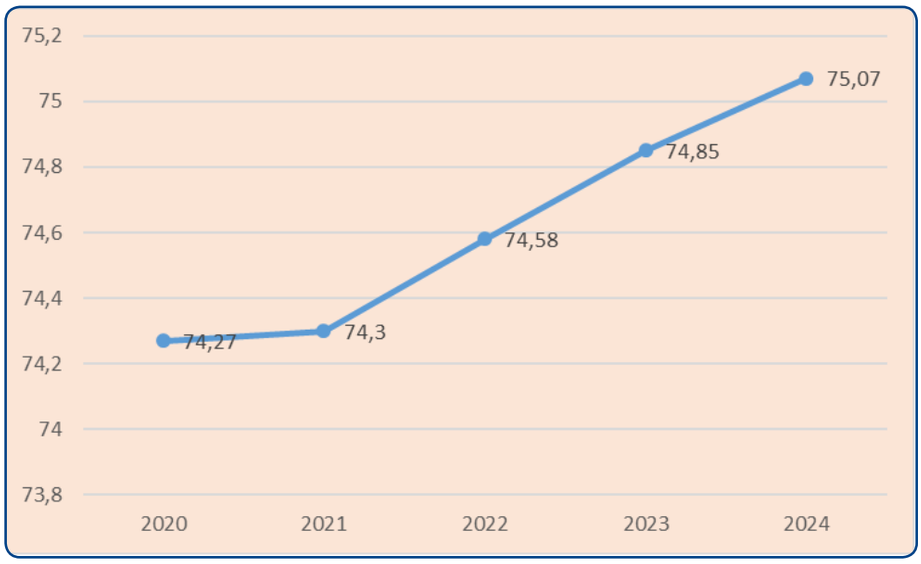
InUse Book 1.indb 73 10/19/2025 12:12:42 AM

menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas hidup, kesejahteraan penduduk, dan kemajuan pembangunan manusia. Semakin tinggi angka UHH, semakin baik pula kondisi sosial, ekonomi, dan layanan kesehatan masyarakat.

Beberapa faktor yang memengaruhi UHH antara lain akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, gizi yang cukup, lingkungan hidup yang bersih, serta tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat.

GAMBAR 2.29
Usia Harapan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025



Berdasarkan data, usia harapan hidup di Kabupaten Kediri menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka UHH tercatat sebesar 74,27 tahun, kemudian naik tipis menjadi 74,30 tahun di 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, yakni 74,58 tahun pada 2022; 74,85 tahun pada 2023; dan 75,07 tahun pada 2024.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kediri semakin menikmati kualitas hidup yang lebih baik, seiring dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, program pencegahan penyakit, perbaikan gizi, dan sanitasi lingkungan. Dukungan kebijakan publik di bidang kesehatan serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat juga berkontribusi pada tren positif ini.

Secara umum, peningkatan UHH mencerminkan keberhasilan program-program pembangunan manusia yang dijalankan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, sejahtera, dan berdaya saing.

2.1.2.2.2 Kesehatan Keluarga

Untuk mengevaluasi kondisi kesehatan keluarga, Kementerian Kesehatan telah meluncurkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Program ini menggunakan 12 variabel untuk menilai dan memberikan gambaran tentang kondisi suatu keluarga, yang kemudian diolah menjadi Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan suatu keluarga, mencakup aspek-aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Dalam IKS, terdapat 12 indikator yang mencakup:

InUse Book 1.indb 74 10/19/2025 12:12:43 AM

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

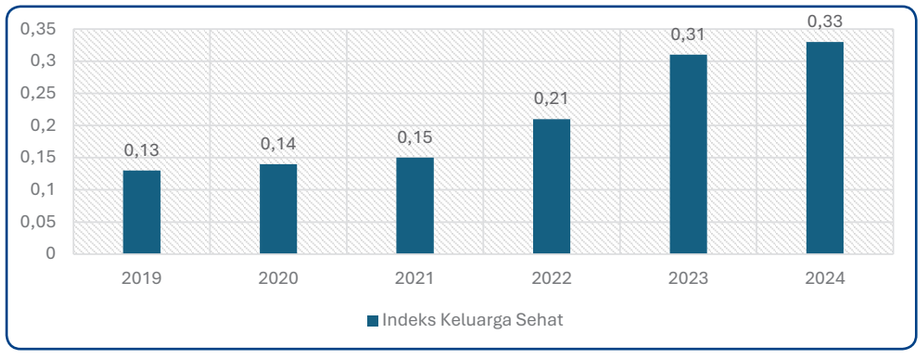
Hasil perhitungan dari dua belas indikator Indeks Keluarga Sehat kemudian dibagi dalam tiga kategori, yaitu :

1. Keluarga Sehat: nilai IKS > 0,8
2. Keluarga Prasehat: nilai IKS 0,5-0,8
3. Keluarga Tidak Sehat: nilai IKS < 0,5

Dengan memperbaiki IKS, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan keluarga serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada peningkatan angka harapan hidup (AHH). Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan indikator keluarga sehat dianggap sebagai investasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan yang berkelanjutan di Kabupaten Kediri.

GAMBAR 2.30
Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, 2024



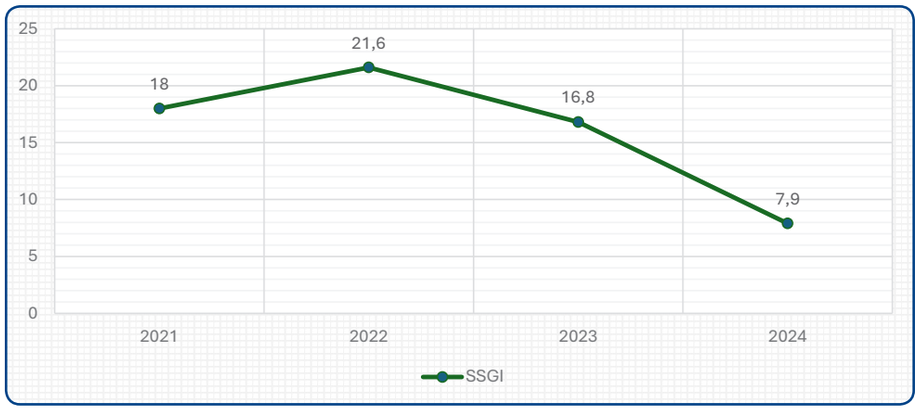
2.1.2.2.3 Stunting

Prevalensi stunting merupakan indikator utama dalam menilai kualitas pembangunan manusia, khususnya dalam aspek kesehatan anak usia dini. Stunting mengacu pada kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu lama, biasanya sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Anak yang mengalami stunting umumnya memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya, serta berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif. Oleh karena itu, prevalensi stunting menjadi indikator penting yang mencerminkan kesehatan dan kesejahteraan anak dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

InUse Book 1.indb 75 10/19/2025 12:12:43 AM

GAMBAR 2.31
Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, 2025



Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, tren prevalensi stunting di Kabupaten Kediri selama periode 2020 hingga 2024 dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021 prevalensi stunting sebesar 18%, meningkat menjadi 21,6% pada tahun 2022, kemudian menurun signifikan menjadi 16,8% pada tahun 2023. Perbedaan antara kedua sumber data ini menunjukkan variasi dalam pendekatan dan cakupan survei. SSGI menggunakan metode survei nasional berbasis sampling, sedangkan data pengukuran langsung biasanya berasal dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan seperti posyandu.

Secara umum, tren penurunan pada kedua jenis data tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Kediri. Penurunan ini mencerminkan dampak dari berbagai program intervensi, seperti peningkatan akses dan cakupan gizi ibu dan anak, edukasi kesehatan masyarakat, perbaikan sanitasi, serta intervensi sensitif lainnya. Meski demikian, fluktuasi yang terjadi dalam data SSGI menunjukkan bahwa pelaksanaan konvergensi program percepatan penurunan stunting belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi prioritas.

Oleh karena itu, data ini sangat penting sebagai dasar evaluasi dan perbaikan strategi kebijakan. Diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi antara berbagai sektor untuk memastikan efektivitas intervensi. Dengan begitu, program penurunan stunting dapat berjalan lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan, demi mendukung pertumbuhan anak yang sehat serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

Pada tahun 2024 fasilitas pelayanan kesehatan posyandu tidak hanya menangani upaya penurunan stunting tetapi juga menangani enam bidang SPM dan bukan hanya SPM kesehatan serta berubah menjadi *new* posyandu.

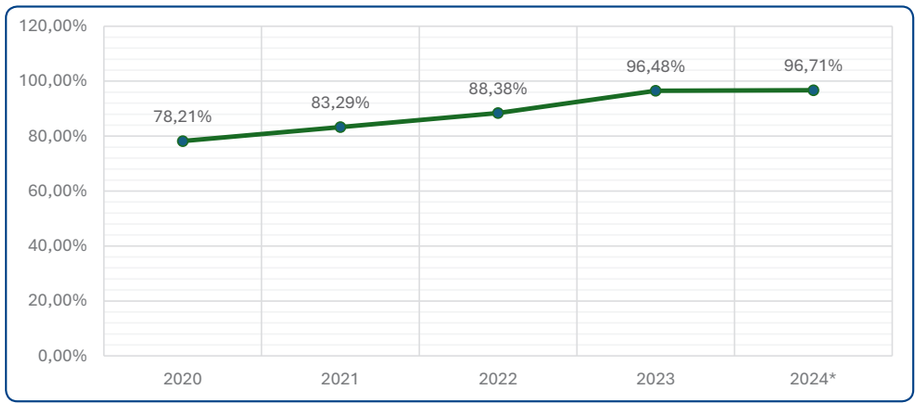
2.1.2.2.4 Jaminan Kesehatan

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah indikator kunci dalam mengukur pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) di Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, bertujuan memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif dan merata kepada seluruh penduduk. Pada tahun 2023, Kabupaten Kediri berhasil mencapai UHC sebesar 96,48 persen penduduknya terdaftar dalam program JKN, sesuai laporan dari BPJS Kesehatan. Berikut adalah grafik capaian kepesertaan jaminan kesehatan Kabupaten Kediri.

InUse Book 1.indb 76 10/19/2025 12:12:43 AM

GAMBAR 2.32
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Sumber: BPJS Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, 2024



Cakupan kepesertaan JKN meningkat tiap tahunnya dan menunjukkan tren positif. Hal Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang luas bagi masyarakat. Tingginya cakupan kepesertaan JKN tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat, serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Namun penting untuk memastikan penduduk yang belum tercakupi dalam JKN untuk dapat terdaftar dalam program jaminan kesehatan.

2.1.2.2.5 Angka Kematian Ibu

Mortalitas dapat dijelaskan sebagai kejadian kematian pada suatu masyarakat dari waktu ke waktu dan tempat tertentu yang dapat menggambarkan status kesehatan masyarakat secara kasar, kondisi/tingkat permasalahan kesehatan, kondisi lingkungan fisik dan biologis secara tidak langsung. Selain itu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan.

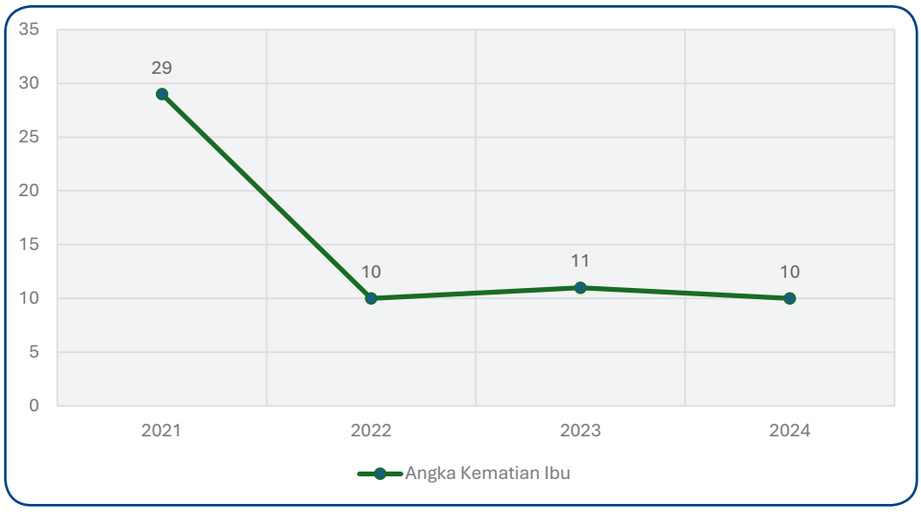
Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal per 100.000 kelahiran hidup, dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Berdasarkan laporan puskesmas jumlah kematian ibu maternal di Kabupaten Kediri pada tahun 2023 sebanyak 16 kasus dari 20.047 kelahiran hidup atau 68,5 per 100.000 KH. Kematian ibu mengalami peningkatan dari tahun 2022, di mana jumlah kematian ibu di tahun 2022 sebanyak 15 kasus, dengan Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 67,25 per 100.000 kelahiran hidup.

InUse Book 1.indb 77
10/19/2025 12:12:43 AM

GAMBAR 2.33
Angka Kematian Ibu Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, 2024



2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

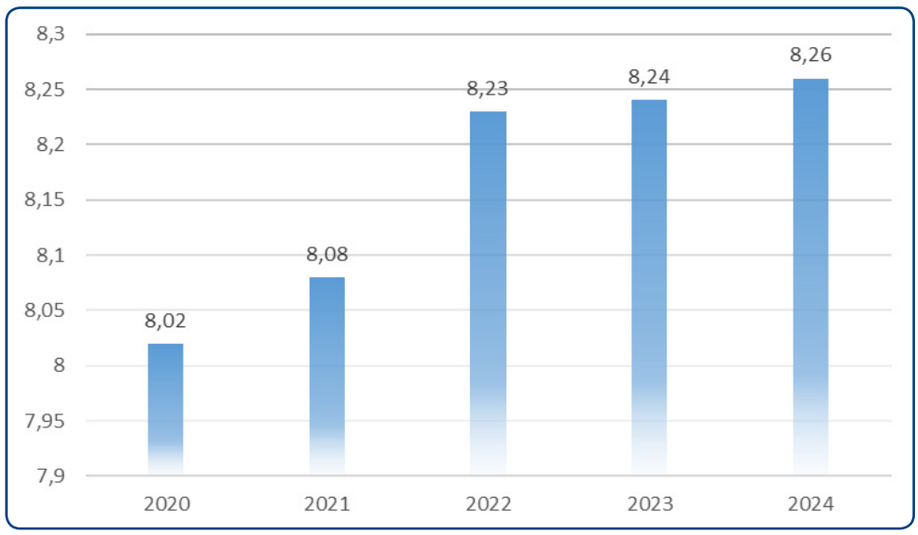
Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Rata-rata lama bersekolah merupakan salah satu ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Rata-rata lama sekolah pada penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan indikator penting untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat dewasa yang telah menyelesaikan pendidikan formal dasarnya. Semakin tinggi angka ini, semakin besar pula peluang masyarakat dalam memperoleh keterampilan, pekerjaan yang layak, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Di Kabupaten Kediri, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, penduduk usia dewasa di wilayah ini menempuh pendidikan rata-rata selama 8,02 tahun, setara dengan jenjang pendidikan hingga kelas dua SMP.

GAMBAR 2.34
Rata-Rata Lama Sekolah Usia di Atas 25 Tahun di Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



InUse Book 1.indb 78 10/19/2025 12:12:44 AM

Angka ini meningkat menjadi 8,08 tahun pada 2021, kemudian naik signifikan menjadi 8,23 tahun pada 2022. Peningkatan terus berlanjut menjadi 8,24 tahun pada 2023, dan mencapai 8,26 tahun pada 2024.

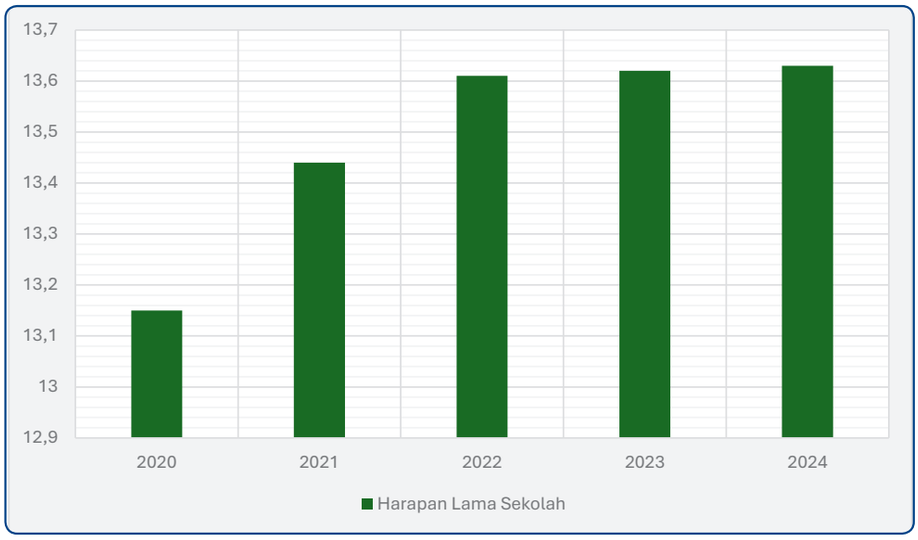
Peningkatan tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam akses dan penyelesaian pendidikan pada masa sebelumnya, yang kini terlihat pada kelompok usia dewasa. Namun, capaian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat dewasa di Kabupaten Kediri belum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas yang idealnya ditempuh selama 12 tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan untuk memperluas akses pendidikan formal dan nonformal bagi masyarakat dewasa guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini.

Angka harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Kediri selama lima tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Kediri berada pada angka 13,15 tahun dan meningkat hingga mencapai 13,63 tahun pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Tren yang meningkat ini juga mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Kediri memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan formal selama periode tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan baru, peningkatan dalam kualitas pendidikan, dan program-program pemerintah yang mendukung akses pendidikan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga dapat berperan dalam meningkatnya angka harapan lama sekolah. Program sosial atau pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan bisa menjadi faktor pendorong.

Selain lamanya waktu yang dihabiskan di sekolah, kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa juga menjadi faktor penting. Meningkatnya angka harapan lama sekolah juga mencerminkan peningkatan dalam kualitas pendidikan di Kabupaten Kediri. Adanya program-program pemerintah yang mendukung pendidikan, seperti beasiswa atau insentif bagi siswa untuk mengejar pendidikan lebih tinggi, dapat memotivasi penduduk untuk menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah. Tingkat angka harapan lama sekolah yang meningkat adalah

GAMBAR 2.35
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025



InUse Book 1.indb 79
10/19/2025 12:12:44 AM

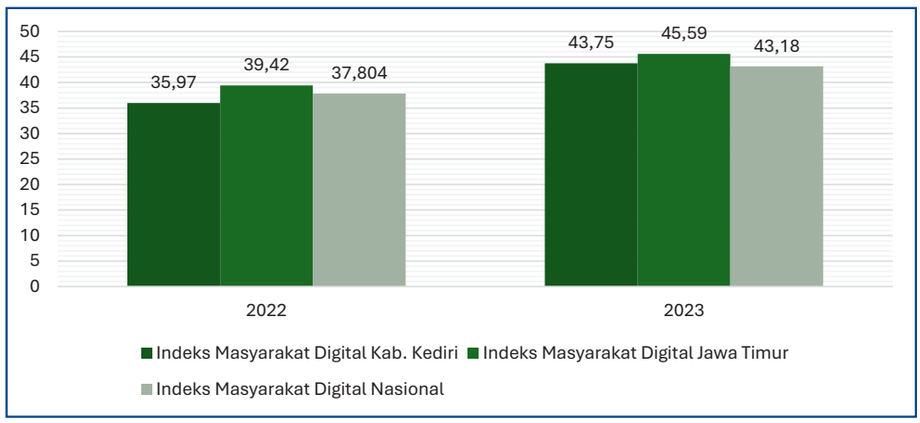
indikator positif untuk pembangunan manusia di suatu daerah. Semakin lama seseorang bersekolah, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mendukung peningkatan kualitas hidup dan peluang kerja. Oleh karena itu, peningkatan angka harapan lama sekolah adalah indikasi yang baik dan mencerminkan komitmen untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Kediri.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah alat ukur yang menilai sejauh mana masyarakat Indonesia terintegrasi dengan teknologi digital dan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan digital. IMDI mengevaluasi empat pilar utama, yaitu: *Pertama*, infrastruktur dan ekosistem; yang mengukur kualitas dan kesetaraan akses terhadap infrastruktur digital, meliputi adopsi teknologi, ekosistem pembelajaran, dan digitalisasi pemerintah. *Kedua*, keterampilan digital; yang menilai kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi, dan keamanan informasi. *Ketiga*, pemberdayaan; yang mencakup bagaimana aktivitas digital berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan taraf hidup, serta keterlibatan individu dalam *e-commerce*, media sosial, dan platform *e-learning*. *Keempat*, pekerjaan; yang fokus pada keterampilan digital terkait pekerjaan, serta bagaimana digitalisasi menciptakan jenis pekerjaan baru dan tuntutan keahlian baru. Dengan memberikan gambaran komprehensif tentang adopsi dan pemanfaatan teknologi digital, IMDI membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mendukung transformasi digital secara lebih luas.

Capaian indeks masyarakat digital Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke 2023, dengan skor naik dari 35,97 menjadi 43,75. Meskipun terjadi kemajuan yang signifikan, skor tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur, yang meningkat dari 39,42 menjadi 45,59, serta di bawah rata-rata nasional, yang naik dari 37,80 menjadi 43,18. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri sedang dalam proses memperbaiki berbagai aspek digitalisasi, termasuk infrastruktur, keterampilan, pemberdayaan, dan pekerjaan, namun masih perlu upaya tambahan untuk menyamai atau melampaui capaian di tingkat provinsi dan nasional. Evaluasi ini menekankan pentingnya terus meningkatkan strategi dan kebijakan untuk memperkuat kapasitas digital di Kabupaten Kediri guna mempercepat proses digitalisasi dan pengembangan masyarakat digital.

GAMBAR 2.36
Indeks Masyarakat Digital Tahun 2022-2023

Sumber: Kominfo, 2024



InUse Book 1.indb 80 10/19/2025 12:12:44 AM

Berdasarkan capaian pilar dan subpilar dari indeks masyarakat digital didapatkan bahwa pilar pekerjaan dan pilar pemberdayaan mendapatkan nilai terendah dibandingkan pilar lainnya. Pilar pemberdayaan yang rendah di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan melalui pengembangan UMKM dan *sharing economy* masih kurang optimal. Hal ini mencerminkan literasi dan keterampilan digital yang belum optimal, serta minimnya penggunaan layanan digital seperti *e-commerce*, media sosial, dan platform *e-learning*. Peningkatan literasi digital dan dukungan bagi UMKM diperlukan untuk memperbaiki kondisi ini. Pilar pekerjaan yang rendah mencerminkan kurangnya keterampilan digital yang dibutuhkan untuk pekerjaan, pelatihan oleh perusahaan, tingkat otomatisasi, dan kemampuan pekerjaan dilakukan secara jarak jauh. Proporsi pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan, keterampilan digital yang tersedia, dan pelatihan keterampilan digital juga belum optimal. Untuk meningkatkan pilar ini, diperlukan peningkatan pelatihan keterampilan digital oleh perusahaan, pemerintah, dan inisiatif pribadi, serta peningkatan penggunaan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari.

Kemampuan literasi dan numerasi adalah faktor penting dalam pembangunan manusia, pendidikan, dan daya saing sumber daya manusia. Literasi mendukung akses informasi dan komunikasi efektif, sementara numerasi penting untuk analisis data dan pemecahan masalah. Keduanya mendukung pencapaian akademis dan kesiapan kerja. Peningkatan dalam kedua kemampuan ini berkontribusi pada produktivitas dan inovasi, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi. Di Kabupaten Kediri, tren peningkatan persentase siswa yang memenuhi kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi menunjukkan kemajuan dalam kualitas pendidikan dan pengembangan keterampilan yang relevan untuk masyarakat dan ekonomi lokal.

Di Kabupaten Kediri, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kompetensi literasi siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data asesmen nasional, pada tahun 2021, persentase siswa yang memenuhi kompetensi minimum dalam literasi adalah 61,38%, meningkat menjadi 63,7% di tahun 2022, naik lagi menjadi 79,18% pada tahun 2023, dan tetap menjadi 79,18% di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai

GAMBAR 2.37
Siswa yang Memenuhi Kompetensi Literasi dan Numerasi Minimum Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, 2025



InUse Book 1.indb 81 10/19/2025 12:12:45 AM

program literasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal penguatan budaya membaca di sekolah, pelatihan guru dalam pembelajaran berbasis teks dan optimalisasi peran perpustakaan sekolah. Sebaliknya, capaian kompetensi numerasi siswa menunjukkan stagnan di tahun 2024. Persentase siswa yang memenuhi kompetensi minimum dalam numerasi pada tahun 2021 adalah 38,38%, naik menjadi 39,29% di tahun 2022 dan mencapai 62,12% di tahun 2023, namun mengalami stagnasi di tahun 2024 sebesar 62,12%. Hal ini disebabkan banyak siswa yang kesulitan dalam memahami konsep matematika dasar, menerapkan logika kuantitatif dan menyelesaikan soal yang memerlukan pemahaman kontekstual. Penurunan ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Kediri, mengingat numerasi merupakan kemampuan dasar yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.2.4 Keluarga Berkualitas

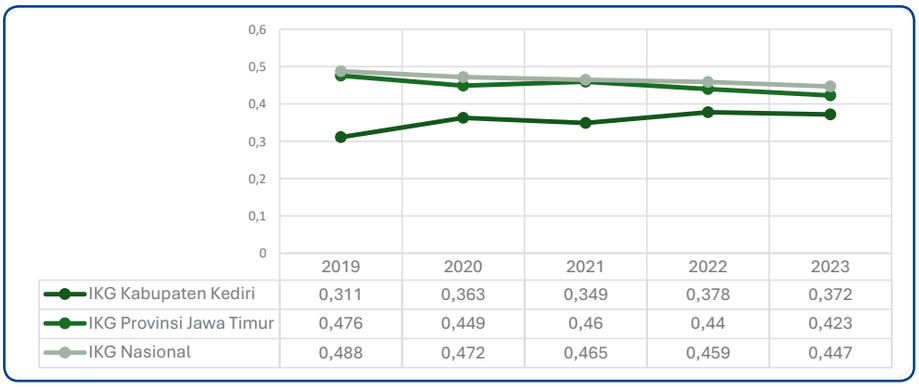
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indeks untuk mengukur kualitas keluarga yang digunakan untuk mengevaluasi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Indeks ini penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga yang tangguh, berkembang, atau rentan. Terdapat tiga dimensi utama dalam iBangga, yaitu *ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan*, dengan sebelas indikator yang diukur. Dimensi ketenteraman mencakup indikator kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Dimensi kemandirian mencakup indikator pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses media *online*. Dimensi kebahagiaan mencakup indikator interaksi keluarga dan interaksi sosial. Nilai iBangga berkisar antara 0 hingga 100, dengan kategori rentan atau kurang baik untuk nilai di bawah 40, berkembang atau cukup baik untuk nilai antara 40 hingga 70, dan tangguh untuk nilai di atas 70. Pada tahun 2022, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, capaian iBangga dari Kabupaten Kediri adalah di angka 57,43 yang berarti dalam kategori berkembang atau cukup baik atau dalam kategori siaga. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu di angka 57,87 pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen lebih untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur sejauh mana kesenjangan gender memengaruhi kualitas hidup dan kesempatan antara pria dan wanita dalam berbagai aspek pembangunan. IKG mencakup dimensi kesehatan reproduksi, pendidikan, keterwakilan politik, dan partisipasi angkatan kerja. Indeks ini membantu menilai kemajuan dalam kesetaraan gender dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Semakin kecil nilai indeks menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin rendah, artinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi-dimensi yang diukur semakin mendekati keseimbangan. Berikut adalah perbandingan antara Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan Nasional pada tahun 2019-2023.

InUse Book 1.indb 82 10/19/2025 12:12:45 AM

GAMBAR 2.38
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2024



	2019	2020	2021	2022	2023
IKG Kabupaten Kediri	0,311	0,363	0,349	0,378	0,372
IKG Provinsi Jawa Timur	0,476	0,449	0,46	0,44	0,423
IKG Nasional	0,488	0,472	0,465	0,459	0,447

Dari tahun 2019 hingga 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kediri menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, IKG Kabupaten Kediri berada di angka 0,311 yang merupakan nilai yang relatif rendah dibandingkan dengan IKG Provinsi Jawa Timur (0,476) dan nasional (0,488). Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Kediri lebih kecil daripada di tingkat provinsi dan nasional. Namun, nilai IKG mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 0,363, dan pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi 0,349. Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai 0,378, sebelum sedikit menurun lagi pada tahun 2023 menjadi 0,372. Secara keseluruhan, IKG Kabupaten Kediri menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun tetapi nilainya tetap lebih rendah dibandingkan dengan IKG provinsi dan nasional. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam mengurangi ketimpangan gender di tingkat lokal. Namun, ketimpangan gender masih ada, dan upaya terus-menerus diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Kenaikan IKG pada beberapa tahun menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri mungkin mengalami tantangan dalam beberapa aspek kesetaraan gender, meskipun tetap berada pada tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional.

2.1.3 Aspek Daya Saing

Analisis aspek daya saing daerah dapat dianalisis melalui berbagai aspek, meliputi daya saing ekonomi daerah, daya saing SDM, daya saing fasilitas/infrastruktur, serta daya saing iklim investasi.

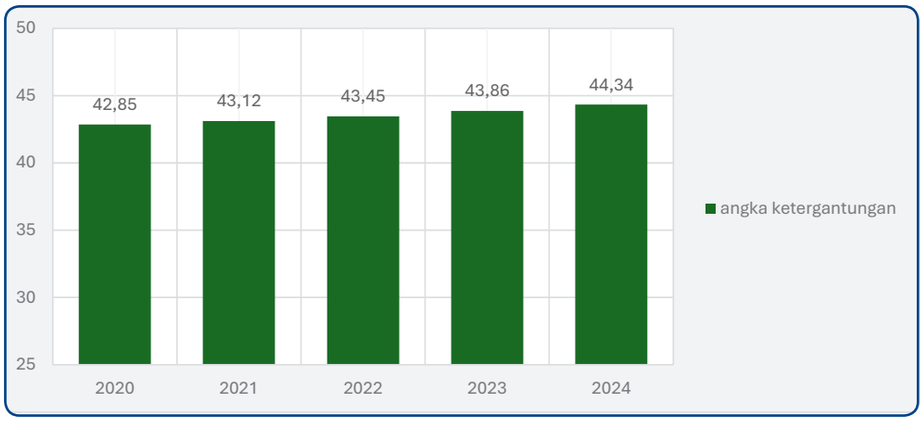
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing suatu daerah di era global yang kian kompetitif sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Modal insani yang unggul, terampil, dan berdaya cipta menjadi fondasi utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menganalisis daya saing sumber daya manusia suatu daerah, angka ketergantungan menjadi indikator demografis yang krusial. Angka ini mencerminkan perbandingan antara penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan kelompok usia produktif (15-64 tahun). Daya saing SDM dapat dipengaruhi secara signifikan oleh besaran

InUse Book 1.indb 83 10/19/2025 12:12:45 AM

GAMBAR 2.39
Angka Ketergantungan Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2024



angka ketergantungan. Ketika angka ketergantungan tinggi, proporsi penduduk yang tidak bekerja lebih besar, memberikan tekanan pada sumber daya ekonomi yang ada. Implikasinya terhadap daya saing SDM sangat terasa dalam hal terbatasnya investasi pada pendidikan, kesehatan, dan pelatihan yang esensial untuk menciptakan SDM yang unggul dan kompeten. Keterbatasan SDM yang kompeten ini pada gilirannya dapat menghambat inovasi, adopsi teknologi, dan kemampuan adaptasi daerah terhadap dinamika ekonomi global yang kompetitif.

Angka ketergantungan di Kabupaten Kediri menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka ketergantungan tercatat sebesar 42,85. Angka ini kemudian mengalami kenaikan secara bertahap menjadi 43,12 pada tahun 2021; 43,45 pada tahun 2022; 43,86 pada tahun 2023; dan mencapai 44,34 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya penambahan proporsi penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Kediri selama periode 2020-2024.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, serta ditentukan oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Untuk menggambarkan struktur ekonomi, salah satu indikator yang umum digunakan adalah distribusi persentase sektoral terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar kontribusi suatu sektor, semakin signifikan peran sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, analisis kontribusi terhadap PDRB menjadi penting untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan pola ketergantungan ekonomi wilayah.

Berdasarkan data kontribusi sektoral terhadap PDRB Kabupaten Kediri periode 2020–2024, terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor paling dominan. Rata-rata kontribusinya mencapai 22,61 persen, meskipun mengalami tren penurunan dari 23,56 persen pada tahun 2020 menjadi 21,33 persen pada tahun 2024.

InUse Book 1.indb 84 10/19/2025 12:12:45 AM

Selain itu, sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar dengan rata-rata sebesar 22,01 persen, bahkan mengalami tren peningkatan signifikan pada tahun 2024 sebesar 23,06 persen. Hal ini menandakan bahwa sektor industri menjadi salah satu penggerak ekonomi yang semakin penting di daerah ini.

Sektor lain yang memberikan kontribusi relatif besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata 19,88 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya seperti transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan memiliki kontribusi yang lebih kecil, yakni di bawah 6 persen, dan sebagian besar sektor lainnya berada di bawah 5 persen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Kediri masih bertumpu pada sektor primer dan sekunder, terutama sektor pertanian dan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, namun ada pergeseran menuju penguatan sektor industri sebagai respons terhadap dinamika pembangunan dan industrialisasi. Upaya pengembangan kedua sektor ini secara seimbang berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

TABEL 2.24
Struktur Ekonomi di Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025 (Diolah)

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,56	23,33	22,48	22,33	21,33	22,61
Pertambangan dan Penggalian	1,53	1,54	1,48	1,49	1,47	1,50
Industri Pengolahan	21,49	21,46	21,95	22,09	23,06	22,01
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06
Konstruksi	9,03	8,76	8,88	8,98	8,96	8,92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,96	19,79	20,21	20,30	20,16	19,88
Transportasi dan Pergudangan	1,91	2,01	2,23	2,46	2,65	2,25
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43	1,48	1,58	1,68	1,77	1,59
Informasi dan Komunikasi	5,89	5,99	5,95	5,90	5,82	5,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,85	1,82	1,81	1,76	1,72	1,79
Real Estat	2,15	2,11	2,02	1,93	1,92	2,03
Jasa Perusahaan	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,96	3,73	3,55	3,32	3,41	3,59
Jasa Pendidikan	5,33	5,07	4,8	4,60	4,56	4,87
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89
Jasa Lainnya	1,59	1,61	1,75	1,86	1,87	1,73
PDRB	100	100	100	100	100	100,00

Rasio PDRB Industri Pengolahan

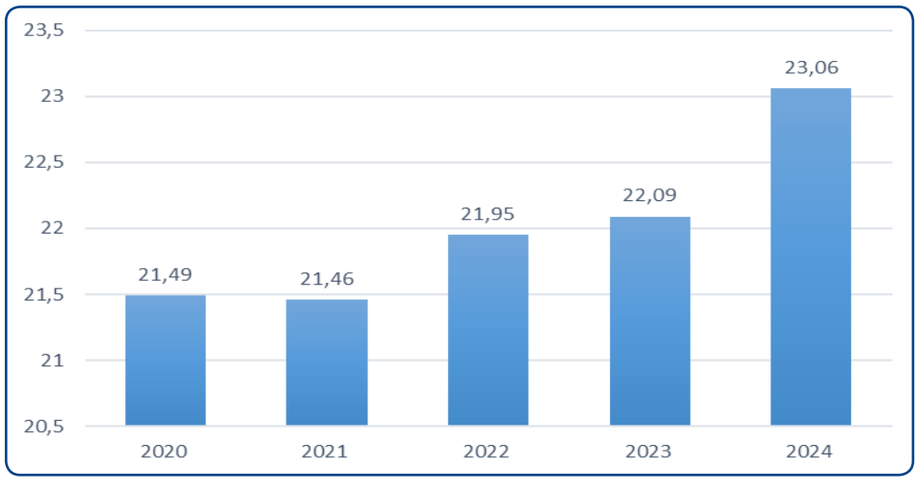
Analisis terhadap rasio PDRB sektor industri pengolahan memiliki arti penting karena mencerminkan sejauh mana sektor ini berkontribusi terhadap perekonomian daerah, serta memberikan wawasan tentang arah pertumbuhan, efisiensi kebijakan, dan daya saing sektor industri di suatu wilayah. Rasio ini

InUse Book 1.indb 85 10/19/2025 12:12:45 AM

juga menunjukkan sejauh mana sektor industri berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi secara umum. Selain itu, analisis ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan akan investasi, penerapan teknologi baru, serta penguatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan, yang semuanya mendukung penyusunan kebijakan daerah yang lebih terarah guna meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi, dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kediri.

GAMBAR 2.40
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025



Berdasarkan data kontribusi sektoral terhadap PDRB Kabupaten Kediri selama periode 2020 hingga 2024, sektor industri pengolahan menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif dan stabil. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 21,49 persen, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 23,06 persen pada tahun 2024. Rata-rata kontribusi selama lima tahun tersebut tercatat sebesar 22,01 persen, yang mencerminkan peran penting sektor ini dalam mendorong perekonomian daerah. Tren ini menunjukkan efektivitas dari kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Kediri, termasuk pengembangan infrastruktur, iklim investasi yang kondusif, serta peningkatan kualitas SDM di sektor industri.

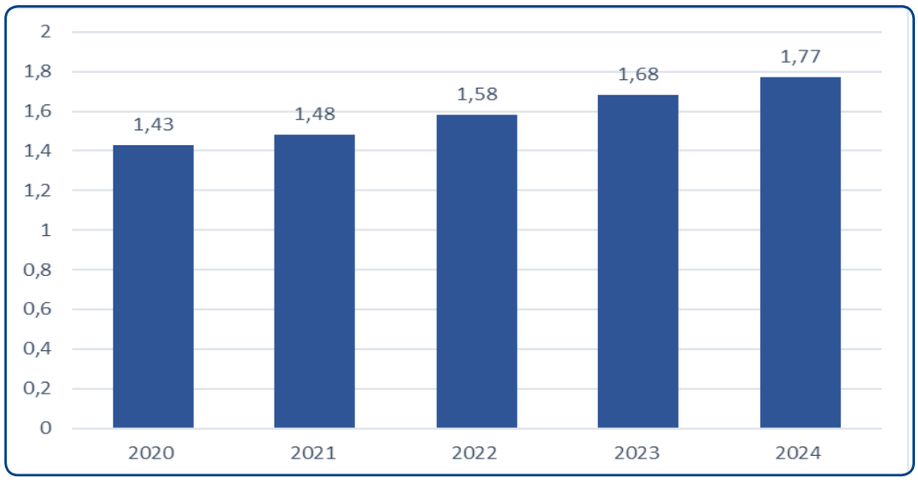
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Analisis terhadap rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum memiliki signifikansi strategis karena sektor ini mencerminkan aktivitas pariwisata, perhotelan, dan konsumsi masyarakat yang berdampak langsung pada penerimaan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Sektor ini juga memiliki keterkaitan erat dengan sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan transportasi, sehingga perkembangannya berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah secara menyeluruh. Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan, serta merancang strategi promosi yang lebih efektif untuk menarik kunjungan wisatawan. Hal ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.

InUse Book 1.indb 86 10/19/2025 12:12:46 AM

GAMBAR 2.41
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025



Berdasarkan data terbaru, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Kediri menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang 1,43 persen, dan mengalami pertumbuhan bertahap hingga mencapai 1,77 persen pada tahun 2024. Rata-rata kontribusi selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 1,59 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan sektor ini setelah kemungkinan terdampak oleh pandemi, serta adanya geliat aktivitas konsumsi dan pariwisata lokal yang semakin membaik.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata kontribusi sektor serupa di tingkat Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,86 persen, capaian Kabupaten Kediri masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ini belum berkembang optimal dan masih menyimpan potensi besar untuk ditingkatkan. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur wisata, penguatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata, promosi destinasi lokal, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Kediri dapat tumbuh lebih cepat, memperkuat ekonomi daerah, dan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Struktur Ekonomi Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Utama

Selain dengan melihat persentase kontribusi dari masing-masing sektor dalam perekonomian, ada tidaknya dominasi transformasi/perubahan struktur ekonomi juga dapat dianalisis dengan pengelompokan tujuh belas lapangan usaha menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Lapangan Usaha Primer
Lapangan usaha primer adalah lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber daya alam seperti tanah maupun segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

2) Lapangan Usaha Sekunder
Lapangan usaha sekunder adalah lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder

InUse Book 1.indb 87 10/19/2025 12:12:46 AM

itu sendiri, menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air; serta lapangan usaha konstruksi.

3) Lapangan Usaha Tersier

Lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estat; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya.

TABEL 2.25
Struktur Perekonomian Kabupaten Kediri Berdasarkan Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2020-2024

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Primer	25,09	24,87	23,96	23,82	22,8	24,108
Sekunder	30,65	30,35	30,96	31,2	32,14	31,06
Tersier	44,26	44,78	45,08	44,99	45,06	44,83

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa tidak terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Kediri selama periode 2020-2024. Sektor yang mendominasi perekonomian adalah sektor tersier yang mencapai kontribusi rata-rata 44,83 persen selama lima tahun ke belakang. Kontribusi tertinggi sektor tersier terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 45,08 persen. Berbeda halnya dengan sektor sekunder dan sektor primer terhadap perekonomian Kabupaten Kediri cenderung fluktuatif.

2.1.3.2.2 Rasio Kewirausahaan

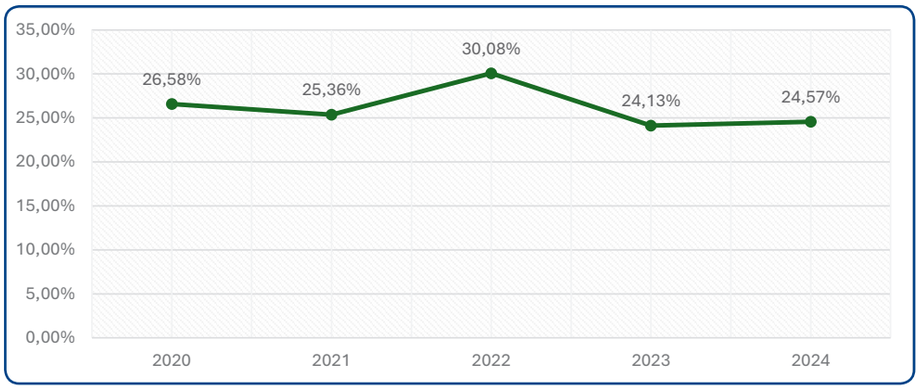
Rasio kewirausahaan merupakan indikator penting dalam mengukur dinamika perekonomian suatu daerah. Tingginya rasio ini mencerminkan besarnya proporsi penduduk usia produktif yang terlibat dalam kegiatan usaha, baik sebagai pemilik maupun pengelola. Indikator ini tidak hanya mengukur potensi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menggambarkan tingkat inovasi, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap peluang pasar. Untuk mengukur rasio kewirausahaan di Kabupaten Kediri digunakan *proxy* dengan menghitung rasio jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas (usia kerja) yang status pekerjaan utamanya meliputi: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; dibagi jumlah penduduk usia kerja. Capaian rasio kewirausahaan tersebut ditunjukkan oleh Gambar 2.42 berikut.

Berdasarkan data pada grafik, rasio kewirausahaan di Kabupaten Kediri menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 26,58%, kemudian mengalami penurunan menjadi 25,36% pada tahun 2021. Terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 yang mencapai 30,08%, namun kemudian kembali menurun menjadi

InUse Book 1.indb 88 10/19/2025 12:12:46 AM

GAMBAR 2.42
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)



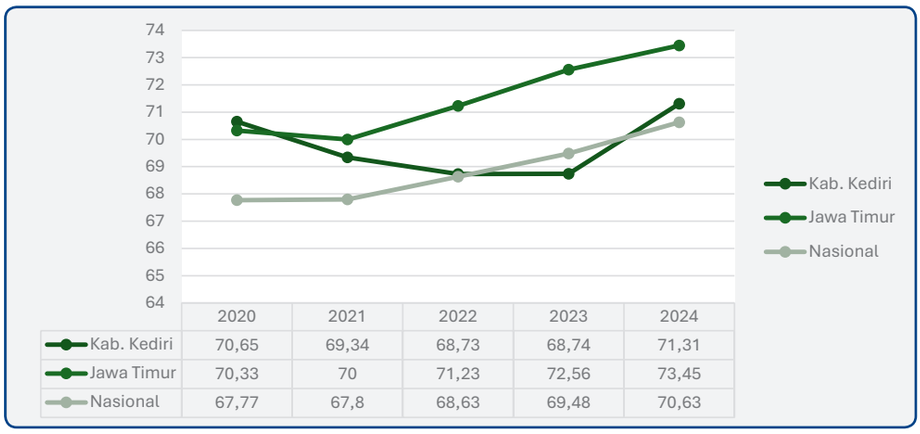
24,13% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, rasio kewirausahaan menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 24,57%. Secara keseluruhan, tren menunjukkan dinamika yang beragam dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 dan penurunan kembali pada dua tahun berikutnya.

2.1.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK. Faktor-faktor yang memengaruhi TPAK selain jumlah penduduk, seperti pendidikan, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Angka TPAK Indonesia mencapai 70,63 persen pada Agustus 2024. Angka tersebut naik 1,89 persen poin dari periode tahun sebelumnya (*year-on-year*/yoy), yakni di angka 68,74 persen. Adapun di Kabupaten Kediri pada tahun 2024, TPAK berada di angka 71,31 persen yang mana lebih tinggi dari capaian angka nasional.

GAMBAR 2.43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kediri	70,65	69,34	68,73	68,74	71,31
Jawa Timur	70,33	70	71,23	72,56	73,45
Nasional	67,77	67,8	68,63	69,48	70,63

Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kediri selama periode 2020 hingga 2024 mengalami penurunan dari awal periode hingga tahun 2022, kemudian meningkat signifikan pada 2024. Pada tahun 2020, TPAK mencapai 70,65 persen, kemudian terjadi penurunan pada tahun-tahun berikutnya. TPAK terendah terjadi pada tahun 2022 dengan angka 68,73 persen. Selanjutnya, TPAK meningkat sedikit pada tahun 2023 di angka 68,74 persen dan

InUse Book 1.indb 89 10/19/2025 12:12:47 AM

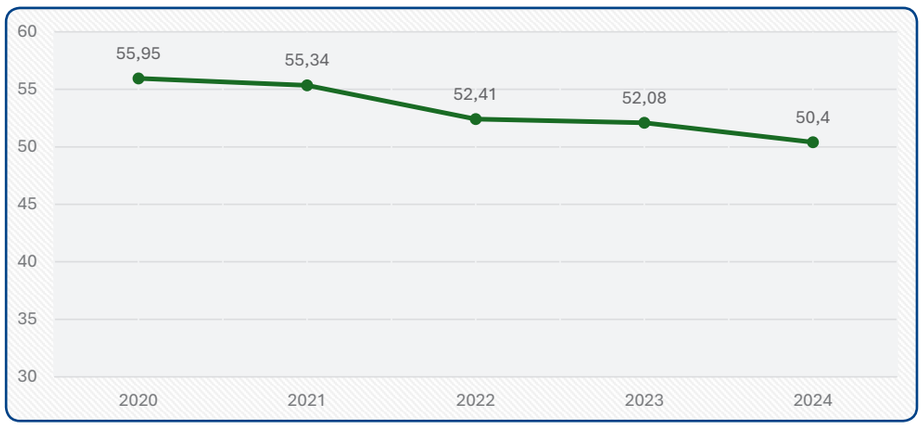
meningkat signifikan hingga sebesar 71,31 persen pada 2024. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, seperti perubahan dalam lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi regional, dan faktor-faktor demografi seperti pertumbuhan penduduk. Penurunan TPAK bisa mencerminkan dinamika ekonomi yang berubah di Kabupaten Kediri serta faktor-faktor lain, seperti investasi infrastruktur dan kebijakan ketenagakerjaan. Perlu diperhatikan bahwa penurunan TPAK bisa menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan untuk memastikan stabilitas dan peningkatan peluang kerja dalam jangka panjang. Peningkatan yang berkelanjutan dalam TPAK penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri.

2.1.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Menganalisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan penting karena mencerminkan sejauh mana perempuan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, yang berdampak pada inklusi ekonomi, pemanfaatan optimal potensi tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesetaraan gender di tempat kerja.

GAMBAR 2.44
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 55,95%, kemudian sedikit menurun menjadi 55,34% pada tahun 2021. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 52,41%, dan terus berlanjut menjadi 52,08% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, TPAK perempuan di Kabupaten Kediri mencapai angka terendah dalam periode tersebut, yaitu 50,4%. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan dinamika partisipasi perempuan dalam pasar kerja di Kabupaten Kediri selama lima tahun terakhir.

2.1.3.2.5 Indeks Inovasi Daerah

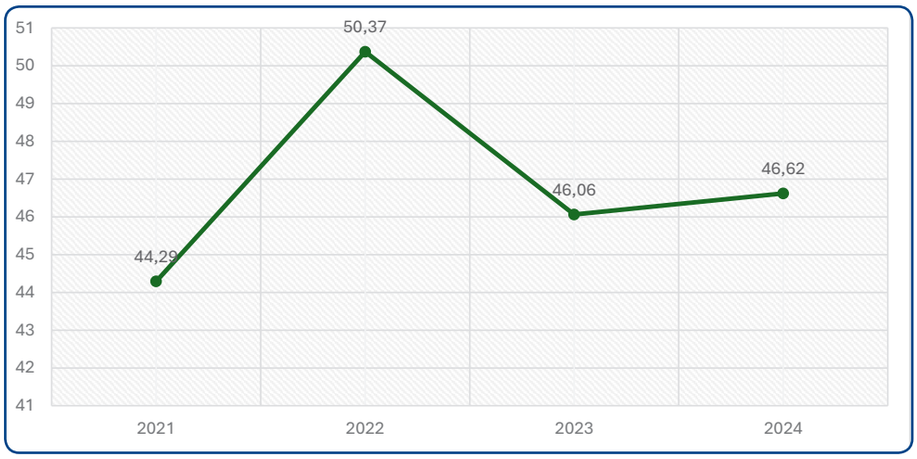
Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan tolok ukur komprehensif yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan mengimplementasikan inovasi di berbagai sektor pembangunan. Indikator ini tidak hanya mengukur *output* inovasi dalam bentuk produk atau layanan baru, tetapi juga mencerminkan ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembangnya

InUse Book 1.indb 90 10/19/2025 12:12:47 AM

budaya inovasi, mulai dari dukungan kebijakan, ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, hingga kolaborasi antarpemangku kepentingan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017, inovasi daerah mencakup semua bentuk pembaruan dalam administrasi pemerintahan daerah dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

GAMBAR 2.45
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024

Sumber: e-database. kemendagri.go.id



Data mengenai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Kediri dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 indeks inovasi daerah Kabupaten Kediri berada di angka 279. Pada tahun 2021, indeks inovasi daerah Kabupaten Kediri berada di angka 44,29 dan meningkat signifikan pada tahun berikutnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri telah efektif menerapkan prinsip-prinsip inovasi daerah, seperti efisiensi, efektivitas, peningkatan kualitas pelayanan, serta transparansi dan akuntabilitas. Mengacu pada data pada tahun 2023, terjadi inkonsistensi yang menyebabkan IID turun menjadi 46,06 meskipun kembali meningkat hingga mencapai 46,62 pada 2024. Perlu ada upaya perbaikan agar indeks inovasi daerah dapat meningkat secara konsisten. Indeks inovasi daerah Kabupaten Kediri tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan capaiannya dengan tahun 2021-2024 karena terdapat perubahan mekanisme baik dalam penilaian maupun penentuan batas/rentang skor pengategorian indeks inovasi daerah. Selain dengan indeks inovasi daerah disusun juga RIPJPID dengan tujuan untuk: (1) menjelaskan gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi daerah, (2) menetapkan dan menjelaskan tema prioritas riset dan inovasi di daerah, (3) menetapkan dan menjelaskan tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah, (4) menetapkan dan menjelaskan kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah, (5) menetapkan dan menjelaskan strategi riset dan inovasi di daerah, dan (6) menetapkan dan menjelaskan peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi daerah Kabupaten Kediri yang relevan, terpadu, dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya di Kabupaten Kediri, utamanya RPJMD dengan tema prioritas riset dan inovasi di daerah adalah percepatan dan penguatan bidang sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola berbasis riset dan inovasi di daerah sebagai upaya pemajuan IPTEK untuk pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.

InUse Book 1.indb 91 10/19/2025 12:12:47 AM

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.1.3.3.1 Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas lingkungan di suatu wilayah atau negara. Indeks ini menyajikan gambaran holistik tentang kondisi lingkungan, termasuk aspek-aspek seperti udara, air, tanah, flora, fauna, dan berbagai aspek lain yang memengaruhi keberlanjutan dan kualitas hidup.

IKLH dapat mencakup berbagai parameter dan indikator, seperti tingkat polusi udara, tingkat pencemaran air, keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, deforestasi, degradasi tanah, dan banyak lagi. Setiap indikator diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Kediri menunjukkan kecenderungan terus menurun seiring berjalannya waktu. Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan ini meliputi tingginya tingkat polusi udara dan air akibat pertumbuhan industri, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan mencakup penurunan kualitas udara dan air, kerusakan ekosistem, serta risiko kesehatan masyarakat yang semakin meningkat.

Untuk mengantisipasi penurunan nilai IKLH, diperlukan tindakan yang komprehensif. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait kontrol polusi dan pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan. Kampanye penyadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan juga sangat diperlukan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat dalam menjaga dan merestorasi lingkungan menjadi kunci untuk memperbaiki tren penurunan nilai IKLH di Kabupaten Kediri.

TABEL 2.26
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, 2023 dan LKjIP Kabupaten Kediri, 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	62,67	62,77	62,22	62,97	62,97
Indeks Kualitas Udara	77,38	76,68	80,94	86,12	94,31
Indeks Kualitas Lahan	37,42	37,34	39,34	40,49	39,34

2.1.3.3.2 PDRB Nonmigas

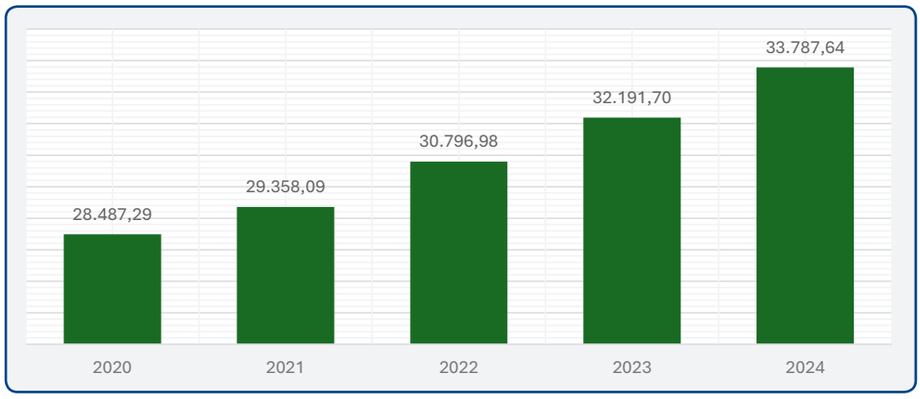
Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonmigas dapat menjadi proksi penting dalam mengukur penerapan ekonomi hijau di suatu wilayah. PDRB nonmigas mencerminkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di luar pertambangan minyak dan gas bumi. Peningkatan kontribusi sektor-sektor seperti pertanian organik, pariwisata berkelanjutan, industri pengolahan berbasis sumber daya terbarukan, energi terbarukan, serta jasa lingkungan dalam PDRB nonmigas mengindikasikan adanya pergeseran menuju praktik ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertumbuhan PDRB nonmigas yang didorong oleh sektor-sektor tersebut menandakan bahwa

InUse Book 1.indb 92 10/19/2025 12:12:47 AM

aktivitas ekonomi yang tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya fosil semakin dominan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Dengan demikian, tren dan komposisi PDRB nonmigas dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi hijau telah terintegrasi dan berkontribusi pada struktur ekonomi suatu wilayah.

GAMBAR 2.46
Perkembangan PDRB Nonmigas Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025



Berdasarkan data pada grafik, PDRB nonmigas Kabupaten Kediri menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai PDRB nonmigas tercatat sebesar 28.487,29 (dalam satuan mata uang yang tidak disebutkan). Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 29.358,09 pada tahun 2021; 30.796,98 pada tahun 2022; 32.191,70 pada tahun 2023; dan mencapai 33.787,64 pada tahun 2024. Tren positif ini mengindikasikan adanya pertumbuhan dan peningkatan kontribusi sektor-sektor ekonomi di luar pertambangan minyak dan gas bumi terhadap perekonomian Kabupaten Kediri selama lima tahun terakhir.

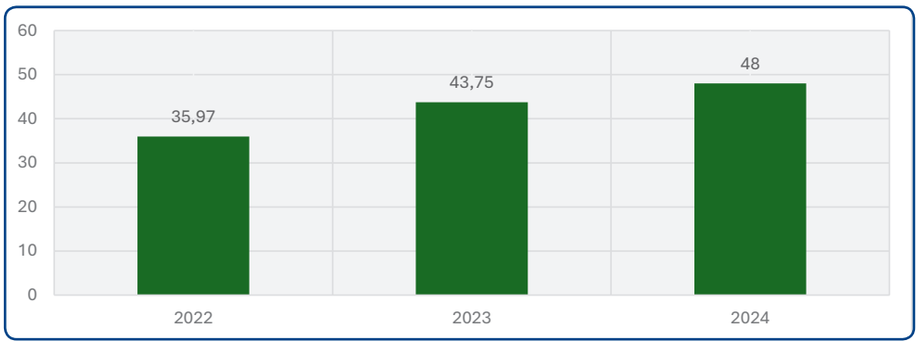
2.1.3.4 Transformasi Digital

2.1.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah sebuah indikator komposit yang dikembangkan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat digital di Indonesia. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang holistik mengenai bagaimana teknologi digital telah meresap dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks ini mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh digitalisasi, mulai dari akses, penggunaan, hingga dampak sosial dan ekonomi.

GAMBAR 2.47
Perkembangan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2025



InUse Book 1.indb 93
10/19/2025 12:12:48 AM

IMDI menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, nilai IMDI tercatat sebesar 35,97. Indeks ini kemudian mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 43,75 pada tahun 2023, dan terus meningkat mencapai 48 pada tahun 2024. Peningkatan IMDI ini mengindikasikan adanya kemajuan yang pesat dalam adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat di Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir, mencerminkan peningkatan dalam akses, penggunaan, literasi digital, serta dampak positif digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan.

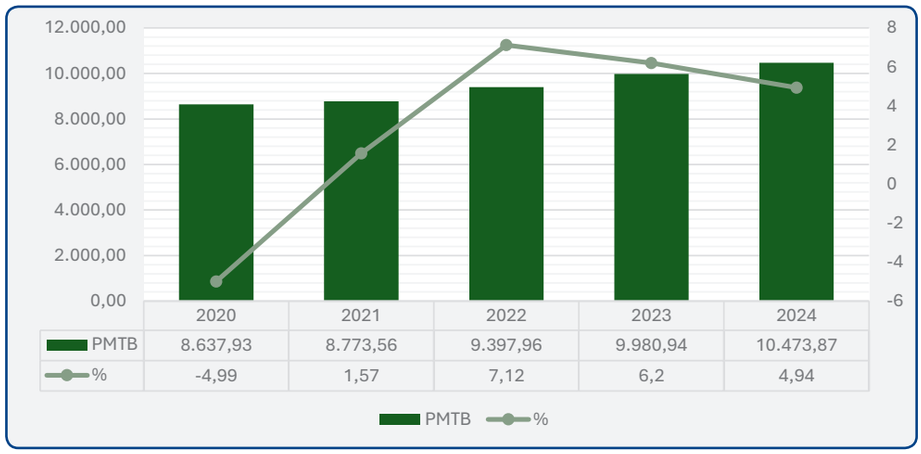
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Dosmetik dan Global

2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah penambahan atau pengurangan barang modal dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, mesin, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi dalam kurun waktu tertentu. Analisis PMTB sebagai persentase dari produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Kediri selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika investasi fisik yang menarik yang dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 2.48
Nilai dan Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB ADHK (Rp Miliar)

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025



Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kediri tahun 2025, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai salah satu komponen PDRB pengeluaran di Kabupaten Kediri menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2020 hingga 2024. Meskipun mengalami kontraksi sebesar -4,99% pada tahun 2020 dengan nilai PMTB sebesar Rp8.637,93 miliar, PMTB kemudian kembali tumbuh positif sebesar 1,57% pada tahun 2021 dengan nilai Rp8.773,56 miliar. Pertumbuhan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,12% dengan nilai Rp9.397,96 miliar, diikuti oleh pertumbuhan yang cukup kuat sebesar 6,2% pada tahun 2023 dengan nilai Rp9.980,94 miliar. Pada tahun 2024, pertumbuhan PMTB tercatat sebesar 4,94% dengan nilai mencapai Rp10.473,87 miliar. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan adanya peningkatan investasi dan pembentukan modal tetap yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri selama periode pengamatan.

Dalam kurun waktu 2020-2024, peranan PMTB terhadap PDRB bergerak fluktuatif. Jika dijabarkan yakni dari 32,82 persen pada tahun 2020 menjadi 31,88 persen (2021), dan 32,70 persen pada tahun 2022. Sementara itu, pada

InUse Book 1.indb 94 10/19/2025 12:12:48 AM

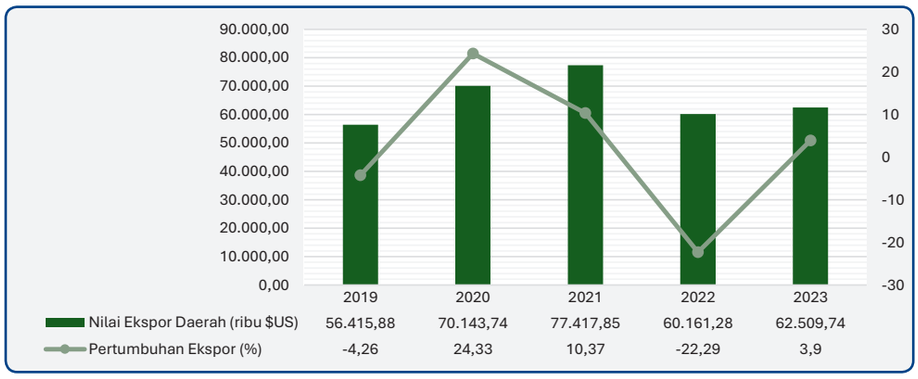
tahun 2023 dan 2024 peranan PMTB menjadi 32,94 dan 32,70 persen. Imbas dari pandemi Covid-19 mengakibatkan proyek pembangunan dan investasi sempat terhenti, sehingga pembentukan PMTB juga menurun. Struktur PMTB terbesar berasal dari PMTB bangunan dengan proporsi di atas 76 persen. Pada tahun 2020, peranan komponen sempat turun jika dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, yakni dari 76,33 persen menjadi 76,07 persen. Sebagian besar pelaku ekonomi baik pemerintah, swasta, maupun perorangan mengubah persepsi mereka pada penggunaan modal yang awalnya ditujukan untuk investasi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi di era pandemi. Seiring stablinya ekonomi, proses pembangunan infrastruktur kembali berjalan sehingga struktur PMTB bangunan mendekati sebelum tejadinya pandemi yaitu sebesar 76,62 persen pada tahun 2023 namun berkurang pada tahun 2024 menjadi 76,47 persen. PMTB yang stabil dan cenderung meningkat menunjukkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur dan kapasitas produksi, yang merupakan komponen terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDB. Menurut teori pertumbuhan Harrod-Domar, semakin banyak investasi yang dilakukan, semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, analisis PMTB penting untuk memahami bagaimana investasi fisik memengaruhi ekonomi wilayah dan merencanakan strategi yang dapat mendorong investasi lebih lanjut guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Kabupaten Kediri.

2.1.3.5.2 Net Ekspor

Perdagangan memegang peran vital dalam dinamika ekonomi suatu wilayah. Ekspor, sebagai salah satu komponen utama perdagangan, tidak hanya menjadi sumber pendapatan tetapi juga indikator kemampuan daya saing produk lokal di pasar. Kabupaten Kediri menunjukkan dinamika ekspor yang menarik selama periode 2019 hingga 2023.

GAMBAR 2.49
Nilai Ekspor Daerah dan Pertumbuhan Ekspor Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, 2024



Nilai ekspor daerah di Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi yang mencerminkan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perekonomian lokal. Dari tahun 2019 hingga 2021, nilai ekspor menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 77.417 ribu dolar Amerika. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup tajam sebesar -22,29%, sebelum kembali mengalami peningkatan sebesar 3,90% pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kinerja ekspor daerah, termasuk perubahan

InUse Book 1.indb 95 10/19/2025 12:12:48 AM

permintaan, kemampuan produksi lokal, serta kebijakan perdagangan yang diterapkan. Lebih lanjut berikut adalah perkembangan nilai ekspor menurut komoditas di Kabupaten Kediri.

TABEL 2.27
Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Berdasarkan Komoditas (USD) di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perdagangan, 2024

	2019	2020	2021	2022	2023
Ekspor					
Produk industri kertas	35.999.648,65	48.575.466,82	1.601.416,35	24.404.728,79	14.391.641,65
Produk berbahan kayu/triplek	18.092.190,04	19.318.849,65	73.172.726,75	32.853.106,84	44.956.413,82
Bahan kimia	-	-	-	-	-
Produk pertanian	31.570,50	104.118,50	80.294	75.061,82	1.324.741,23
Snack wafer chocolate	519.819,96	235.368,95	-	-	-
Bonggol jagung	1.772.653,94	1.909.932,76	2.563.412	2.820.850,54	1.836.952,68
Impor					
Bahan baku kertas/pulp	137.716.314,37	119.692.208,55	164.708.473	104.098.656,75	97.435.588,55
Bahan kimia	36.464.410,81	26.960.546,64	13.145.128,96	10.100.224,62	3.141.283,33
Spareparts	10.597.144,74	30.123.158,08	26.976.680,87	53.006.623,34	15.520.540,95
Lobak	210.736,00	359.981,58	-	119.600	-
Sawi	-	-	288.000,00	46.000	-
Bahan baku mur, baut, sekrup	911.857,57	326.145,27	156.539,40	118.631,11	75.492,29
Mesin pembuat roti/biskuit	-	-	-	-	-
Aksesoris	37.219,33	-	756,57	-	-
Produk berbahan kayu	445.224,81	289.222,84	1.223.699,92	661.034,82	-

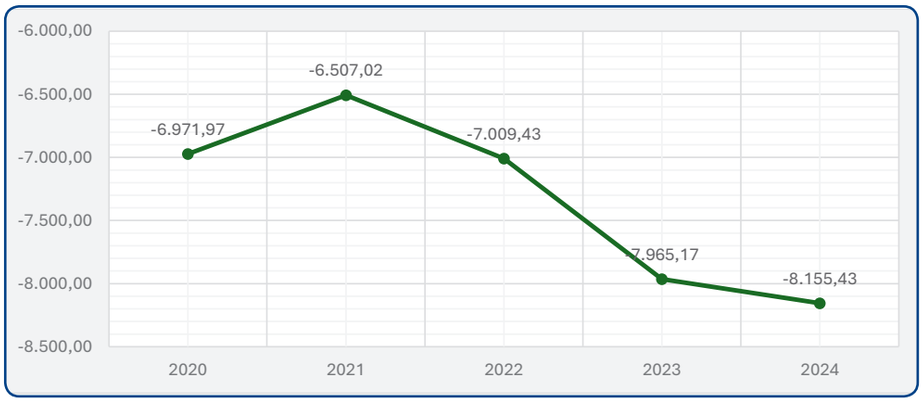
Produk yang diekspor oleh Kabupaten Kediri didominasi oleh produk berbahan kayu/triplek dan industri kertas untuk kertas rokok, menunjukkan potensi besar sektor industri pengolahan kayu di daerah ini. Selain itu, produk pertanian seperti bonggol jagung dan berbagai hasil pertanian lainnya juga turut berkontribusi dalam total nilai ekspor daerah. Diversifikasi produk ekspor ini mencerminkan upaya daerah dalam memanfaatkan potensi lokal untuk bersaing di pasar. Namun, meskipun terjadi peningkatan nilai ekspor, Kabupaten Kediri masih menghadapi tantangan besar berupa defisit net ekspor, di mana nilai impor selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor. Defisit ini mencerminkan ketergantungan daerah pada produk impor untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi lokal, serta menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan daya saing produk lokal.

Menganalisis net ekspor daerah penting karena memberikan gambaran mengenai keseimbangan ekonomi antara ekspor dan impor suatu wilayah. Net ekspor antardaerah didefinisikan sebagai selisih antara nilai ekspor dan impor antardaerah. Jika nilai ekspor lebih besar daripada impor, net ekspor akan bernilai positif, dan sebaliknya. Analisis ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan ekonomi daerah, serta mengarahkan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Berikut adalah capaian net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Kediri.

InUse Book 1.indb 96 10/19/2025 12:12:49 AM

GAMBAR 2.50
Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024



Selama tahun 2020-2024 nilai nominal net ekspor Kabupaten Kediri selalu bernilai negatif, yang artinya neraca antardaerah di Kabupaten Kediri mengalami defisit yang artinya nilai ekspor Kabupaten Kediri lebih rendah dari impor antardaerahnya. Pada tahun 2020 nilai net ekspor sebesar negatif 7.308,45 miliar rupiah, tahun 2020 nilai net ekspor sebesar negatif 6.971,97 miliar rupiah, kemudian negatif 6.507,02 miliar rupiah (2021), negatif 7.008,43 miliar rupiah (2022), negatif 7.965,17 miliar rupiah pada tahun 2023, dan negatif 8.155,43 miliar rupiah pada tahun 2024.

Komponen net ekspor merupakan gambaran aktivitas perdagangan luar wilayah. Di Kabupaten Kediri, komponen ini menunjukkan ekspor yang cenderung lebih rendah dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi "defisit" atau merugikan. Hal ini karena Kabupaten Kediri adalah bukan daerah sentra industri dan perdagangan, sehingga sebagian besar kebutuhan sehari-hari produk industri dan perdagangan didatangkan dari luar wilayah. Produk pertanian banyak mendominasi ekspor Kabupaten Kediri, seperti tanaman bahan makanan (khususnya cabai dan nanas), perkebunan (tebu dan kopi), perikanan (air tawar dan hias), dan peternakan (sapi potong dan ayam ras). Sedangkan produk industri yang merupakan pangsa ekspor adalah produk kertas rokok.

Untuk mengatasi defisit ini, dukungan terhadap sektor industri dan usaha lokal penting agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif dan memenuhi kebutuhan dalam wilayah serta diekspor ke luar daerah. Meningkatkan daya saing produk lokal melalui inovasi, peningkatan kualitas, dan perluasan pasar dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor, sehingga mengurangi defisit net ekspor antardaerah dan memperbaiki keseimbangan ekonomi di Kabupaten Kediri.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk mendukung berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Ketersediaan air bersih di suatu wilayah dapat mencerminkan tingkat daya

InUse Book 1.indb 97 10/19/2025 12:12:49 AM

saingnya. Data pada tabel di bawah menggambarkan jumlah pelanggan PDAM berdasarkan berbagai kategori konsumen, termasuk sosial khusus, sosial umum, rumah tangga, pelanggan khusus, niaga kecil, niaga besar, industri kecil, industri besar, dan kran umum.

Berdasarkan data dari Tabel 2.28, terdapat peningkatan jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Kediri. Jumlah pelanggan rumah tangga pada tahun 2019 adalah 13.596 rumah, meningkat menjadi 14.879 rumah pada tahun 2020; 15.002 rumah pada tahun 2021; 15.675 rumah pada tahun 2022; dan 16.439 rumah pada tahun 2023. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah pelanggan di instansi pemerintah, niaga, dan industri dalam periode yang sama.

TABEL 2.28
Jumlah Pelanggan Air Bersih di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023

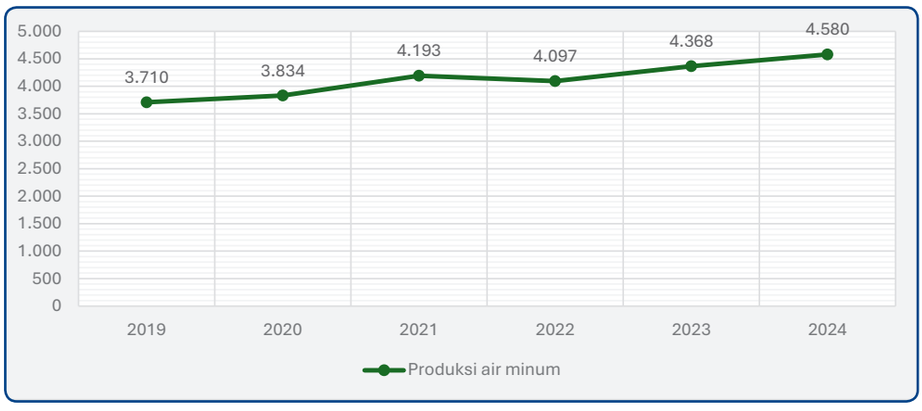
Sumber: PDAM Kabupaten Kediri, 2024

Aspek	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Sosial	Rumah	1.435	285	296	296	300
Rumah tangga	Rumah	13.596	14.879	15.002	15.675	16.439
Instansi pemerintah	Rumah	45	49	50	49	54
Niaga	Rumah	135	135	315	325	343
Industri	Rumah	2	2	1	0	1
Khusus	Rumah	3	2	0	0	3

Dalam konteks pengelompokan pelanggan yang sama seperti yang tertera pada tabel sebelumnya, PDAM Kediri memproduksi air sebanyak 3.710 ribu meter kubik pada tahun 2019. Jumlah air yang tersalurkan pada tahun 2020 sebanyak 3.834 ribu meter kubik. Pada tahun 2021, jumlah produksi air PDAM Kediri mencapai 4.193 ribu meter kubik, kemudian 4.097 ribu meter kubik pada tahun 2022, 4.368 ribu meter kubik di tahun 2023, dan 4.580 ribu meter kubik pada tahun 2024.

GAMBAR 2.51
Produksi Air Minum yang Disalurkan di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2024

Sumber: PDAM Kabupaten Kediri, 2024



2.1.3.6.2 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Energi dan sumber daya mineral termasuk dalam kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau *unrenewable resources*. Jenis sumber daya alam ini memerlukan waktu pemulihan yang sangat lama, sehingga penggunaannya harus dioptimalkan secara maksimal dan efisien. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti penggunaan listrik yang berasal dari sumber energi. Listrik merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan masyarakat karena perannya yang krusial dalam mendukung berbagai aktivitas, baik konsumsi maupun produksi.

InUse Book 1.indb 98 10/19/2025 12:12:49 AM

Berdasarkan data pada Tabel 2.29 yang memuat informasi tentang jumlah daya listrik PLN yang dihasilkan, terjadi peningkatan secara bertahap dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, jumlah daya listrik yang dihasilkan mencapai 838.179 kWh, meningkat menjadi 861.614 kWh pada tahun 2020, dan mencapai 916.660 kWh pada tahun 2021. Meskipun demikian, tercatat penurunan pada tahun 2022 menjadi 908.044 kWh dan meningkat menjadi 954.485 kWh pada tahun 2023 dan 1.017.541 kWh pada tahun 2024. Meskipun jumlah daya listrik yang dihasilkan meningkat, terdapat penurunan dalam penjualan daya listrik yang berdampak pada nilai penjualan. Informasi lebih lanjut terkait data ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 2.29
Jumlah Daya Listrik PLN Dibangkitkan, Susut, dan Terjual di Kabupaten Kediri Tahun 2019–2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2025

Aspek	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah daya listrik yang dibangkitkan	Juta kWh	838.179	861.614	916.660	908.044	954.485	1.017.541
Susut	kWh	65.797	50.144	59.191	29.745	73.860	77.638
Terjual	Juta kWh	772.382	811.470	857.469	878.299	880.624	939.903

2.1.3.6.3 Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Rumah tangga merupakan kelompok pengguna listrik terbesar di Kabupaten Kediri. Data yang terdapat dalam Tabel 2.30 menunjukkan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Penyaluran listrik kepada rumah tangga terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan pertumbuhan area permukiman dan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2020, jumlah pelanggan listrik mencapai 395.878 rumah tangga, mengalami peningkatan menjadi 410.828 rumah tangga pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah rumah tangga pelanggan mencapai 414.793, kemudian pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 383.474 rumah tangga dan meningkat lagi menjadi 439.669 rumah tangga pada tahun 2024.

TABEL 2.30
Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Kediri Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

Aspek	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah tangga	Rumah	395.878	410.828	414.793	383.474	439.669

2.1.3.6.4 Desa Mandiri

Indeks Desa (ID) adalah indeks komposit dari tiga sub-indeks, yakni: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi desa. ID bertujuan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dasar bagi pembangunan desa. Desa mandiri adalah desa maju yang mampu melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan. Desa maju memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Berikut adalah persentase desa maju dan mandiri di Kabupaten Kediri pada tahun 2019–2024.

InUse Book 1.indb 99 10/19/2025 12:12:49 AM

TABEL 2.31
Capaian Desa Maju dan Desa Mandiri Kabupaten Kediri Tahun 2019-2024

Sumber: Katalog Satu Data Indonesia, 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Mandiri	0	1	7	31	50	87
Jumlah Desa Maju	81	91	125	187	240	236
Jumlah Desa	343	343	343	343	343	343
% Desa Mandiri	0%	0%	2%	9%	15%	25%
% Desa Maju dan Mandiri	24%	27%	38%	64%	85%	69%

Persentase desa mandiri dan desa maju di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, tidak ada desa yang mencapai status mandiri (0%), dan hanya 24% desa yang termasuk dalam kategori desa maju. Tahun 2020, jumlah desa mandiri tetap minim dengan hanya 1 desa (0%), namun desa maju meningkat menjadi 27%. Pada tahun 2021, desa mandiri bertambah menjadi 2%, dan desa maju dan mandiri mencapai 38%. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan lebih lanjut dengan 9% desa mandiri dan 64% desa maju dan mandiri. Pada tahun 2023, 15% desa telah menjadi mandiri, dan 85% desa termasuk dalam kategori desa maju atau mandiri. Mulai tahun 2025, indeks desa mandiri berubah menjadi indeks desa. Meskipun demikian, masih terdapat desa yang dalam kondisi berkembang, yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan. Peningkatan jumlah desa maju dan mandiri penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

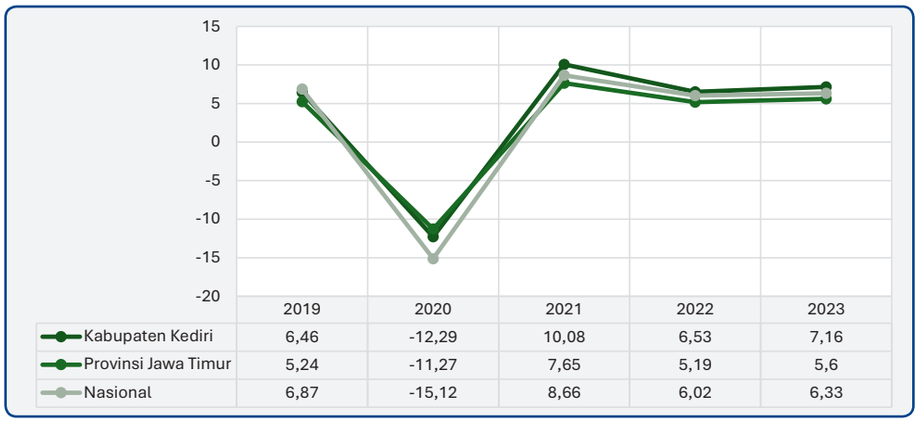
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efisiensi investasi di suatu wilayah, yang mengukur seberapa banyak tambahan modal yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit *output*. Berikut adalah nilai ICOR dari Kabupaten Kediri dibandingkan dengan provinsi dan nasional.

GAMBAR 2.52
Nilai ICOR Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2024



Selama periode 2019-2023, Kabupaten Kediri menunjukkan efisiensi investasi yang umumnya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional. Pada tahun 2019, ICOR Kabupaten Kediri tercatat sebesar 6,46 yang lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur yang berada pada 5,24, serta

InUse Book 1.indb 100 10/19/2025 12:12:50 AM

sedikit lebih baik dibandingkan dengan angka nasional 6,87. Pada tahun 2020, nilai ICOR Kediri (-12,29) dan nasional (-15,12) keduanya negatif, mencerminkan dampak pandemi yang signifikan. Meskipun ICOR Kabupaten Kediri sedikit lebih baik dari nasional, keduanya menunjukkan efisiensi investasi yang sangat rendah. Pada tahun 2021, ICOR Kabupaten Kediri melonjak menjadi 10,08 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur (7,65) dan nasional (8,66), menunjukkan bahwa efisiensi investasi masih kurang optimal. Tahun 2022 terlihat penurunan ICOR di Kabupaten Kediri menjadi 6,53, namun tetap lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur (5,19) dan nasional (6,02), menunjukkan perbaikan namun efisiensi investasi yang masih di bawah rata-rata. Pada tahun 2023, ICOR Kabupaten Kediri naik menjadi 7,16 masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur (5,60) dan nasional (6,33), menandakan perlunya peningkatan lebih lanjut dalam pengelolaan investasi untuk mencapai efisiensi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan rata-rata nasional, Kabupaten Kediri menunjukkan efisiensi investasi yang lebih rendah sepanjang periode 2019-2023. Meskipun ada fluktuasi dan perbaikan dari tahun ke tahun, ICOR Kabupaten Kediri tetap lebih tinggi, mengindikasikan bahwa untuk mencapai *output* yang sama, Kabupaten Kediri membutuhkan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Upaya untuk meningkatkan efisiensi investasi di Kabupaten Kediri perlu menjadi prioritas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

2.1.3.7.2 Tingkat Kriminalitas

Stabilitas dan keamanan daerah adalah faktor penting yang mendukung iklim investasi yang baik. Keamanan dan ketertiban di suatu daerah menjadi hal yang krusial. Tingkat kriminalitas, yang merupakan perbandingan antara jumlah kejadian kriminal terhadap jumlah penduduk di suatu daerah, merupakan indikator utama dalam menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah angka kriminalitas, semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Berikut adalah tabel yang menunjukkan risiko kejadian tindak pidana per 100.000 penduduk.

TABEL 2.32
Kriminalitas - Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk Berdasarkan Kepolisian Resort di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2024

Tahun	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk
2019	77
2020	57
2021	51
2022	4
2023	28
2024	69

Sumber: Kepolisian Resort Kabupaten Kediri, 2024

Menurut data yang tersedia dari tahun 2019 hingga 2023, terjadi penurunan yang signifikan dalam risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2024, angka ini turun menjadi 69 per 100.000 penduduk dari 77 per 100.000 penduduk pada tahun 2019.

InUse Book 1.indb 101 10/19/2025 12:12:50 AM

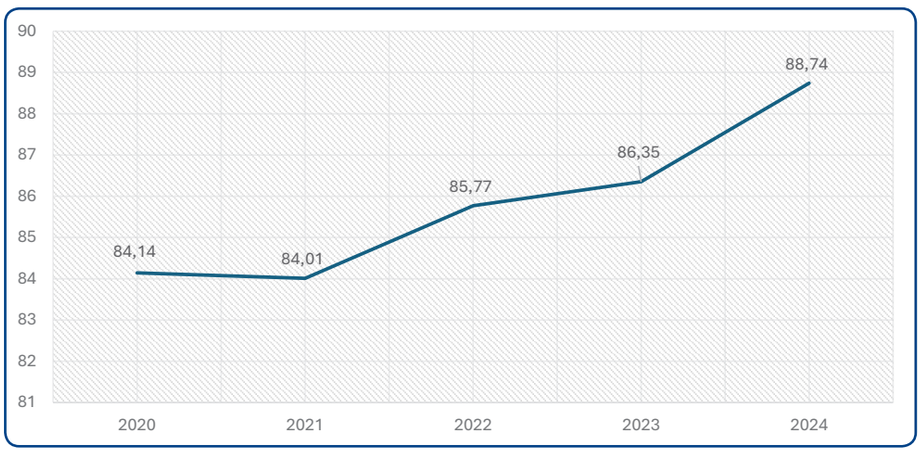
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik terpadu berbasis digital. Kabupaten Kediri mendapatkan nilai indeks SPBE 4,27 di tahun 2024, menempatkannya pada posisi ke-7 di tingkat nasional. Pada tahun 2025 di bulan Januari, Kabupaten Kediri mendapat nilai indeks SPBE sebesar 4,63. Sebuah peningkatan yang menjadikannya sebagai daerah dengan indeks SPBE tertinggi kedua di tingkat nasional.

Selanjutnya, Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi, dan inovasi. Penilaian IPP dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pemantauan kinerja, yang hasilnya kemudian digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Adapun dalam segi rapor kepatuhan pemda terhadap UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Kabupaten Kediri menempati ranking ke-3 dari 14 pemkab/pemkot di Jawa Timur yang masuk zona hijau dengan skor 84,15 pada tahun 2022.

GAMBAR 2.53
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kediri Tahun 2020–2024



Ditinjau berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), terdapat pertumbuhan yang berarti pada tahun 2021 hingga 2024. Kabupaten Kediri mendapatkan nilai 84,01 di tahun 2021 yang merupakan penurunan dari tahun sebelumnya, kemudian tumbuh hingga menyentuh angka 86,35 di tahun 2023 dan 88,74 di tahun 20234. Perlu digarisbawahi apabila IKM adalah indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, maka IPP adalah indeks yang lebih luas yang mencakup evaluasi terhadap kinerja dan kualitas pelayanan publik.

InUse Book 1.indb 102 10/19/2025 12:12:50 AM

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kesatuan bangsa dan politik memiliki tugas membangun masyarakat dengan wawasan kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, demokratis, serta kerukunan antarumat beragama, untuk melindungi dari ancaman disintegrasi bangsa. Dalam periode 2021 hingga 2023, perkembangan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kediri menunjukkan beberapa perubahan.

TABEL 2.33
Perkembangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2019-2024
Sumber: Bakesbangpol, 2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Peserta Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Orang)	400	224	100	100	100	100
% Penanganan Konflik Berlatar Belakang Agama yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
% Penyelenggaraan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	-	-	100	100	100	100
% Penanganan Kejadian Konflik Terkait Poleksosbud dan Ketertiban Masyarakat	100	100	100	100	100	100
% Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih	68	65,24	65	65	65	72
% Peningkatan Ormas/LSM yang Terdaftar	7,11	7,77	8,11	8,7	8,11	8,77

Pada periode 2019–2023, Kabupaten Kediri menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kerukunan dan kepedulian sosial antarumat beragama dan kelompok masyarakat. Selama periode 2021–2023, capaian untuk peserta kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik berlatar belakang agama, penyelenggaraan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), serta penanganan konflik terkait poleksosbud dan ketertiban masyarakat mencapai 100%. Ini menandakan bahwa Kabupaten Kediri berhasil secara konsisten dalam mengelola kerukunan dan konflik sosial.

Tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih tetap stabil di angka 65% dari tahun 2021 hingga 2023. Namun, terdapat fluktuasi dalam peningkatan ormas/LSM yang terdaftar, dengan persentase peningkatan mencapai 8,7% pada tahun 2022, namun sedikit menurun menjadi 8,11% pada tahun 2023. Fluktuasi ini mungkin terkait dengan perubahan regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengenai pendaftaran ormas dan LSM.

Perkembangan infrastruktur politik di Kabupaten Kediri menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan. Jumlah partai politik, partai politik peserta pemilu, ormas profesi, ormas keagamaan, dan ormas kepemudaan tetap stabil atau mengalami sedikit perubahan. Namun, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengalami peningkatan yang signifikan dari 126 pada tahun 2021 menjadi 155 pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik dan sosial.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan sebuah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam bersaing ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari indeks ini adalah untuk memberikan

InUse Book 1.indb 103 10/19/2025 12:12:50 AM

gambaran mengenai kondisi serta potensi daya saing suatu daerah dalam berbagai aspek, termasuk faktor ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan dan tata kelola pemerintah daerah. IDSD menggabungkan perspektif mikro di tingkat perusahaan/industri dan perspektif makro di tingkat institusi publik. Konseptualnya, pengukuran daya saing ini dibagi menjadi tiga faktor utama, yaitu: faktor ketersediaan kebutuhan fundamental, faktor penguat efisiensi, dan faktor inovasi dan kecanggihan. Ketiga faktor ini tercermin dalam 12 pilar daya saing yang dianalisis dalam indeks tersebut. Berikut adalah capaian indeks daya saing daerah tiap pilar di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 hingga 2024.

TABEL 2.34
Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022-2024
Sumber: BRIN, 2024

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	4,23	2,34	3,09	2,97	4,08	2,8	3,07	2,29	3,66	1,93	5	1,8	3,1
2023	4,22	3,02	4,38	3,24	4,07	3,34	3,06	3,1	2,69	4,6	2,58	2,39	3,39
2024	4,88	3,73	4,46	3,79	4,03	3,88	3,55	3,15	2,22	4,63	4,52	2,9	3,81

Indeks ini terdiri dari berbagai pilar yang mencakup lingkungan pendukung, SDM (sumber daya manusia), pasar, ekosistem inovasi, dan lain-lain. Pada tahun 2022, Kabupaten Kediri mencatat skor IDSD sebesar 3,10. Sementara itu, pada tahun 2023, skor IDSD Kabupaten Kediri mengalami peningkatan sebesar 0,29 poin menjadi 3,39. Peningkatan lebih besar, yakni 0,42 terjadi di tahun 2024 dengan skor akhir IDSD sebesar 3,81. Hampir seluruh pilar mengalami kenaikan selama dua tahun. Perubahan yang paling besar ada di pilar 11 yang berubah dari skor 5 menjadi 2,58 di tahun 2023, kemudian meningkat kembali menjadi 4,52 di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh perubahan atau penyesuaian metodologi evaluasi IDSD yang dikeluarkan. Lebih lanjut untuk mengetahui capaian Kabupaten Kediri dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional dibuat tabel sebagai berikut.

TABEL 2.35
Perbandingan 12 Pilar IDSD Kabupaten Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional

Sumber: Laporan Indeks Daya Saing Daerah oleh BRIN, 2024

Pilar		Kabupaten Kediri	Jawa Timur	Nasional
Lingkungan Pendukung	Pilar 1: Institusi	4,88	4,73	4,18
	Pilar 2: Infrastruktur	3,73	4,51	2,97
	Pilar 3: Adopsi TIK	4,46	3,95	3,47
	Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	3,79	4,2	3,99
Sumber Daya Manusia	Pilar 5: Kesehatan	4,03	3,93	3,76
	Pilar 6: Keterampilan	3,88	4,01	3,91
	Pilar 7: Pasar Produk	3,55	2,16	2,57
	Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	3,15	2,78	3,03
Pasar	Pilar 9: Sistem Keuangan	2,22	2,4	2,76
	Pilar 10: Ukuran Pasar	4,63	5	4,35
Ekosistem Inovasi	Pilar 11: Dinamisme Bisnis	4,52	4,24	3,06
	Pilar 12: Kapabilitas Inovasi	2,9	4,63	3,13
SKOR IDSD		3,81	3,88	3,43

Keterangan

- Capaian Lebih Rendah dari Nasional
- Capaian Lebih Rendah dari Provinsi
- Capaian Lebih Rendah dari Nasional dan Provinsi

InUse Book 1.indb 104 10/19/2025 12:12:50 AM

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kediri tahun 2024 menunjukkan skor keseluruhan sebesar 3,81 yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan skor Jawa Timur sebesar 3,88, namun lebih tinggi dibanding capaian nasional. Dalam pilar institusi, mulanya di tahun 2023 Kabupaten Kediri mencatat skor 4,22 lebih tinggi dari Jawa Timur (4,14) namun masih sedikit di bawah rata-rata nasional (4,3), menunjukkan kekuatan dalam modal sosial dan transparansi pemerintah yang baik. Peningkatan pada aspek ini ditunjukkan dengan naiknya skor Kabupaten Kediri di atas capaian nasional dan provinsi pada tahun 2024. Pada pilar infrastruktur, Kabupaten Kediri mencatat skor 3,73 yang lebih rendah dari Jawa Timur (4,51), namun lebih baik dari rata-rata nasional (2,97), menandakan perlunya peningkatan infrastruktur transportasi dan utilitas di daerah.

Kabupaten Kediri unggul dalam adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan skor 4,46 lebih tinggi dari Jawa Timur dan nasional, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengguna internet dan jangkauan jaringan 4G. Namun, dalam stabilitas ekonomi makro, skor 3,79 di Kabupaten Kediri lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur dan nasional, menunjukkan perlunya kebijakan fiskal yang lebih baik dan peningkatan investasi untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah. Adapun skor kesehatan Kabupaten Kediri cukup tinggi pada 4,03 lebih tinggi dari Jawa Timur dan nasional, menunjukkan layanan kesehatan yang baik dan harapan hidup yang tinggi.

Dalam pilar keterampilan, Kabupaten Kediri mencatat skor 3,88 yang lebih rendah dari Jawa Timur dan nasional, sehingga ada kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Pasar produk di Kabupaten Kediri mencatat skor lebih tinggi dari nasional dan Provinsi Jawa Timur yang berarti persaingan sektor jasa yang baik. Pasar tenaga kerja Kabupaten Kediri dengan skor 3,15 telah meningkat dengan stabil dibandingkan capaian nasional dan provinsi, terutama dalam fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja.

Sistem keuangan di Kabupaten Kediri mencatat skor 2,22 lebih rendah dari Jawa Timur dan nasional yang menandakan meski terdapat potensi yang baik, namun masih membutuhkan perbaikan dalam akses kredit dan investasi. Ukuran pasar Kabupaten Kediri mencatat skor 4,63 mendekati skor provinsi (5) dan lebih tinggi dari nasional (4,35), menunjukkan potensi besar untuk penguatan struktur industri. Namun, kapabilitas inovasi dengan skor 2,9 menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri masih perlu meningkatkan biaya dan waktu untuk memulai usaha serta mendorong penelitian dan pengembangan, kreativitas, dan inovasi.

Secara keseluruhan, perbaikan skor IDSD Kabupaten Kediri tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun performa beberapa pilar masih di bawah skor nasional dan provinsi. Kebijakan dan strategi guna meningkatkan daya saing di bidang infrastruktur, keterampilan, dan kapabilitas inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan penting untuk dilakukan.

2.1.4.4 Urusan Pemerintahan Wajib

Ditinjau berdasarkan capaian pada urusan pemerintahan wajib yang diambil dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) *outcome*, maka gambaran pembangunan pada periode sebelumnya dijabarkan sebagai berikut.

InUse Book 1.indb 105 10/19/2025 12:12:50 AM

InUse Book 1.indb 106

TABEL 2.36
Capaian Indikator Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Pendidikan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase satuan pendidikan SD yang terakreditasi A	26,10%	17,54%	18,49%	16,81%	16,31%
Persentase satuan pendidikan SMP yang terakreditasi A	56,60%	48,65%	36,54%	32,19%	58,59%
Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	N/A	N/A	63,70%	79,18%	84,34%
Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	N/A	N/A	39,29%	62,12%	78,68%
Persentase satuan PAUD yang terakreditasi	30,70%	37,61%	73,02%	85,68%	83,02%
Cakupan pelayanan pendidikan nonformal/kesetaraan	44,00%	53,89%	75,25%	94,06%	97,37%
Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	6,50%	27,28%	38,71%	28,21%	61,29%
Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasio guru satuan SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan terhadap peserta didik SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	01:17	01:19	01:16	01:16	01:17
Persentase kelayakan izin operasional SD, SMP, PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase pemuda yang dibina/dilatih	50,00%	50,00%	55,36%	55,25%	60,00%
Persentase atlet pelajar yang dibina/dilatih	0,00%	66,67%	61,02%	62,35%	68,00%
Kesehatan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nomenklatur program dan indikator program berbeda	78%	80%	90%	100%
Persentase kecamatan STBM		0%	0%	0%	4%
Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi		41,60%	41,60%	73,30%	80%
Indeks keluarga sehat		0,15	0,2	0,25	0,33
Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi		73,30%	78,50%	100%	100%
Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin		29%	13,50%	27,10%	42%
AKI		138,46	57	54,11	68,42
AKB		7,16	6,4	4,49	3,86
Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan		70%	70%	100%	35%
Persentase pemberian rekomendasi apotek, TO, TK. ALKES dan OPTIKAL, UMOT		100%	100%	75%	100%
Persentase produk makanan minuman tertentu yang bersertifikat P-IRT		100%	100%	100%	100%
Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)		83%	44%	59%	41%

10/19/2025 12:12:50 AM

InUse Book 1.indb 107

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
RSUD SLG					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	96,72%	79,59%	81,14%	89,11%	82%
Persentase tersedianya peralatan dan mesin di RS	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai akreditasi rumah sakit			Paripurna	Paripurna	Paripurna
Persentase realisasi anggaran Jamkesda		99,99%	99,99%		
Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%
RSUD Kabupaten Kediri					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	84,96%	93,40%	80,28%	96,67%	91,90%
Nilai akreditasi rumah sakit			Paripurna (85%)	Paripurna (85%)	Paripurna (99,43%)
Persentase tersedianya peralatan dan mesin di RS	84,81%	91,45%	92,97%	0%	94,74%
Persentase realisasi anggaran Jamkesda	0%	71,71%	100%	0%	0%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	N/A	91,25%	94,08%	96,28%	94,82%
Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,24%	76,61%	74,68%	69,17%	80,79%
Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	86,94%	88,63%	87,99%	79,08%	86,99%
Cakupan penyelesaian peraturan tata ruang	N/A (INDIKATOR BERBEDA)	N/A (INDIKATOR BERBEDA)	31,25%	62,50%	100%
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase rumah tangga/KK mendapatkan akses air melalui SPAM	83,22%	84,89%	85,23%	86%	86,08%
Persentase pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	N/A	N/A	38,88%	72,22%	72,22%
Cakupan pelayanan SPALD yang aman	N/A	N/A	2,39%	16,67%	41,11%
Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	N/A	N/A	100%	100%	100%
Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki izin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	95,50%	96,50%	96,50%	100%	100%
Pertanahan					
Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah	N/A	N/A	100%	100%	100%
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
Satpol PP					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%

10/19/2025 12:12:50 AM

InUse Book 1.indb 108

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan layanan kasus penanganan bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
Suburusan Bencana					
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat ketersediaan kajian risiko bencana kabupaten	1	1	1	1	1
Sosial					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Pesentase pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial	100%	100%	59%	98%	100%
Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	30%	0	0	25%
Persentase PPKS yang mendapat program rehabilitasi sosial	195,07%	100%	189%	120%	99%
Persentase pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial	119,78%	98,20%	108%	264%	98%
Persentase penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	96%
Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional/kabupaten/kota	Belum ada program	100%	100%	100%	100%
Tenaga Kerja					
Transmigrasi					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	98,65%	83,23%
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	4,46%	13,51%	0,07%	15,15%	15,35%
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	94,44%	97,90%	91,49%	91,99%	91,43%
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100%	6,81%	3,96%	5,09%	5,29%
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	-	-	30%	10%	14,29%
Pangan					
Pertanian					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	1 rumusan	1 rumusan	1 rumusan	1 rumusan	1 rumusan
Koefisien variasi harga pangan utama	10%	10%	10%	10%	10%
Skor pola pangan harapan	94	91,5	92	94,4	91,2
Jumlah cadangan pangan masyarakat	194,71 ton	219,97 ton	216,04 ton	220,5 ton	242,34 ton
Jumlah penanganan desa rentan pangan	3 desa	2 desa	2 desa	4 desa	38 desa

10/19/2025 12:12:51 AM

InUse Book 1.indb 109

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase keamanan pangan segar	80,00%	86,96%	78,57%	100,00%	100,00%
Produktivitas ternak					
- *Service per Conception*	1,3	1,37	1,6	1,6	1,58
- *Calving Interval*	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan
- *Conception Rate*	79,8%	81,80%	75,90%	74%	70%
Jumlah SPR yang terbentuk	4 SPR	4 SPR	4 SPR	4 SPR	4 SPR
Cakupan pemanfaatan prasarana peternakan dan kesehatan hewan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penanganan kasus penyakit hewan	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah unit usaha produk hewan yang tersertifikasi NKV	5 unit	8 unit	8 unit	7 unit	20 unit
Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan bersertifikat BPOM	-	-	-	-	-
Persentase toko obat hewan yang berizin	-	-	-	-	-
Lingkungan Hidup					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan LH	N/A	50%	67%	83,30%	83,33%
Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	N/A	75,00%	76,19%	100,00%	66,67%
Persentase ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	N/A	0,034%	0,0350%	0,03%	0,0364%
Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait pengelolaan limbah B3	N/A	90 usaha/ kegiatan	178 usaha/ kegiatan	163 usaha/ kegiatan	274 usaha/ kegiatan
Persentase usaha dan/atau kegiatan berizin lingkungan dan PPLH yang dibina	N/A	68,87%	88%	108%	88,89%
Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina	N/A	0	0	0	0
Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH	N/A	12,50%	15,90%	23,76%	71,13%
Jumlah *event* penghargaan lingkungan hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	N/A	1 kali	2 kali	3 kali	1 kali
Persentase aduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan	N/A	100%	100%	100%	100%
Persentase sampah yang dikelola	N/A	25,55%	20,73%	29,68%	31,67%
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Kepemilikan dokumen kependudukan					
KTP	96,64%	97,71%	97,13%	97,53%	99,73%
KK	80,53%	91,87%	95,90%	99,87%	99,64%
KIA	23,26%	35,05%	40,63%	47,41%	55,47%

10/19/2025 12:12:51 AM

InUse Book 1.indb 110

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan kepemilikan dokumen akta catatan sipil					
Akta kelahiran	98,36%				
Akta kelahiran 0-18			94,38%	95,52%	96,71%
Akta perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan kualitas pelayanan Adminduk	100%	100%	100%	100%	100%
Tersusunnya buku profil kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat penyelenggaraan penataan desa		4 desa	5 desa	10 desa	3 desa
Persentase kerja sama antara desa yang terfasilitasi	7,5% (26 desa)	7,5% (26 desa)	86,8% (298 desa)	86,8% (298 desa)	86,8% (298 desa)
Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	100% (343 desa)	100% (343 desa)	100% (343 desa)	100% (343 desa)	100% (343 desa)
Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang dibina	100% (343 desa)	100% (343 desa)	100% (343 desa)	100% (343 desa)	100% (343 desa)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	-	80%	100%	100%	100%
Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	-	100%	100%	100%	100%
Persentase *unmeet need*	10,56%	11,27%	12,02%	10,54%	7,90%
Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	-	BKB 30,24%; BKR 24,05%; BKL 33,42%	BKB 30,90%; BKR 19,59%; BKL 24,86%	BKB 34,20%; BKR 18,80%; BKL 28,57%	BKB 35,87%; BKR 30,15%; BKL 37,09%
Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	17,77%	16,10%	15,61%	15,43%	12,63%
Persentase OPD yang responsif gender		80%	100%	100%	100%
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A	100%	100%	100%	100%	100%
Peresentase kegiatan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang dilaksanakan di tingkat desa	-	100%	100%	100%	87%
Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	100%	100%	100%	100%	100%
Perhubungan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	99,57%	95,87%	97,98%	97,86%	94,87%
Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan	0	0	20%	40%	60%
Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	106,12%	3,76%	14,68%	21,4%	33,39%

10/19/2025 12:12:51 AM

InUse Book 1.indb 111

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	86%	86,24%	79,66%	98,57%	87,7%
Persentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	96,74%	96,37%	95,5%	94,31%	92,17%
Komunikasi dan Informatika					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persandian					
Cakupan keamanan persandian dan TI	46%	47%	48%	49%	77%
Statistik					
Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah			100%	100%	100%
Koperasi, Usaha Mikro					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi	5%	13,90%	15,87%	20,67%	17,78%
Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang cukup sehat	1,00%	1,23%	16,29%	14,89%	2,92%
Persentase SDM koperasi terlatih	0,09%	0,28%	0,35%	0,37%	0,16%
Persentase partisipasi koperasi aktif	18,44%	12,67%	20,14%	28,22%	34,49%
Persentase partisipasi usaha mikro	13%	15,68%	25,17%	24,96%	24,41%
Persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya	2,24%	4,37%	8,35%	9,43%	8,42%
Penanaman Modal					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	100%	100%
Persentase pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal		40%	25%	25%	25%
Persentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan		133%	100%	100%	100%
Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu		100%	100%	100%	100%
Persentase kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman		88,71%	159,88%	101,76%	101,76%
Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		100%	100%	100%	100%
Kearsipan					
Perpustakaan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat tertib pengelolaan arsip OPD	49,28%	51,43%	24,64%	68,06%	93,50%
Persentase autentisitas arsip statis yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perpusatakaan yang terkelola dengan baik				17,04%	51,37%

10/19/2025 12:12:51 AM

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kelautan dan Perikanan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah produksi perikanan budi daya					
Pembesaran (ton)	21.553,00	22.354,94	23.094,15	23.996,40	24.687,82
Ikan hias (ribu ekor)	320.020,00	335.815,00	352.599,80	369.804,79	388.412,00
Benih (juta ekor)	20.345,00	20.936,976	21.114,356	21.457,55	21.544,63
Cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan umum darat	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah konsumsi asal ikan (kg/kapita/tahun)	30,22	33,72	42,02	46,33	47
Pariwisata					
Kebudayaan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase peningkatan objek dan daya tarik wisata	67,35%	4,87%	2,32%	6,97%	10,96%
Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar	580,00%	8,5%	2,772%	1,867%	2,752%
Lama tinggal (*length of stay*) wisatawan di Kabupaten Kediri	-	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari
Persentase peningkatan grup kesenian yang dberdayakan	0%	0%	219,63%	276%	122,69%
Persentase peningkatan budaya lokal yang dilestarikan	110,00%	38,46%	4,34%	21,73%	21,73%
Persentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	30,77%	0%	5,80%	33,30%	22,22
Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	-	100%	100%	100%	100%
Persentase CB yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase sarpras museum yang dipelihara	-	100%	100%	100%	100%
Pertanian					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kelompok tani yang dilakukan *monitoring* dalam pemanfaatan sarana pertanian	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	77,26%	78,65%	79,65%	81,09%	82,21%
Jumlah desa yang melaksanakan inovasi tani organik	18	30	49	89	93
Persentase prasarana pertanian dengan kondisi baik	70%	71%	72%	73%	74%
Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian (serangan OPT)	88,47%	91%	92%	93%	94%
Cakupan bina kelompok tani	100%	100%	100%	100%	100%
Perdagangan					
Perindustrian					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	87,79%	91,53%	97,87%	100%	95,75%

InUse Book 1.indb 112
10/19/2025 12:12:51 AM

InUse Book 1.indb 113

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pasar yang memenuhi standar	93,24%	74,68%	95,01%	100,00%	100,00%
Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	81,75%	73,95%	100,00%	100,00%
Persentase produk ekspor unggulan	55,2%	86,88%	87,22%	100,00%	100,00%
Persentase pelaku usaha yang memenuhi uji metrologi legal	-	95,08%	82,16%	77,53%	100,00%
Persentase kegiatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	-	98,99%	88,70%	100,00%	-
Pertumbuhan industri yang terstandardisasi	-	72,73%	91,93%	100,00%	100,00%
Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	-	87,01%	94,89%	100,00%	100,00%
Sekretariat Daerah					
Bagian Hukum					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Kesejahteraan Rakyat					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase layanan administrasi perekonomian dan pembangunan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Umum					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Tata Pemerintahan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan pengelolaan perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Organisasi					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Sekretariat DPRD					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		87,05%	89,70%	98,13%	95,15%
Persentase pelaksanaan fasilitasi pembahasan propemperda dan rancangan perda	100%	100%	100%	100%	100%

10/19/2025 12:12:51 AM

InUse Book 1.indb 114

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Fungsi Penunjang Perencanaan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
Fungsi Penunjang Keuangan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Ketepatan waktu penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Ketepatan waktu penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan rancanganan PPAS	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Ketepatan waktu pengajuan rancangan perda tentang APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Ketepatan waktu pengajuan rancangan perda tentang perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Ketepatan waktu penyampaian rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Keandalan pelaporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase aset pemerintah daerah yang diamankan	49,08%	46,13%	50,39%	54,19%	56,98%
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Fungsi Penunjang Keuangan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase peningkatan PAD	8,01%	3,92%	26,44%	-2,09%	11,98%
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks profesionalisme dimensi kinerja dan disiplin	28,91	29,38	29,8	29,97	Indeks belum rilis
Indeks profesionalisme dimensi kompetensi dan kualifikasi	23,27	25,03	52,43	51,65	Indeks belum rilis
Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan					
Cakupan layanan administrasi perkantoran	92%	95%	93%	94%	98,64%
Persentase hasil penelitian yang telah diimplementasikan	0%	100%	100%	100%	100%

10/19/2025 12:12:51 AM

InUse Book 1.indb 115

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Inspektorat					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Opini laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,84 (Baik Sekali)	3,88 (Baik Sekali)	3,93 (Baik Sekali)	3,92 (Baik Sekali)	3,85 (Baik Sekali)
Kecamatan					
Kecamatan Mojo					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	97,43%	100%	97,98%	97,00%	97,00%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	99,63%%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100%	90,00%	94,37%	100%	100%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%
Kecamatan Kras					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	79,48%	87,63%	94,82%	85,59%	95,26%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%
Kecamatan Ngadiluwih					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	97,02%	92,44%	95,34%	95,71%	95,06%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%
Kecamatan Kandat					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	94%	92%	93%	94%	96%

10/19/2025 12:12:51 AM

InUse Book 1.indb 116

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100%	100%	90%	99%	92%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%	100%	100%	77%	93%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	97%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100%	100%	94%	94%	98%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	95%	88%
Kecamatan Wates					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	79,88%	81%	97%	95%	96%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100%	95%	81%	81%	81%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%	70%	86%	86%	95%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%	95%	100%	100%	80%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100%	95%	94%	86%	94%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	75%	100%	83%	74%
Kecamatan Ngancar					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95,37%	92,93%	97,76%	96,93%	94,49%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	98,14%	97,48%	96,12%	87,27%	98,18%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%	100%	98,21%	100%	100%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	58,00%	100%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100%	100%	100%	93,91%	98,57%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	98,39%	94,00%
Kecamatan Puncu					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		91,56%	93,55%	95,64%	93,56%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		65,52%	99,97%	87,59%	78,58%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan		80,00%	99,83%	100,00%	100,00%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan		75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		50,00%	97,44%	95,47%	100,00%
Persentase pemerintahan desa yang dibina		100,00%	99,94%	98,94%	98,37%
Kecamatan Plosoklaten					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	97,02%	84,72%	95,34%	95,71%	95,06%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

10/19/2025 12:12:51 AM

InUse Book 1.indb 117

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%
Kecamatan Gurah					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	79,23%	85,82%	96,00%	95,49%	94,66%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	0%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%
Kecamatan Pagu					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		97,89%	97,76%	96,93%	94,49%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		98,24%	96,12%	87,27%	98,18%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan		100%	98,21%	100%	100%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan		100%	100%	58%	100%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani					
Persentase pemerintahan desa yang dibina					
Kecamatan Gampengrejo					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		94,37%	95,47%	95,37%	94,85%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan		94,51%	100,00%	93,16%	97,82%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		92,56%	94,86%	83,23%	64,83%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan		90,23%	91,63%	100,00%	100,00%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		95,65%	91,70%	97,01%	99,74%
Persentase pemerintahan desa yang dibina		94,32%	97,55%	80,56%	97,95%
Kecamatan Grogol					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	82,25%	90%	91%	92%	95%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%

10/19/2025 12:12:52 AM

InUse Book 1.indb 118

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kecamatan Papar					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	88,95%	95,95%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		100%	90,91%	100%	81,82%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%	100%	100%	38%	100%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%	83,30%	100%	100%	100%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		100%	100%	100%	100%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	95,60%	95,83%
Kecamatan Purwosari					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		87,65%	93,87%	98,04%	98,91%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		64,91%	59,57%	89,54%	89,07%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan		96,55%	70,13%	68,10%	96,93%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan		41,14%	17,59%	99,85%	97,46%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		36,48%	97,07%	99,86%	99,47%
Persentase pemerintahan desa yang dibina		60,14%	80,92%	99,87%	99,22%
Kecamatan Plemahan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		90,85%	95,40%	94,39%	93,05%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		100,00%	46,43%	88,52%	99,48%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan		91,00%	60,80%	92,35%	91,69%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan		100,00%	53,57%	99,96%	96,37%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		44,31%	93,91%	94,54%	98,71%
Persentase pemerintahan desa yang dibina		100,00%	80,84%	95,35%	96,75%
Kecamatan Pare					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	100%	100%
Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		100%	100%	100%	100%
Persentase koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan yang terlaksana		100%	100%	100%	100%
Persentase koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan yang terlaksana		100%	100%	100%	100%
Persentase penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		100%	100%	100%	100%
Persentase pemerintahan desa yang dibina		100%	100%	100%	100%
Kecamatan Kepung					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	88,00%	85,99%	97,01%	94,74%	95,00%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100,00%	56,00%	87,11%	99,00%	99,00%

10/19/2025 12:12:52 AM

InUse Book 1.indb 119

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	76,00%	76,00%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100,00%	96,00%	100,00%	69,23%	64,00%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100,00%	67,00%	89,00%	95,00%	99,00%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100,00%	79,00%	100,00%	99,00%	100,00%
Kecamatan Kandangan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		87,52%	96,23%	98,06%	97,08%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		46,87%	59,83%	23,46%	6,17%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan		69,60%	64,68%	72,72%	92,36%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan		36,01%	74,09%	93,26%	0,00%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		36,06%	95,44%	89,91%	93,75%
Persentase pemerintahan desa yang dibina		60,45%	38,69%	89,15%	7,47%
Kecamatan Tarokan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95,57%	84,88%	93,62%	97,27%	93,09%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100,00%	87,62%	99,82%	93,01%	85,19%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100,00%	92,11%	90,88%	94,89%	100,00%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100,00%	40,87%	100%	86,25%	99,83%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100,00%	47,93%	81,66%	94,96%	99,87%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100,00%	99,88%	94,58%	86,08%	99,08%
Kecamatan Kunjang					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	79,81%	85,59%	95,97%	95,76%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	95,85%	93,19%	60,75%	80,53%	0,00%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100,00%	100,00%	71,25%	60,28%	95,54%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	93,84%	100,00%	96,58%	97,04%	99,34%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100,00%	100,00%	57,89%	98,48%	19,34%
Kecamatan Banyakan					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		93,97%	88,02%	97,00%	97,00%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

10/19/2025 12:12:52 AM

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%
Kecamatan Ringinrejo					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	80,27%	81%	80%	97,34%	92,00%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	93%	98,74%	93%	85%	100%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	55,40%	100%	55,40%	98%	96%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	92%	100%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	100%	56,55%	100%	94%	100%
Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	94%	98%
Kecamatan Kayen Kidul					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		78,88%	85,19%	84,60%	87,94%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		29,59%	92,72%	79,19%	81,64%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan		100%	33,67%	60,60%	97,66%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan		62,18%	167,44%	54,09%	100%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		33,65%	44,70%	92,66%	92,93%
Persentase pemerintahan desa yang dibina		37,57%	19,12%	63,47%	83,53%
Kecamatan Ngasem					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		95,90%	74,45%	94,08%	97,55%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		99,47%	100%	97,84%	99,99%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan		100%	100%	100%	88,73%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan		100%	100%	100%	93,26%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		39,91%	93,10%	96,73%	71,70%
Persentase pemerintahan desa yang dibina		23,13%	100%	100%	99,99%
Kecamatan Badas					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		64,62%	97,00%	95,04%	91,64%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		60,64%	96,00%	78,35%	100%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan		71,30%	100%	99,83%	94,58%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan		78,24%	99,01%	66,21%	100%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		19,64%	100%	96,21%	99,37%
Persentase pemerintahan desa yang dibina		22,74%	86,00%	97,96%	100%

InUse Book 1.indb 120
10/19/2025 12:12:52 AM

InUse Book 1.indb 121

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kecamatan Semen					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		99%	96%	91%	95,19%
Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		100%	68%	71,00%	44,32%
Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan		100%	98%	85,00%	90,83%
Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan		100%	97%	71,00%	99,73%
Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		40,26%	80%	93,00%	99,86%
Persentase pemerintahan desa yang dibina		99,89%	67%	97%	98,04%
Kesatuan Bangsa dan Politik					
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	90%
Persentase pembinaan ormas	80%	85%	85%	90%	95%
Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	85%	85%	90%	95%	100%
Persentase konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

10/19/2025 12:12:52 AM

2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan peraturan pemerintah sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa standar pelayanan minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

2.1.4.5.1 Pendidikan

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendikbudristek RI Nomor 32 Tahun 2022, indikator SPM pendidikan digunakan pemerintah daerah sebagai referensi perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan kualitas pendidikan. Standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan adalah jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Oleh sebab itu, visi besar transformasi pendidikan Indonesia akan

TABEL 2.37
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan

No.	Indikator	Realisasi	
		2023	2024
1.	Anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	92,71	94,87
2.	Anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,57	98,43
3.	Anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	98,18	99,23
4.	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	100	98,18
5.	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	100	96,35
6.	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	100	99,75
7.	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	96,31	92,38
8.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100	96,86
9.	Pertumbuhan proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S-1/D-IV	97,90	98,56
10.	Iklim keamanan SD	89,64	92,28
11.	Iklim keamanan SMP	84,64	92,14
12.	Iklim kebinekaan SD	82,80	96,03
13.	Iklim kebinekaan SMP	87,56	96,96
14.	Iklim inklusivitas SD	-	90,85
15.	Iklim inklusivitas SMP	-	90,50

InUse Book 1.indb 122 10/19/2025 12:12:52 AM

tercapai dengan terpenuhinya SPM pendidikan di daerah. Transformasi standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah kepada semua warga negara, yang menjadi fokus dalam transformasi SPM di pendidikan meliputi: akses pendidikan, fasilitas dan infrastruktur, partisipasi sekolah, kualitas pengajaran, kualitas lingkungan sekolah, dan kualitas pendidik. Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, transformasi SPM pendidikan bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan inklusif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan.

2.1.4.5.2 Kesehatan

Operasionalisasi SPM bidang kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

TABEL 2.38
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan

No.	Indikator	Realisasi	
		2023	2024
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	92,49
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	93,10
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	98,65
4.	Pelayanan kesehatan balita	98,03	97,92
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan	96,84	95,80
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	90,59	93,57
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	77,46	90,31
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	92,18	94,44
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	92,96	94,68
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	97,4	100
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	100
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*)	100	100

2.2 Gambaran Kondisi Keuangan Kabupaten Kediri

Kondisi keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika pemerintahan daerah diibaratkan sebagai satu organ tubuh maka fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung yang senantiasa memompakan darah segar bagi fungsi/sektor pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan.

Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah *instrumen kunci* dari kebijakan pemerintah daerah, sehingga disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara "*revenue* dan *expenditure*". Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

InUse Book 1.indb 123 10/19/2025 12:12:52 AM

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Gambaran kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, serta pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kapasitas fiskal, ruang fiskal, dan *tax ratio*.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kediri meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

InUse Book 1.indb 124 10/19/2025 12:12:52 AM

InUse Book 1.indb 125

TABEL 2.39

Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp)

Sumber: LRA Kabupaten Kediri 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R (%)
PENDAPATAN	**2.835.332.942.710,08**	**2.923.110.843.869,24**	**3.059.858.480.150,76**	**3.163.467.890.431,88**	**3.322.211.841.313,16**	**4,04%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	494.413.404.880,18	513.773.026.141,24	649.630.917.159,76	636.075.970.326,88	697.847.351.975,16	10,07%
PENDAPATAN TRANSFER	2.205.380.594.105,00	2.401.475.948.751,00	2.378.321.143.873,00	2.526.670.467.437,00	2.624.364.489.338,00	4,36%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	135.538.943.724,90	7.861.868.977,00	31.906.419.118,00	721.452.668,00	0	3,47%
BELANJA	**2.832.284.646.054,78**	**2.937.424.451.914,08**	**3.154.101.883.074,31**	**3.288.924.911.656,40**	**3.496.881.425.582,82**	**5,42%**
BELANJA OPERASI	1.820.405.333.008,29	1.994.571.255.560,31	2.146.482.941.015,11	2.196.425.893.300,31	2.473.605.563.654,91	8,03%
BELANJA MODAL	400.753.335.360,14	319.312.867.444,77	370.827.255.677,20	483.080.137.961,09	330.855.699.613,91	-1,36%
BELANJA TAK TERDUGA	88.432.937.186,35	34.261.986.572,00	3.063.084.500,00	709476100	1.547.212.797,00	-27,77%
TRANSFER	522.693.040.500,00	589.278.342.337,00	633.728.601.882,00	608.709.404.295,00	690.872.949.517,00	7,46%
SURPLUS/(DEFISIT)	3.048.296.655,30	-14.313.608.044,84	-94.243.402.923,55	-125.457.021.224,52	-174.669.584.269,66	15,30%
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	564.638.700.878,03	578.335.637.468,33	559.022.240.723,49	520.994.937.799,94	410.613.961.575,42	-7,23%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	5.000.000.000,00	33.783.900.000,00	60.000.000.000,00	0	-11,20%
PEMBIAYAAN NETO	564.638.700.878,03	573.335.637.468,33	525.238.340.723,49	460.994.937.799,94	410.613.961.575,42	-7,50%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**567.686.997.533,33**	**559.022.029.423,49**	**430.994.937.799,94**	**335.537.916.575,42**	**235.944.377.305,76**	**-19,06%**

10/19/2025 12:12:52 AM

Tabel di atas menunjukkan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Kediri tahun 2020-2024. Selama periode tersebut, realisasi **total pendapatan** daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,04 persen per tahun. Selama periode tersebut, total realisasi pendapatan terus mengalami peningkatan sepanjang periode. Pada 2020, total realisasi pendapatan sebesar Rp2,84 triliun meningkat hingga mencapai Rp3,32 triliun pada 2024.

Realisasi **belanja** yang meliputi belanja operasi, modal, tak terduga, dan transfer juga mengalami peningkatan, yakni rata-rata sebesar 5,42 persen per tahun. Capaian realisasi terus mengalami peningkatan di sepanjang periode. Pada tahun 2020, realisasi belanja mencapai Rp2,83 triliun. Pada tahun 2024 realisasi belanja telah meningkat menjadi Rp3,50 triliun.

Adapun dari segi realisasi **pembiayaan**, terjadi peningkatan pada periode 2020-2021, tetapi kemudian dari 2021-2024 capaian mengalami penurunan. Dengan begitu secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 7,50 persen per tahun.

Jika melihat pola perimbangan dari pendapatan dan belanja daerah, Kabupaten Kediri mengalami surplus pada 2020 sebesar Rp3,05 miliar. Namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi defisit anggaran di Kabupaten Kediri, yaitu sebesar Rp14,31 miliar di tahun 2021. Tahun 2022 defisitnya membesar menjadi Rp94,24 miliar, dan kembali mengalami defisit pada tahun 2023 sebesar Rp125,46 miliar. Pada tahun 2024, defisit anggaran sebesar Rp174,67 miliar.

2.2.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kategorisasi pendapatan daerah dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

InUse Book 1.indb 126 10/19/2025 12:12:52 AM

InUse Book 1.indb 127

TABEL 2.40

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp)

Sumber: LRA Kabupaten Kediri 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R (%)
PENDAPATAN	**2.835.332.942.710,08**	**2.923.110.843.869,24**	**3.059.858.480.150,76**	**3.163.467.890.431,88**	**3.322.211.841.313,16**	**4,25%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**494.413.404.880,18**	**513.773.026.141,24**	**649.630.917.159,76**	**636.075.970.326,88**	**697.847.351.975,16**	**10,07%**
Pendapatan Pajak Daerah	215.296.696.264,19	211.898.045.266,30	249.542.912.696,70	268.862.706.928,78	293.049.195.122,00	8,23%
Pendapatan Retribusi Daerah	25.581.608.369,00	26.810.037.670,00	26.441.173.936,00	28.141.450.670,00	375.096.644.257,50	6,68%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.082.765.027,00	10.525.930.496,50	11.152.094.535,05	11.392.016.816,90	12.757.923.367,90	6,12%
Lain-Lain PAD yang Sah	243.452.335.219,99	264.539.012.708,44	362.494.735.992,01	327.679.795.911,20	16.943.589.227,76	12,54%
PENDAPATAN TRANSFER	**2.205.380.594.105,00**	**2.401.475.948.751,00**	**2.378.321.143.873,00**	**2.526.670.467.437,00**	**2.624.364.489.338,00**	**4,41%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.660.449.065.562,00	1.781.942.316.819,00	1.777.572.967.855,00	1.842.993.223.894,00	1.914.625.131.838,00	3,71%
Bagi Hasil Pajak	70.632.475.129,00			162.948.180.688,00	154.972.503.000,00	
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	45.074.179.261,00					
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.166.589.629.000,00	1.149.910.000.000,00	1.149.910.000.000,00	1.207.532.004.752,00	1.263.604.809.829,00	2,06%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	43.600.341.438,00	369.140.000.000,00	463.800.000.000,00	472.513.038.454,00	87.565.044.605,00	173,80%
Dana Alokasi Khusus Penugasan	9.332.901.809,00					
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	325.219.538.925,00				408.482.774.404,00	

10/19/2025 12:12:52 AM

InUse Book 1.indb 128

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	372.864.492.000,00	376.809.186.400,00	366.374.903.000,00	386.988.846.345,00	416.643.778.000,00	2,89%
Dana Insentif Daerah	40.910.000.000,00	56.604.427.000,00	29.406.840.000,00	5.700.953.000,00	0	-47,57%
Dana Desa	331.954.492.000,00	320.204.759.400,00	336.968.063.000,00	381.287.893.345,00	384.897.284.000,00	3,95%
Insentif Fiskal					31.746.494.000,00	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	164.766.607.543,00	235.376.530.032,00	227.034.465.018,00	277.909.463.577,00	283.680.227.000,00	15,95%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	164.766.607.543,00	235.376.530.032,00	227.034.465.018,00	277.909.463.577,00	283.680.227.000,00	15,95%
Bantuan Keuangan	7.300.429.000,00	7.347.915.500,00	7.338.808.000,00	18.778.933.621,00	9.415.352.500,00	26,64%
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	7.300.429.000,00	7.347.915.500,00	7.338.808.000,00	18.778.933.621,00	9.415.352.500,00	26,64%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**135.538.943.724,90**	**7.861.868.977,00**	**31.906.419.118,00**	**721.452.668,00**	**-**	**3,47%**
Pendapatan Hibah	131.663.838.963,00	7.861.868.977,00	17.482.335.638,00	721.452.668,00	-	-41,88%
Pendapatan Lainnya	3.875.104.761,90	-	-	-	-	
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan			14.424.083.480,00	-	-	

10/19/2025 12:12:52 AM

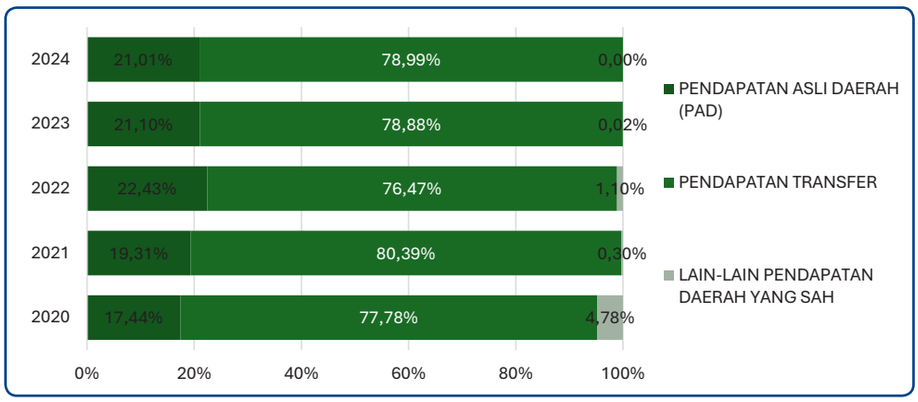
Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020-2024 realisasi total pendapatan cenderung mengalami kenaikan, setelah mengalami penurunan signifikan pada masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2,84 triliun. Selanjutnya, realisasi pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2021-2024 seiring dengan pulihnya ekonomi daerah. Pada tahun 2021 pendapatan meningkat sebesar Rp2,92 triliun. Kemudian tahun 2022 meningkat menjadi Rp3,06 triliun, hingga pada 2023 realisasi pendapatan menjadi Rp3,16 triliun. Pada 2024, realisasi pendapatan meningkat hingga mencapai sebesar Rp3,32 triliun. Kontribusi terbesar pada pendapatan Kabupaten Kediri berasal dari pendapatan transfer. Temuan ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Capaian PAD yang merupakan indikator kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah justru menyumbang tidak sampai satu per tiga dari realisasi pendapatan. Namun, capaian PAD cenderung meningkat dari 2020-2024, rata-rata peningkatannya sebesar 10,07 persen per tahun. Pada tahun 2020, nilai PAD sebesar Rp494,41 miliar sedangkan pada 2024 nilainya sudah menjadi Rp697,85 miliar.

Pajak dan retribusi belum menjadi penyumbang utama dalam PAD Kabupaten Kediri. Komponen PAD masih didominasi oleh lain-lain PAD yang sah. Peningkatan rata-rata dari lain-lain PAD yang sah mencapai 12,54 persen per tahun, sedangkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah masih di angka 8,23 persen dan 6,68 persen per tahun. Peningkatan PAD khususnya pada potensi penerimaan melalui pajak dan retribusi tetap perlu diupayakan di antaranya melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan melalui digitalisasi. Selain itu, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan inovasi sumber penerimaan salah satunya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai salah satu komponen PAD yang belum dioptimalkan kinerjanya di antaranya melalui bagi hasil pembiayaan dan BUMD.

Di sisi lain, dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kediri dapat dikatakan masih sangat didominasi oleh besarnya kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum. Lain-lain pendapatan yang sah dan PAD masih menjadi sumber yang memiliki kontribusi paling sedikit dibandingkan pendapatan transfer seperti dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

GAMBAR 2.54
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Kabupaten Kediri, 2020-2024 (Diolah)



InUse Book 1.indb 129
10/19/2025 12:12:53 AM

Grafik di atas menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Kabupaten Kediri sepanjang tahun 2020-2024. Pada periode tersebut terlihat bahwa pendapatan transfer memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 78,41 persen. Selanjutnya, PAD merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total pendapatan daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 20,34 persen. Adapun lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,24 persen. Berdasarkan pola perkembangan capaian selama periode tersebut, kontribusi dari ketiga komponen mengalami fluktuasi. Pendapatan transfer dan lain-lain PAD yang sah menunjukkan tren penurunan sedangkan PAD cenderung mengalami peningkatan.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Selama periode 2020–2024, pendapatan daerah Kabupaten Kediri selalu mencapai target atau di atas 100 persen. Pada tahun 2020–2024 realisasinya semakin jauh melebihi target, tetapi terjadi penurunan persentase realisasi di tahun 2022-2024.

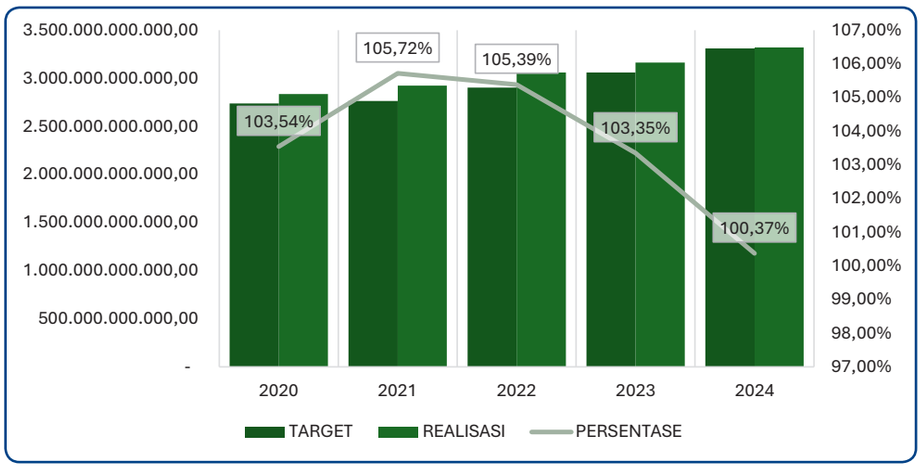
TABEL 2.41
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Kabupaten Kediri, 20202-2024 (Diolah)

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
2020	2.738.329.295.085,50	2.835.332.942.710,08	103,54%	97.003.647.624,58
2021	2.764.954.775.390,97	2.923.110.843.869,24	105,72%	158.156.068.478,27
2022	2.903.461.029.809,00	3.059.858.480.150,76	105,39%	156.397.450.341,76
2023	3.060.891.450.606,00	3.163.467.890.431,88	103,35%	102.576.439.825,88
2024	3.309.915.518.337,00	3.322.211.841.313,16	100,37%	12.296.322.976,16

GAMBAR 2.55
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Kabupaten Kediri, 2020-2024 (Diolah)



InUse Book 1.indb 130 10/19/2025 12:12:53 AM

2.2.1.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja daerah meliputi belanja operasi, modal, dan belanja tak terduga. **Belanja operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. **Belanja modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Sedangkan, **belanja tak terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Transfer daerah meliputi transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

Tabel berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah dan transfer dari tahun 2020-2024. Jumlah realisasi belanja daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2020 sebesar Rp2,31 triliun yang kemudian meningkat hingga menjadi Rp2,81 triliun pada tahun 2024, dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,01 persen per tahun. Adapun realisasi transfer daerah meningkat dari 2020 yang sebesar Rp522,69 miliar hingga mencapai Rp690,87 miliar pada 2024. Walaupun peningkatannya cukup berfluktuasi, transfer daerah menunjukkan peningkatan dengan rata-rata sebesar 7,46 persen per tahun. Uraian secara lengkap per jenis belanja dalam realisasi belanja APBD Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut.

InUse Book 1.indb 131 10/19/2025 12:12:53 AM

InUse Book 1.indb 132

TABEL 2.42

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp)

Sumber: LRA Kabupaten Kediri 2020-2024

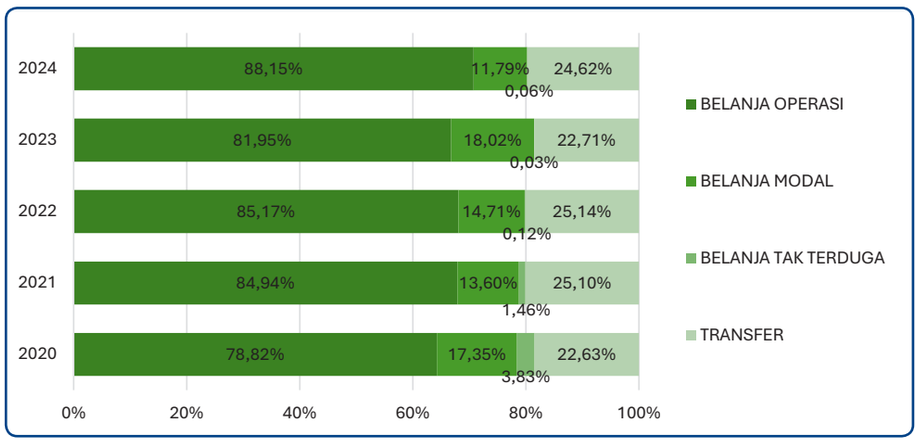
URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R (%)
BELANJA	2.832.284.646.054,78	2.937.424.451.914,08	3.154.101.883.074,31	3.288.924.911.656,40	3.496.881.425.582,82	5,01%
BELANJA OPERASI	1.820.405.333.008,29	1.994.571.255.560,31	2.146.482.941.015,11	2.196.425.893.300,31	2.473.605.563.654,91	8,03%
Belanja Pegawai	1.020.706.789.039,18	1.045.358.508.299,15	1.015.562.668.089,13	1.037.290.457.852,41	1.113.452.455.260,34	2,26%
Belanja Barang dan Jasa	577.278.773.723,79	733.395.231.385,64	850.022.436.471,98	897.026.040.443,90	1.093.423.944.647,57	17,59%
Belanja Subsidi						
Belanja Hibah	151.190.620.444,00	131.722.605.511,00	166.938.632.709,00	204.961.109.059,00	227.586.461.747,00	11,92%
Belanja Bantuan Sosial	71.229.149.801,32	84.094.910.364,52	113.959.203.745,00	57.148.285.945,00	39.142.702.000,00	-6,95%
BELANJA MODAL	400.753.335.360,14	319.312.867.444,77	370.827.255.677,20	483.080.137.961,09	330.855.699.613,91	-1,36%
Belanja Modal Tanah	21.832.396.370,00	739.021.050,00	14.811.044.501,00	5.368.065.000,00	13.089.898.752,00	471,91%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.434.780.998,33	88.389.688.061,53	124.760.543.373,62	87.312.599.441,76	64.201.996.556,33	-3,27%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.538.353.051,00	93.665.590.482,04	99.225.286.467,24	278.354.511.586,00	168.103.771.211,58	28,26%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	137.620.786.839,95	130.037.662.941,20	129.017.062.767,34	108.327.660.166,33	83.830.344.468,00	-11,24%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.116.754.100,86	6.480.904.910,00	3.013.318.568,00	3.632.801.767,00	1.005.458.723,00	-38,96%
Belanja Modal Aset Lainnya	210.264.000,00	0	0	84.500.000,00	624.229.903,00	
BELANJA TAK TERDUGA	88.432.937.186,35	34.261.986.572,00	3.063.084.500,00	709.476.100,00	1.547.212.797,00	-27,77%
Belanja Tak Terduga	88.432.937.186,35	34.261.986.572,00	3.063.084.500,00	709.476.100,00	1.547.212.797,00	-27,77%
TRANSFER	522.693.040.500,00	589.278.342.337,00	633.728.601.882,00	608.709.404.295,00	690.872.949.517,00	7,46%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	22.241.423.000,00	23.885.042.000,00	23.642.556.000,00	24.509.268.000,00	34.850.304.000,00	13,06%
Transfer Bantuan Keuangan	500.451.617.500,00	565.393.300.337,00	610.086.045.882,00	584.200.136.295,00	656.022.645.517,00	7,23%

10/19/2025 12:12:53 AM

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja dan transfer maka terlihat kontribusi terbesar belanja daerah dialokasikan pada belanja operasi. Selama periode 2020–2024, kontribusi belanja operasi merupakan yang terbesar, yakni rata-rata sebesar 83,81 persen. Belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai. Sementara itu, transfer memakan porsi terbesar kedua dengan rata-rata sebesar 24,04 persen. Selanjutnya terdapat belanja modal yang rata-rata kontribusinya sebesar 15,10 persen. Alokasi paling banyak terletak pada belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Sementara itu, belanja tak terduga berkontribusi paling rendah dengan capaian rata-rata sebesar 1,10 persen.

GAMBAR 2.56
Struktur Belanja Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Kabupaten Kediri, 2020-2024 (Diolah)



Target dan Realisasi Belanja

Selama periode tahun 2020-2024, target belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang mencapai kurang dari 100 persen. Selama periode 2020-2024 capaian realisasi berkisar pada 85,75 sampai 93,99 persen dari anggaran.

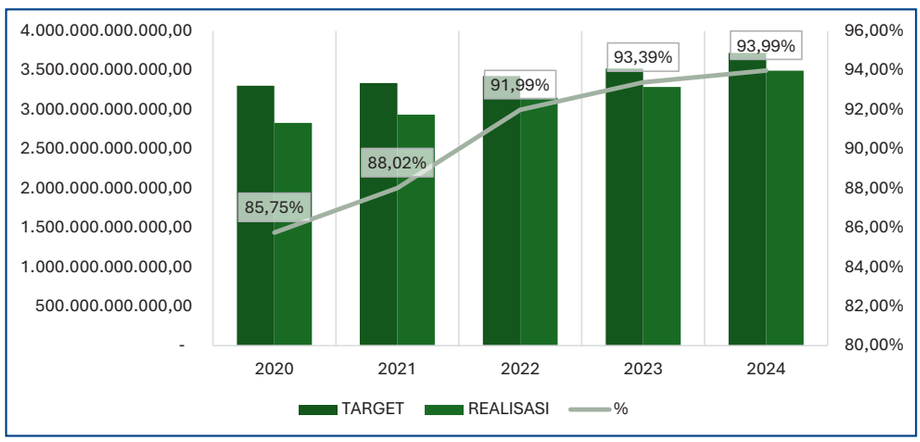
TABEL 2.43
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Kabupaten Kediri 2020-2024 (Diolah)

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
2020	3.303.033.640.237,12	2.832.284.646.054,78	85,75%	-470.748.994.182,34
2021	3.337.191.772.924,30	2.937.424.451.914,08	88,02%	-399.767.321.010,22
2022	3.428.699.159.232,00	3.154.101.883.074,31	91,99%	-274.597.276.157,69
2023	3.521.886.388.405,00	3.288.924.911.656,40	93,39%	-232.961.476.748,60
2024	3.720.453.434.912,00	3.496.881.425.582,82	93,99%	-223.572.009.329,18

GAMBAR 2.57
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Kabupaten Kediri 2020-2024 (Diolah)



InUse Book 1.indb 133
10/19/2025 12:12:54 AM

2.2.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Namun ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel 2.44 berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Kediri tahun 2020-2024. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kediri bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan dana bergulir. Adapun pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal terjadi pada 2021-2022.

2.2.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah.

Neraca daerah menyajikan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek), dan ekuitas suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian, neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

InUse Book 1.indb 134 10/19/2025 12:12:54 AM

InUse Book 1.indb 135

TABEL 2.44

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp)

Sumber: LRA Kabupaten Kediri 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R (%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**564.638.700.878,03**	**578.335.637.468,33**	**559.022.240.723,49**	**520.994.937.799,94**	**410.613.961.575,42**	**-7,23%**
Penggunaan SiLPA	524.604.345.151,62	567.686.997.533,33	559.022.240.723,49	430.994.937.799,94	335.537.916.575,42	-9,59%
Penerimaan Kembali Dana Bergulir						
Penerimaan Kembali Piutang	13.151.000,00	10.648.639.935,00		-	-	
Penerimaan Kembali Investasi Nonpermanen Lainnya						
Koreksi SiLPA	21.204.726,41					
Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00			90.000.000.000,00		
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)					75.000.000.000,00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					76.045.000,00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**5.000.000.000,00**	**33.783.900.000,00**	**60.000.000.000,00**	**-**	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	3.783.900.000,00	-	-	
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya						
Pembentukan Dana Cadangan			30.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-	
PEMBIAYAAN NETO	**564.638.700.878,03**	**573.335.637.468,33**	**525.238.340.723,49**	**460.994.937.799,94**	**410.613.961.575,42**	**-7,50%**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**567.686.997.533,33**	**559.022.029.423,49**	**430.994.937.799,94**	**335.537.916.575,42**	**235.944.377.305,76**	**-15,37%**

10/19/2025 12:12:54 AM

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Kediri pada periode tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mencapai Rp5,35 triliun atau meningkat 8,73 persen dari total aset pada 2020 yang sebesar Rp4,92 triliun. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari: (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Kewajiban daerah terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Pada tahun 2020, jumlah kewajiban daerah Kabupaten Kediri mencapai nilai sebesar Rp10,62 miliar kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 hingga mencapai Rp93,46 miliar atau meningkat sebesar 780 persen.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2019-2023, nilai ekuitas pemerintah Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 nilai ekuitas daerah Kabupaten Kediri mencapai nilai sebesar Rp4,74 triliun kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai Rp5,31 triliun pada tahun 2023.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu, selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah Kabupaten Kediri dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya, rumusnya adalah aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih likuid, rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah Kabupaten Kediri mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh utang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2019-2023 relatif tinggi, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Kediri dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2023 mencapai 16,65 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Kediri adalah 16,65 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo.

InUse Book 1.indb 136 10/19/2025 12:12:54 AM

InUse Book 1.indb 137

TABEL 2.45
Neraca Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Aset	4.920.090.045.491,03	5.313.546.574.123,78	5.293.852.242.842,27	5.335.271.572.593,54	5.351.113.240.253,26
	Aset Lancar	669.741.334.663,68	730.043.402.693,29	526.885.874.925,23	426.257.743.854,07	353.618.442.850,33
	Investasi Jangka Panjang	119.392.762.686,16	108.864.868.244,38	111.254.746.937,86	115.409.422.170,59	112.023.789.760,65
	Aset Tetap	4.107.709.080.630,65	4.452.724.651.096,11	4.615.692.792.240,43	4.744.338.409.846,53	4.798.675.267.236,73
	Aset Lainnya	23.246.867.510,54	21.913.652.090,00	40.018.828.738,75	49.265.996.722,35	21.600.345.274,73
	Jumlah Aset	4.920.090.045.491,03	5.313.546.574.123,78	5.293.852.242.842,27	5.335.271.572.593,54	5.351.113.240.253,26
2.	Kewajiban					
	Kewajiban Jangka Pendek	10.623.245.508,11	33.373.835.099,80	21.364.962.849,76	25.922.153.867,77	28.140.420.719,88
	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	65.322.580.644,00
	Jumlah Kewajiban	10.623.245.508,11	33.373.835.099,80	21.364.962.849,76	25.922.153.867,77	93.463.001.363,88
3.	Ekuitas					
	Ekuitas	4.909.466.799.982,91	5.280.174.927.874,35	5.302.487.279.992,58	5.309.349.418.725,77	5.257.650.238.889,38
	Jumlah Ekuitas	4.909.466.799.982,91	5.280.174.927.874,35	5.302.487.279.992,58	5.309.349.418.725,77	5.257.650.238.889,38
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4.920.090.045.491,02	5.313.548.762.974,15	5.323.852.242.842,34	5.335.271.572.593,54	5.351.113.240.253,26

10/19/2025 12:12:54 AM

InUse Book 1.indb 138

TABEL 2.46
Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp)
Sumber: Neraca Kabupaten Kediri, 2019-2023 (Diolah)

Rasio	Rumus	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	669.741.334.663,68	730.043.402.693,29	526.885.874.925,23	426.257.743.854,07	353.618.442.850,33
	Kewajiban Jangka Pendek	10.623.245.508,11	33.373.835.099,80	21.364.962.849,76	25.922.153.867,77	28.140.420.719,88
	Rasio Lancar	12,57	12,57	12,57	12,57	12,57
	Aset Lancar Persediaan	51.666.360.817,49	46.523.471.271,96	66.906.859.632,65	61.183.615.676,36	61.703.050.611,33
	Kewajiban Jangka Pendek	10.623.245.508,11	33.373.835.099,80	21.364.962.849,76	25.922.153.867,77	28.140.420.719,88
	Quick Ratio	4,86	1,39	3,13	2,36	2,19
Rasio Solvabilitas	Total Utang	10.623.245.508,11	33.373.835.099,80	21.364.962.849,76	25.922.153.867,77	93.463.001.363,88
	Total Aset	4.920.090.045.491,03	5.313.546.574.123,78	5.293.852.242.842,27	5.335.271.572.593,54	5.351.113.240.253,26
	Rasio Total Utang (%)	0,22%	0,63%	0,40%	0,49%	1,75%
	Total Utang	10.623.245.508,11	33.373.835.099,80	21.364.962.849,76	25.922.153.867,77	93.463.001.363,88
	Total Ekuitas	4.909.466.799.982,91	5.280.174.927.874,35	5.302.487.279.992,58	5.309.349.418.725,77	5.257.650.238.889,38
	Rasio Utang/ Modal (%)	0,22%	0,63%	0,40%	0,49%	1,78%

10/19/2025 12:12:54 AM

Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Quick ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan pemerintah Kabupaten Kediri yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Selama periode 2019-2023 rasio cepat di Kabupaten Kediri menunjukkan nilai >1 sepanjang periode. Peningkatan *quick ratio* perlu terus diupayakan khususnya melalui peningkatan aset lancar persediaan.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total utang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio utang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total utang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin utangnya dengan aset yang dimilikinya, rumusnya total utang dibagi total aset. Sedangkan rasio utang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibiayai pihak kreditor dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total utang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total utang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2023 sebesar 0,49 persen artinya sebesar Rp0,49 dari setiap Rp1,00 total aset merupakan pendanaan dari utang, atau aset pemerintah Kabupaten Kediri yang didanai oleh utang adalah sebesar 0,49 persen, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Sedangkan dari tahun 2020-2024, rasio utang terhadap modal, memiliki rasio yang hampir sama dengan rasio total utang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Kediri.

2.2.1.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value*

InUse Book 1.indb 139 10/19/2025 12:12:54 AM

of money di mana prinsip ekonomis, efektivitas, dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2020-2024 ditunjukkan oleh tabel berikut.

TABEL 2.47
Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Kabupaten Kediri, 2020-2024 (Diolah)

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
	(a)	(b)	(a)/(b) × 100%
2020	1.020.706.789.039,18	2.832.284.646.054,78	36,04%
2021	1.045.358.508.299,15	2.942.424.451.914,08	35,53%
2022	1.015.562.668.089,13	3.187.885.783.074,31	31,86%
2023	1.037.290.457.852,41	3.348.924.911.656,40	30,97%
2024	1.113.452.455.260,34	3.496.881.425.582,82	31,84%
Rata-rata	1.046.474.175.708,04	3.161.680.243.656,48	33,10%

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, baik dari segi nominal maupun proporsinya terhadap total pengeluaran. Pada tahun 2020, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai Rp1,02 triliun di tahun 2020 meningkat hingga menjadi Rp1,05 triliun pada 2021, kemudian menurun di tahun berikutnya menjadi Rp1,02 triliun pada tahun 2022. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kembali meningkat pada tahun 2023 hingga mencapai Rp1,04 triliun dan 2024 hingga sebesar Rp1,11 triliun. Sementara itu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah Kabupaten Kediri juga berfluktuasi. Selama periode 2020-2024 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah berkisar antara 30,97 persen hingga 36,04 persen, dengan rata-rata proporsi selama periode tersebut sebesar 33,10 persen. Berdasarkan data tersebut, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah kurang dari 50 persen sehingga biaya pemenuhan kebutuhan aparatur bukan merupakan porsi besar dalam beban total realisasi belanja, namun perlu dioptimalisasi kembali sehingga belanja yang memiliki manfaat langung kepada masyarakat meningkat serta untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat bahwa pemenuhan belanja aparatur kurang dari 30 persen dari total pengeluaran.

2.2.1.4 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/defisit riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/defisit riil APBD Kabupaten Kediri selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

InUse Book 1.indb 140 10/19/2025 12:12:54 AM

InUse Book 1.indb 141

TABEL 2.48

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp)

Sumber: LRA Kabupaten Kediri, 2020-2024 (Diolah)

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendapatan Daerah	2.835.332.942.710,08	2.923.110.843.869,24	3.059.858.480.150,76	3.163.467.890.431,88	3.322.211.841.313,16
2.	Belanja Daerah	2.832.284.646.054,78	2.937.424.451.914,08	3.154.101.883.074,31	3.288.924.911.656,40	3.496.881.425.582,82
	Surplus/Defisit	3.048.296.655,30	-14.313.608.044,84	-94.243.402.923,55	-125.457.021.224,52	-174.669.584.269,66
3.	Pembiayaan Daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	564.638.700.878,03	578.335.637.468,33	559.022.240.723,49	520.994.937.799,94	410.613.961.575,42
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	5.000.000.000,00	33.783.900.000,00	60.000.000.000,00	-
	Pembiayaan Neto	564.638.700.878,03	573.335.637.468,33	525.238.340.723,49	460.994.937.799,94	410.613.961.575,42
	Sisa Lebih/Kurang Pembiyaan Tahun Berjalan	567.686.997.533,33	559.022.029.423,49	430.994.937.799,94	335.537.916.575,42	235.944.377.305,76

TABEL 2.49

Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp)

Sumber: LRA Kabupaten Kediri, 2020-2024 (Diolah)

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.835.332.942.710,08	2.923.110.843.869,24	3.059.858.480.150,76	3.163.467.890.431,88	3.322.211.841.313,16
	Dikurangi					
2.	Realisasi Belanja Daerah	2.832.284.646.054,78	2.937.424.451.914,08	3.154.101.883.074,31	3.288.924.911.656,40	3.496.881.425.582,82
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	5.000.000.000,00	33.783.900.000,00	60.000.000.000,00	-
	Surplus/Defisit Riil	3.048.296.655,30	-19.313.608.044,84	-128.027.302.923,55	-185.457.021.224,52	-174.669.584.269,66

10/19/2025 12:12:54 AM

InUse Book 1.indb 142

TABEL 2.50
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kediri (Rp)
Sumber: LRA Kabupaten Kediri, 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan SiLPA	524.604.345.151,62	567.686.997.533,33	559.022.240.723,49	430.994.937.799,94	335.537.916.575,42
Penerimaan Kembali Dana Bergulir					
Penerimaan Kembali Piutang	13.151.000,00	10.648.639.935,00		-	-
Penerimaan Kembali Investasi Nonpermanen Lainnya					
Koreksi SiLPA	21.204.726,41				
Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00			90.000.000.000,00	
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)					75.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					76.045.000,00

10/19/2025 12:12:54 AM

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2020-2024 terjadi pola fluktuasi pembiayaan neto setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pembiayaan neto Kabupaten Kediri mencapai nilai sebesar Rp524,60 miliar, mengalami penurunan cukup signifikan pada 2021-2022 hingga mencapai Rp573,33 miliar. Pada tahun 2023-2024, pembiayaan neto mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga nilai pembiayaan neto berturut-turut mencapai Rp525,24 miliar dan Rp410,61 miliar. Sementara itu defisit riil menunjukkan peningkatan yang berdampak pada SiLPA semakin menurun.

2.2.1.4.1 Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas setelah dikurangi pendapatan yang telah ditentukan penggunaannya dan dipenuhinya belanja yang bersifat wajib. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS dan berbagai jenis pendapatan yang bersifat *earmarked* (ditentukan penggunaannya). Semakin besar ruang fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD. Secara teknis perhitungan ruang fiskal dapat menggunakan formula berikut ini.

Ruang Fiskal	=	(Total Pendapatan + SiLPA) – Pendapatan Mengikat – Belanja Wajib Daerah
Pendapatan Mengikat	=	DAK + Pendapatan Hibah + Dana Insentif Daerah + Dana Desa
Belanja Mengikat	=	Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil + Belanja Administrasi Umum (Adum) + Alokasi Dana Desa
Belanja Wajib	=	Belanja Urusan Pendidikan (20%) + Belanja Urusan Kesehatan (10%) + Belanja Infrastruktur

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya ruang fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005) mengemukakan bahwa ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Sesuai dengan hasil perhitungan ruang fiskal Kabupaten Kediri tahun 2020-2024 ditemukan ruang fiskal Kabupaten Kediri cukup terbatas dalam mendanai penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah. Tabel 2.50 menunjukkan hasil analisis ruang fiskal daerah di Kabupaten Kediri tahun 2020-2024. Sepanjang tahun 2020-2024, ruang fiskal daerah Kabupaten Kediri fluktuatif namun cenderung menurun pada empat tahun terakhir. Rata-rata ruang fiskal daerah hanya sebesar 8,72 persen sehingga ketersediaan ruang dalam anggaran sangat terbatas. Adapun nilai ruang fiskal tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp561,43 miliar atau sebesar 16,61 persen dari total penerimaan, sedangkan nilai paling rendah sebesar Rp135,23 miliar atau sebesar 3,47 persen dari total penerimaan pada 2023. Nilai yang pasang surut secara signifikan seiring dengan dinamika realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan efektivitas penganggaran masih perlu diupayakan perencanaan yang semakin matang, sehingga semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal. Penyertaan modal menjadi alternatif langkah yang dapat dilakukan guna meningkatkan PAD Kabupaten Kediri.

InUse Book 1.indb 143 10/19/2025 12:12:54 AM

InUse Book 1.indb 144

TABEL 2.51
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp)
Sumber: LRA Kabupaten Kediri, 2020-2024 (Diolah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PENERIMAAN	**3.399.971.640.000,00**	**3.501.446.480.000,00**	**3.618.880.720.000,00**	**3.624.461.830.000,00**	**3.732.825.800.000,00**
PENDAPATAN MENGIKAT	**882.681.110.000,00**	**753.811.060.000,00**	**847.657.240.000,00**	**860.222.380.000,00**	**902.691.600.000,00**
DAK	378.152.780.000,00	369.140.000.000,00	463.800.000.000,00	472.513.040.000,00	486.047.820.000,00
Hibah	131.663.840.000,00	7.861.870.000,00	17.482.340.000,00	721.450.000,00	-
Dana Insentif Daerah	40.910.000.000,00	56.604.430.000,00	29.406.840.000,00	5.700.000.000,00	31.746.500.000,00
Dana Desa	331.954.490.000,00	320.204.760.000,00	336.968.060.000,00	381.287.890.000,00	384.897.280.000,00
	-	-	-	-	-
BELANJA MENGIKAT	**467.365.700.000,00**	**535.501.670.000,00**	**572.445.790.000,00**	**594.636.400.000,00**	**605.034.220.000,00**
Belanja Pegawai (Dikurang Belanja Pegawai pada Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, dan Infrastruktur)	186.351.470.000,00	235.255.930.000,00	257.903.470.000,00	250.493.750.000,00	250.493.750.000,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Belanja Adum (5%*Belanja)	141.614.230.000,00	146.871.220.000,00	157.705.090.000,00	164.446.250.000,00	174.844.070.000,00
Alokasi Dana Desa	139.400.000.000,00	153.374.520.000,00	156.837.230.000,00	179.696.400.000,00	179.696.400.000,00
	-	-	-	-	-
BELANJA WAJIB	**1.488.494.240.000,00**	**1.750.756.210.000,00**	**1.924.447.140.000,00**	**2.080.225.670.000,00**	**2.080.225.670.000,00**
Belanja Pendidikan	839.506.060.000,00	929.075.420.000,00	898.256.680.000,00	898.746.130.000,00	898.746.130.000,00
Belanja Kesehatan	449.856.020.000,00	544.182.060.000,00	630.443.580.000,00	698.399.400.000,00	698.399.400.000,00
Belanja Infrastruktur	199.132.160.000,00	277.498.730.000,00	395.746.880.000,00	483.080.140.000,00	483.080.140.000,00
	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT SERTA BELANJA WAJIB	**2.838.541.050.000,00**	**3.040.068.940.000,00**	**3.344.550.170.000,00**	**3.535.084.450.000,00**	**3.587.951.490.000,00**
	-	-	-	-	-
RUANG FISKAL	**561.430.590.000,00**	**461.377.550.000,00**	**274.330.550.000,00**	**89.377.380.000,00**	**144.874.310.000,00**
PERSENTASE RUANG FISKAL	**16,51%**	**13,18%**	**7,58%**	**2,47%**	**3,88%**
RATA-RATA PERSENTASE RUANG FISKAL	**8,72%**				

10/19/2025 12:12:55 AM

2.2.1.4.2 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan. Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Adapun kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

TABEL 2.52
Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun	Nilai	Kategori
Indeks KFD	2020	1,57	Tinggi
	2021	1,25	Tinggi
Rasio KFD	2022	1,69	Sedang
	2023	1,61	Tinggi
	2024	1,52	Tinggi

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2020-2024

Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{KFD}_{\text{Kabupaten'/Kota}-i} = Y - \left[Y_a + X\right]$$

Keterangan:
KFD = Kapasitas fiskal daerah
Y = Pendapatan
Y_a = Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan
X = Belanja tertentu

Penghitungan indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$IKFD_{\text{Kabupaten'/Kota}-i} = \frac{KFD_{\text{Kabupaten/Kota}-i}}{\sum KFD_{\text{Kabupaten/Kota}-i}}$$

Berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori kapasitas fiskal daerah sebagai berikut untuk tahun 2021.

TABEL 2.53
Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Beradasarkan IKFD

Rentang IKFD 2021	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,530	Sangat Rendah
0,530 < IKFD < 0,727	Rendah
0,727 ≤ IKFD < 1,053	Sedang
1,053 ≤ IKFD < 1,838	Tinggi
IKFD ≥ 1,838	Sangat Tinggi

InUse Book 1.indb 145 10/19/2025 12:12:55 AM

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka dapat dikemukakan, nilai kapasitas fiskal daerah (IKFD) Kabupaten Kediri pada 2020-2021 menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Kediri selalu berada pada kategori tinggi.

Sejak tahun 2022 terdapat perubahan metode penghitungan kapasitas fiskal oleh kementerian keuangan dengan menggunakan indikator rasio kapasitas fiskal daerah. Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, kementerian keuangan mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Pada Pasal 1 Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Adapun kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya, formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{KFD}_{\text{Kabupaten'/Kota}-i} = Y - \left[Y_a + X\right]$$

Keterangan:
KFD = Kapasitas fiskal daerah
Y = Pendapatan
Y_a = Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan
X = Belanja tertentu

Penghitungan rasio kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$IKFD_{\text{Kabupaten'/Kota}-i} = \frac{KFD_{\text{Kabupaten/Kota}-i}}{\sum KFD_{\text{Kabupaten/Kota}-i}}$$

Berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori kapasitas fiskal daerah sebagai berikut untuk tahun 2022.

TABEL 2.54
Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan RKFD

Rentang RKFD 2022	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 1,905	Sangat Rendah
0,905 < RKFD < 1,141	Rendah
1,141 ≤ RKFD < 1,378	Sedang
1,378 ≤ RKFD < 1,615	Tinggi
RKFD ≥ 1,615	Sangat Tinggi

InUse Book 1.indb 146 10/19/2025 12:12:55 AM

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Capaian RKFD Kabupaten Kediri pada tahun 2022-2024 berturut-turut berada pada kategori sedang dan tinggi.

2.2.1.4.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Berdasarkan Tabel 2.55, secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Kediri mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2024. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2020, yakni 1,20. Selanjutnya pada tahun 2021, kemampuan mendanai belanja daerah menurun menjadi 1,19. Pada tahun 2022, terjadi penurunan dengan capaian menjadi 1,14 dan di tahun 2023 terjadi penurunan hingga menjadi 1,10. Pada tahun 2024 kemampuan mendanai belanja daerah kembali menurun hingga sebesar 1,07. Berkaitan dengan kondisi tersebut, meskipun tahun sepanjang 2020-2024 nilainya telah >1, namun masih diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi kerja sama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan, dan menyikapi tantangan ke depan.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Proyeksi pendapatan Kabupaten Kediri dilakukan berdasarkan analisis tren pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2020-2024 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kabupaten Kediri tahun 2024. Hal ini juga diperkuat dengan justifikasi kualitatif angka pertumbuhan masing-masing pos pendapatan dan belanja dari para *stakeholders* pengelolanya. Pada tahun 2020-2024 diasumsikan dengan telah terbentuknya penyesuaian masyarakat terhadap masa pemulihan ekonomi di Indonesia maka akan mendorong kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga dapat memasuki momentum pascapemulihan ekonomi.

Berdasarkan penghitungan proyeksi dengan asumsi pertumbuhan *moderat* pendapatan daerah pada APBD tahun 2025 diperkirakan mencapai nilai sebesar Rp3,35 triliun dan menjadi Rp3,86 triliun pada tahun 2030 sehingga rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,11 persen. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari pendapatan transfer yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Adapun PAD tumbuh signifikan dengan peningkatan rata-rata mencapai 2,89 persen. Pada pertumbuhan PAD diharapkan terjadi peningkatan khususnya kontribusi pajak, retribusi, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan dikhususkan pada penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD.

InUse Book 1.indb 147 10/19/2025 12:12:55 AM

InUse Book 1.indb 148

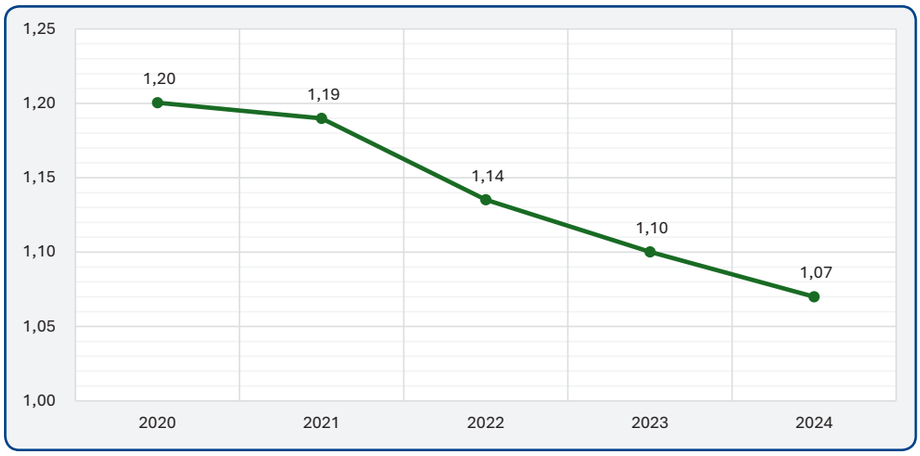
TABEL 2.55
Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024 (Rp)
Sumber: LRA Kabupaten Kediri, 2020-2024 (Diolah)

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Penerimaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Total Pengeluaran	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
2020	2.835.332.942.710,08	564.638.700.878,03	3.399.971.643.588,11	2.832.284.646.054,78	0	2.832.284.646.054,78	1,20
2021	2.923.110.843.869,24	578.335.637.468,33	3.501.446.481.337,57	2.937.424.451.914,08	5.000.000.000,00	2.942.424.451.914,08	1,19
2022	3.059.858.480.150,76	559.022.240.723,49	3.618.880.720.874,25	3.154.101.883.074,31	33.783.900.000,00	3.187.885.783.074,31	1,14
2023	3.163.467.890.431,88	520.994.937.799,94	3.684.462.828.231,82	3.288.924.911.656,40	60.000.000.000,00	3.348.924.911.656,40	1,10
2024	3.322.211.841.313,16	410.613.961.575,42	3.732.825.802.888,58	3.496.881.425.582,82	0	3.496.881.425.582,82	1,07

10/19/2025 12:12:55 AM

GAMBAR 2.58
Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Kabupaten Kediri, 2019-2022 (Diolah)



Seiring dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah mengalami perubahan yang sejalan dengan asumsi pertumbuhan *moderat.* Berdasarkan penghitungan proyeksi, belanja daerah pada APBD tahun 2025 diperkirakan mencapai nilai sebesar Rp3,57 triliun. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, nominal proyeksi belanja daerah mengalami peningkatan hingga menjadi Rp3,95 triliun pada tahun 2030 sehingga rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 2,06 persen. Adapun defisit berkisar antara Rp92,92 miliar hingga Rp222,77 miliar, sehingga jika dibandingkan total pendapatan daerah nilai defisit rata-rata sebesar 4,15 persen.

Dengan masih terbatasnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah, diperlukan strategi yang adaptif dan terarah untuk menggali serta memaksimalkan berbagai sumber pembiayaan alternatif. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat struktur pembiayaan pembangunan Kabupaten Kediri pada periode 2025–2030 serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan penuh tantangan, kemampuan untuk secara kreatif memanfaatkan berbagai peluang pendanaan menjadi kunci penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan agenda pembangunan daerah. Pembiayaan alternatif dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketergantungan pada skema pendanaan konvensional sekaligus memperluas ruang fiskal pemerintah daerah. Kabupaten Kediri telah menerapkan berbagai skema pembiayaan alternatif untuk memperkuat pendanaan pembangunan di luar sumber konvensional di antaranya pelibatan unsur swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur publik, pengelolaan zakat produktif di bawah pengelolaan BAZNAS yang dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Pemerintah Kabupaten Kediri juga mengoptimalkan Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk membiayaan APBD dan bekerja sama dengan perbankan dalam menyediakan subsidi bunga bagi kredit murah yang menyasar pelaku usaha mikro, serta optimalisasi pemanfaatan dana CSR dalam mendukung sektor-sektor pembangunan prioritas agar lebih terarah dan kolaboratif.

InUse Book 1.indb 149
10/19/2025 12:12:55 AM

TABEL 2.56
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2030 (Rp)
Sumber: Olah Data, 2025

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	R (%)
PENDAPATAN	**3.348.386.295.922,00**	**3.419.256.546.496,00**	**3.540.489.958.992,00**	**3.643.946.325.797,00**	**3.750.852.949.031,00**	**3.861.330.058.204,00**	**2,89%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**922.133.180.348,00**	**941.327.141.107,00**	**966.478.028.685,00**	**992.714.037.579,00**	**1.020.083.692.166,00**	**1.048.637.723.633,00**	**2,60%**
Pendapatan Pajak Daerah	481.571.644.359,00	471.410.476.797,00	493.189.640.825,00	515.975.002.231,00	539.813.047.334,00	564.752.410.121,00	3,27%
Pendapatan Retribusi Daerah	110.879.057.500,00	139.862.511.374,00	142.659.761.601,00	145.512.956.833,00	148.423.215.970,00	151.391.680.289,00	6,83%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.990.158.640,00	14.361.833.087,00	14.936.306.410,00	15.533.758.666,00	16.155.109.013,00	16.801.313.374,00	3,73%
Lain-Lain PAD yang Sah	315.692.319.849,00	315.692.319.849,00	315.692.319.849,00	315.692.319.849,00	315.692.319.849,00	315.692.319.849,00	0,00%
PENDAPATAN TRANSFER	**2.426.253.115.574,00**	**2.477.929.405.389,00**	**2.574.011.930.307,00**	**2.651.232.288.218,00**	**2.730.769.256.865,00**	**2.812.692.334.571,00**	**3,00%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.852.964.444.458,00	1.960.750.191.873,00	2.006.302.670.215,00	2.063.791.750.323,00	2.123.005.502.833,00	2.183.995.667.918,00	3,35%
Bagi Hasil Pajak	135.266.404.445,00	137.252.513.431,00	149.953.721.057,00	153.852.332.689,00	157.867.902.670,00	162.003.939.750,00	3,71%
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.263.721.751.121,00	1.313.702.628.555,00	1.358.779.802.257,00	1.399.243.196.325,00	1.440.920.492.215,00	1.483.848.106.981,00	3,26%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	453.976.288.892,00	509.795.049.887,00	497.569.146.901,00	510.696.221.309,00	524.217.107.948,00	538.143.621.187,00	3,57%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	403.874.438.116,00	404.874.438.116,00	404.972.063.718,00	417.121.225.629,00	429.634.862.398,00	442.523.908.270,00	1,85%
Dana Insentif Daerah	31.628.434.116,00	32.128.434.116,00	41.728.434.116,00	42.980.287.139,00	44.269.695.754,00	45.597.786.626,00	8,09%
Dana Desa	372.246.004.000,00	372.746.004.000,00	363.243.629.602,00	374.140.938.490,00	385.365.166.644,00	396.926.121.644,00	1,32%
Dana Penyesuaian							
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	169.414.233.000,00	112.304.775.400,00	162.737.196.374,00	170.319.312.266,00	178.128.891.634,00	186.172.758.383,00	4,99%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	169.414.233.000,00	112.304.775.400,00	162.737.196.374,00	170.319.312.266,00	178.128.891.634,00	186.172.758.383,00	4,99%
Bantuan Keuangan							
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya							

InUse Book 1.indb 150
10/19/2025 12:12:55 AM

InUse Book 1.indb 151

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	R (%)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-						
Pendapatan Hibah							
Pendapatan Lainnya							
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan							
BELANJA	**3.571.153.253.870,00**	**3.595.257.424.549,00**	**3.684.856.292.425,00**	**3.775.313.097.123,00**	**3.863.732.387.462,00**	**3.954.252.294.331,00**	**2,06%**
BELANJA OPERASI	**2.510.943.801.555,00**	**2.519.435.412.018,00**	**2.589.820.277.066,00**	**2.654.645.783.993,00**	**2.721.091.928.594,00**	**2.789.199.226.806,00**	**2,15%**
Belanja Pegawai	1.208.735.816.119,00	1.218.238.248.580,50	1.345.174.210.950,00	1.378.883.566.224,00	1.413.435.655.380,00	1.448.851.546.763,00	3,79%
Belanja Barang dan Jasa	1.019.901.141.714,00	1.030.284.403.803,90	1.004.010.065.165,00	1.027.860.316.795,00	1.052.306.824.715,00	1.077.364.495.332,00	1,12%
Belanja Hibah	239.414.364.661,00	229.751.448.356,85	193.207.577.284,00	198.037.766.716,00	202.988.710.884,00	208.063.428.656,00	-2,49%
Belanja Bantuan Sosial	42.892.479.061,00	41.161.311.276,75	47.428.423.667,00	49.864.134.258,00	52.360.737.615,00	54.919.756.055,00	5,24%
BELANJA MODAL	400.128.361.255,00	382.042.425.648,15	424.087.824.777,00	436.600.158.736,00	445.191.961.387,00	453.955.600.093,00	2,67%
Belanja Modal Tanah	17.648.817.520,00	15.000.000.000,00	15.737.745.842,00	16.209.878.217,00	16.534.075.781,00	16.864.757.297,00	-0,62%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.226.144.508,00	48.198.985.313,85	100.562.612.121,00	103.579.490.484,00	105.651.080.294,00	107.764.101.900,00	22,32%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	251.803.275.948,00	241.640.335.290,90	147.162.644.862,00	151.385.524.208,00	154.285.234.692,00	157.242.939.386,00	-7,29%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.234.447.180,00	75.076.855.043,40	151.222.579.857,00	155.759.257.253,00	158.874.442.398,00	162.051.931.246,00	20,88%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.517.601.358,00	1.456.350.000,00	8.664.421.272,00	8.924.353.910,00	9.102.840.988,00	9.284.897.808,00	99,58%
Belanja Modal Aset Lainnya	698.074.741,00	669.900.000,00	737.820.823,00	741.654.664,00	744.287.234,00	746.972.456,00	1,47%
BELANJA TAK TERDUGA	**18.810.026.142,00**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**-4,05%**
Belanja Tak Terduga	18.810.026.142,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-4,05%
TRANSFER	**641.271.064.918,00**	**678.779.586.882,85**	**655.948.190.582,00**	**669.067.154.394,00**	**682.448.497.481,00**	**696.097.467.431,00**	**1,70%**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**36.500.000.000,00**	**36.654.097.691,67**	**32.797.409.529,00**	**32.115.223.411,00**	**34.122.424.874,00**	**34.944.092.865,00**	**-0,70%**
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.870.227.244,00	3.958.642.550,70	3.279.740.953,00	3.532.674.575,00	4.094.690.985,00	4.018.570.679,00	1,38%
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	32.629.772.756,00	32.695.455.140,97	29.517.668.576,00	28.582.548.836,00	30.027.733.889,00	30.925.522.186,00	-0,93%

10/19/2025 12:12:55 AM

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	R (%)
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	604.771.064.918,00	642.125.489.191,18	623.150.781.053,00	636.951.930.983,00	648.326.072.607,00	661.153.374.566,00	1,84%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	523.067.931.629,00	552.227.920.704,41	532.793.917.800,00	546.504.756.783,00	557.560.422.442,00	571.897.669.000,00	1,84%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	81.703.133.289,00	89.897.568.486,76	90.356.863.253,00	90.447.174.200,00	90.765.650.165,00	89.255.705.566,00	1,87%
SURPLUS/(DEFISIT)	**- 222.766.957.948,00**	**- 176.000.878.053,00**	**- 144.366.333.433,00**	**- 131.366.771.326,00**	**- 112.879.438.431,00**	**- 92.922.236.127,00**	**-15,95%**
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**235.944.377.304,00**	**205.678.297.409,00**	**174.043.752.789,00**	**191.044.190.682,00**	**122.556.857.787,00**	**102.599.655.483,00**	**-14,11%**
Penggunaan SiLPA	235.944.377.304,00	205.678.297.409,00	174.043.752.789,00	191.044.190.682,00	122.556.857.787,00	102.599.655.483,00	-14,11%
Penerimaan Kembali Dana Bergulir							
Penerimaan Kembali Piutang							
Koreksi SiLPA							
Pencairan Dana Cadangan							
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**13.177.419.356,00**	**29.677.419.356,00**	**29.677.419.356,00**	**59.677.419.356,00**	**9.677.419.356,00**	**9.677.419.356,00**	**28,50%**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00						
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya							
Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00			
Pembayaran Pinjaman	9.677.419.356,00	9.677.419.356,00	9.677.419.356,00	9.677.419.356,00	9.677.419.356,00	9.677.419.356,00	
PEMBIAYAAN NETO	222.766.957.948,00	176.000.878.053,00	144.366.333.433,00	131.366.771.326,00	112.879.438.431,00	92.922.236.127,00	-15,95%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	

InUse Book 1.indb 152
10/19/2025 12:12:56 AM

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan

2.3.1.1 Permasalahan Kluster Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kediri menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, terutama terkait belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan. Rendahnya kualitas layanan kesehatan tercermin dari belum meratanya akreditasi fasilitas kesehatan dan tingginya prevalensi stunting yang mencapai angka memprihatinkan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas masyarakat tetapi juga menimbulkan beban ekonomi jangka panjang bagi daerah.

Di sektor pendidikan, ketidakmerataan akses pendidikan berkualitas, khususnya di daerah tertinggal, semakin memperparah kesenjangan kompetensi SDM. Minimnya jumlah tenaga kesehatan terlatih, rendahnya motivasi masyarakat terhadap pendidikan, serta ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri menjadi penghambat utama dalam menciptakan SDM yang adaptif terhadap tuntutan era globalisasi. Jika tidak segera diatasi melalui intervensi menyeluruh, berbagai tantangan ini akan terus menjadi batu sandungan dalam peningkatan daya saing daerah dan berpotensi mempertahankan siklus kemiskinan yang berulang. Akar masalahnya bersifat multidimensi, mulai dari budaya mutu yang masih lemah di fasilitas kesehatan, keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan guru, hingga kurangnya sinergi antara sektor pendidikan dengan dunia industri. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penguatan sistem kesehatan primer, serta penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Solusi-solusi strategis ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang tidak hanya produktif tetapi juga memiliki daya inovasi tinggi dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong kemajuan Kabupaten Kediri di berbagai sektor pembangunan.

TABEL 2.57
Identifikasi Permasalahan Kluster Sumber Daya Manusia

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SDM	Manajemen dan pengelolaan fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan	Budaya mutu di puskesmas masih belum terbentuk sehingga capaiannya tidak konsisten
2.			Belum semua rumah sakit optimal dalam pelaksanaan akreditasi
3.		Cakupan dan kemampuan SDM di bidang kesehatan yang belum optimal	Cakupan dan kemampuan SDM di bidang kesehatan yang belum optimal
4.		Kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak belum optimal.	Masih ada ibu hamil yang tidak melalukan pemeriksaan kehamilan secara rutin
5.			Prevalensi stunting masih tinggi
6.			Fenomena tiga keterlambatan masih terjadi, yaitu terlambat dalam pengambilan keputusan untuk merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai, terlambat dalam mencapai tempat rujukan, dan terlambat dalam penanganan yang tepat.

InUse Book 1.indb 153 10/19/2025 12:12:56 AM

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
7.		Upaya penemuan dan pengobatan yang belum optimal	Upaya penemuan dan pengobatan yang belum optimal
8.		Penanggulangan TBC yang belum optimal	Penanggulangan TBC yang belum optimal
9.		Belum semua masyarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Belum semua masyarakat memiliki akses yang optimal terhadap informasi JKN
10.			Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadi peserta JKN
11.			Keterbatasan ekonomi masyarakat
12.		Dukungan tenaga pendidik, materi pembelajaran, dan kapasitas murid yang belum optimal untuk mendukung kompetensi literasi dan numerasi	Dukungan tenaga pendidik, materi pembelajaran, dan kapasitas murid yang belum optimal untuk mendukung kompetensi literasi
13.			Dukungan tenaga pendidik, materi pembelajaran, dan kapasitas murid yang belum optimal untuk mendukung kompetensi numerasi
14.		Tantangan masyarakat untuk mengakses pendidikan	Faktor perekonomian keluarga menjadi tantangan bagi anak untuk melanjutkan pendidikan
15.			Rendahnya motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan
16.		Belum meratanya kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan	Rendahnya pemerataan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan
17.		Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang dan belum merata	Kondisi fasilitas dan infrastruktur sekolah menengah yang belum memadai
18.			Kualitas program pembelajaran di LKP/PKBM yang belum memadai
19.			Kualitas program pembelajaran di LKP/PKBM yang belum memadai
20.		Tantangan masyarakat untuk mengakses pendidikan	Akses terhadap pendidikan yang belum optimal
21.			Akses terhadap pendidikan di tingkat sekolah dasar belum optimal
22.			Akses terhadap pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama belum optimal
23.			Akses terhadap pendidikan di tingkat sekolah menengah atas belum optimal
24.		Kesadaran untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi kurang dan kemampuan ekonomi yang kurang	Kesadaran untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi kurang dan masih adanya kasus putus sekolah
25.			Terdapat remaja yang lebih memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga
26.		Persentase penduduk miskin yang relatif lebih tinggi	Daya beli masyarakat yang menurun
27.			Ketidakmerataan sarana dan prasarana layanan dasar
28.			Keterbatasan akses terhadap pekerjaan
29.			Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum optimal
30.			Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum ditanggulangi secara optimal
31.			Angka putus sekolah dapat berdampak pada tingkat pengangguran terbuka
32.			Ketidakcocokan antara kebutuhan pasar kerja dan kompetensi/ kualifikasi SDM
33.		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum optimal	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum optimal

InUse Book 1.indb 154 10/19/2025 12:12:56 AM

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
34.		Kurangnya inklusivitas terhadap pekerja penyandang disabilitas	Keterbatasan lapangan pekerjaan dengan prasarana ramah disabilitas
35.			Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat yang inklusif
36.			Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan informasi bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor formal
37.		Pemberdayaan perempuan dan edukasi tentang keluarga bencana yang belum optimal	Kurangnya edukasi masyarakat mengenai risiko perkawinan usia dini
38.			Tingginya angka putus sekolah di kalangan anak-anak
39.			Kehamilan yang tidak diinginkan masih menjadi masalah
40.			Kemampuan IT di masyarakat masih belum memadai untuk mendukung pendataan kondisi keluarga
41.			Adanya keinginan untuk memiliki lebih dari dua anak
42.		Kurangnya pemahaman perangkat daerah mengenai prinsip responsif gender	Kurangnya pemahaman SKPD mengenai prinsip responsif gender
43.			Kurangnya pemahaman SKPD mengenai prinsip responsif gender dalam penanganan kasus kekerasan
44.			Terbatasnya jumlah tenaga terlatih dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan
45.			Ketidakmampuan ekonomi perempuan masih menjadi kendala
46.		Penurunan kualitas air dikarenakan aktivitas penduduk dan industri	Pertambahan jumlah penduduk yang pesat meningkatkan aktivitas di sekitar aliran sungai, menyebabkan penurunan kualitas air
47.		Perlunya upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar tidak terbarukan	Peningkatan jumlah penduduk dan moda transportasi menyebabkan peningkatan penggunaan bahan bakar industri, berdampak pada kualitas lingkungan
48.		Stagnasi luasan RTH di perkotaan	Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) belum optimal
49.			Pengelolaan alih fungsi lahan yang belum optimal
50.			Data potensi RTH yang dikelola tidak mencakup keseluruhan potensi yang ada
51.		Kurangnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat serta rendahnya kesadaran untuk hidup bersih	Banyaknya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang harus dituntaskan mengakibatkan penanganan dilakukan secara bertahap
52.			DED yang sudah disusun terkadang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya
53.		Kurangnya penanganan sampah terpadu dengan sarana prasarana yang memadai	Lahan yang terbatas sebagai lokasi pembangunan tempat pengelolaan sampah
54.		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Implementasi 3R di tiap tingkatan yang belum optimal
55.		Pemenuhan kebutuhan listrik dari energi alternatif belum optimal	Pemenuhan kebutuhan listrik dari energi alternatif belum optimal
56.		Kurangnya diversifikasi konsumsi pangan berkualitas untuk mencapai pola pangan harapan (PPH) ideal	Pola konsumsi masyarakat yang masih bergantung pada beras dan tepung terigu kurang mendukung keberagaman pangan
57.		Kurangnya ketersediaan pangan, distribusi yang tidak merata, dan tingginya angka kerawanan pangan serta masalah gizi	Masih kurangnya kemampuan pengelola cadangan pangan masyarakat dalam manajemen usaha dan pengelolaan stok pangan
58.			Masih ada desa di Kabupaten Kediri yang masuk prioritas 2 daerah rentan rawan pangan

InUse Book 1.indb 155 10/19/2025 12:12:56 AM

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
59.		Pembinaan perekonomian agrobisnis yang belum efektif	Kurangnya pemahaman dan wawasan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan dalam penggunaan pestisida secara bijak saat budi daya serta penanganan produk yang baik saat pascapanen
60.		Kurangnya pengelolaan sumber daya air yang efektif	Kelembagaan untuk penyediaan sumber daya air yang belum optimal
61.		Sistem jaringan sumber daya air tidak merata	Belum ada pendataan terkait jaringan sumber daya air
62.			Wilayah Kabupaten Kediri yang luas dan lokasi sumber yang jauh dari pemukiman membuat akses SPAM masih terhambat

3.2.1.2 Permasalahan Kluster Ekonomi

Kabupaten Kediri menghadapi berbagai tantangan mendasar dalam upaya penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya produktivitas dan daya saing sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Banyak pelaku UMKM masih terkendala oleh keterbatasan akses permodalan, teknologi produksi yang tertinggal, serta kesulitan dalam pemasaran produk. Di sisi lain, struktur industri yang belum terintegrasi dengan baik antara sektor hulu dan hilir menyebabkan inefisiensi dalam rantai pasokan dan nilai tambah produk yang rendah.

Akar permasalahan ekonomi di Kabupaten Kediri bersifat multidimensional. *Pertama*, dari sisi sumber daya manusia, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. *Kedua*, terbatasnya infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan jaringan logistik menghambat pengembangan usaha. *Ketiga*, belum optimalnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi dalam menciptakan ekosistem usaha yang inovatif. *Keempat*, dampak pandemi yang berkepanjangan telah memperparah kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. *Kelima*, tingginya tingkat ketergantungan pada sektor tertentu membuat perekonomian daerah rentan terhadap guncangan eksternal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi penguatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan akses pembiayaan, pengembangan infrastruktur pendukung, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan yang propertumbuhan inklusif.

3.2.1.3 Permasalahan Kluster Lingkungan dan Infrastruktur

Kabupaten Kediri menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Masalah utama meliputi penurunan kualitas lingkungan akibat tekanan aktivitas penduduk dan industri, seperti menurunnya kualitas air sungai akibat limbah domestik dan industri, serta pencemaran udara dari emisi kendaraan dan industri. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih belum merata, terutama di wilayah terpencil, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pengelolaan sampah yang belum optimal dengan terbatasnya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) menyebabkan masalah persampahan di berbagai wilayah.

InUse Book 1.indb 156 10/19/2025 12:12:56 AM

TABEL 2.58
Identifikasi Permasalahan Kluster Ekonomi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ekonomi	Ketidakstabilan dan inefisiensi dalam rantai pasokan dan struktur industri	Pasokan bahan baku yang terbatas dan harga jual yang fluktuatif
2.			Keterbatasan akses pasar Belum optimalnya struktur industri (hulu-hilir)
3.			Masih rendahnya kualitas, desain, dan kemasan produk IKM
4.			Belum optimalnya penerapan teknologi industri pada IKM
5.		Rendahnya daya saing produk IKM	Belum terintegrasinya kerja sama antara IKM dan industri besar
6.			Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi
7.			komunikasi dan informasi sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata
8.		Belum optimalnya sistem pengelolaan pariwisata	Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia bidang kebudayaan dan kepariwisataan
9.			Masih terbatasnya sarana-prasarana penunjang/pendukung pariwisata.
10.			Terbatasnya investasi di bidang pariwisata
11.			Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk wisata
12.		Rendahnya daya tarik wisata	Penurunan jumlah wisatawan
13.			Terbatasnya akomodasi dan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata dan pendidikan
14.		Terbatasnya permintaan atas penyediaan akomodasi dan makan minum	Perubahan preferensi dan pola konsumsi masyarakat
15.			Melemahnya daya beli
16.			Kurangnya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan
17.			Terbatasnya akses ke modal dan pembiayaan
18.		Kurangnya dukungan dan fasilitasi untuk pengembangan kewirausahaan	Proses perizinan usaha yang kompleks
19.			Belum optimalnya pemberdayaan kewirausahaan
20.			Kurangnya inovasi dan diversifikasi
21.			Keterbatasan akses pasar
22.		Kurangnya pengembangan dan dukungan ekosistem usaha koperasi	Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia
23			Keterbatasan akses modal dan pembiayaan
24.			Keterbatasan alat produksi
25.			Tingginya persaingan dengan usaha swasta
26.		Rendahnya daya saing koperasi	Kurangnya kompetensi manajerial dalam perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan pengendalian operasional
27.			Kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar
28.		Belum efektifnya manajemen pengelolaan BUMD	Rendahnya produktivitas aset daerah dalam menyumbang pendapatan
29.			Kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik
30.		Belum optimalnya efisiensi operasional BUMD	Kurangnya keunggulan kompetitif BUMD dibandingkan perusahaan swasta
31.			Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja
32.		Rendahnya daya saing BUMD	Keterbatasan akses ke pendidikan dan keterampilan

InUse Book 1.indb 157
10/19/2025 12:12:56 AM

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
33.		Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja	Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang cukup
34.			Pertumbuhan populasi yang cepat tanpa disertai dengan pertumbuhan lapangan kerja yang seimbang
35.		Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja	Minimnya investasi pada sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru
36.			Belum optimalnya kemitraan penyaluran tenaga kerja
37.		Belum optimalnya efisiensi dalam penciptaan dan penyaluran lapangan kerja	Persepsi masyarakat yang masih mengakar bahwa perempuan lebih cocok untuk mengurus rumah tangga dan keluarga
38.			Tanggung jawab ganda pada perempuan
39.		Ketidaksetaraan gender dalam kesempatan dan partisipasi di pasar kerja	Diskriminasi gender di lingkungan kerja
40.			Keterbatasan akses modal bagi perempuan
41.			Belum optimalnya kebijakan dan regulasi yang mendukung partisipasi perempuan dalam angkatan kerja
42.		Kurangnya dukungan dan fasilitasi untuk partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Kurangnya kapasitas tenaga ahli di bidang inovasi
43.			Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berinovasi
44.		Keterbatasan sumber daya inovasi	Kurikulum pendidikan yang kurang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah
45.			Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung inovasi
46.			Belum optimalnya kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi
47.			Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dalam ekosistem inovasi
48.		Kurangnya efektivitas dalam pengembangan ekosistem inovasi	Kurangnya strategi investasi yang komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta
49.			Kurangnya keterampilan dan kapasitas SDM dalam mengelola dan mengimplementasikan investasi
50.		Kurangnya efektivitas dalam perencanaan dan pengelolaan investasi	Keterbatasan dalam akses atau kualitas data yang relevan untuk perencanaan dan evaluasi investasi
51.			Kurangnya fasilitas atau layanan yang mendukung investasi, seperti pusat layanan investasi atau program bimbingan
52.		Kurangnya dukungan dan kemudahan dalam proses investasi	Prosedur dan regulasi yang terlalu kompleks dan berbelit
53.			Banyak industri masih menggunakan teknologi produksi yang menghasilkan emisi gas buang berbahaya
54.			Banyak industri masih menggunakan teknologi produksi yang sudah usang dan kurang efisien, sehingga menghasilkan emisi yang lebih tinggi
55.		Belum optimalnya adopsi teknologi produksi yang ramah lingkungan dan efisien	Biaya untuk mengadopsi teknologi bersih sering kali menjadi kendala bagi industri, terutama industri kecil dan menengah
56.			Kurangnya kesadaran dari pemilik industri dan masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara
57.			Kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan daripada dampak lingkungan yang ditimbulkan
58.		Kurangnya perhatian terhadap dampak lingkungan dalam praktik industri	Pengawasan terhadap industri oleh pemerintah sering kali kurang efektif
59.			Ketidakpastian hukum pada pelaku pelanggaran lingkungan

InUse Book 1.indb 158 10/19/2025 12:12:56 AM

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
60.		Kurangnya efektivita dalam penegakan hukum lingkungan	Kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi digital membuat lulusan kurang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin digital
61.			Belum optimalnya akses dan adopsi teknologi digital
62.		Belum optimalnya performa regulasi dalam menjaga kondusivitas ekonomi	Ketergantungan pada kondisi pasar
63.			Kebijakan pajak dan subsidi yang belum optimal
64.			Belum efisiennya penambahan dan pengurangan barang modal
65.			Manajemen proyek yang belum sepenuhnya akuntabel dan bertanggung jawab
66.		Belum efektifnya pengelolaan ekonomi daerah	Keterbatasan SDM
67.			Kesenjangan distribusi investasi, baik antarwilayah maupun sektoral
68.			Pembiayaan dan akses modal yang terbatas, berbelit, dan tidak ramah pengusaha
69.			Terbatasnya sumber daya dan produksi lokal
70.			Terbatasnya infrastruktur penunjang produksi di semua lini skala produksi
71.			Kurang berkembangnya daya saing ekspor domestik
72.			Sistem pemasaran yang tidak merata dan optimal
73.			Kantong kemiskinan yang belum terentaskan
74.			Belum meratanya akses air bersih dan sanitasi layak sebagai kebutuhan dan hak dasar
75.		Pemerataan ruang hidup layak huni yang belum tercapai	Kebijakan tata ruang dan sosial yang belum sepenuhnya inklusif
76.			Kualitas bangunan dan konstruksi tanpa kontrol standar minimal
77.			Kelembagaan perangkat desa yang belum terstandar
78.			Kapasitas aparatur desa belum mencapai standar pelayanan minimal desa (SPM desa)
79.		Sistem kelembagaan desa yang belum berorientasi pada pembangunan yang maju dan berkelanjutan	Belum meratanya keberadaan peta jalan operasional pada setiap desa untuk mengarahkan pembangunan
80.			Kebijakan pemerintah daerah yang belum berpihak pada pembangunan perdesaan
81.		Kondisi ekonomi makro belum mendukung investasi dengan optimal	Penurunan realisasi investasi setelah PSN berakhir menjadi tantangan
82.		Fasilitas kredit kurang progresif	Ketimpangan akses terhadap penyediaan kredit
83.			Keterbatasan produk kredit yang inovatif
84.			Keterbatasan informasi dan edukasi tentang kredit
85.		Pengawasan terhadap koperasi dan unit simpan pinjam masih rendah	Jumlah tenaga pengawas yang kompeten terbatas
86.			Keterbatasan pelatihan untuk pengawas koperasi mengakibatkan pemahaman yang tidak merata
87.			Pemanfaatan teknologi informasi SAPPAKOP belum optimal
88.		Kooperasi belum mampu untuk memberikan pelayanan yang optimal	Jumlah tenaga penilai kesehatan koperasi terbatas
89.			Kesadaran dan motivasi pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan masih rendah

InUse Book 1.indb 159 10/19/2025 12:12:56 AM

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
90.			Pembentukan koperasi menjadi kewenangan Kementerian Koperasi
91.			Keberadaan anggota koperasi yang tidak aktif tidak terdata
92.			Tidak adanya forum yang dilaksanakan secara rutin menghambat komunikasi
93.		Pengelolaan UMKM yang belum optimal dari pelaku usaha Daya saing UMKM yang belum optimal	Jumlah kegiatan pelatihan untuk UMKM terbatas
94.			Kesadaran pelaku usaha mikro tentang legalitas usaha masih rendah
95.			Informasi mengenai kegiatan pelatihan untuk pelaku usaha mikro masih terbatas
96.			Jumlah peserta yang dapat mengikuti kegiatan kemitraan terbatas
97.			Belum ada sarana untuk foto produk di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
98.			Standardisasi mutu produk makanan dan minuman belum diterapkan
99.			Jumlah kegiatan pameran terbatas
100.			Rantai pasok yang belum efektif dan efisien untuk mendukung impor
101.			Penurunan permintaan terhadap produk unggulan impor kabupaten
102.		Peraturan terkait penanaman modal belum diperbarui dan belum adanya kajian peluang investasi	Peraturan penanaman modal belum diperbarui
103.			Dokumen potensi peluang investasi belum tersedia untuk investor
104.			Terbatasnya perusahaan yang diwajibkan bermitra dengan UMK pada aplikasi OSS
105.		Pelayanan dan pengelolaan untuk penanaman modal belum optimal	Materi dan bahan promosi belum tersedia
106.			Ketidakjelasan informasi perizinan menyebabkan kebingungan pemohon
107.			Sinkronisasi dengan OPD teknis masih perlu ditingkatkan
108.			Data tidak dapat diperbarui secara *real-time*
109.			Sistem informasi dan teknologi belum terintegrasi dengan baik

Akar permasalahan ini bersifat struktural dan kultural. Dari sisi tata kelola, lemahnya pengawasan terhadap pemenuhan AMDAL oleh industri dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan memperparah kerusakan ekosistem. Keterbatasan anggaran daerah untuk pemeliharaan infrastruktur menyebabkan banyak fasilitas yang cepat rusak. Di sisi masyarakat, masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan terlihat dari minimnya partisipasi dalam program pengelolaan sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*). Tantangan geografis Kabupaten Kediri yang terdiri dari dataran tinggi dan rendah juga menyulitkan pemerataan pembangunan infrastruktur. Untuk mengatasi ini, diperlukan pendekatan terpadu yang meliputi penguatan regulasi perlindungan lingkungan, peningkatan alokasi anggaran infrastruktur, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

InUse Book 1.indb 160 10/19/2025 12:12:56 AM

TABEL 2.59
Identifikasi Permasalahan Kluster Lingkungan dan Infrastruktur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lingkungan dan IInfrastruktur	Tantangan multidimensional dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar penunjang pembangunan bagi seluruh masyarakat	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah
2.			Belum optimalnya akses terharap infrastruktur dasar akibat keberagaman kondisi geografis
3.			Masih terdapat infrastruktur dengan kondisi kurang baik
4.			Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
5.			Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan wilayah berbasis lingkungan
6.			Kurangnya perwujudan tata ruang berbasis lingkungan
7.		Terbatasnya keterlibatan aspek lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang masih kurang optimal
8.			Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif
9.		Pengembangan desa tangguh bencana belum optimal	Diperlukannya pembentukan Kampung Siaga Bencana di daerah-daerah rawan bencana
10.			Diperlukannya sistem mitigasi bencana di masing-masing desa rawan bencana
11.		Perlunya upaya untuk mengurangi penggunakaan bahan bakar tidak terbarukan	Peningkatan jumlah penduduk dan moda transportasi menyebabkan peningkatan penggunaan bahan bakar industri, berdampak pada kualitas lingkungan
12.		Stagnasi luasan RTH di perkotaan	Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) belum optimal
13.			Pengelolaan alih fungsi lahan yang belum optimal
14.			Data potensi RTH yang dikelola tidak mencakup keseluruhan potensi yang ada
15.		Kurangnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat serta rendahnya kesadaran untuk hidup bersih	Banyaknya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang harus dituntaskan mengakibatkan penanganan dilakukan secara bertahap
16.			DED yang sudah disusun terkadang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya
17.		Kurangnya penanganan sampah terpadu dengan sarana prasarana yang memadai	Lahan yang terbatas sebagai lokasi pembangunan tempat pengelolaan sampah
18.		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Implementasi 3R di tiap tingkatan yang belum optimal
19.		Pemenuhan kebutuhan listrik dari energi alternatif belum optimal	Pemenuhan kebutuhan listrik dari energi alternatif belum optimal
20.		Kurangnya diversifikasi konsumsi pangan berkualitas untuk mencapai pola pangan harapan (PPH) ideal	Pola konsumsi masyarakat yang masih bergantung pada beras dan tepung terigu kurang mendukung keberagaman pangan
21.		Kurangnya ketersediaan pangan, distribusi yang tidak merata, dan tingginya angka kerawanan pangan serta masalah gizi	Kurangnya diversifikasi konsumsi pangan berkualitas untuk mencapai pola pangan harapan (PPH) ideal
22.			Masih ada desa di Kabupaten Kediri yang masuk prioritas 2 daerah rentan rawan pangan
23.		Pembinaan perekonomian agrobisnis yang belum efektif	Kurangnya pemahaman dan wawasan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan dalam penggunaan pestisida secara bijak saat budi daya serta penanganan produk yang baik saat pascapanen
24.		Kurangnya pengelolaan sumber daya air yang efektif	Kelembagaan untuk penyediaan sumber daya air yang belum optimal

InUse Book 1.indb 161 10/19/2025 12:12:56 AM

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
25.		Sistem jaringan sumber daya air tidak merata	Belum ada pendataan terkait jaringan sumber daya air
26.			Wilayah Kabupaten Kediri yang luas dan lokasi sumber yang jauh dari pemukiman membuat akses SPAM masih terhambat
27.		Kualitas dan konektivitas infrastruktur guna mendukung aktivitas perekonoian yang belum optimal	Kualitas dan kuantitas infrastruktur guna mendukung aktivitas perekonomian belum optimal
28.			Data kondisi jalan tidak *update* dan akurat karena survei hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun sehingga tidak bisa menjadi dasar pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan (hanya berdasarkan aduan masyarakat)
29.			Peningkatan mobilitas dampak pembangunan bandara, stadion dan Jembatan Jongbiru menyebabkan kerusakan jalan di beberapa ruas
30.		Kurangnya kesiapan dan integrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari	Generasi tua cenderung lebih sulit beradaptasi dengan teknologi digital
31.			Terbatasnya materi pelatihan digital yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
32.			Ketidakmerataan kualitas infrastruktur transportasi dan penunjang konektivitas antarwilayah
33.			Perbedaan kualitas dan ketersediaan produk di daerah

3.2.1.3 Permasalahan Kluster Tata kelola Pemerintah

Kabupaten Kediri menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan. Masalah utama meliputi birokrasi yang masih berbelit-belit, sistem pelayanan yang kurang transparan, serta kapasitas SDM aparatur yang belum optimal dalam menghadapi tuntutan pemerintahan modern. Sistem pengelolaan keuangan daerah juga menghadapi kendala akuntabilitas, sementara koordinasi antar-OPD sering terhambat oleh belum terintegrasinya sistem informasi pemerintahan secara digital. Akar masalahnya bersumber pada tumpang-tindih regulasi, keterbatasan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang masih rendah. Untuk mengatasi ini, diperlukan penyederhanaan birokrasi, penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan sistem informasi terpadu, dan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal juga menjadi kunci penting, termasuk optimalisasi peran inspektorat dan aparat pengawasan fungsional. Transformasi tata kelola ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

InUse Book 1.indb 162 10/19/2025 12:12:56 AM

TABEL 2.60
Identifikasi Permasalahan Kluster Tata Kelola Pemerintah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tata Kelola Pemerintah	Kelembagaan peradilan yang belum inklusif dan efisien	Tumpang-tindih regulasi dan kepentingan
2.			Kurangnya transparansi dalam peradilan dan penegakan inklusif hukum yang belum konsisten
3.		Keterbatasan informasi dalam peningkatan kesadaran hukum	Keterbatasan dan ketidaktahuan akan akses terhadap layanan hukum
4.			Terbatasnya partisipasi publik dan edukasi hukum
5.		Sistem jaringan terpadu pemerintah yang belum terintegrasi secara online	Belum diterapkannya pembuatan basis data terintegrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
6.			Keterbatasan SDM dengan keahlian yang sesuai
7.			Terdapat 80% OPD belum menerapkan sistem komputasi awan (*cloud computing*)
8.		Rendahnya perhatian terhadap kualitas perangkat penunjang pemerintahan	Belum adanya arahan peremajaan perangkat keras yang perlu diperbarui pada tingkat OPD
9.			Seluruh OPD masih menggunakan sistem operasi komputer dan perangkat lunak kantor yang tidak berlisensi
10.		Pelayanan publik inklusif yang belum efisien	Keterbatasan SDM terampil
11.			Birokrasi yang berbelit dan tidak efisien
12.			Kurangnya akuntabilitas dan transparansi
13.			Terbatasnya aksesibilitas disertai partisipasi masyarakat yang rendah
14.		Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum antikorupsi	Persepsi antikorupsi yang belum mengakar di masyarakat
15.			Penegakan hukum yang lemah
16.			Masih maraknya politik uang dan bentuk korupsi lain dalam praktik keseharian
17.		Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan urgensi penegakan demokrasi
18.			Masih adanya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan demokratis, seperti pemilu
19.			Belum efektifnya pendidikan politik kepada masyarakat
20.			Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil
21.		Sistem kelembagaan perpajakan yang belum optimal	Kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal
22.			Sistem administrasi konvensional yang rumit dan belum mendukung pengawasan pajak dan retribusi secara optimal
23.			Perangkat hukum dan *law enforcement* yang tidak tegas
24.			Belum terbentuknya basis data perpajakan dan retribusi daerah
25.		Kebijakan finansial belum inovatif dan pro-rakyat	Minimnya kesadaran finansial akibat belum adanya edukasi keuangan
26.			Insentif seperti suku bunga yang kurang menarik bagi masyarakat
27.			Terbatasnya inovasi produk keuangan yang inklusif
28.		Perlunya peningkatan kondisi hidup rukun di masyarakat	Konflik sosial dapat memicu kriminalitas

InUse Book 1.indb 163
10/19/2025 12:12:57 AM

Berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, permasalahan setiap urusan dilihat dari hasil capaian kinerja yang digambarkan melalui interpretasi. Adapun permasalahan mencakup tantangan-tantangan pada urusan tersebut yang dielaborasikan menurut kondisi eksisting daerah. Di sisi lain, faktor-faktor penentu keberhasilan berisikan aspek apa saja yang dapat digunakan untuk menjadi dorongan berhasilnya setiap indikator kinerja pada urusan terkait.

TABEL 2.61
Permasalahan Berdasarkan Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Sumber: Diolah Berdasarkan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**PENDIDIKAN**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Urusan pendidikan menghadapi beberapa tantangan. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah belum optimalnya persentase satuan pendidikan SD yang terakreditasi A dan persentase atlet pelajar yang dibina/dilatih. Kedua indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun indikator lain menunjukkan capaian yang baik atau bahkan melampaui target, rendahnya persentase akreditasi A untuk sekolah dasar dan belum optimalnya pembinaan atlet pelajar menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi.	• Peningkatan anggaran pendidikan untuk sarana, pelatihan guru, dan program mutu. • Pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkala. • Penyediaan infrastruktur memadai (perpustakaan, laboratorium, ruang kreatif). • Penguatan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan daerah. • Pendampingan intensif untuk akreditasi sekolah dan lembaga kursus. • Penyederhanaan perizinan operasional satuan pendidikan. • Program inklusif pendidikan nonformal dengan sosialisasi masif. • Sinergi antardinas (pendidikan, PUPR, kesehatan) untuk layanan terpadu. • Sistem pemantauan *real-time* capaian indikator pendidikan. • Pelibatan masyarakat dan industri dalam mendukung pendidikan vokasi.
	Persentase satuan pendidikan SD yang terakreditasi A	<		
	Persentase satuan pendidikan SMP yang terakreditasi A	>		
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	>		
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	>		
	Persentase satuan PAUD yang terakreditasi	>		
	Cakupan pelayanan pendidikan nonformal/kesetaraan	>		
	Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	>		
	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan	=		
	Rasio guru satuan SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan terhadap peserta didik SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal/ kesetaraan	>		
	Persentase kelayakan izin operasional SD, SMP, PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat	=		
	Persentase pemuda yang dibina/ dilatih	>		
	Persentase atlet pelajar yang dibina/dilatih	<		

InUse Book 1.indb 164 10/19/2025 12:12:57 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	**KESEHATAN**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah belum optimalnya capaian pada beberapa indikator, yaitu persentase kecamatan STBM, angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan, dan persentase UKBM Purnama Mandiri. Selain itu, pada RSUD SLG, persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah juga belum optimal. Demikian pula, pada RSUD Kabupaten Kediri, persentase tersedianya peralatan dan mesin di rumah sakit belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari tingkat kecamatan hingga rumah sakit.	• Komitmen dan dukungan anggaran yang memadai. • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar akreditasi. • Peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan yang profesional dan responsif. • Penguatan program promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat. • Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi kesehatan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. • Sinergi dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat. • Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan rentan. • Pengawasan yang ketat terhadap standar mutu dan keamanan obat, makanan, dan produk kesehatan lainnya. • Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan peran aktif UKBM dalam upaya peningkatan kesehatan di tingkat komunitas. • Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
	Persentase kecamatan STBM	<		
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi	>		
	Indeks keluarga sehat	>		
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) terakreditasi	>		
	Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	>		
	AKI	<		
	AKB	<		
	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	<		
	Persentase pemberian rekomendasi apotek, TO, TK. ALKES dan OPTIKAL, UMOT	>		
	Persentase produk makanan minuman tertentu yang bersertifikat P-IRT	>		
	Persentase UKBM Purnama Mandiri (posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	<		
	RSUD SLG			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	<		
	Persentase tersedianya peralatan dan mesin di rumah sakit	>		
	Nilai akreditasi rumah sakit	=		
	Persentase realisasi anggaran Jamkesda	n.a		
	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan	>		
	RSUD Kabupaten Kediri			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	>		
	Nilai akreditasi rumah sakit	=		
	Persentase tersedianya peralatan dan mesin di rumah sakit	<		
	Persentase realisasi anggaran Jamkesda	n.a		

InUse Book 1.indb 165 10/19/2025 12:12:57 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	>	Kondisi infrastruktur irigasi dan jalan kabupaten masih memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Meskipun terdapat keberhasilan dalam penyelesaian peraturan tata ruang, kondisi infrastruktur yang belum optimal dapat menghambat kelancaran distribusi air untuk pertanian dan mobilitas masyarakat serta barang, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada sektor-sektor terkait.	• Alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur. • Perencanaan yang matang dan terintegrasi antara sektor pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sektor lainnya. • Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang efisien, efektif, dan akuntabel. • Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. • Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. • Koordinasi yang baik antar-organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan dengan pemerintah pusat/provinsi. • Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. • Komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan tata ruang yang baik.
	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	<		
	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	<		
	Cakupan penyelesaian peraturan tata ruang	>		
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
	Pertanahan			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan tidak menghadapi permasalahan signifikan karena seluruh indikator yang terisi menunjukkan capaian yang optimal atau bahkan melampaui target. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah menjaga	• Kebijakan dan regulasi yang mendukung penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

InUse Book 1.indb 166 10/19/2025 12:12:57 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase rumah tangga/KK mendapatkan akses air melalui SPAM	>	konsistensi kinerja yang sudah sangat baik ini agar tidak mengalami penurunan di masa mendatang. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan agar capaian yang telah sesuai target tetap terjaga.	• Perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. • Investasi yang memadai dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. • Kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, pengembang, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyediaan perumahan dan infrastruktur. • Penegakan hukum yang konsisten terhadap peraturan perizinan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman. • Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman dan peningkatan kualitas hunian. • Inovasi dan teknologi dalam pembangunan perumahan yang efisien dan berkelanjutan.
	Persentase pengelolaan TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/TPS	>		
	Cakupan pelayanan SPALD yang aman	>		
	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	=		
	Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki izin	n.a		
	Persentase peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan			
	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah	>		
5.	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
	Satpol PP		Tantangan yang mungkin dihadapi meliputi peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara cepat dan efektif, serta perluasan cakupan layanan penanganan bencana kebakaran agar seluruh wilayah dan masyarakat dapat terlayani dengan baik.	• Peningkatan kapasitas dan responsivitas aparat dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. • Penguatan sistem deteksi dini dan pencegahan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran. • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pengamanan dan penanganan kebakaran yang memadai dan modern. • Peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran dan petugas ketertiban umum melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. • Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ketenteraman, ketertiban umum, dan pencegahan kebakaran. • Sinergi dan koordinasi yang baik antara aparat kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemadam kebakaran, dan instansi terkait lainnya.
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=		
	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	=		
	Cakupan layanan kasus penanganan bencana kebakaran	=		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=		
	Tingkat ketersediaan kajian risiko bencana kabupaten	=		

InUse Book 1.indb 167 10/19/2025 12:12:57 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	**Sosial**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah belum optimalnya penanganan terhadap warga negara migran korban kekerasan, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat program rehabilitasi sosial, pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan korban bencana. Capaian pada indikator-indikator tersebut belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan target. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal kepada kelompok-kelompok rentan tersebut, sehingga diperlukan perbaikan strategi dan peningkatan alokasi sumber daya.	• Penguatan kelembagaan dan koordinasi antarberbagai pihak terkait dalam penanganan masalah sosial. • Peningkatan kapasitas pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial lainnya. • Perluasan jangkauan dan kualitas program rehabilitasi sosial bagi PPKS. • Implementasi program perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan. • Optimalisasi pemberdayaan PPKS seperti karang taruna, organisasi sosial, dan relawan. • Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah sosial.
	Pesentase pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial	=		
	Persentase penanganan warga negara migran korban tidak kekerasan	<		
	Persentase PPKS yang mendapat program rehabilitasi sosial	<		
	Persentase pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial	<		
	Persentase penanganan korban bencana	<		
	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/kota	=		
7.	**Tenaga Kerja**			
	Transmigrasi			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Permasalahan dalam urusan tenaga kerja dan transmigrasi berfokus pada upaya peningkatan tata kelola kerja yang layak.	• Penyusunan dan implementasi rencana tenaga kerja daerah yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. • Peningkatan akses dan kualitas pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja. • Sosialisasi dan pendampingan kepada perusahaan terkait penerapan tata kelola kerja yang layak dan pemenuhan hak-hak pekerja. • Pengembangan program transmigrasi yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi wilayah tujuan. • Peningkatan kualitas pembinaan dan pemberdayaan bagi transmigran. • Peningkatan informasi pasar kerja yang akurat dan mudah diakses oleh pencari kerja dan pemberi kerja.
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	>		
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	>		
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	<		
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	<		
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	>		
8.	**Pangan**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Tantangan yang dihadapi meliputi efektivitas perumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan, pengendalian fluktuasi harga pangan utama, peningkatan skor pola pangan harapan masyarakat menuju konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).	• Perumusan dan implementasi kebijakan pangan yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. • Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan B2SA.

InUse Book 1.indb 168 10/19/2025 12:12:57 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	=		• Penguatan kelembagaan dan pengelolaan cadangan pangan di tingkat masyarakat dan daerah. • Peningkatan produktivitas pertanian melalui inovasi teknologi, penyediaan sarana produksi, dan pendampingan petani. • Kemitraan dan kerja sama antarperangkat daerah, petani, pelaku usaha pangan, dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.
	Koefisien variasi harga pangan utama	>		
	Skor pola pangan harapan	<		
	Jumlah cadangan pangan masyarakat	>		
	Jumlah penanganan desa rentan pangan	>		
	Persentase keamanan pangan segar	>		
	Pertanian			
	Produktivitas ternak		Urusan pertanian khususnya pada bidang peternakan dan kesehatan hewan mengalami kendala pada upaya efisiensi reproduksi, pemanfaatan infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan, penanganan penyakit hewan, pengembangan usaha produk hewan yang memenuhi standar. Tantangan yang dihadapi meliputi optimalisasi indikator produktivitas ternak seperti *Service per Conception, Calving Interval*, dan *Conception Rate*, pembentukan dan penguatan kelompok peternak (SPR), pemanfaatan maksimal prasarana peternakan dan kesehatan hewan yang telah tersedia dan peningkatan persentase penanganan kasus penyakit hewan secara efektif.	• Peningkatan kualitas bibit dan manajemen pemeliharaan ternak untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi reproduksi. • Penguatan kelembagaan peternak melalui pembentukan dan pendampingan kelompok tani ternak (sentra peternakan rakyat—SPR). • Peningkatan kapasitas petugas kesehatan hewan dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit hewan. • Penguatan sistem surveilans dan pelaporan penyakit hewan secara dini dan akurat. • Fasilitasi dan pendampingan bagi pelaku usaha produk hewan untuk memperoleh sertifikasi NKV dan BPOM. • Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran obat hewan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. • Peningkatan akses peternak terhadap informasi teknologi, pasar, dan pembiayaan. • Pengembangan kemitraan antara peternak, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.
	- *Service per Conception*	>		
	- *Calving Interval*	=		
	- *Conception Rate*	<		
	Jumlah SPR yang terbentuk	<		
	Cakupan pemanfaatan prasarana peternakan dan kesehatan hewan yang tersedia	=		
	Persentase penanganan kasus penyakit hewan	=		
	Jumlah unit usaha produk hewan yang tersertifikasi NKV	>		
	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan bersertifikat BPOM	n.a		
	Persentase toko obat hewan yang berizin	n.a		
9.	**Lingkungan Hidup**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Permasalahan dalam urusan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri berfokus pada upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penanganan isu-isu lingkungan yang mendesak. Tantangan yang dihadapi meliputi perluasan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan serta peningkatan persentase sampah yang dikelola secara benar.	• Peningkatan kualitas dan kuantitas kajian lingkungan hidup sebagai dasar kebijakan. • Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkala dan komprehensif. • Pembinaan dan pengawasan intensif terhadap pengelolaan limbah B3 bagi kegiatan/usaha. • Peningkatan kesadaran dan kepatuhan usaha/kegiatan terhadap perizinan lingkungan dan PPLH.
	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	=		
	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	<		
	Persentase ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	<		

InUse Book 1.indb 169 10/19/2025 12:12:57 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait pengelolaan limbah B3	=		• Peningkatan penyuluhan dan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. • Pemberian penghargaan sebagai motivasi bagi individu, kelompok, dan usaha yang peduli lingkungan. • Peningkatan efektivitas penanganan aduan masyarakat terkait PPLH secara transparan dan akuntabel.
	Persentase usaha dan/atau kegiatan berizin lingkungan dan PPLH yang dibina	>		
	Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina	n.a		
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH	>		
	Jumlah *event* penghargaan lingkungan hidup yang diadakan atau diikuti dalam satu tahun	<		
	Persentase aduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang terselesaikan	>		
	Persentase sampah yang dikelola	<		
10.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kediri menghadapi tantangan berupa belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mengakibatkan proses pelayanan yang kurang efisien dan terkadang menyulitkan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik belum optimal karena sistem integrasi data yang belum sepenuhnya terwujud, diperparah dengan masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses berbagai layanan publik.	• Peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pelayanan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. • Penyederhanaan prosedur pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. • Pelayanan keliling atau jemput bola untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil atau rentan. • Kerja sama yang efektif dengan instansi terkait dalam pemanfaatan data kependudukan. • Inovasi pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. • Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan. • Alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung operasional dan pengembangan urusan.
	Kepemilikan dokumen kependudukan			
	KTP	>		
	KK	>		
	KIA			
	Cakupan kepemilikan dokumen akta catatan sipil			
	Akta kelahiran			
	Akta kelahiran 0-18	<		
	Akta perkawinan	=		
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Aminduk)	=		
	Tersusunnya buku profil kependudukan	=		
11.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	>	Penataan desa di Kabupaten Kediri belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan tantangan pada tingkat penyelenggaraan penataan desa.	• Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi tertib administrasi pemerintahan desa. • Peningkatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan.
	Tingkat penyelenggaraan penataan desa			

InUse Book 1.indb 170 10/19/2025 12:12:57 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase kerja sama antara desa yang terfasilitasi	>		• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. • Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan akses terhadap sumber daya. • Penguatan kelembagaan dan jaringan kerja antar organisasi masyarakat sipil di tingkat desa.
	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	>		
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang dibina	>		
12.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	=	Sebagian besar indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini ditunjukkan pada kolom interpretasi yang dominan dengan tanda “>”. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pada indikator yang sudah mencapai target, serta menjaga performa baik pada indikator yang telah melampaui target.	• Peningkatan akurasi dan cakupan pengumpulan data mikro keluarga hingga tingkat desa/kelurahan. • Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan keluarga berencana (KB) yang beragam dan terjangkau. • Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dan kesehatan reproduksi. • Penguatan program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pencegahan pernikahan dini. • Peningkatan peran aktif tenaga penyuluh KB dan kader di tingkat lapangan. • Penguatan kelompok kegiatan bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), dan bina keluarga lansia (BKL) serta pengintegrasian dengan layanan lainnya.
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	=		
	Persentase *unmeet need*	>		
	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	>		
		>		
		>		
	Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	>		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Persentase OPD yang responsif gender	=	Sebagian besar indikator kinerja, seperti “persentase kegiatan kesetaraan gender dan hak anak yang dilaksanakan di tingkat desa” dan “persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TPA,” berhasil melampaui target. Sementara itu, indikator “persentase OPD yang responsif gender” dan “persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh P2TPA” berhasil mencapai target sesuai yang ditetapkan. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga konsistensi kinerja yang sudah baik, serta berupaya untuk meningkatkan capaian yang saat ini hanya mencapai target agar bisa melampaui target di masa mendatang.	• Penguatan kapasitas dan jangkauan P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang kesetaraan gender dan hak anak di tingkat desa dan masyarakat luas. • Peningkatan partisipasi aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi perempuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Penguatan kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait (kepolisian, kesehatan, pendidikan, dll.) dalam penanganan kasus kekerasan dan pemberdayaan. • Peningkatan kualitas layanan pendampingan dan pemulihan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.
	Peresentase kegiatan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang dilaksanakan di tingkat desa	=		
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	>		

InUse Book 1.indb 171 10/19/2025 12:12:57 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				• Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.
13.	**Perhubungan**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	<	Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah, ketersediaan perlengkapan jalan yang masih jauh dari target, serta angkutan jalan yang belum memenuhi standar keselamatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan, sehingga diperlukan upaya strategis untuk mengatasi berbagai kekurangan tersebut agar kinerja dapat meningkat.	• Penyusunan kajian penyelenggaraan dan pengembangan perhubungan yang komprehensif dan berbasis data. • Peningkatan pengawasan terhadap standar keselamatan angkutan jalan dan sanksi bagi pelanggar. • Pengembangan infrastruktur perhubungan yang memadai dan berkeselamatan. • Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan melalui pelatihan dan sertifikasi. • Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu.
	Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan	=		
	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	<		
	Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	>		
	Persentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	<		
14.	**Komunikasi dan Informatika**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Permasalahan utamanya adalah capaian indikator “cakupan keamanan persandian dan TI” yang belum mencapai target, sebagaimana ditunjukkan oleh tanda “<” pada kolom interpretasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah dalam pemenuhan standar keamanan persandian dan teknologi informasi. Meskipun urusan komunikasi dan statistiknya menunjukkan hasil yang positif, ketidakcapaian target pada keamanan persandian ini menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.	• Pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi yang merata dan berkapasitas tinggi. • Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan informasi, komunikasi, dan pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal. • Pembangunan dan penguatan jaringan intra pemerintah daerah yang aman dan terintegrasi. • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. • Pengembangan sistem pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi statistik sektoral yang akurat dan tepat waktu. • Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik dan pengelolaan data. • Peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik.
	Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan	=		
	Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah	=		
	Persandian			
	Cakupan keamanan persandian dan TI	<		
	Statistik			
	Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah	=		
15.	**Koperasi, Usaha Mikro**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Urusan koperasi, usaha mikro menghadapi dua tantangan utama. Permasalahan pertama adalah rendahnya persentase SDM koperasi yang terlatih, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator yang belum mencapai target. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor koperasi, yang dapat memengaruhi kualitas pengelolaan dan	• Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan terhadap koperasi, KSP/USP. • Penyediaan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola koperasi dan KSP/USP untuk meningkatkan kesehatan organisasi. • Sosialisasi dan motivasi untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota dalam kegiatan koperasi.
	Tingkat pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi	>		
	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang cukup sehat	>		

InUse Book 1.indb 172 10/19/2025 12:12:58 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase SDM koperasi terlatih	<	operasional koperasi secara keseluruhan. Kedua, permasalahan juga terlihat pada rendahnya persentase partisipasi usaha mikro, yang juga belum optimal.	• Fasilitasi dan pendampingan bagi usaha mikro untuk meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai ekonomi. • Pemberian akses terhadap pembiayaan, pemasaran, dan teknologi bagi koperasi dan usaha mikro. • Penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro melalui pembentukan jaringan dan kerja sama. • Peningkatan literasi keuangan dan kewirausahaan bagi anggota koperasi dan pelaku usaha mikro.
	Persentase partisipasi koperasi aktif	>		
	Persentase partisipasi usaha mikro	<		
	Persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya	>		
16.	**Penanaman Modal**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Tantangan yang mungkin muncul adalah memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan agar capaian yang telah sesuai target tidak mengalami penurunan di periode berikutnya. Meskipun sebagian besar indikator sudah optimal, ada kebutuhan untuk terus memantau dan mengembangkan strategi agar kinerja tetap terjaga dengan baik.	• Penyusunan dan sosialisasi kebijakan insentif dan fasilitas penanaman modal yang menarik dan tepat sasaran. • Penguatan dan optimalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. • Peningkatan efektivitas kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui monitoring dan evaluasi. • Pengembangan dan integrasi data dan sistem informasi penanaman modal yang komprehensif. • Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan penanaman modal dan promosi investasi. • Penciptaan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berdaya saing. • Peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak terkait (investor, asosiasi pengusaha, pemerintah pusat/provinsi). • Penyediaan infrastruktur pendukung investasi yang memadai.
	Persentase pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal	=		
	Persentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	=		
	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu	=		
	Persentase kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman	>		
	Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	=		
17.	**Kearsipan**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Tantangan yang mungkin dihadapi adalah menjaga konsistensi dan kualitas dari capaian yang sudah ada. Meskipun indikator "persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah" dan "persentase autentisitas arsip statis yang ditetapkan" sudah sesuai target, diperlukan upaya berkelanjutan agar capaian tersebut tidak menurun di masa mendatang. Demikian pula, pada indikator "tingkat tertib pengelolaan arsip OPD" dan "persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik" yang telah melampaui target, tantangannya adalah bagaimana mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang sudah sangat baik tersebut.	• Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang standar dan memadai. • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola arsip melalui pelatihan dan pendidikan kearsipan. • Implementasi sistem klasifikasi dan penataan arsip yang efektif dan efisien. • Penyediaan anggaran yang memadai untuk pengelolaan kearsipan. • Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. • Peningkatan koleksi perpustakaan yang relevan dan beragam.
	Tingkat tertib pengelolaan arsip OPD	>		
	Persentase autentisitas arsip statis yang ditetapkan	=		
	Perpustakaan			
	Persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik	>		

InUse Book 1.indb 173 10/19/2025 12:12:58 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	**Kelautan dan Perikanan**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Tantangan yang dihadapi pada urusan ini adalah bagaimana menjaga konsistensi kinerja yang sudah sangat baik ini agar tidak mengalami penurunan di masa mendatang. Terlebih lagi, untuk indikator yang telah melampaui target, tantangannya adalah mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian tersebut agar tetap berada pada level optimal.	• Peningkatan kapasitas dan teknologi budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi dan kualitas. • Penguatan sistem pengawasan sumber daya ikan di perairan umum darat secara efektif dan berkelanjutan. • Diversifikasi produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. • Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan. • Pelatihan dan pendampingan bagi pembudidaya ikan dan nelayan. • Pelestarian lingkungan perairan untuk keberlanjutan sumber daya ikan.
	Jumlah produksi perikanan budi daya			
	Pembesaran (ton)	>		
	Ikan hias (ribu ekor)	>		
	Benih (juta ekor)	>		
	Cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan umum darat	=		
	Jumlah konsumsi asal ikan (kg/ kapita/tahun)	>		
19.	**Pariwisata**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	>	Tantangannya adalah bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas SDM yang sudah berkompetensi dasar tersebut agar dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dinamis. Selain itu, diperlukan juga strategi untuk memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki SDM tidak hanya bersifat dasar, tetapi juga dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi untuk mendukung daya saing pariwisata daerah.	• Pengembangan dan pembenahan objek dan daya tarik wisata yang inovatif dan berkelanjutan. • Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. • Promosi pariwisata yang efektif dan menyasar target pasar yang tepat. • Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata yang memadai dan berkualitas (aksesibilitas, akomodasi, fasilitas umum). • Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. • Pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pelayanan pariwisata.
	Persentase peningkatan objek dan daya tarik wisata	>		
	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar			
	Lama tinggal (*length of stay*) wisatawan di Kabupaten Kediri	>		
	Kebudayaan			
	Persentase peningkatan grup kesenian yang dberdayakan	=	Urusan kebudayaan menghadapi tantangan pada indikator “persentase peningkatan budaya lokal yang dilestarikan”. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan untuk melestarikan budaya lokal masih memerlukan perhatian dan strategi yang lebih efektif agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.	• Peningkatan pembinaan dan dukungan bagi kelompok kesenian untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan. • Inventarisasi, dokumentasi, dan revitalisasi budaya lokal, kesenian lokal, sejarah lokal, dan cagar budaya secara sistematis. • Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan. • Pemanfaatan teknologi informasi untuk dokumentasi, promosi, dan aksesibilitas informasi kebudayaan. • Penyelenggaraan festival dan kegiatan budaya secara rutin dan menarik.
	Persentase peningkatan budaya lokal yang dilestarikan	<		
	Persentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	>		
	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	=		
	Persentase cagar budaya (CB) yang dilestarikan	=		
	Persentase sarpras museum yang dipelihara	=		

InUse Book 1.indb 174 10/19/2025 12:12:58 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	**Pertanian**			
	Dinas Pertanian		Urusan pertanian menghadapi tantangan pada indikator "persentase prasarana pertanian dengan kondisi baik". Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi prasarana pertanian masih memerlukan perbaikan atau pemeliharaan lebih lanjut agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun indikator lain menunjukkan hasil yang baik, kondisi prasarana yang belum optimal dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian secara keseluruhan.	• Sosialisasi dan penyediaan akses terhadap benih/bibit unggul pertanian yang berkualitas. • Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pertanian (irigasi, jalan usaha tani, dll.) secara berkelanjutan. • Peningkatan cakupan dan kualitas pembinaan kelompok tani. • Peningkatan akses petani terhadap informasi teknologi pertanian, pasar, dan pembiayaan. • Pengembangan kerja sama antara petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pihak terkait lainnya. • Pemberdayaan petani melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas organisasi tani.
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	>		
	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	=		
	Persentase pemanfaatan benih/ bibit unggul pertanian	=		
	Jumlah desa yang melaksanakan inovasi tani organik	>		
	Persentase prasarana pertanian dengan kondisi baik	<		
	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian (serangan OPT)	=		
	Cakupan bina kelompok tani	=		
21.	**Perdagangan**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	>	Tantangan utama yang dihadapi adalah pada indikator "persentase kegiatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri". Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya untuk mendorong dan mengukur penggunaan serta pemasaran produk dalam negeri masih memerlukan perhatian.	• Peningkatan pembangunan dan revitalisasi pasar sesuai standar kualitas dan keamanan. • Implementasi kebijakan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang efektif. • Identifikasi dan pengembangan potensi produk ekspor unggulan daerah. • Sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha dalam memenuhi uji metrologi legal. • Promosi dan kampanye peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. • Peningkatan kualitas SDM di sektor perdagangan dan perindustrian melalui pelatihan dan pendampingan. • Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan perdagangan dan perindustrian.
	Persentase pasar yang memenuhi standar	>		
	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	>		
	Persentase produk ekspor unggulan	>		
	Persentase pelaku usaha yang memenuhi uji metrologi legal	>		
	Persentase kegiatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	n.a		
	Perindustrian			
	Pertumbuhan industri yang terstandardisasi	>		
	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	>		
22.	**Sekretariat Daerah**			
	Bagian Hukum		Urusan sekretariat daerah tidak menghadapi permasalahan signifikan karena semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi pada urusan ini adalah bagaimana menjaga konsistensi kinerja yang sudah sangat baik ini agar tidak mengalami penurunan di	• Penguatan koordinasi antarbagian di Sekretariat Daerah dan dengan seluruh OPD. • Peningkatan efektivitas fasilitasi dan koordinasi dalam penyelesaian isu hukum.
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=		
	Persentase penyelesaian fasilitasi dan koordinasi hukum	=		
	Bagian Kesejahteraan Rakyat			

InUse Book 1.indb 175 10/19/2025 12:12:58 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	masa mendatang. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan terus berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah dicapai.	• Penyelarasan program pemerintah dan kesejahteraan rakyat serta perekonomian dan pembangunan secara terpadu. • Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perekonomian dan pembangunan. • Penguatan koordinasi pengelolaan perbatasan daerah dengan pihak terkait. • Evaluasi dan penataan organisasi perangkat daerah secara berkala sesuai kebutuhan. • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh bagian sekretariat daerah.
	Persentase pemenuhan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	=		
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=		
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	=		
	Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=		
	Persentase layanan administrasi perekonomian dan pembangunan yang terlaksana	=		
	Bagian Umum			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=		
	Bagian Tata Pemerintahan			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=		
	Persentase pemenuhan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	=		
	Persentase pemenuhan pengelolaan perbatasan	=		
	Bagian Organisasi			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=		
23.	**Sekretariat DPRD**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	>	Urusan sekretariat DPRD tidak menghadapi permasalahan signifikan karena semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi pada urusan ini adalah bagaimana menjaga konsistensi kinerja yang sudah sangat baik ini agar tidak mengalami penurunan di masa mendatang. Diperlukan upaya	• Peningkatan efektivitas fasilitasi penyusunan dan pembahasan propemperda dan ranperda. • Penguatan dukungan administrasi dan teknis bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas. • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD.

InUse Book 1.indb 176 10/19/2025 12:12:58 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan terus berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah dicapai.	• Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan DPRD.
	Persentase pelaksanaan fasilitasi pembahasan propemperda dan rancangan perda	=		• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sekretariat DPRD.
24.	**Fungsi Penunjang Perencanaan**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Urusan perencanaan tidak menghadapi permasalahan signifikan karena semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi pada urusan ini adalah bagaimana menjaga konsistensi kinerja yang sudah sangat baik ini agar tidak mengalami penurunan di masa mendatang. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan terus berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah dicapai.	• Peningkatan disiplin dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai jadwal yang ditetapkan. • Penguatan koordinasi antarperangkat daerah dalam penyusunan perencanaan. • Peningkatan pemahaman terhadap RPJMD sebagai acuan utama penyusunan RKPD. • Penyusunan RKPD yang lebih detail dan terukur dalam mencapai target RPJMD. • Pemanfaatan data dan informasi yang akurat dan terkini dalam proses perencanaan. • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di setiap perangkat daerah.
	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	=		
	Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	=		
25.	**Fungsi Penunjang Keuangan**			
	BPKAD		Urusan keuangan tidak menghadapi permasalahan signifikan karena semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi pada urusan ini adalah bagaimana menjaga konsistensi kinerja yang sudah sangat baik ini agar tidak mengalami penurunan di masa mendatang. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan terus berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah dicapai.	• Peningkatan disiplin dan koordinasi antar-unit kerja terkait dalam penyusunan dokumen keuangan. • Implementasi sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dan handal. • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis. • Penguatan pengawasan internal terhadap proses pengelolaan keuangan daerah. • Penerapan standar akuntansi pemerintah yang konsisten dan akuntabel. • Pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan secara berkala. • Inventarisasi dan pengamanan aset pemerintah daerah secara tertib dan berkelanjutan.
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=		
	Ketepatan waktu penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS	=		
	Ketepatan waktu penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan rancanganan PPAS	=		
	Ketepatan waktu pengajuan rancangan perda tentang APBD	=		
	Ketepatan waktu pengajuan rancangan perda tentang perubahan APBD	=		
	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	=		
	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	=		

InUse Book 1.indb 177 10/19/2025 12:12:58 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ketepatan waktu penyampaian rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD	=		
	Keandalan pelaporan keuangan	=		
	Persentase aset pemerintah daerah yang diamankan	>		
26.	**Fungsi Penunjang Keuangan**			
	Badan Pendapatan Daerah		Menjaga pertumbuhan PAD	• Peningkatan kualitas data potensi pendapatan daerah melalui survei, pemetaan, dan pemutakhiran yang akurat. • Optimalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi, kemudahan pembayaran, dan penegakan hukum yang efektif. • Perluasan basis pajak dan retribusi dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. • Peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dan retribusi melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. • Penguatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. • Peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan retribusi untuk mendorong kepatuhan. • Pengembangan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	>		
	Persentase peningkatan PAD	>		
27.	**Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		Pada urusan pengelolaan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Kediri perlu ada penguatan sistem pembinaan pegawai, peningkatan disiplin kerja, serta optimalisasi program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan kualifikasi ASN untuk mendukung kinerja organisasi yang lebih baik.	• Implementasi sistem manajemen kinerja ASN yang terukur dan transparan. • Penegakan disiplin kerja yang konsisten dan adil bagi seluruh ASN. • Penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN yang berbasis kebutuhan organisasi dan individu. • Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan pekerjaan.

InUse Book 1.indb 178 10/19/2025 12:12:58 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				• Peningkatan akses ASN terhadap informasi dan kesempatan pengembangan kompetensi. • Penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang proporsional berdasarkan kinerja dan disiplin.
	Indeks profesionalisme dimensi kinerja dan disiplin			• Pengembangan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.
	Indeks profesionalisme dimensi kompetensi dan kualifikasi			• Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepegawaian dan informasi pelatihan.
28.	**Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan**			
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	<	Hasil penelitian perlu ditingkatkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang optimal dan berkelanjutan.	• Penyusunan agenda riset daerah yang fokus pada prioritas pembangunan dan potensi daerah. • Alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. • Pembentukan dan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah yang efektif. • Penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, sektor swasta, dan masyarakat. • Diseminasi dan implementasi hasil penelitian dan pengembangan yang efektif untuk pembangunan daerah. • Monitoring dan evaluasi dampak kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap pembangunan daerah.
	Persentase hasil penelitian yang telah diimplementasikan	>		
29.	**Inspektorat**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Fungsi pengawasan di Kabupaten Kediri menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjalankan tugas pengawasan yang efektif. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.	• Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. • Penguatan independensi dan objektivitas APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. • Implementasi dan internalisasi SPIP secara efektif di seluruh perangkat daerah. • Peningkatan kesadaran dan pemahaman seluruh ASN tentang pentingnya SPIP. • Pelaksanaan program pencegahan korupsi yang terstruktur dan sistematis. • Penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi. • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	=		
	1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	<		
	2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<		
	3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	>		

InUse Book 1.indb 179 10/19/2025 12:12:58 AM

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	**Kecamatan *)**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	>	Cakupan koordinasi ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Selain itu, penanganan urusan pemerintahan umum belum optimal menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan, dan pembinaan pemerintahan desa juga perlu diperluas untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa.	• Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. • Penguatan koordinasi antara kecamatan dengan desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. • Optimalisasi penanganan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. • Peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan pemerintahan desa. • Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan koordinasi di tingkat kecamatan. • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. • Monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.
	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	<		
	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	<		
	Cakupan koordinasi ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan	<		
	Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	<		
	Persentase pemerintahan desa yang dibina	<		
31.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**			
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	=	Urusan kesatuan bangsa dan politik menghadapi tantangan pada indikator "persentase partai politik yang difasilitasi". Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk memfasilitasi partai politik masih memerlukan peningkatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dengan partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	• Peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada berbagai kelompok masyarakat. • Penguatan pembinaan ormas dalam rangka pemberdayaan dan sinergi dengan program pemerintah. • Peningkatan program pembinaan kelompok masyarakat terkait pencegahan narkoba dan penguatan kerukunan beragama dan kepercayaan. • Peningkatan respons cepat dan efektif dalam menindaklanjuti konflik sosial. • Penguatan forum-forum komunikasi antartokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. • Peningkatan pendidikan politik dan kewarganegaraan kepada masyarakat. • Penguatan deteksi dini potensi konflik sosial dan ancaman terhadap kesatuan bangsa.
	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	>		
	Persentase partai politik yang difasilitasi	<		
	Persentase pembinaan ormas	>		
	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	>		
	Persentase konflik sosial yang ditindaklanjuti	>		

**) Capaian kecamatan (rata-rata)*

InUse Book 1.indb 180 10/19/2025 12:12:58 AM

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis memegang peran krusial dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, termasuk Kabupaten Kediri. Hal ini diperlukan agar pembangunan yang dirancang selaras dengan konteks dan tantangan yang dihadapi, baik dalam skala global, nasional, maupun daerah. Dengan memperhatikan isu-isu strategis, perencanaan dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan dan situasi nyata, sehingga mampu menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kediri, semakin kompleks. Isu dan tantangan pembangunan perlu dimitigasi dan dioptimalkan menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta sebagai fondasi awal untuk mencapai *Visi Indonesia Emas 2045*. Oleh karena itu, perencanaan jangka menengah daerah harus mempertimbangkan isu-isu strategis global yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan daerah. Berdasarkan *World Economic Forum Global Risk Report* 2024, setidaknya terdapat 10 risiko global jangka menengah sebagai berikut.

1. **Cuaca Ekstrem**
   Cuaca ekstrem seperti badai, banjir, dan gelombang panas menjadi semakin sering dan intens akibat perubahan iklim. Fenomena ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, kerusakan infrastruktur, dan ancaman terhadap keselamatan manusia. Daerah yang rentan terhadap cuaca ekstrem perlu memperkuat sistem peringatan dini dan infrastruktur tahan bencana.
2. **Perubahan Kritikal terhadap Ekosistem**
   Ekosistem di seluruh dunia mengalami tekanan besar akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan pencemaran. Perubahan kritikal terhadap ekosistem dapat mengganggu keseimbangan alam, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengancam ketahanan pangan serta sumber daya air.
3. ***Biodiversity Loss* dan Gangguan Ekosistem**
   Kehilangan keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem merupakan ancaman serius bagi keseimbangan ekologi. Spesies yang punah atau terancam punah mengakibatkan kerusakan rantai makanan dan menurunkan kemampuan ekosistem untuk menyediakan layanan penting seperti penyaringan air dan penyerbukan tanaman.
4. **Krisis Sumber Daya Alam**
   Kelangkaan sumber daya alam seperti air bersih, lahan subur, dan mineral penting menjadi isu global yang mendesak. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan dan eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan konflik, meningkatkan ketidakstabilan ekonomi, dan mengganggu pasokan pangan serta energi.
5. **Misinformasi dan Disinformasi**
   Misinformasi dan disinformasi, terutama melalui media sosial dan platform digital, menimbulkan tantangan besar dalam membangun kepercayaan publik dan membuat kebijakan yang efektif. Penyebaran informasi yang salah dapat memengaruhi opini publik, memicu ketegangan sosial, dan mengganggu proses demokratis.

InUse Book 1.indb 181 10/19/2025 12:12:59 AM

6. **Dampak Buruk Teknologi AI**
   Teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*–AI) membawa manfaat besar, tetapi juga menimbulkan risiko signifikan seperti pengangguran massal, bias algoritma, dan pelanggaran privasi. Pengembangan dan penerapan AI harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap masyarakat dan ekonomi.
7. ***Involuntary Mitigation***
   Kebijakan mitigasi yang dipaksakan tanpa partisipasi atau persetujuan masyarakat dapat menimbulkan ketegangan sosial dan resistensi. Upaya mitigasi perubahan iklim dan krisis lingkungan harus melibatkan pemangku kepentingan secara inklusif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan.
8. ***Cyber Insecurity***
   Ancaman keamanan siber semakin meningkat dengan semakin terhubungnya dunia digital. Serangan siber dapat mengakibatkan kerugian finansial, gangguan operasional, dan pencurian data pribadi. Perlindungan terhadap ancaman siber memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan individu.
9. **Polarisasi Sosial**
   Polarisasi sosial yang meningkat, baik berdasarkan politik, agama, ras, maupun ekonomi, mengancam kohesi sosial dan stabilitas masyarakat. Polarisasi ini dapat memicu konflik, menghambat kemajuan kebijakan, dan melemahkan solidaritas sosial.
10. **Polusi**
    Polusi udara, air, dan tanah terus menjadi masalah besar yang memengaruhi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Upaya untuk mengurangi polusi memerlukan kebijakan yang ketat, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis jangka menengah nasional memiliki peran penting sebagai panduan bagi daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan relevan. Isu-isu nasional ini menyediakan kerangka acuan yang lebih luas dan terintegrasi, memastikan bahwa kebijakan daerah tidak berjalan secara terpisah atau tidak sinkron dengan tujuan nasional. Dengan menyelaraskan isu strategis daerah dengan isu nasional, Kabupaten Kediri dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Penyelarasan ini tidak hanya memperkuat posisi Kabupaten Kediri dalam konteks nasional, tetapi juga membuka peluang akses terhadap sumber daya dan dukungan dari pemerintah pusat yang lebih besar.

Berdasarkan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2025–2029 telah ditetapkan lima isu jangka menengah, yaitu sebagai berikut.

1. **Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia**
   Hilirisasi adalah proses meningkatkan nilai tambah pada produk mentah dengan mengolahnya menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, telah mulai menunjukkan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan

InUse Book 1.indb 182 10/19/2025 12:12:59 AM

mendorong hilirisasi, Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah seperti mineral dan kelapa sawit, tetapi juga produk-produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Hal ini telah meningkatkan penerimaan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat industri dalam negeri. Misalnya, sektor pertambangan yang sebelumnya hanya mengekspor bijih nikel kini mulai mengolahnya menjadi produk setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi.

Untuk mencapai manfaat yang lebih besar, hilirisasi perlu dilanjutkan dan diperluas ke sektor-sektor lain. Melalui hilirisasi yang berkelanjutan, Indonesia dapat meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Pemerintah perlu mendukung upaya ini dengan kebijakan yang tepat, seperti insentif fiskal, investasi infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, proses hilirisasi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi secara keseluruhan berjalan harmonis dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan makro, yang mencakup aspek-aspek seperti fiskal, moneter, dan perdagangan, harus selaras dengan kebijakan sektoral yang spesifik di bidang-bidang seperti pertanian, industri, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa sinkronisasi ini, kebijakan yang diterapkan di satu sektor bisa bertentangan dengan kebijakan di sektor lain, mengurangi efektivitas keseluruhan dan menghambat pencapaian tujuan strategis. Misalnya, kebijakan moneter yang mendukung suku bunga rendah untuk mendorong investasi harus diimbangi dengan kebijakan sektoral yang mendukung pengembangan industri tertentu, sehingga investasi tersebut dapat diarahkan secara efektif ke sektor-sektor yang memberikan nilai tambah tinggi.

Untuk mendorong sinkronisasi kebijakan yang efektif, perhatian terhadap kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama. Kebijakan makro dan sektoral harus dirancang dengan mempertimbangkan visi dan misi pembangunan nasional, serta kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Pemerintah pusat perlu berperan aktif dalam mengoordinasikan berbagai kebijakan ini, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah. Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan kepentingan nasional dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Dengan demikian, sinkronisasi kebijakan tidak hanya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Penerapan Standar *Sustainability* yang Tinggi di Level Global

Penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global menjadi isu strategis jangka menengah yang krusial bagi Indonesia. Di tengah

InUse Book 1.indb 183 10/19/2025 12:12:59 AM

meningkatnya kesadaran dan tuntutan terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan, pasar global semakin mengutamakan produk-produk yang memenuhi standar *sustainability* yang ketat. Negara-negara maju dan organisasi internasional terus memperketat regulasi terkait keberlanjutan, mulai dari emisi karbon hingga penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Bagi Indonesia, ini berarti bahwa untuk tetap kompetitif di pasar internasional, produk-produk lokal harus memenuhi standar *sustainability* ini. Tanpa komitmen terhadap keberlanjutan, produk Indonesia berisiko ditolak di pasar global, mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan kehilangan pangsa pasar.

Agar produk Indonesia tetap bersaing di pasar global, orientasi pada praktik bisnis yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas. Industri dalam negeri perlu mengadopsi teknologi hijau dan menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, dan penggunaan bahan baku terbarukan. Pemerintah dapat mendukung upaya ini dengan mengeluarkan kebijakan insentif untuk perusahaan yang mengimplementasikan praktik *sustainability*, serta menyediakan fasilitas dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas industri dalam menerapkan standar keberlanjutan. Dengan demikian, produk Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi, meningkatkan daya saing di pasar internasional, dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Transisi Energi untuk Mendorong Pemerataan

Transisi energi menjadi isu strategis jangka menengah yang penting bagi Indonesia untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan antarwilayah. Salah satu kunci dalam mencapai transisi energi yang adil dan merata adalah dengan membangun jaringan listrik nasional (*national grid*) yang mampu mendistribusikan pasokan listrik secara efisien ke seluruh pelosok negeri, termasuk luar Pulau Jawa. Saat ini, Pulau Jawa masih menjadi pusat utama konsumsi dan distribusi listrik, sementara banyak wilayah di luar Jawa mengalami keterbatasan akses terhadap energi listrik yang stabil dan terjangkau. Dengan membangun *national grid* yang terintegrasi, listrik yang dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan (PLT EBT), dapat dialirkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Selain pengembangan *national grid*, pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa merupakan langkah strategis untuk mendorong pemerataan energi. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro, yang tersebar di berbagai daerah. Pembangunan PLT EBT di wilayah-wilayah luar Jawa tidak hanya akan meningkatkan pasokan energi yang bersih dan berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terpusat. Pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan yang kuat untuk investasi di sektor energi terbarukan ini, termasuk regulasi yang mendukung, kemudahan perizinan, dan subsidi untuk proyek-proyek energi hijau. Dengan demikian, transisi energi tidak

InUse Book 1.indb 184 10/19/2025 12:12:59 AM

hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan berkontribusi pada pencapaian target keberlanjutan Indonesia.

5. *Aging Population* Negara Maju

Negara-negara maju saat ini menghadapi tantangan signifikan terkait dengan populasi yang menua (*aging population*). Usia produktif di negara-negara tersebut terus menurun, yang mengakibatkan penurunan tenaga kerja yang aktif dan meningkatnya beban ekonomi untuk mendukung populasi lansia. Penurunan populasi usia produktif ini juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kebutuhan akan layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang. Negara-negara maju perlu mencari solusi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk meningkatkan investasi dalam teknologi kesehatan, mereformasi sistem pensiun, dan menarik tenaga kerja asing untuk mengisi kesenjangan tenaga kerja.

Di sisi lain, fenomena *aging population* di negara maju membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor pariwisata kesehatan khusus bagi lansia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata kesehatan bagi lansia, mengingat keindahan alam, biaya perawatan kesehatan yang relatif lebih murah, serta keramahan dan budaya perawatan yang kuat. Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, melatih tenaga medis yang kompeten, dan mempromosikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata kesehatan global. Dengan mengembangkan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan fasilitas yang ramah lansia, Indonesia dapat menarik wisatawan lansia dari negara maju, sehingga meningkatkan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor pariwisata dan kesehatan.

Selain lima isu di atas, dalam dokumen RPJMN 2025–2029 juga disampaikan mengenai isu kewilayahan. Di mana berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN tahun 2020-2024, terdapat beberapa isu strategis kewilayahan di Pulau Jawa yang dapat diperhatikan Kabupaten Kediri dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, yaitu sebagai berikut.

1) Masih tingginya kerentanan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Pulau Jawa.
2) Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah daerah aliran sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.
3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
4) Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
5) Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi Covid-19.

InUse Book 1.indb 185 10/19/2025 12:12:59 AM

2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Isu strategis jangka menengah di Provinsi Jawa Timur menjadi panduan bagi Kabupaten Kediri dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Sebagai bagian dari provinsi ini, Kabupaten Kediri perlu menyelaraskan arah pembangunannya dengan visi dan misi provinsi. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat kabupaten lebih terintegrasi dengan kebijakan provinsi, menghasilkan sinergi yang lebih kuat. Selain itu, isu-isu strategis provinsi memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang dihadapi, memungkinkan Kabupaten Kediri untuk mengantisipasi dan memanfaatkannya secara optimal. Selain itu, isu strategis provinsi juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi Kabupaten Kediri dalam mengembangkan potensi lokal. Dengan memahami prioritas pembangunan provinsi, Kabupaten Kediri dapat mengidentifikasi sumber daya dan keunggulan komparatif yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi. Berikut merupakan rincian isu strategis pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

1. **Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas & Nilai Tambah Sumber Daya Lokal**
   Isu ini menyoroti upaya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal. Memberdayakan dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Ini dapat dilakukan melalui akses lebih baik ke pembiayaan, pelatihan, dan pasar.
2. **Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan**
   Isu ini merujuk pada tantangan dan kompleksitas dalam memastikan ketersediaan serta aksesibilitas layanan dasar yang diperlukan untuk mendukung perkembangan wilayah.
3. **Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan**
   Isu ini utamanya dalam konteks peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.
4. **Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal**
   Isu ini mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial.
5. **Pemerataan Kemandirian Pangan & Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan**
   Isu ini mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat serta upaya optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan.
6. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Bencana**
   Isu ini dalam konteks pengelolaan risiko bencana dalam pembangunan berkelanjutan dengan integrasi pengelolaan risiko bencana dalam

InUse Book 1.indb 186 10/19/2025 12:12:59 AM

perencanaan pembangunan berkelanjutan merupakan aspek penting. Membangun infrastruktur dan menerapkan kebijakan pembangunan dengan memperhitungkan risiko bencana akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana.

7. **Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
   Isu ini menyoroti upaya untuk meningkatkan ketertiban umum dalam masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil analisis dari permasalahan pembangunan yang ada dan mempertimbangkan konteks global, nasional, maupun regional, maka tersintesis beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian. Adapun perumusan isu strategis ini mempertimbankan permasalahan yang patut menjadi perhatian sesuai dengan arah pembangunan Tahap 1 RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Berikut merupakan isu daerah yang disusun.

1. **Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia**
   Peningkatan kualitas dan SDM adalah isu strategis yang sangat penting bagi kemajuan Kabupaten Kediri. Dalam era global yang kompetitif, pengembangan SDM yang berkualitas, termasuk aspek kesehatan, menjadi kunci untuk meraih daya saing, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Memperbaiki kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses kesehatan yang baik akan memastikan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan masa depan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yang baik mendukung produktivitas dan mengurangi absensi kerja, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Investasi dalam SDM dan kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, mengatasi isu ini secara efektif akan mendukung pencapaian perkembangan yang berkelanjutan dan inklusif, serta memperkuat fondasi masa depan Kabupaten Kediri.

2. **Pemenuhan Layanan Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan**
   Pemenuhan layanan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan menjadi isu mendesak mengingat dampak langsungnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Kemiskinan yang meluas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kualitas hidup, dan memperdalam ketimpangan sosial. Dibutuhkan intervensi yang mampu menyediakan layanan perlindungan sosial yang efektif, termasuk bantuan sosial, akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar dapat secara komprehensif menyasar pengurangan beban ekonomi bagi keluarga kurang mampu dan memperkuat jaringan keamanan sosial. Pengentasan kemiskinan tidak hanya melibatkan pemberian bantuan

InUse Book 1.indb 187 10/19/2025 12:12:59 AM

finansial, tetapi juga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses ke peluang ekonomi, dan pengembangan kapasitas lokal. Adanya upaya mengatasi isu ini secara menyeluruh diharapkan dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan daerah. Selain itu, pemenuhan layanan perlindungan sosial yang tepat akan mengurangi ketergantungan pada bantuan sementara, meningkatkan integrasi sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan stabil. Keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat fondasi bagi masa depan yang lebih baik bagi seluruh komunitas.

3. **Optimalisasi Kinerja dan Sumber Daya Ekonomi**

   Optimalisasi kinerja dan sumber daya ekonomi menjadi isu strategis mengingat perannya yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah. Di dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks diperlukan efisiensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan dan perkembangan daerah. Kegagalan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi dengan efektif dapat mengakibatkan dampak negatif berupa pemborosan, penurunan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang terhambat yang mana berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidupnya. Tanpa upaya optimalisasi, daerah berisiko kehilangan peluang investasi, mengalami keterlambatan dalam pengembangan infrastruktur, dan menghadapi ketidakstabilan ekonomi yang dapat memperburuk ketimpangan sosial. Namun, sebaliknya, adanya fokus pada peningkatan kinerja dan pengelolaan sumber daya yang efisien membuat Kabupaten Kediri dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor kunci, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Upaya ini juga akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Kabupaten Kediri dalam peta ekonomi regional dan nasional.

4. **Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja**

   Adanya tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah dan partisipasi angkatan kerja yang tidak optimal dapat menjadi katalis bagi masalah lain berupa pengangguran yang tinggi, kehilangan potensi produktivitas, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga dapat memperburuk ketidakstabilan sosial dan ekonomi, mengakibatkan ketimpangan pendapatan, dan menghambat perbaikan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, ketidakmampuan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai dapat menyebabkan migrasi keluar dari daerah, sehingga mengurangi kapasitas ekonomi lokal dan merugikan potensi pembangunan jangka panjang. Sebaliknya, adanya fokus pada optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja akan membuat Kabupaten Kediri dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

InUse Book 1.indb 188 10/19/2025 12:12:59 AM

Upaya ini mencakup pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta penciptaan peluang kerja yang beragam dan berkualitas. Dibutuhkan penanganan secara efektif untuk dapat menyelesaikan serangkaian masalah yang begitu kompleks di masyarakat, namun berdampak langsung pada roda-roda penggerak pembangunan Kabupaten Kediri.

5. **Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya dan Inovasi Daerah**
Tidak optimalnya pengelolaan sumber daya dapat mengakibatkan pemborosan, penurunan kualitas infrastruktur, dan berkurangnya daya tarik investasi yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Tanpa inovasi, daerah berisiko kehilangan daya saing, mengalami stagnasi dalam pengembangan industri, dan tertinggal dalam hal penerapan teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tidak hanya itu, kurangnya pengelolaan yang optimal dapat menyebabkan dampak lingkungan yang negatif, seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem, yang akan memperburuk kualitas ruang hidup masyarakat. Di sisi lain, upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya dan dorongan inovasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas infrastruktur, dan menarik lebih banyak investasi. Inovasi yang efektif akan membuka peluang baru, meningkatkan daya saing, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung pengembangan solusi teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

6. **Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ruang Hidup dan Pembangunan Desa**
Ketidakmerataan akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak seyogianya memperburuk kondisi kesehatan, meningkatkan kemiskinan, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Tanpa pembangunan desa yang efektif, ketimpangan antara daerah urban dan pedesaan dapat semakin melebar, mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan berkurangnya potensi pertumbuhan ekonomi lokal. Kondisi ini juga dapat menyebabkan migrasi keluar dari desa, mengurangi kekuatan ekonomi lokal, dan memperburuk kesenjangan sosial. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan dasar ruang hidup yang baik dan pelaksanaan pembangunan desa yang menyeluruh dapat meningkatkan kualitas hidup, mendorong pengembangan ekonomi lokal, dan memperkuat integrasi sosial. Peningkatan infrastruktur dasar akan memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi, sedangkan pembangunan desa yang terencana akan memperkuat kapasitas lokal, mendukung pertumbuhan yang merata, dan mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, menangani isu ini secara efektif adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat fondasi sosial dan ekonomi Kabupaten Kediri.

7. **Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif**
Lambatnya pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap tantangan dapat menyebabkan ketidakpuasan publik, penurunan kepercayaan, dan peningkatan ketidakstabilan sosial. Ketidakefektifan tata kelola dapat mengakibatkan

InUse Book 1.indb 189 10/19/2025 12:12:59 AM

buruknya pelayanan publik, birokrasi yang lambat, serta korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang kemudian menghambat implementasi kebijakan dan program pembangunan. Tanpa tata kelola yang baik, alokasi sumber daya menjadi tidak optimal dan masalah-masalah mendesak seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan tidak tertangani dengan efektif, sehingga mengakibatkan ketimpangan yang semakin dalam dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperbaiki implementasi kebijakan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Melalui sistem yang baik, pemerintah dapat lebih cepat menanggapi kebutuhan masyarakat, mengelola sumber daya dengan lebih efisien, dan menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan tepat sasaran. Upaya ini juga akan memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, membuat pembangunan menjadi lebih inklusif untuk semua.

8. Optimalisasi Sistem Kelembagaan dan Kebijakan Ekonomi

Sistem kelembagaan dan kebijakan ekonomi yang tidak optimal membawa Kabupaten Kediri pada risiko ketidakstabilan ekonomi, birokrasi yang tidak efisien, dan kesulitan dalam menarik investasi. Kelemahan dalam struktur kelembagaan dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak konsisten, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya koordinasi antar-instansi hingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan daya saing daerah. Ketidakselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan dapat menyebabkan pemborosan anggaran, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, juga perlakuan yang tidak merata terhadap sektor-sektor ekonomi penting. Selain itu, ketidakmampuan dalam merespons perubahan kondisi ekonomi global dan lokal dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik dan ketidakpuasan masyarakat. Adapun dengan mengoptimalkan sistem kelembagaan dan kebijakan ekonomi, Kabupaten Kediri dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan menarik lebih banyak investasi. Sistem yang baik akan memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif, perencanaan ekonomi yang lebih strategis, dan pengelolaan sumber daya yang berkeadilan.

9. Peningkatan Daya Saing Daerah

Dampak dari daya saing yang rendah pada daerah mencakup berkurangnya investasi, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Daerah yang tidak kompetitif menghadapi risiko kehilangan peluang ekonomi, seperti keterbatasan dalam menarik investor baru dan kekurangan dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas, stagnasi industri, dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, daya saing yang rendah menghambat kemampuan daerah untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta meningkatkan ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang tidak berkembang. Namun, upaya peningkatan yang diusahakan dapat memperbaiki infrastruktur, mengembangkan sektor-sektor kunci, dan menerapkan kebijakan yang mendukung inovasi dan

InUse Book 1.indb 190 10/19/2025 12:12:59 AM

efisiensi. Peningkatan daya saing akan menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

10. Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Keluarga

Ketahanan sosial budaya keluarga yang buruk berdampak pada adanya kekerasan rumah tangga, ketidakstabilan emosional, dan pergeseran nilai-nilai budaya yang dapat mengganggu harmoni dalam masyarakat. Keluarga kemudian menghadapi risiko terjadinya penurunan kualitas pendidikan anak, peningkatan angka pengabaian anak, dan masalah kesehatan mental yang tidak tertangani yang pada akhirnya berkontribusi pada kemerosotan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya kesadaran akan pentingnya keluarga berencana dan kemampuan keluarga dalam modal finansial, modal sosial, dan pentagon aset secara keseluruhan dapat menurunkan kapasitas keluarga dan masyarakat secara umum. Selain itu, ketidakstabilan dalam struktur keluarga dapat memperburuk kesenjangan sosial, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan mengurangi dukungan sosial yang penting bagi anggota keluarga yang rentan. Dibutuhkan penguatan ketahanan sosial budaya keluarga melalui program yang mendukung keluarga, seperti pendidikan, konseling, dan dukungan sosial yang akan memperkuat fondasi sosial masyarakat. Upaya ini juga akan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial, penciptaan masyarakat yang lebih inklusif, dan peningkatan daya tahan komunitas terhadap berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

11. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang Berkelanjutan

Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang diabakan akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan yang mengancam kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem vital. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya memperburuk kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi produktivitas pertanian, memengaruhi ketahanan pangan, dan memperbesar risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Kegagalan dalam menjaga daya dukung lingkungan juga dapat menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi sumber daya alam yang penting bagi kehidupan. Selain itu, tanpa pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, biaya yang diperlukan untuk rehabilitasi dan pemulihan lingkungan akan semakin meningkat, membebani anggaran daerah dan menghambat pembangunan ekonomi. Sebaliknya, melalui fokus pada peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan daerah dapat memastikan keberlanjutan sumber daya alam, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Pengelolaan yang baik akan memperbaiki kualitas udara dan air, melindungi ekosistem, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Serangkaian usaha ini juga akan mendorong praktik-praktik ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta menciptakan masyarakat yang lebih resilien terhadap tantangan lingkungan. Dengan demikian, menangani isu ini secara komprehensif akan mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan masa depan yang lebih sehat dan stabil bagi seluruh komunitas.

InUse Book 1.indb 191 10/19/2025 12:12:59 AM

12. Permukiman Layak Huni yang Berkelanjutan

Peningkatan masalah kesehatan masyarakat, seperti penyakit akibat sanitasi yang buruk dan kualitas udara yang rendah dapat timbul dari ketidaklayakan ruang hidup yang tidak layak. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan, ketidaksesuaian ruang hidup, dan penurunan kualitas hidup yang berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik penghuni. Selain itu, permasalahan yang ada dapat memperburuk ketimpangan sosial yang mana kelompok berpendapatan rendah menghadapi kondisi perumahan yang sangat buruk dan tidak aman hingga dapat memperparah kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial. Kurangnya akses ke infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan sistem pembuangan limbah juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, pencemaran, dan penurunan nilai tanah. Di sisi lain, pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi risiko kesehatan, dan memperbaiki integrasi sosial. Permukiman yang baik akan memastikan akses ke fasilitas dasar, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman, serta mendukung pertumbuhan komunitas yang lebih stabil dan inklusif. Penanganan isu secara komprehensif tentu akan berpengaruh secara multidimensi pada aspek-aspek pembangunan lain karena masyarakat yang sehat adalah penggerak tangguh pembangunan.

13. Penguatan Swasembada Pangan

Swasembada pangan tidak tercapai akan berimplikasi pada ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari luar, sehingga dapat menyebabkan volatilitas harga, ketidakstabilan pasokan, dan kerentanan terhadap fluktuasi pasar. Ketergantungan ini juga dapat memperburuk ketahanan pangan masyarakat, meningkatkan risiko kekurangan pangan, dan memperburuk kemiskinan serta ketimpangan sosial. Tanpa penguatan sektor pertanian lokal, produktivitas pertanian akan menurun dan berdampak pada pendapatan petani, mengurangi kesempatan kerja, dan memperburuk masalah ketahanan pangan. Kegagalan dalam mencapai swasembada juga dapat menyebabkan penurunan kualitas pangan yang tersedia, meningkatkan ketergantungan pada bahan pangan impor yang mungkin tidak memenuhi standar kesehatan, juga memengaruhi keberagaman dan keberlanjutan pola makan masyarakat. Sebaliknya, adanya upaya mencapai swasembada pangan dapat meningkatkan kapasitas produksi lokal, mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal, dan memperkuat ketahanan pangan. Investasi dalam teknologi pertanian, pelatihan petani, peningkatan jumlah petani muda, dan pengembangan infrastruktur pendukung akan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem pangan, memperbaiki kesejahteraan petani, dan memastikan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas bagi daerah. Pengembangan ekonomi lokal juga akan terdampak sekaligus mengurangi dampak negatif fluktuasi harga dan meningkatkan ketahanan komunitas terhadap krisis pangan.

14. Penguatan Fondasi Implementasi Transformasi Pembangunan

Pembangunan wilayah dan infrastruktur yang tidak dilakukan secara adil berdampak pada ketimpangan desa-kota yang semakin besar, hingga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Tidak hanya

InUse Book 1.indb 192 10/19/2025 12:12:59 AM

itu, implementasi sarana dan prasarana yang tidak ramah lingkungan meningkatkan risiko kerusakan ekologis yang parah yang akan merugikan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Adapun belum optimalnya pembangunan yang berkesinambungan dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, inefisiensi, dan kegagalan dalam mencapai tujuan jangka panjang yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, melalui penguatan fondasi implementasi transformasi pembangunan, Kabupaten Kediri dapat memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mencapai hasil yang lebih holistik dan sinergis antardimensi pembangunan. Fokus pada integrasi proyek dengan prinsip ramah lingkungan dan kesinambungan akan memperbaiki kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat ketahanan lingkungan. Rangkaian upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan basis yang kokoh untuk masa depan yang lebih stabil dan harmonis, serta memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh komunitas dan ekosistem.

Berdasarkan isu daerah yang teridentifikasi tersebut tersebut kemudian dilakukan analisis isu strategis yang diukur berdasarkan kesesuaian dan relevansinya terhadap isu KLHS, RPJP Kabupaten Kediri 2025-2045, isu global dan isu nasional pada RPJMN 2025-2029, serta isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2030.

TABEL 2.62
Perumusan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu RPJPD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Provinsi	
Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia	Tantangan masyarakat untuk mengakses pendidikan	✓	✓		✓	✓	✓
Pemenuhan layanan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum optimal	✓	✓		✓	✓	✓
Optimalisasi kinerja dan sumber daya ekonomi	Belum efektifnya pengelolaan ekonomi daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan partisipasi angkatan kerja	Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja	✓	✓		✓	✓	✓
Optimalisasi pengelolaan sumber daya dan inovasi daerah	Keterbatasan sumber daya inovasi	✓	✓	✓			
Pemenuhan kebutuhan dasar ruang hidup dan pembangunan desa	Sistem kelembagaan desa yang belum berorientasi pada pembangunan yang maju dan berkelanjutan	✓		✓		✓	
Efektivitas tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif	Sistem jaringan terpadu pemerintah yang belum terintegrasi secara *online*	✓	✓	✓		✓	✓

InUse Book 1.indb 193 10/19/2025 12:12:59 AM

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu RPJPD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Provinsi	
Optimalisasi sistem kelembagaan dan kebijakan ekonomi	Kurangnya dukungan dan fasilitasi untuk pengembangan kewirausahaan	✓		✓		✓	
Peningkatan daya saing daerah	Ketidakstabilan dan inefisiensi dalam rantai pasokan dan struktur industri	✓	✓	✓	✓		✓
Penguatan ketahanan sosial budaya keluarga	Kesadaran untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi kurang dan kemampuan ekonomi yang kurang	✓	✓			✓	
Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan	Tantangan multidimensional dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar penunjang pembangunan bagi seluruh masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Permukiman layak huni yang berkelanjutan	Kurangnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat serta rendahnya kesadaran untuk hidup bersih	✓	✓	✓		✓	✓
Penguatan swasembada pangan	Kurangnya ketersediaan pangan, distribusi yang tidak merata, dan tingginya angka kerawanan pangan serta masalah gizi	✓	✓		✓	✓	✓
Penguatan fondasi implementasi transformasi pembangunan	Tantangan multidimensional dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar penunjang pembangunan bagi seluruh masyarakat	✓		✓			

Dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang efektif dan efisien, identifikasi dan prioritisasi isu-isu strategis menjadi langkah krusial. Analisis pembobotan isu strategis daerah dilakukan untuk menentukan tingkat urgensi, dampak, dan keterkaitan antarberbagai permasalahan dan potensi yang dihadapi Kabupaten Kediri. Proses ini memastikan bahwa sumber daya dan upaya pembangunan dapat difokuskan pada isu-isu yang paling signifikan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, Kabupaten Kediri perlu mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu strategis yang paling berpengaruh terhadap kemajuan daerah. Analisis pembobotan isu strategis ini bertujuan untuk menghasilkan daftar prioritas isu yang akan menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan selama periode RPJMD. Dengan demikian, upaya pembangunan akan lebih terarah dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat dan daerah. Analisis pembobotan ditunjukkan oleh tabel berikut.

InUse Book 1.indb 194 10/19/2025 12:12:59 AM

TABEL 2.63
Kriteria Pembobotan Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

TABEL 2.64
Penilaian Skala Urgensi Isu Strategis Berdasarkan Skor

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia	20	8	20	10	12	25	95
2.	Pemenuhan layanan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan	20	8	18	10	12	20	88
3.	Optimalisasi kinerja dan sumber daya ekonomi	15	10	18	10	12	25	90
4.	Optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan partisipasi angkatan kerja	20	8	18	10	12	20	88
5.	Efektivitas tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif	20	10	15	8	15	25	93
6.	Peningkatan daya saing daerah	18	10	20	8	12	20	88
7.	Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan	15	8	20	8	10	25	86
8.	Permukiman layak huni yang berkelanjutan	15	8	15	7	12	20	77
9.	Penguatan swasembada pangan	20	8	15	7	12	20	82

InUse Book 1.indb 195 10/19/2025 12:13:00 AM

InUse Book 1.indb 196 10/19/2025 12:13:00 AM



BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

InDesc Book 1.indd 197 10/19/2025 12:13:00 AM

Kabupaten Kediri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 memiliki visi *Kediri Berbudaya Luhur 2045* (Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan). Pada tahun 2045, Kabupaten Kediri akan menjadi wilayah dengan pendapatan per kapita yang tinggi, disertai dengan menurunnya kemiskinan dan ketimpangan, kabupaten yang memiliki daya saing daerah tinggi dan sumber daya manusia yang unggul, serta kabupaten yang terus-menerus berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang melalui 8 (delapan) misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan dan 17 (tujuh belas) sasaran pokok pembangunan yang keberhasilannya diukur dengan 42 (empat puluh dua) indikator utama pembangunan.

GAMBAR 3.1
Misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045



Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045, RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2025–2029 sebagai tahapan pertama dalam pembangunan jangka panjang daerah akan memiliki keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Untuk itu, dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029. Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2025–2029. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kediri nantinya akan dijabarkan dalam tujuan

InUse Book 1.indb 198 10/19/2025 12:13:00 AM

dan sasaran pembangunan daerah untuk diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan dan sinkronisasi antardokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Kediri disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kediri.

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Visi pembangunan didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai di masa depan (*desired future*) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi daerah dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas, dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2025–2029. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Kediri, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2029 adalah:

Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan

Visi di atas dilandasi pemikiran bahwa kabupaten harus menjadi wilayah yang maju, berdaya saing, dan layak huni sejajar dengan wilayah lain di Indonesia dengan tetap mengedepankan budi luhur dan karakter nasionalis-religius yang mengakar kuat. Kabupaten Kediri dapat menjadi wilayah yang unggul dalam bidang ekonomi, teknologi informasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, juga transportasi yang selaras dengan perkembangan zaman serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, setara, berkarakter, dan berbudaya, serta saling menghormati pada sesama manusia, dan lingkungan sekitar.

InUse Book 1.indb 199 10/19/2025 12:13:00 AM

Kabupaten Kediri yang *berbudaya dan religius* dapat berarti sifat moralitas tinggi, etika yang baik, dan tindakan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus urgensi memelihara budaya dan nilai-nilai lokal. Visi ini diinterpretasikan ke dalam lingkup birokrasi yang meliputi kepemimpinan, profesionalitas, dan integritas. Pada tahun 2029, Kabupaten Kediri berkeadilan melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan pelayanan publik terbaik yang efisien, responsif, dan berkualitas. Di dalam masyarakat, karakter demikian juga ditanamkan agar dapat menjadi modal dasar dalam mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang unik, sehingga dapat menjaga kekuatan identitas daerah dan rasa kebanggaan masyarakat Kabupaten Kediri melalui pemantapan *sense of belonging* terhadap identitas diri dan daerahnya. Tidak hanya itu, nilai spiritual dan agama yang menjadi basis dalam membentuk moral dan etika di masyarakat juga termaktub dalam visi ini. Makna di dalamnya mengarahkan pada toleransi antar-agama dan memberikan dasar yang kuat bagi kerukunan antarwarga. Pada aspek kearifan lokal, Kabupaten Kediri menjunjung tinggi kemanusiaan dan menunjukkan sifat Kabupaten Kediri yang berbudaya serta berkarakter nasionalis dan religius. Nilai kebersamaan dan gotong royong dijaga kekuatannya melalui pemahaman dan praktik kehidupan bermasyarakat yang inklusif dan toleran sebagai fondasi masyarakat yang demokratis dan adil sehingga tercipta lingkungan yang mendukung kesejahteraan bersama dan menjunjung tinggi perdamaian dan harmoni.

Kabupaten Kediri yang *maju* dapat berarti berjalan (bergerak) ke muka, tampil ke muka; menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya), berkembang; telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi; cerdas, berkembang pikirannya, dan berpikir dengan baik. Pada tahun 2029, Kabupaten Kediri sebagai wilayah yang maju, sumber pertumbuhan perekonomiannya berkelanjutan, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya dengan masyarakatnya cerdas dan memiliki pemikiran yang terus berkembang sesuai perubahan zaman. Kabupaten Kediri menjadi wilayah modern dan inovatif sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kabupaten Kediri yang *sejahtera* dapat berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Pada tahun 2029, Kabupaten Kediri sebagai wilayah yang penduduknya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, disertai dengan menurunnya kemiskinan dan ketimpangan, serta kabupaten yang memiliki daya saing daerah yang tinggi. Selain itu, masyarakat Kabupaten Kediri terhindar dan terlindungi dari serangan, bahaya, ancaman dan kerusuhan yang mengancam ketenteraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri akan mewujudkan ketertiban masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Kediri.

Kabupaten Kediri yang *berkelanjutan* dapat berarti berlangsung terus menerus; berkesinambungan. Sebagai kabupaten yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pada tahun 2029, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan

InUse Book 1.indb 200 10/19/2025 12:13:00 AM

hidup, serta tata kelola lingkungan yang baik. Kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kediri ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi alam beserta isinya yang terjaga dengan baik. Tidak hanya itu, dituju pula kondisi Kabupaten Kediri yang sejahtera melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis pengembangan agraris dan industri yang kompetitif dan berdaya saing dan peningkatan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat. Visi ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kediri dalam pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan.

3.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, yaitu sebagai berikut.

GAMBAR 3.2
Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029



Misi yang diemban untuk pencapaian visi daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. Penjelasan masing-masing misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

InUse Book 1.indb 201 10/19/2025 12:13:01 AM

Misi 1: Pengembangan SDM yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing serta Nasionalis-Religius adalah perwujudan pokok visi Kabupaten Kediri Berbudaya dan Religius. Misi pertama pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar sosial. Misi ini nantinya mengarah pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Kediri agar semakin sehat dan cerdas. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Kediri akan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia. Aspek pendidikan dan kesehatan yang tentunya berkualitas merupakan poin utama yang harus dipenuhi agar sumber daya manusia di Kabupaten Kediri mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia bahkan secara global. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menciptakan masyarakat Kabupaten Kediri yang semakin sejahtera di masa depan.

Misi 2: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal adalah perwujudan pokok visi Kabupaten Kediri Sejahtera. Misi kedua pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar ekonomi di mana dalam pengembangan perekonomian wilayah difokuskan pada pengembangan sektor pertanian, ekonomi kreatif, infrastruktur ekonomi berbasis produk lokal, ekonomi hijau, peningkatan digitalisasi UMKM, penguatan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil, dan pengembangan kawasan industri yang pada muaranya akan mendukung pertumbuhan perekonomian wilayah secara berkelanjutan.

Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan adalah perwujudan pokok visi Kabupaten Kediri Maju. Misi ketiga pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar tata kelola yang difokuskan pada penataan organisasi dan sumber daya manusia hingga kemudahan pengurusan perizinan, administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang perwujudan Kabupaten Kediri sebagai wilayah modern dan berdaya saing di masa depan. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah, di mana salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi. Secara umum, reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien, di samping juga melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Misi 4: Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur adalah perwujudan pokok visi Kabupaten Kediri Maju. Misi keempat pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar lingkungan hidup yang akan difokuskan pada infrastruktur dan manajemen transportasi, infrastruktur banjir, peningkatan kualitas rumah rakyat, infrastruktur pengelolaan sampah, dan pengembangan ruang terbuka yang ramah pada anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kegagalan

InUse Book 1.indb 202 10/19/2025 12:13:01 AM

mengatasi masalah infrastruktur wilayah dapat mengakibatkan penurunan daya saing dan daya tarik daerah yang pada akhirnya menurunkan produktivitas daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan aspek penataan ruang dan lingkungan sangat diperlukan. Seluruh masyarakat Kabupaten Kediri yang tinggal di wilayah manapun memperoleh sentuhan pembangunan modern sehingga "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) di mana untuk mewujudkannya diperlukan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).

Misi 5: Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda adalah perwujudan pokok visi Kabupaten Kediri Berbudaya dan Maju. Misi kelima pada hakikatnya merupakan interaksi pelaksanaan pilar sosial dan ekonomi di mana dalam pengembangan perekonomian wilayah akan didorong oleh pengembangan daya tarik wisata, pengembangan lokasi pendukung sektor pariwisata, dan fasilitasi pembangunan objek wisata. Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan budaya daerah yang tinggi, optimalisasi seni budaya daerah melalui penyelenggaraan festival kesenian daerah yang dapat berperan ganda baik sebagai upaya pelestarian seni budaya itu sendiri maupun sebagai ajang promosi pariwisata daerah. Kombinasi kekayaan alam yang dimiliki dan pengembangan seni budaya daerah disertai dengan promosi wisata akan menjadi pengungkit sektor pariwisata di Kabupaten Kediri menjadi maju seperti wilayah lain di Provinsi Jawa Timur. Dengan komposisi demogarafi penduduk yang berusia muda, fasilitasi kegiatan kepemudaan akan terus didorong pada semua aspek pendukungnya guna peningkatan produktivitas daerah di masa depan. Selain itu, pembinaan olahraga di daerah akan terus digalakkan baik dari sisi olaharaga prestasi maupun olahraga rekreasi melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga maupun faislitasi sarana dan prasarana pendukung olahraga.

Misi 6: Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan adalah perwujudan pokok visi Kabupaten Kediri Berkelanjutan. Misi keenam pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tentunya akan berpengaruh pada kondisi lingkungan hidup. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kediri akan terus melaksanakan pembangunan dengan tetap menjaga kaidah keseimbangan alam di mana pembangunan yang dilakukan akan terus selaras dengan perencanaan tata ruang dan wilayah sehingga dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup dapat diminimalkan. Kabupaten Kediri merupakan daerah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam sehingga infrastruktur yang dibangun tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi tetapi juga dilakukan untuk menguatkan ketahanan wilayah sehingga kerentanan risiko bencana di daerah dapat dikurangi.

InUse Book 1.indb 203 10/19/2025 12:13:01 AM

Misi 7: Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat adalah perwujudan pokok visi Kabupaten Kediri Maju dan Sejahtera. Misi ketujuh pada hakikatnya merupakan interaksi pelaksanaan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pembangunan di Kabupaten Kediri di masa yang akan datang akan berbasis desa sehingga kemajuan daerah akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Kediri. Pembangunan berbasis desa akan memiliki dampak berganda dari sisi infrastruktur dasar, sosial, ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan konsep tersebut, seluruh masyarakat Kabupaten Kediri yang tinggal di desa manapun memperoleh sentuhan pembangunan modern sehingga "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan kemajuan daerah dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan.

Dalam rangka upaya memastikan bahwa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kediri tahun 2025–2029 sesuai dengan pokok-pokok visi, penjabarannya ditampilkan pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dan Misi Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

Misi	Pokok-Pokok Visi
Misi 1: Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius	Kabupaten Kediri Berbudaya dan Religius
Misi 2: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal	Kabupaten Kediri Sejahtera
Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Kediri Maju
Misi 4: Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur	Kabupaten Kediri Maju
Misi 5: Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda	Kabupaten Kediri Berbudaya dan Maju
Misi 6: Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan	Kabupaten Kediri Berkelanjutan
Misi 7: Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Kediri Maju dan Sejahtera

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi

InUse Book 1.indb 204 10/19/2025 12:13:01 AM

dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2025–2029 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kediri untuk periode tersebut.

TABEL 3.2
Tujuan Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

Misi	Slogan	Tujuan	Indikator Tujuan
Misi 1: Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius	Kabupaten Kediri Berbudaya dan Religius	Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing serta nasionalis religius	Indeks Pembangunan Manusia
Misi 2: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal	Kabupaten Kediri Sejahtera	Tujuan 2: Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal	Pertumbuhan Ekonomi
Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Kediri Maju	Tujuan 3: Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi
Misi 4: Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur	Kabupaten Kediri Maju	Tujuan 4: Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkeadilan	Indeks Daya Saing Daerah
Misi 5: Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda	Kabupaten Kediri Berbudaya dan Maju	Tujuan 5: Berkembangnya daya tarik pariwisata berbasis seni budaya daerah dan potensi unggulan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum
Misi 6: Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan	Kabupaten Kediri Berkelanjutan	Tujuan 6: Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan	Indeks Risiko Bencana
Misi 7: Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Kediri Maju dan Sejahtera	Tujuan 7: Terwujudnya pembangunan desa yang merata dan berkeadilan	Indeks Desa
		Tujuan 8: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan

Untuk pencapaian visi sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut.

Misi 1 RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius. Dalam rangka untuk mewujudkan Misi 1 pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2025–2029, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

1. Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing serta nasionalis religius, memiliki indikator Indeks Pembangunan Manusia. Sasaran yang ingin diciptakan pada tujuan ini adalah:

InUse Book 1.indb 205 10/19/2025 12:13:01 AM

- Sasaran 1: Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan unggul yang merata, dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
- Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator usia harapan hidup.
- Sasaran 3: Terwujudnya pembangunan keluarga dan kesetaraan gender, dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Ketimpangan Gender.
- Sasaran 4: Terwujudnya kehidupan masyarakat nasionalis-religius, dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia.

Misi 2 RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 adalah Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal. Dalam rangka untuk mewujudkan Misi 2 pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2025–2029, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

2. Tujuan 2: Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal, memiliki indikator pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin diciptakan pada tujuan ini adalah:

- Sasaran 5: Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal, dengan indikator PDRB per kapita.

Misi 3 RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Dalam rangka untuk mewujudkan Misi 3 pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2025–2029, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

3. Tujuan 3: Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif, memiliki indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan pada tujuan ini adalah:

- Sasaran 6: Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Pemerintahan Digital dan Indeks Pelayanan Publik.

Misi 4 RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 adalah Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur. Dalam rangka untuk mewujudkan Misi 4 pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2025–2029, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

4. Tujuan 4: Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, memiliki indikator Indeks Daya Saing Daerah. Sasaran yang ingin diciptakan pada tujuan ini adalah:

- Sasaran 7: Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan, dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur.

Misi 5 RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 adalah Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda. Dalam rangka untuk mewujudkan Misi 5 pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

InUse Book 1.indb 206 10/19/2025 12:13:01 AM

5. Tujuan 5: Berkembangnya daya tarik pariwisata berbasis seni budaya daerah dan potensi unggulan, memiliki indikator rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan, dan minum. Sasaran yang ingin diciptakan pada tujuan ini adalah:
   - Sasaran 8: Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, dengan indikator tingkat pertumbuhan wisatawan.

   Misi 6 RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 adalah Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan. Dalam rangka untuk mewujudkan Misi 6 pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2025–2029, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

6. Tujuan 6: Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan, memiliki indikator Indeks Risiko Bencana. Sasaran yang ingin diciptakan pada tujuan ini adalah:
   - Sasaran 9: Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah.
   - Sasaran 10: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

   Misi 7 RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 adalah Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. Dalam rangka untuk mewujudkan Misi 7 pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2025–2029, maka ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

7. Tujuan 7: Terwujudnya pembangunan desa yang merata dan berkeadilan, memiliki indikator Indeks Desa. Sasaran yang ingin diciptakan pada tujuan ini adalah:
   - Sasaran 11: Terwujudnya kemandirian desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan indikator Persentase Desa Mandiri.

8. Tujuan 8: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, memiliki indikator tingkat kemiskinan. Sasaran yang ingin diciptakan pada tujuan ini adalah:
   - Sasaran 12: Menurunnya angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan di masyarakat, dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan Rasio Gini.

3.1.4 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan serangkaian janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2025–2029. Prioritas pembangunan daerah merupakan perwujudan agenda prioritas yang harus dilaksanakan selama masa berlakunya RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029. Dalam rangka mewujudkan ***Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan***, terdapat **17 (tujuh belas) program prioritas** yang telah ditetapkan. Selanjutnya, 17 program prioritas pembangunan tersebut dituangkan secara detail dan akan diterjemahkan ke dalam program pembangunan daerah yang disajikan pada Bab VI RPJMD.

InUse Book 1.indb 207 10/19/2025 12:13:01 AM

TABEL 3.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran beserta Indikator, dan Target Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target							Keterangan
					Kondisi Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan												
Kabupaten Kediri Berbudaya dan Religius												
1.	Misi 1: Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius	Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing serta nasionalis religius		Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	75,18	76,00-76,35	76,11-76,71	76,42-77,32	76,73-77,93	77,04-79,24	77,45-80,01	
			Sasaran 1: Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan unggul yang merata	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,26	8,68	8,76	8,85	8,99	9,06	9,09	
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,63	13,64	13,66	13,73	13,82	13,88	13,92	
			Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,07	75,18	75,44	75,7	75,95	76,21	76,47	
			Sasaran 3: Terwujudnya pembangunan keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai)	-	63	63,85	64,71	65,56	66,42	67,27	
				Indeks Ketimpangan Gender (Nilai)	0,372	0,365	0,345	0,335	0,326	0,316	0,306	
			Sasaran 4: Terwujudnya kehidupan masyarakat nasionalis-religius	Indeks Harmoni Indonesia (Nilai)	-	7,12	7,13	7,14	7,15	7,16	7,17	
Kabupaten Kediri Sejahtera												
2.	Misi 2: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal	Tujuan 2: Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95	4,05-5,00	4,11-5,02	4,12-5,15	4,15-5,17	4,23-5,18	4,22-5,13	
			Sasaran 5: Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	32,34	32,68-34,20	32,97-35,14	33,15-36,08	33,76-37,02	34,01-38,95	34,29-39,89	

InUse Book 1.indb 208
10/19/2025 12:13:01 AM

InUse Book 1.indb 209

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target							Keterangan
					Kondisi Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan												
Kabupaten Kediri Maju												
3.	Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tujuan 3: Menguatkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	87,09	87,10-87,80	87,50-88,20	88,00-88,70	88,50-89,20	89,00-89,70	89,50-90,20	
			Sasaran 6: Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik	Indeks Pemerintahan Digital (Nilai)	2	2	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	
				Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	4,34	3,46	3,49	3,52	3,55	3,58	4,00	
Kabupaten Kediri Maju												
4.	Misi 4: Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur	Tujuan 4: Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkeadilan		Indeks Daya Saing Daerah (Nilai)	3,73	3,90-3,92	3,98-4,00	4,06-4,08	4,14-4,17	4,22-4,25	4,30-4,33	
			Sasaran 7: Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Nilai)	69,84	70	72	74	76	78	80	
Kabupaten Kediri Berbudaya dan Maju												
5.	Misi 5: Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda	Tujuan 5: Berkembangnya daya tarik pariwisata berbasis seni budaya daerah dan potensi unggulan		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum (%)	1,77	1,71-1,91	1,72-2,00	1,73-2,07	1,75-2,14	1,77-2,20	1,79-2,26	
			Sasaran 8: Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata	Tingkat Pertumbuhan Wisatawan (%)	n/a	7	8	9	10	11	12	Data 2024 (n/a)

10/19/2025 12:13:01 AM

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target							Keterangan
					Kondisi Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan												
Kabupaten Kediri Berkelanjutan												
6.	Misi 6: Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan	Tujuan 6: Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan		Indeks Risiko Bencana (Nilai)	117,51	115,55-112,73	112,73-110,05	110,05-107,49	107,49-105,05	105,05-102,71	102,71-99,63	
			Sasaran 9: Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (Nilai)	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	
			Sasaran 10: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	70,49	71,66	71,74	71,82	71,9	71,97	72,05	
Kabupaten Kediri Maju dan Sejahtera												
7.	Misi 7: Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan 7: Terwujudnya pembangunan desa yang merata dan berkeadilan		Indeks Desa (Nilai)	0,779	0,775-0,780	0,783-0,791	0,791-0,802	0,799-0,813	0,807-0,824	0,815-0,835	
			Sasaran 11: Terwujudnya kemandirian desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri (%)	25,65	37,9	38,78	39,65	40,23	40,82	41,66	
		Tujuan 8: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan (%)	9,95	8,29-9,74	8,23-9,43	8,08-9,01	7,9-8,7	5,49-8,18	5,18-7,15	
			Sasaran 12: Menurunnya angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan di masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,1	5,47-4,75	5,45-4,50	5,44-4,26	5,33-4,08	5,27-3,97	5,21-3,89	
				Rasio Gini (Nilai)	0,3	0,278-0,312	0,272-0,306	0,267-0,301	0,261-0,295	0,256-0,290	0,250-0,284	
Formulasi Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029: 7 Misi, 8 Tujuan, dan 12 Sasaran Strategis												

InUse Book 1.indb 210
10/19/2025 12:13:01 AM

TABEL 3.4
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 Berdasarkan Misi

Misi	Program Prioritas
Misi 1: Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius	Program 1: Makan bergizi gratis bagi 30.000 PAUD
	Program 2: Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu
	Program 3: Peningkatan Puskesmas rawat inap dan pembangunan rumah sakit di kawasan aerotropolis
	Program 4: Insentif bagi 17 ribu guru, tenaga pendidik (GTK), guru ngaji, dan guru agama
	Program 5: Beasiswa Rp30 miliar per tahun untuk Kediri Berbudaya (pelajar, mahasiswa, dan santri).
	Program 6: Bantuan stimulus fasilitas untuk musala, masjid, pondok pesantren, tempat ibadah, dan pendidikan keagamaan
Misi 2: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal	Program 7: Pupuk tersedia, petani bahagia
	Program 8: 30.000 lapangan pekerjaan baru
Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program 9: Halo Masbup 2.0: respons cepat tanpa batas
	Program 10: Gercep Sahaja (Gerak Cepat Satu Hari Jadi) administrasi kependudukan
Misi 4: Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur	Program 11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa
	Program 12: Revitalisasi pasar
Misi 5: Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
Misi 6: Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
Misi 7: Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	Program 15: Peningkatan insentif RT dan RW
	Program 16: Peningkatan insentif kader desa dan dusun (Posyandu, KB, dan pembangunan manusia)
	Program 17: Peningkatan alokasi dana desa (ADD) dan pemberian bantuan keuangan khusus untuk desa sejahtera

Sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah, pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dirancang dengan pendekatan yang lebih terarah dan terstruktur dalam mendukung keberhasilan program prioritas Bupati Kediri secara efektif dan efisien. Pengendalian Program Prioritas Bupati Kediri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alur pemantauan dan evaluasi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan secara tahunan. Tujuh belas Program Prioritas Bupati Kediri akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sepanjang periode 2025–2029 yang dirancang menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program)* serta pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Oleh karena itu, pengendalian diperlukan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama dalam kaitannya dengan pencapaian prioritas daerah, agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan mendukung pencapaian hasil pembangunan secara optimal.

InUse Book 1.indb 211 10/19/2025 12:13:01 AM

3.1.5 Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

Setiap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus melihat dokumen perencanaan lainnya agar perencanaan yang akan dilakukan memiliki keselarasan dan hal yang dicita-citakan tercapai. Begitu juga dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode tahun 2025–2029 juga telah dipadupadankan dengan sasaran pokok yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Dari sebanyak 17 sasaran pokok RPJPD direspons dengan 12 sasaran strategis RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029. Keselarasan sasaran pokok RPJPD dengan sasaran RPJMD ditampilkan pada Tabel 3.5.

TABEL 3.5
Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029	RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045	
	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
Sasaran 1: Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan unggul yang merata	KL 1: Keterjangkauan layanan kesehatan	Sasaran Pokok 1: Penyediaan akses dan layanan kesehatan yang bermutu dan merata
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	KL 2: Pendidikan inklusif dan terjangkau	Sasaran Pokok 2: Penguatan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan inklusif yang terjangkau
Sasaran 4: Terwujudnya kehidupan masyarakat nasionalis-religius	KL 13: Masyarakat yang unggul, nasionalis, dan religius	Sasaran Pokok 13: Masyarakat yang unggul, nasionalis, religius
Sasaran 3: Terwujudnya pembangunan keluarga dan kesetaraan gender di masyarakat	KL 14: Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Sasaran Pokok 14: Keluarga berkualitas yang berkeadilan gender
Sasaran 5: Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal; Sasaran 8: Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata	KL 4: Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi berbasis potensi lokal	Sasaran Pokok 4: Peningkatan efektivitas iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi berbasis potensi lokal
	KL 5: Penguatan ekonomi hijau berdaya saing	Sasaran Pokok 5: Keseimbangan pemerataan ekonomi dan perlindungan lingkungan
	KL 6: Transformasi digital	Sasaran Pokok 6: Digitalisasi pelayanan masyarakat
	KL 7: Integrasi ekonomi domestik dan nasional	Sasaran Pokok 7: Integrasi ekonomi domestik, regional, dan nasional
	KL 11: Stabilitas ekonomi makro daerah	Sasaran Pokok 11: Stabilitas ekonomi makro daerah
	KL 12: Daya saing dan daya tarik investasi	Sasaran Pokok 12: Iklim investasi yang kompetitif dan berdaya saing

InUse Book 1.indb 212 10/19/2025 12:13:01 AM

Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029	RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045	
	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
Sasaran 6: Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik	KL 9: Tata Kelola yang Responsif, Adaptif, dan Profesional	Sasaran Pokok 9: Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan profesional
	KL 10: Hukum Berkeadilan, Demokrasi dan Ketahanan Wilayah	Sasaran Pokok 10: Hukum berkeadilan, demokrasi, dan ketahanan wilayah
Sasaran 7: Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan; Sasaran 9: Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim; Sasaran 10: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	KL 15: Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan	Sasaran Pokok 15: Pembangunan lingkungan dan ruang hidup layak berkelanjutan
	KL 16: ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Sasaran Pokok 16: Pelestarian lingkungan mendukung ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
	KL 17: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Sasaran Pokok 17: Tangguh bencana dan perubahan iklim
Sasaran 12: Menurunnya angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan di masyarakat	KL 3: Perlindungan sosial bagi kelompok rentan	Sasaran Pokok 3: Pemerataan ekonomi dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan
Sasaran 11: Terwujudnya kemandirian desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	KL 8: Pemerataan dan pembangunan berbasis klusterisasi wilayah	Sasaran Pokok 8: Kemandirian ekonomi lokal berdaya saing melalui pembangunan berbasis klusterisasi wilayah

3.1.6 Keselarasan Target Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan Target Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari agenda-agenda pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh kepemimpinan nasional periode 2025–2029. Selain itu, sinkronisasi juga dilakukan pada target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029. Oleh sebab itu, target sasaran-sasaran yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 juga menjadi target yang harus dicapai oleh daerah, tentu saja dengan penyesuaian konteks lokal (kewenangan Kabupaten Kediri) yang menjadi lingkungan strategis pelaksanaan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Tabel 3.6 menunjukkan perbandingan target sasaran makro yang akan dicapai dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 dengan target makro yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Kediri pada tahun 2029.

InUse Book 1.indb 213 10/19/2025 12:13:01 AM

TABEL 3.6
Perbandingan Target Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan Target Sasaran Ekonomi Makro RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029

No.	Indikator	Target RPJMN Tahun 2029	Target RPJMD Provinsi Tahun 2029	Target RPJMD Tahun 2029
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	8,00	-	4,90 - 5,67
2.	GNI per kapita (USD	8.000	-	-
	PDRB per kapita (Rp Juta)	-	-	57,47
3.	Kontribusi PDB manufaktur (%)	21,90	-	-
	Pertumbuhan PDRB industri pengolahan (%)	-	-	-
4.	Tingkat kemiskinan (%)	4,50 – 5,00	-	8,75
5.	Rasio Gini (nilai)	0,372 – 0,375	-	0,287
6.	Indeks modal manusia (nilai)	0,59	-	-
	Indeks pembangunan manusia (nilai)	-	-	77,71
7.	Persentase penurunan emisi GRK (%)	45,17	-	-
8.	Indeks kualitas lingkungan hidup (nilai)	77,20	-	72,00

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Penahapan Pembangunan

3.2.1.1 Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing serta Nasionalis Religius

Misi 1, yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan karakter unggul, daya saing tinggi, serta berlandaskan nilai nasionalisme dan religiusitas, strategi yang dirancang tidak hanya menekankan peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pembangunan karakter moral dan spiritual masyarakat. Pendekatan strategis ini tercermin dalam empat bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, keluarga serta kesetaraan gender, dan kehidupan beragama, yang semuanya saling terintegrasi untuk menciptakan SDM yang berkualitas secara menyeluruh.

Strategi dalam sektor pendidikan menjadi fondasi utama bagi Misi 1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan unggul yang merata diwujudkan melalui optimalisasi program pelatihan guru berkelanjutan. Melalui program ini, para pendidik diberi kesempatan untuk terus mengasah kemampuan pedagogis dan metodologisnya sehingga dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa dari latar belakang yang beragam. Selain itu, pengembangan kurikulum berbasis potensi lokal juga merupakan strategi kunci yang diimplementasikan. Kurikulum ini tidak hanya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga peserta didik dapat mengembangkan identitas budaya yang kuat dan rasa bangga terhadap daerah asal mereka. Upaya penyediaan fasilitas pendidikan digital di daerah tertinggal turut menjadi bagian dari strategi untuk meratakan kualitas pendidikan, dengan memanfaatkan teknologi informasi guna mengatasi kesenjangan geografis dan mengoptimalkan proses belajar mengajar.

InUse Book 1.indb 214 10/19/2025 12:13:02 AM

Di sektor kesehatan, strategi yang diusung bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan prima yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang sering kali terabaikan. Implementasi sistem telemedicine menjadi salah satu inovasi penting dalam strategi ini. Dengan mengintegrasikan teknologi komunikasi dalam pelayanan kesehatan, pasien dapat memperoleh konsultasi dan diagnosis dari tenaga medis profesional tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan intensif serta penyediaan peralatan medis yang memadai juga menjadi prioritas utama. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, dapat menikmati layanan kesehatan yang responsif dan berkualitas. Strategi lain yang mendukung upaya ini adalah pendirian pusat kesehatan di daerah yang selama ini kurang terlayani, sehingga distribusi fasilitas kesehatan menjadi lebih merata dan inklusif.

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, Misi 1 juga menekankan pentingnya pembangunan keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender sebagai fondasi stabilitas sosial. Dalam hal ini, strategi yang diimplementasikan berfokus pada pemberdayaan keluarga melalui berbagai program edukasi dan pendampingan. Program pelatihan dan *workshop* tentang kesetaraan gender ditujukan untuk mengubah paradigma tradisional dan mendorong partisipasi aktif seluruh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Pemberian akses terhadap informasi dan sumber daya yang mendukung kesetaraan gender juga ditekankan, sehingga setiap individu dapat mengembangkan potensinya secara optimal tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, pendampingan psikososial bagi keluarga yang rentan juga merupakan strategi yang dirancang untuk menangani berbagai permasalahan internal keluarga secara holistik, mulai dari konflik interpersonal hingga masalah kesehatan mental. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi unit terkecil yang harmonis, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial di masyarakat.

Dalam aspek kehidupan beragama, strategi yang diusulkan berupaya membangun kehidupan beragama yang maslahat melalui pendekatan yang inklusif dan toleran. Fasilitasi dialog antaragama dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan berbasis komunitas menjadi langkah strategis yang diambil untuk mengurangi polarisasi dan konflik sektarian. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan ruang-ruang pertemuan yang aman dan kondusif, di mana setiap pihak dapat berbagi pandangan dan nilai-nilai keagamaan secara konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat toleransi antarumat beragama, tetapi juga mendorong integrasi nilai-nilai moral dan etika ke dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, penyusunan program-program yang menggabungkan unsur pendidikan dan pelatihan tentang nilai kemanusiaan juga merupakan bagian dari strategi ini, sehingga masyarakat dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan solidaritas dalam kehidupan beragama.

3.2.1.2 Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan melalui Pemanfaatan Potensi Lokal

Misi 2, yang berfokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta revitalisasi sektor pertanian, strategi yang diterapkan menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di tengah tantangan globalisasi dan persaingan pasar, strategi ini mengedepankan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang

InUse Book 1.indb 215 10/19/2025 12:13:02 AM

punggung ekonomi masyarakat. Penguatan kapasitas pelaku UMKM dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk. Dengan bekal keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam, para pelaku UMKM diharapkan mampu bersaing di pasar regional maupun nasional. Selain itu, penyediaan akses permodalan melalui skema kredit lunak dan kemitraan strategis menjadi bagian penting dari strategi ini, guna mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Revitalisasi sektor pertanian menjadi pilar penting dalam Misi 2, dengan strategi yang menitikberatkan pada diversifikasi komoditas dan adopsi teknologi modern. Upaya diversifikasi komoditas bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang pasar baru. Implementasi teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi otomatis, penggunaan bibit unggul, dan pemanfaatan data agrikultur, menjadi strategi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan tani, gudang penyimpanan, dan fasilitas *cold storage* juga menjadi fokus utama. Infrastruktur tersebut tidak hanya mendukung distribusi produk pertanian, tetapi juga membantu menekan biaya produksi sehingga produk lokal dapat bersaing secara global.

Di samping itu, pengembangan rantai nilai (*value chain*) produk pertanian merupakan strategi penting untuk mengoptimalkan potensi lokal. Dengan memperkuat keterkaitan antara petani, pengolah, dan pemasaran, setiap tahap dalam rantai nilai dapat diintegrasikan dengan lebih baik sehingga meningkatkan nilai tambah produk. Strategi ini didukung oleh kolaborasi erat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, sehingga tercipta sinergi yang produktif dan berkelanjutan. Selain itu, pelibatan komunitas tani dalam proses inovasi dan adopsi teknologi juga menjadi fokus utama, agar inovasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

3.2.1.3 Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan kunci untuk menciptakan institusi publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Misi 3, yang berfokus pada upaya transformasi tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif, memerlukan strategi komprehensif di berbagai lini. Pertama, penerapan digitalisasi layanan publik melalui e-government menjadi salah satu langkah strategis untuk mempermudah akses pelayanan bagi warga. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengintegrasikan seluruh jenis layanan administratif ke dalam satu portal daring yang mudah digunakan, sehingga masyarakat dapat mengurus perizinan, administrasi kependudukan, dan pembayaran pajak secara terpadu. Agar digitalisasi ini berdampak luas, perlu disiapkan infrastruktur teknologi yang andal, jangkauan internet yang memadai, dan sistem keamanan siber yang kuat. Selain itu, pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) tentang pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi elemen penting, karena tanpa kemampuan teknis yang memadai, proses digitalisasi berpotensi terhambat.

Pembangunan ibu kota kabupaten baru di Kecamatan Ngasem juga menjadi instrumen vital dalam mewujudkan Misi 3. Dengan memusatkan seluruh layanan pemerintahan dalam satu kompleks terpadu, efisiensi birokrasi

InUse Book 1.indb 216 10/19/2025 12:13:02 AM

akan meningkat drastis. Desain tata ruang yang modern dan fasilitas yang memadai akan mendukung penerapan sistem pelayanan terpadu, memangkas waktu tunggu, dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Hal ini sebagai bentuk langkah menuju pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, di mana koordinasi antar-instansi dapat berjalan optimal, serta inovasi dalam tata kelola pemerintahan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.

Kedua, strategi peningkatan kompetensi aparatur dalam inovasi dan manajemen pelayanan publik perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Aparatur dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan teknologi. Program pelatihan intensif di bidang teknologi informasi, manajemen risiko, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional. Selain itu, sistem penilaian kinerja yang transparan dan berbasis capaian juga harus dikembangkan. Pemerintah bisa menetapkan indikator kinerja, seperti kecepatan layanan, kepuasan masyarakat, dan jumlah inovasi yang diimplementasikan. Dengan demikian, ASN akan terdorong untuk lebih responsif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

3.2.1.4 Misi 4: Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur

Pembangunan wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkeadilan merupakan landasan penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui Misi 4, pemerintah berupaya mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan. Salah satu strategi kunci adalah penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Dengan tersedianya jalan yang layak, arus transportasi barang dan jasa akan menjadi lebih lancar, sehingga mendukung kegiatan ekonomi lokal seperti perdagangan hasil pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri rumah tangga.

Selain itu, pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan perumahan turut menjadi prioritas. Ketersediaan air bersih, sanitasi, dan jaringan listrik merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditawar. Dengan menyediakan fasilitas tersebut, pemerintah berupaya menjamin standar hidup yang layak bagi setiap warga, terlepas dari lokasi dan kondisi sosial ekonomi mereka. Prinsip keberlanjutan juga diterapkan melalui pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, misalnya dengan membangun sistem pengelolaan limbah domestik dan menerapkan konsep hemat energi pada bangunan publik.

Penanganan trase hunian menjadi bagian integral dari penataan ruang yang responsif terhadap risiko bencana alam. Pemerintah mendorong pemetaan wilayah rawan banjir, longsor, dan gempa bumi untuk menentukan area permukiman yang aman. Pendekatan ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak swasta dalam merancang perencanaan tata ruang yang efisien. Dengan penempatan permukiman di zona yang tepat, potensi kerugian materiil maupun korban jiwa akibat bencana dapat diminimalkan.

Pembangunan bandara menjadi tulang punggung strategi untuk transformasi regional. Bandara ini tidak hanya berfungsi sebagai gerbang utama konektivitas udara, melainkan juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

InUse Book 1.indb 217 10/19/2025 12:13:02 AM

pembangunan. Dengan dimulainya operasional Bandara Dhoho, aksesibilitas Kabupaten Kediri akan meningkat secara signifikan, sehingga membuka peluang investasi baru, memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, serta mendorong sektor pariwisata. Bandara ini juga akan menjadi simpul transportasi vital yang menghubungkan wilayah selatan Jawa dengan berbagai daerah di Indonesia, bahkan berpotensi ke kancah internasional di masa mendatang.

Seiring dengan pembangunan bandara, pengembangan kawasan aerotropolis di sekitarnya menjadi prioritas utama. Konsep aerotropolis ini akan mengintegrasikan fungsi bandara dengan pusat-pusat bisnis, logistik, industri, perhotelan, dan permukiman, menciptakan sebuah kota bandara yang terencana dan modern. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan tol, jalan arteri baru, sistem transportasi publik yang terintegrasi, serta penyediaan utilitas dasar akan dipercepat untuk mendukung ekosistem aerotropolis yang berkelanjutan. Harapannya, kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menciptakan ribuan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kediri. Pengembangan aerotropolis ini adalah langkah strategis untuk menjadikan Kabupaten Kediri sebagai pusat logistik dan bisnis regional, sejalan dengan tujuan pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan.

Selanjutnya, sejalan dengan Misi 4, Kabupaten Kediri mengusung strategi ambisius untuk memindahkan dan membangun ibu kota kabupaten baru di wilayah Kecamatan Ngasem. Langkah ini krusial untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan representatif, mampu menampung seluruh aktivitas administrasi dan pelayanan publik secara lebih efisien. Pembangunan ini mencakup kompleks perkantoran pemerintahan yang terpadu, fasilitas pendukung, serta penataan ruang yang sistematis untuk mendukung pertumbuhan perkotaan yang terencana. Pemindahan ibu kota ke Ngasem diharapkan dapat meratakan pembangunan wilayah, mengurangi konsentrasi kepadatan di wilayah lama, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di area sekitar Ngasem melalui pengembangan infrastruktur dasar dan aksesibilitas yang lebih baik. Ini adalah upaya nyata dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh penjuru Kabupaten Kediri.

Terakhir, keberhasilan Misi 4 sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Setiap proyek infrastruktur sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, hingga dunia usaha. Proses perencanaan yang inklusif akan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap hasil pembangunan. Partisipasi warga juga dapat membantu pengawasan agar proyek berjalan tepat waktu, tepat guna, dan sesuai spesifikasi teknis.

Secara keseluruhan, Misi 4 menegaskan bahwa pembangunan wilayah dan infrastruktur tidak semata-mata tentang pembangunan fisik, melainkan juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, serta pelestarian lingkungan. Dengan strategi yang terarah, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan publik yang kuat, Misi 4 diharapkan mampu menciptakan perubahan positif yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

InUse Book 1.indb 218 10/19/2025 12:13:02 AM

3.2.1.5 Misi 5: Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda

Pengembangan pariwisata, seni budaya, olahraga, dan kreativitas pemuda memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah sekaligus memajukan perekonomian serta memperkuat jati diri masyarakat. Misi 5 berfokus pada optimalisasi potensi pariwisata berbasis kearifan lokal, pemeliharaan kekayaan seni dan budaya, pengembangan sektor olahraga, serta pemberdayaan generasi muda agar mampu berkontribusi secara kreatif. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa strategi kunci yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara berkelanjutan.

Pertama, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui daya tarik destinasi wisata, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu melakukan penataan dan pengelolaan kawasan pariwisata secara komprehensif. Hal ini mencakup perbaikan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, transportasi umum, jaringan telekomunikasi, hingga ketersediaan akomodasi yang layak. Selain itu, upaya promosi pariwisata harus dirancang dengan memperhatikan tren global, misalnya melalui pemanfaatan media sosial, platform daring, dan kolaborasi dengan influencer atau agen perjalanan. Aspek keberlanjutan juga menjadi pertimbangan utama, sehingga pengelolaan daya tarik wisata dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam industri pariwisata.

Kedua, terwujudnya kejayaan kebudayaan daerah memerlukan strategi yang menitikberatkan pada pelestarian, pembinaan, dan pemanfaatan seni budaya secara kreatif. Pemerintah dapat mendorong penyelenggaraan festival kebudayaan, pameran seni, serta pertunjukan tradisional yang bersifat rutin untuk menarik minat wisatawan dan masyarakat umum. Selain itu, upaya pendokumentasian karya seni dan budaya lokal juga sangat penting agar warisan budaya dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Di samping pelestarian, perlu diupayakan pula inovasi yang memadukan unsur tradisional dengan sentuhan modern, sehingga seni budaya daerah tetap relevan dan menarik bagi kalangan muda. Dengan demikian, kejayaan kebudayaan daerah bukan hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi yang dapat menggerakkan sektor ekonomi kreatif.

Ketiga, pengembangan daya tarik pariwisata berbasis seni budaya dan potensi unggulan menjadi langkah strategis dalam memperluas segmen pasar wisata. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri, baik itu kesenian khas, kuliner tradisional, hingga keindahan alam. Pemerintah bersama pelaku usaha pariwisata dapat mengemas berbagai potensi tersebut dalam paket wisata tematik, seperti tur *heritage*, ekowisata, atau wisata kuliner. Selain memberikan pengalaman berharga bagi pengunjung, konsep ini juga memberdayakan komunitas lokal dengan mendorong partisipasi mereka dalam menyediakan jasa pemandu, penginapan berbasis *homestay*, serta produk-produk kerajinan khas daerah. Dengan demikian, pengembangan pariwisata akan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa bangga dan kepedulian mereka terhadap pelestarian warisan budaya.

InUse Book 1.indb 219 10/19/2025 12:13:02 AM

Keempat, meningkatnya potensi dan kreativitas pemuda dalam pengembangan seni budaya tidak terlepas dari pentingnya pembinaan dan pendampingan yang tepat. Pemerintah dapat memfasilitasi program pelatihan dan kompetisi di bidang seni, olahraga, serta keterampilan kreatif lain yang relevan. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui sanggar-sanggar seni, pusat pelatihan olahraga, atau wadah-wadah komunitas yang dikelola oleh pemuda itu sendiri. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga menjadi kunci agar generasi muda memiliki ruang berekspresi dan mengasah kemampuan mereka. Dengan adanya dukungan kebijakan dan infrastruktur, diharapkan muncul talenta-talenta baru yang mampu membawa nama daerah ke kancah nasional maupun internasional.

Tak kalah penting, integrasi antara olahraga dan pariwisata juga dapat dikembangkan melalui penyelenggaraan berbagai ajang kompetisi atau festival olahraga yang melibatkan atlet lokal, nasional, maupun internasional. Kegiatan semacam ini tidak hanya mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat, tetapi juga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Contohnya, lomba lari maraton yang menampilkan keindahan alam setempat, turnamen olahraga air di kawasan pantai atau danau, serta kompetisi sepeda yang melintasi rute-rute bersejarah. Jika dikelola dengan baik, olahraga dapat menjadi daya tarik pariwisata yang unik, sekaligus mengangkat reputasi daerah sebagai destinasi yang aktif dan dinamis. Pembangunan Stadion: Menunjang Misi Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda di Kabupaten Kediri.

Dalam mendukung Misi 5, pembangunan stadion baru menjadi salah satu strategi kunci yang akan diakselerasi. Stadion ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas olahraga modern yang mampu menyelenggarakan berbagai *event* berskala regional hingga nasional, tetapi juga akan menjadi magnet pariwisata baru. Dengan desain yang representatif dan fasilitas pendukung yang lengkap, stadion akan menarik lebih banyak pengunjung, baik dari kalangan pecinta olahraga maupun masyarakat umum yang mencari hiburan dan rekreasi. Keberadaan stadion ini juga akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan UMKM di sekitar area stadion, serta penciptaan lapangan kerja baru.

Lebih lanjut, stadion ini akan menjadi pusat pengembangan olahraga di Kabupaten Kediri sebagai fasilitas latihan dan kompetisi bagi para atlet muda dan klub olahraga. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan prestasi olahraga daerah dan pembibitan talenta-talenta atlet lokal. Selain itu, stadion juga akan dirancang untuk dapat mengakomodasi berbagai *event* seni budaya dan kreativitas pemuda, seperti konser musik, pameran, atau festival, menjadikannya ruang multifungsi yang dinamis. Dengan demikian, pembangunan stadion ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi strategis yang akan memperkuat identitas Kabupaten Kediri sebagai daerah yang maju dalam bidang pariwisata, kaya akan seni dan budaya, berprestasi dalam olahraga, dan progresif dalam mendukung kreativitas generasi muda.

Secara keseluruhan, Misi 5 berupaya menciptakan sinergi antara pariwisata, seni budaya, olahraga, dan kreativitas pemuda sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling menguatkan. Dengan strategi yang berfokus pada pengelolaan destinasi wisata secara profesional, pelestarian serta inovasi seni budaya, pengembangan potensi pemuda, dan integrasi olahraga dalam kegiatan pariwisata, diharapkan potensi daerah dapat tergali secara optimal. Melalui langkah-langkah ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan terus tumbuh,

InUse Book 1.indb 220 10/19/2025 12:13:02 AM

kebudayaan lokal tetap terjaga, dan pemuda mendapat ruang yang luas untuk berkontribusi. Pada akhirnya, pengembangan pariwisata dan seni budaya tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkokoh identitas serta kebanggaan daerah di tengah arus perubahan global.

3.2.1.6 Misi 6: Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan

Penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan merupakan agenda krusial untuk memastikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan masa depan yang lestari. Misi 6 ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam. Salah satu strategi utamanya adalah pengelolaan ruang melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mempertimbangkan faktor risiko bencana, keberlanjutan ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Dengan memetakan kawasan rawan banjir, longsor, gempa bumi, dan jenis bencana lainnya, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan permukiman, industri, maupun infrastruktur pada area yang lebih aman. Selain itu, pemanfaatan lahan secara bijak dan berkelanjutan dapat mengurangi potensi kerusakan lingkungan, mencegah kerugian ekonomi, serta meminimalkan korban jiwa saat terjadi bencana.

Selanjutnya, pengelolaan kewaspadaan bencana menjadi komponen penting dalam meningkatkan resiliensi daerah. Pemerintah bersama masyarakat perlu menyusun rencana kontinjensi yang komprehensif, termasuk mekanisme evakuasi, titik kumpul, serta sistem peringatan dini. Melalui simulasi berkala, warga akan terlatih untuk merespons keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Di samping itu, pemanfaatan teknologi seperti sensor pemantau gempa, aplikasi informasi cuaca, dan sistem komunikasi tanggap darurat dapat membantu memperkuat kesiapsiagaan. Pendidikan kebencanaan juga perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan kegiatan sosialisasi komunitas, agar pengetahuan mengenai tanda-tanda awal bencana dan cara bertindak aman menjadi bagian dari budaya masyarakat. Pendekatan partisipatif yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan dunia usaha akan memperkaya wawasan sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana.

Di sisi lain, pengendalian kerusakan lingkungan juga tidak dapat diabaikan. Degradasi lahan, penebangan hutan secara ilegal, serta pencemaran air dan udara akan meningkatkan kerentanan wilayah terhadap berbagai ancaman bencana. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu menegakkan regulasi yang mengatur tata kelola lingkungan secara tegas. Penanaman kembali lahan kritis dan rehabilitasi ekosistem hutan dapat menurunkan risiko banjir dan longsor, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati. Sementara itu, pengelolaan sampah dan limbah domestik maupun industri harus ditingkatkan dengan memperhatikan prinsip *reduce, reuse, dan recycle*. Upaya ini tidak hanya akan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, tetapi juga mengurangi beban infrastruktur pengolahan limbah dan menghemat sumber daya alam. Di samping langkah-langkah teknis, edukasi publik mengenai gaya hidup ramah lingkungan dan konsumsi berkelanjutan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat secara sukarela turut serta menjaga kelestarian alam.

InUse Book 1.indb 221 10/19/2025 12:13:02 AM

Dalam kerangka keberlanjutan lingkungan, peran pemuda dan komunitas lokal sangatlah penting. Mereka dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan, menginisiasi gerakan penghijauan, atau melakukan kampanye pelestarian alam melalui media sosial. Peningkatan kapasitas kelembagaan, seperti pelatihan petugas pemadam kebakaran, relawan bencana, dan satuan tugas penanggulangan krisis, akan membantu mengokohkan struktur pertahanan wilayah. Di samping itu, kolaborasi dengan pihak swasta dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana dan penguatan infrastruktur hijau. Keterlibatan berbagai pihak ini mencerminkan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, Misi 6 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan tata ruang yang bijak, kesiapsiagaan bencana yang menyeluruh, serta perlindungan lingkungan yang berkesinambungan. Sinergi antara kebijakan, penegakan hukum, partisipasi publik, dan inovasi teknologi menjadi modal utama untuk mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan pendekatan kolaboratif dan berwawasan jangka panjang, diharapkan setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari lingkungan yang sehat dan aman, serta memiliki kemampuan adaptif untuk menghadapi tantangan alam di masa mendatang.

3.2.1.7 Misi 7: Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat merupakan langkah strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang menempatkan desa sebagai ujung tombak kemajuan. Misi 7 ini berupaya memaksimalkan potensi desa dengan menekankan pada pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan desa. Salah satu kunci keberhasilan strategi ini terletak pada pembentukan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mampu mengelola aset dan potensi setempat secara profesional. Melalui BUMDes, berbagai usaha dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik desa, mulai dari sektor pertanian, kerajinan, pariwisata, hingga jasa keuangan mikro. Dengan demikian, desa dapat menghasilkan sumber pendapatan baru yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Selain BUMDes, kolaborasi antardesa dan lembaga kerja sama antardesa menjadi elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kerja sama ini dapat terwujud dalam bentuk pemasaran bersama, pengelolaan sumber daya alam lintas batas, atau program pelatihan dan pendampingan teknis secara kolektif. Melalui sinergi tersebut, desa-desa dapat saling berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya, sehingga memperkuat posisi tawar di pasar yang lebih luas. Sebagai contoh, jika sebuah desa memiliki keunggulan di sektor pertanian organik, sementara desa lain unggul dalam pengolahan hasil pertanian, keduanya bisa bekerja sama untuk memproduksi produk bernilai tambah tinggi dan memasarkannya secara bersama-sama. Kerja sama ini tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga menumbuhkan solidaritas antarwarga desa.

InUse Book 1.indb 222 10/19/2025 12:13:02 AM

Dalam kerangka mewujudkan kemandirian desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kapasitas dan partisipasi warga. Pelatihan di bidang kewirausahaan, manajemen keuangan, dan teknologi tepat guna dapat membantu masyarakat mengelola usaha dengan lebih profesional. Di samping itu, penguatan kelompok tani, nelayan, maupun perajin desa melalui pendampingan intensif akan memacu munculnya inovasi dan diversifikasi produk. Program literasi digital juga dapat diberikan agar pelaku usaha desa mampu memanfaatkan platform daring untuk promosi, penjualan, dan kolaborasi dengan mitra di luar wilayah. Melalui partisipasi aktif masyarakat, proses pembangunan menjadi lebih demokratis dan berkelanjutan, karena warga merasa memiliki inisiatif yang dijalankan dan terdorong untuk terus mengembangkannya.

Sementara itu, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa yang berkeadilan, pemerintah perlu memastikan dukungan infrastruktur dan layanan dasar, seperti akses jalan, jaringan telekomunikasi, air bersih, dan listrik. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memudahkan distribusi barang dan jasa, memicu investasi lokal, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru. Di samping itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti sektor swasta dan lembaga keuangan, juga sangat diperlukan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, desa dapat memperoleh akses permodalan, pendampingan manajemen, dan perluasan pasar.

Terakhir, aspek keberlanjutan lingkungan perlu menjadi landasan utama dalam proses pembangunan desa. Upaya pelestarian lingkungan, seperti rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan limbah rumah tangga, dan konservasi sumber daya air, akan menjaga keseimbangan ekosistem serta menunjang kegiatan ekonomi jangka panjang. Masyarakat desa, dengan kearifan lokalnya, memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam setempat. Apabila kegiatan ekonomi dijalankan selaras dengan pelestarian lingkungan, maka kemandirian desa akan terwujud tanpa mengorbankan kualitas hidup generasi mendatang.

Secara keseluruhan, Misi 7 berupaya menciptakan desa yang mandiri, kuat secara ekonomi, dan memiliki kapasitas sosial untuk menghadapi tantangan global. Dengan strategi pembentukan BUMDes, kerja sama antardesa, pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar, serta pelestarian lingkungan, desa dapat menjadi basis pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan. Jika desa-desa semakin berdaya, maka kesenjangan wilayah dapat dikurangi, dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat secara signifikan. Melalui sinergi dan komitmen bersama, kemandirian desa bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang mampu mendorong Indonesia menuju kemajuan yang lebih inklusif.

InUse Book 1.indb 223 10/19/2025 12:13:02 AM

TABEL 3.7
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

MISI 1	**Pengembangan SDM yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing serta Nasionalis-Religius**		
	TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing serta nasionalis religius	Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan unggul yang merata	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan modern dan inklusif
			Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP)
		Terwujudnya pembangunan keluarga dan kesetaraan gender di masyarakat	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak
			Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup
		Terwujudnya kehidupan masyarakat nasionalis-religius	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
			Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
MISI 2	**Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal**		
	TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
	Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan
			Penciptaan iklim ekonomi yang mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja
MISI 3	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**		
	TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik	Digitalisasi pelayanan publik melalui *e-government*
			Peningkatan kompetensi aparatur dalam inovasi dan manajemen layanan publik
MISI 4	**Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur**		
	TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
	Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa
			Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian

InUse Book 1.indb 224 10/19/2025 12:13:02 AM

MISI 5	**Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda**		
	TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
	Berkembangnya daya tarik pariwisata berbasis seni budaya daerah dan potensi unggulan	Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata
			Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten
			Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
			Pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya
			Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional
			Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten
MISI 6	**Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan**		
	TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
			Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten
		Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
MISI 7	**Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**		
	TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
	Terwujudnya pembangunan desa yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya kemandirian desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerja sama antardesa
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan di masyarakat	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

InUse Book 1.indb 225 10/19/2025 12:13:02 AM

Penahapan pembangunan, selanjutnya, merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Tabel 3.8 berikut merupakan penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2026 hingga 2030. Perumusannya menggunakan pendekatan *Shewhart cycle* yang merupakan sebuah metodologi berupa empat langkah tindakan yang dapat menjadi instrumen manajemen perencanaan guna mencapai perkembangan yang senantiasa berkelanjutan. Rangkaian empat langkah PDCA tersebut meliputi: (1) *planning* yang mencakup penentuan target, (2) *doing* yang merupakan tahap implementasi, (3) *checking* dalam hal ini merupakan evaluasi atas performa kinerja pembangunan yang telah berjalan, dan (4) *acting* yang mencakup tindak lanjut dari hasil evaluasi dan berorientasi pada kesiapan menuju tahap selanjutnya dalam RPJPD Kabupaten Kediri. Adapun setiap tahap kemudian menjadi padanan tema yang akan diangkat pada renstra perangkat daerah di tahun tersebut.

TABEL 3.8
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2026–2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pembangunan Fondasi SDM dan Infrastruktur Dasar	Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Digitalisasi	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Lingkungan	Evaluasi dan Konsolidasi Pembangunan Berkelanjutan	Akselerasi Kemandirian Desa dan Kesejahteraan Masyarakat

Tahap I (2026): Pembangunan Fondasi SDM dan Infrastruktur Dasar. Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Kediri akan memfokuskan pembangunan pada penyediaan layanan dasar yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terlepas dari kondisi geografis dan ekonomi. Beberapa kegiatan yang perlu digarisbawahi ialah bagaimana Dinas Pendidikan akan membangun dan merehabilitasi sarana sekolah, termasuk penyediaan ruang kelas baru dan laboratorium di daerah tertinggal serta sarana yang dapat mengakomodasi siswa disabilitas. Bersamaan dengan itu, Dinas Kesehatan melakukan revitalisasi puskesmas dan posyandu untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dasar. DPUPR secara paralel akan memperbaiki infrastruktur vital seperti jalan desa, jembatan, dan sistem drainase dasar. Tahap ini menjadi landasan penting sebelum melangkah ke program-program yang lebih kompleks, dengan target terpenuhinya standar pelayanan minimal di seluruh kecamatan.

Tahap II (2027): Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Digitalisasi. Memasuki tahun kedua, fokus beralih ke penggerakan ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi. Dinas Koperasi dan UMKM akan mengintensifkan pelatihan digital marketing dan pendampingan usaha mikro, sementara Diskominfo mempercepat implementasi *e-government* satu pintu yang efisien untuk menyederhanakan perizinan usaha dan urusan birokrasi di tingkat kabupaten. Dinas Perdagangan mengembangkan platform pemasaran *online* produk lokal, didukung oleh DPUPR yang menyelesaikan jaringan internet *broadband* di sentra-sentra ekonomi. Tahun ini menjadi momentum lompatan digital dengan target 50% UMKM terdigitalisasi dan peningkatan signifikan dalam kemudahan berusaha.

InUse Book 1.indb 226 10/19/2025 12:13:02 AM

Tahap III (2028): Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Lingkungan. Tahap ketiga mengonsolidasikan potensi budaya dan alam sebagai pengungkit ekonomi. Dinas Pariwisata menggelar festival budaya tahunan dan mengembangkan desa wisata berbasis kearifan lokal, didukung Dinas Pendidikan yang melatih pemandu wisata muda. DLH secara simultan melakukan rehabilitasi ekosistem melalui penghijauan kembali dan pengelolaan sampah terpadu di kawasan wisata dan permukiman. BPBD memperkuat mitigasi bencana dengan sistem peringatan dini berbasis komunitas. Tahun ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan.

Tahap IV (2029): Evaluasi dan Konsolidasi Pembangunan Berkelanjutan. Memasuki tahun keempat, dilakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh capaian pembangunan. Bappeda memimpin proses audit kinerja berbasis data dengan tiga pendekatan: (1) pengukuran indikator kuantitatif melalui sistem *dashboard real-time*, (2) evaluasi kualitatif melalui FGD dengan akademisi, CSO, dan tokoh masyarakat, serta (3) survei kepuasan pelayanan publik. Hasilnya diolah menjadi laporan "*Lesson Learned*" yang mengidentifikasi program yang perlu dihentikan, dimodifikasi, atau direplikasi. Contoh konkret termasuk evaluasi efektivitas digitalisasi UMKM di pelosok dan kualitas revitalisasi puskesmas.

Tahap V (2030): Konsolidasi dan Transisi Menuju Akselerasi Pembangunan. Tahun terakhir RPJMD diarahkan pada dua agenda utama. Pertama, konsolidasi program unggulan yang terbukti efektif menjadi kebijakan berkelanjutan, seperti institusionalisasi model BUMDes yang sukses dan penyusunan SOP pelayanan publik terstandar. Kedua, penyiapan dokumen RPJPD dengan mengonversi temuan evaluasi menjadi rekomendasi strategis, termasuk penyelarasan terhadap visi jangka panjang dan pengembangan sistem *database* terintegrasi. Tahap ini memastikan kesinambungan pembangunan sekaligus menjadi jembatan menuju periode perencanaan berikutnya.

Siklus ini menciptakan mekanisme pembangunan yang dinamis, evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir periode, tetapi menjadi dasar untuk penyempurnaan berkelanjutan. Pendekatan PDCA terintegrasi ini memastikan setiap tahapan RPJMD saling terkait secara sistematis, dengan proses *check-act* yang ketat untuk meminimalkan pemborosan anggaran dan memaksimalkan dampak pembangunan bagi masyarakat.

3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

3.2.1.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Tahap 1 RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045, terdapat arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun periode pembangunan. Arah kebijakan merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Secara umum, arah kebijakan Kabupaten Kediri selama 20 tahun ke depan dibagi ke dalam empat periode sesuai dengan RPJMD yang meliputi: (1) periode 2025–

InUse Book 1.indb 227 10/19/2025 12:13:02 AM

2029, (2) periode 2030–2034, (3) periode 2035–2039, dan (4) periode 2040–2045. Perumusan arah kebijakan yang kokoh merupakan langkah esensial mengingat perannya yang bukan hanya sekadar menjadi panduan, melainkan juga fondasi mendalam untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh daerah. Arah kebijakan memiliki peran utama dalam menentukan prioritas pembangunan dan tindakan strategis yang akan diambil pada setiap periode lima tahun.

Pentingnya arah kebijakan terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Melalui identifikasi terhadap prioritas utama dan tujuan jangka panjang, Kabupaten Kediri dapat merencanakan sumber daya dan langkah-langkah konkrit yang akan mendukung pencapaian visi daerah. Seiring berjalannya waktu, arah kebijakan menjadi acuan yang memandu setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu guna menciptakan kesinambungan pembangunan. Penyusunan arah kebijakan mencakup identifikasi tantangan dan peluang yang dapat muncul selama periode lima tahun dan memberikan kerangka kerja yang dapat menyesuaikan rencana jika diperlukan. Selain itu, arah kebijakan mempromosikan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas karena melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam perumusannya. Proses ini menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkesinambungan, sesuai dengan visi Kabupaten Kediri untuk masa depan yang lebih baik.

Arah kebijakan yang dirumuskan menjadi pijakan utama dalam merencanakan pembangunan daerah Kabupaten Kediri selama periode lima tahun dan berperan krusial dalam mencapai visi daerah: "*KEDIRI BERBUDAYA LUHUR 2045: Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan*." Visi ini mencerminkan tekad dan tujuan Kabupaten Kediri untuk menjadi daerah yang lebih baik dalam berbagai aspek. Pertama, komitmen Kabupaten Kediri untuk memelihara nilai-nilai budaya, moral, dan etika yang tinggi. Dalam kerangka arah kebijakan, hal ini diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang mendukung pendidikan, kebudayaan, dan etika masyarakat. Selanjutnya, visi di atas juga mencerminkan keinginan daerah untuk memajukan sektor ekonomi dan berkompetisi di tingkat nasional maupun global. Arah kebijakan akan menjadi dasar bagi inisiatif pengembangan ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

Selain itu, visi *Kediri Berbudaya Luhur* juga menunjukkan komitmen Kabupaten Kediri untuk memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Arah kebijakan akan menentukan strategi yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Adapun pentingnya memelihara nilai-nilai nasionalisme, humanisme, dan keagamaan dalam setiap aspek kebijakan dan tindakan pembangunan juga menjadi sorotan. Dengan demikian, arah kebijakan yang diuraikan di atas merupakan kerangka kerja yang akan membimbing setiap tindakan pembangunan Kabupaten Kediri selama periode lima tahun dalam 20 tahun ke depan. Adanya dasar pijakan ini berperan dalam memastikan bahwa visi daerah menjadi kenyataan dan mencerminkan tekad Kabupaten Kediri untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat.

InUse Book 1.indb 228 10/19/2025 12:13:02 AM

Tema arah kebijakan pada tahapan pertama (2025–2029) adalah penguatan fondasi pembangunan di Kabupaten Kediri. Pada tahap ini, *transformasi sosial* difokuskan pada penuntasan pemenuhan, kemudahan akses, dan optimalisasi mutu pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sehingga siap untuk menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kediri. *Transformasi ekonomi* difokuskan pada penguatan simpul kebijakan yang adaptif dalam mendukung hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, dan pemenuhan akses digital di Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. *Transformasi tata kelola* difokuskan pada perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan, dan praktik *smart governance*. Supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan ketahanan pembangunan daerah digunakan sebagai salah satu landasan transformasi yang berfokus pada penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui reformasi struktural dan penjaminan kebijakan fiskal sehingga menjadi dasar dalam perwujudan ketahanan pembangunan daerah yang kokoh. Ketahanan sosial budaya, resiliensi, dan ekologi juga bertindak sebagai landasan transformasi di Kabupaten Kediri yang berfokus pada pelestarian budaya lokal sebagai identitas daerah, penguatan komunitas dan kolaborasi multipihak, dan inventarisasi sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai fondasi dan aset utama pembangunan. Kerangka implementasi pembangunan wilayah pada tahapan ini secara umum difokuskan pada penetapan dasar pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata. Selain itu, dilakukan pula pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi aksesibilitas air bersih, sanitasi, jaringan listrik, dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, seluruhnya harus didukung oleh pembangunan fondasi sinergitas melalui sinkronisasi dokumen perencanaan dan pemenuhan infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan.

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025-2029 yang telah diadopsi pada rancangan akhir (rankhir) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, bahwa terdapat *highlight* intervensi arah kebijakan dengan lokus di Kabupaten Kediri, antara lain:

1) Kawasan Perkotaan Kediri
   a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kediri melalui:
      - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
      - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau.
      - Penataan pemukiman kumuh terpadu perkotaan.
   b. Pengembangan dalam urusan perumahan dan kawasan pemukiman dengan pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Kediri (PHTC).
   c. Pengembangan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang:
      - Inisiasi pembangunan TPST regional Kediri;
      - Inisiasi pengembangan SPAM regional lintas tengah; dan
      - Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Kediri.
   d. Pengembangan dalam urusan kebencanaan dengan pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Kelud.

InUse Book 1.indb 229 10/19/2025 12:13:02 AM

2) Kawasan swasembada pangan, air, dan energi Brantas dengan pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui: kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.

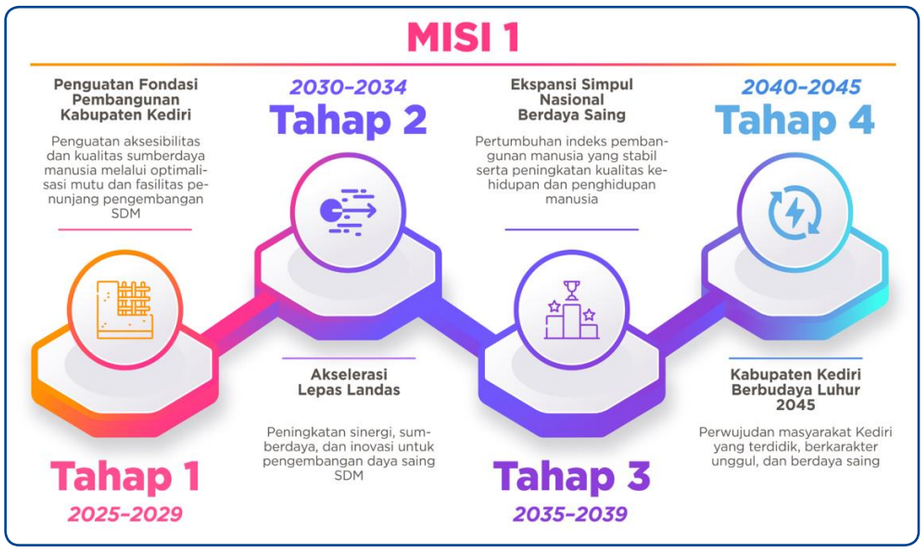
Arah kebijakan pembangunan tahap pertama (2025–2029) selaras dengan visi dan misi jangka panjang (periode RPJPD 20 tahun) dijabarkan pada tabel berikut.

TABEL 3.9
Arah Kebijakan Tahap 1 Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025–2029
(1)	(2)	(3)
Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing	Penguatan aksesibilitas dan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan SDM
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Penguatan simpul kebijakan yang adaptif dalam mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal
	Mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.	Optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan, dan praktik *smart governance*
	Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah	Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah serta keamanan dan ketahanan wilayah
	Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan	Pembangunan ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi
	Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan	Pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata
	Dukungan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Pembangunan fondasi sinergitas melalui sinkronisasi dokumen perencanaan dan pemenuhan infrastruktur pendukung ekonomi ramah lingkungan

InUse Book 1.indb 230 10/19/2025 12:13:02 AM

Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Terdidik yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing



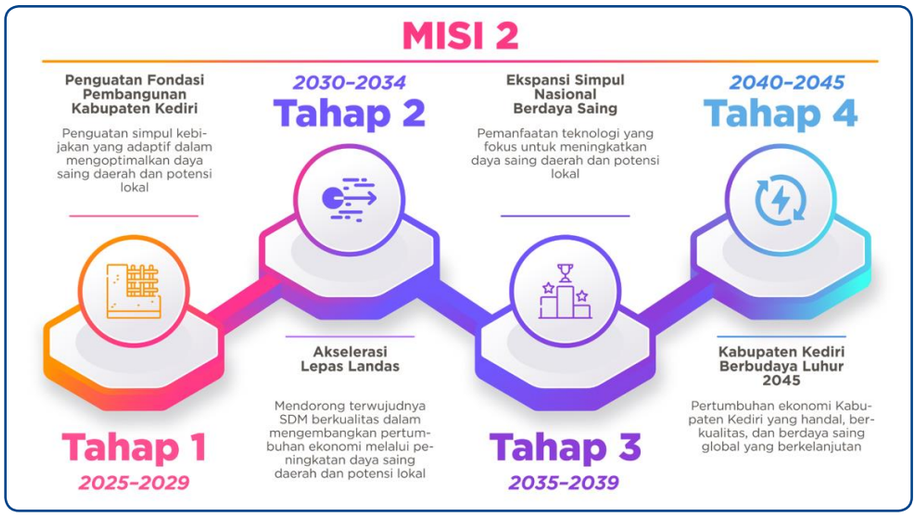
Arah kebijakan pada misi pertama bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kediri yang terdidik, berkarakter unggul, berdaya saing, nasionalis dan religius. Perumusan arah kebijakan dilaksanakan dalam empat tahapan pembangunan guna mencapai tujuan akhir. Pada tahap pembangunan pertama pelaksanaan misi satu berfokus pada penguatan aksesibilitas dan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan sumber daya manusia. Modal dasar yang telah dimiliki oleh Kabupaten Kediri perlu diperkuat agar dapat bersaing sesuai perkembangan zaman. Peningkatan demografi khususnya pada potensi masyarakat produktif perlu diimbangi dengan jumlah fasilitas yang memadai. Di sisi lain, peningkatan fasilitas perlu diiringi dengan peningkatan kualitas yang relevan sesuai dengan tuntutan zaman.

Keterjangkauan layanan pendidikan perlu diperhatikan guna mencapai optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan SDM. Pendidikan inklusif menyediakan lingkungan pendidikan yang mendukung keberagaman, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus sehingga kurikulum dan metode pengajaran harus dapat diakses oleh semua siswa. Selanjutnya, pendidikan karakter dilaksanakan dengan mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam kurikulum untuk mengembangkan nilai-nilai etika.

Penguatan aksesibilitas dan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan SDM dilakukan dalam upaya penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif sekaligus peningkatan layanan tingkat lanjutan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Selain peningkatan layanan, Pemerintah Kabupaten Kediri akan terus menjaga cakupan penerima jaminan kesehatan nasional dengan tujuan *Universal Health Coverage* (UHC) agar masyarakat mendapat kepastian pelayanan kesehatan yang diperlukan.

InUse Book 1.indb 231 10/19/2025 12:13:03 AM

Misi 2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata melalui Peningkatan Daya Saing Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Potensi Lokal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

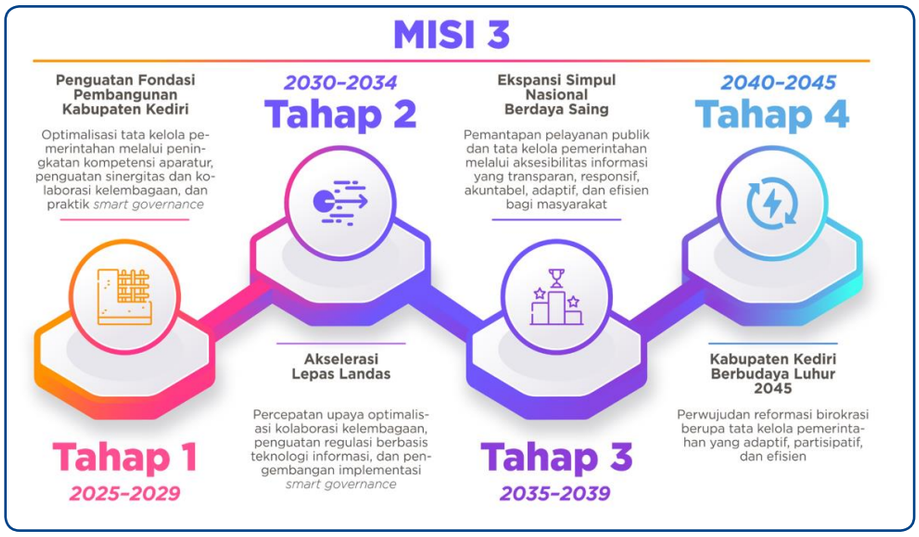


Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kediri pada misi kedua, yaitu "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat" dapat diwujudkan dengan beberapa tahapan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tahap pertama berfokus pada penguatan simpul kebijakan yang adaptif dalam mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal. Hal ini berfokus pada adanya respons yang cepat terhadap perubahan kondisi, mengintegrasikan pemikiran lintas sektor, dan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif. Untuk mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal, kebijakan ini dapat mencakup inisiatif seperti penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yang fleksibel, fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM dan industri lokal, serta implementasi program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Upaya juga harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan efisiensi, serta promosi inovasi dan riset lokal. Pentingnya kebijakan adaptif adalah kesanggupannya untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan sekitar, sehingga mampu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing daerah yang tangguh. Selain itu, pada tahap pertama ini juga dilakukan peningkatan kualitas layanan infrastruktur sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendukung konektivitas wilayah dan sektor pariwisata.

Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan yang Akuntabel

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kediri berkaitan dengan misi ketiga RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel pada tahun 2045. Dalam perwujudan cita-cita yang hendak dicapai dalam misi ke-3 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 diperlukan arah kebijakan pada tiap periode perencanaan 5 (lima) tahunan guna mencapai hasil akhir ideal yang diharapkan.

InUse Book 1.indb 232 10/19/2025 12:13:03 AM



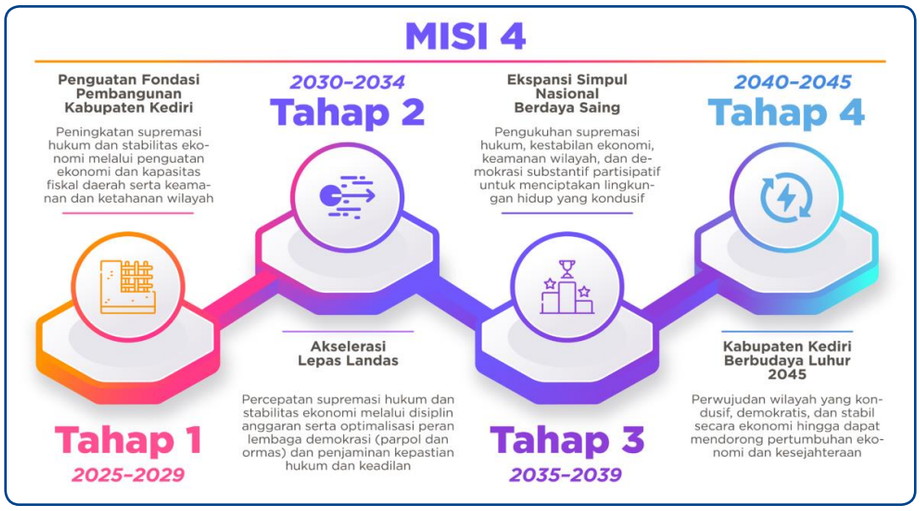
Pada periode pertama (2025–2029) arah kebijakan pembangunan diarahkan pada optimalisasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan, dan praktik *smart governance*. Maksud dari arah pembangunan periode pertama ini adalah agar tercapai kondisi internal yang optimal, termasuk dari segi kapasitas aparatur dan lembaga dalam rangka mendukung proses pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kediri. Optimalisasi tata kelola pemerintahan, termasuk penguatan aparatur daerah sehingga menjamin kinerja yang efektif dan efisien. Peningkatan kualitas dan pendayagunaan aparatur daerah ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya diklat dan pelatihan yang mendukung pengembangan kompetensi para aparatur daerah.

Misi 4. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Perekonomian untuk Mewujudkan Keamanan dan Ketahanan Wilayah

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kediri pada misi keempat RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 diarahkan untuk mewujudkan adanya supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah Kabupaten Kediri pada tahun 2045. Perwujudan cita-cita yang hendak dicapai dalam misi ke-4 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 diperlukan arah kebijakan pada tiap periode perencanaan 5 (lima) tahunan untuk mencapai hasil akhir ideal yang diharapkan.

Pada tahap pertama (2025–2029) arah kebijakan pembangunan pada misi ini diharapkan untuk mencapai percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah serta keamanan dan ketahanan wilayah. Supremasi hukum diharapkan akan menjadi sebuah jaminan pada masyarakat karena menyatakan bahwa hukum pada posisi yang tertinggi agar mampu melindungi segenap komponen yang ada di Kabupaten Kediri. Selain itu, kestabilan perekonomian daerah juga harus terus dijaga agar mampu menyejahterakan seluruh masyarakat di Kabupaten Kediri.

InUse Book 1.indb 233 10/19/2025 12:13:03 AM



Stabilitas perekonomian daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Kesinambungan fiskal dilakukan melalui upaya penguatan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terutama dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah yang didukung dengan berbagai kebijakan dan pengendalian fiskal, serta kelembagaan yang adaptif. Selain itu, dari sisi belanja daerah juga dapat diarahkan pada belanja yang bersifat produktif, efektif, efisien dan menghasilkan *output* yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian daerah juga dapat dilakukan melalui upaya penguatan manajemen investasi dalam rangka mendukung berbagai program pembangunan daerah.

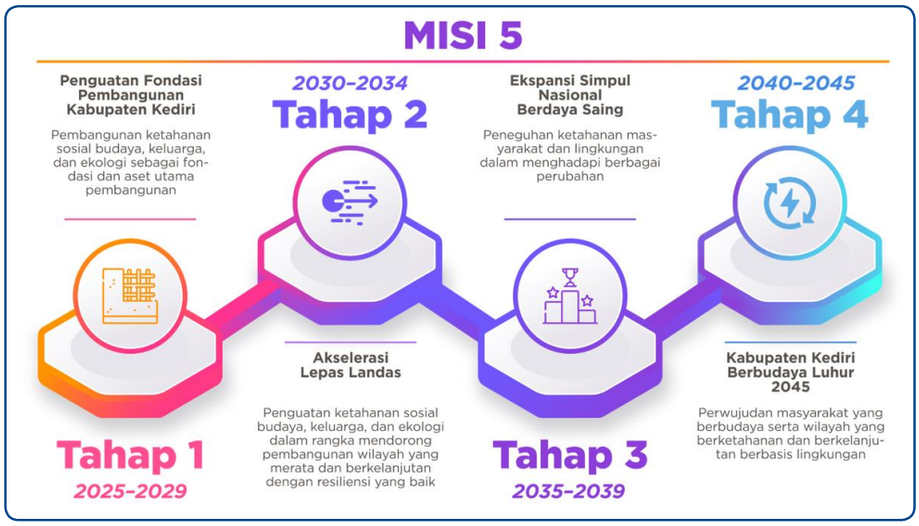
Misi 5. Menguatkan Moral dan Nilai-Nilai Masyarakat dalam Melestarikan Budaya, Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana, dan Menjaga Keberlanjutan Lingkungan

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kediri pada misi kelima RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 diarahkan untuk mencapai penguatan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Untuk mewujudkan cita-cita yang hendak dicapai dalam misi ke-5 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 tersebut, diperlukan arah kebijakan pada tiap periode perencanaan 5 (lima) tahunan untuk mencapai hasil akhir ideal yang diharapkan.

Arah kebijakan pada periode pertama, yaitu mengenai ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi sebagai fondasi dan aset utama dalam pembangunan. Langkah ini diimplementasikan pada tahap pertama karena mengakui pentingnya membangun landasan yang kuat untuk mendukung upaya pembangunan secara keseluruhan. Dalam konteks ketahanan sosial budaya, pendekatan ini melibatkan penguatan nilai-nilai masyarakat sebagai elemen

InUse Book 1.indb 234 10/19/2025 12:13:04 AM

sentral pembangunan. Penguatan nilai-nilai, seperti solidaritas, toleransi, dan keadilan, bukan hanya memperkuat struktur sosial, tetapi juga memberikan fondasi moral untuk masyarakat. Kesadaran akan warisan budaya juga menjadi prioritas karena memahami dan melestarikan budaya adalah langkah penting dalam membangun identitas dan kohesi sosial. Dengan memperkuat ketahanan sosial budaya, masyarakat dapat lebih baik memahami dan mengatasi perubahan, tantangan, serta konflik internal.

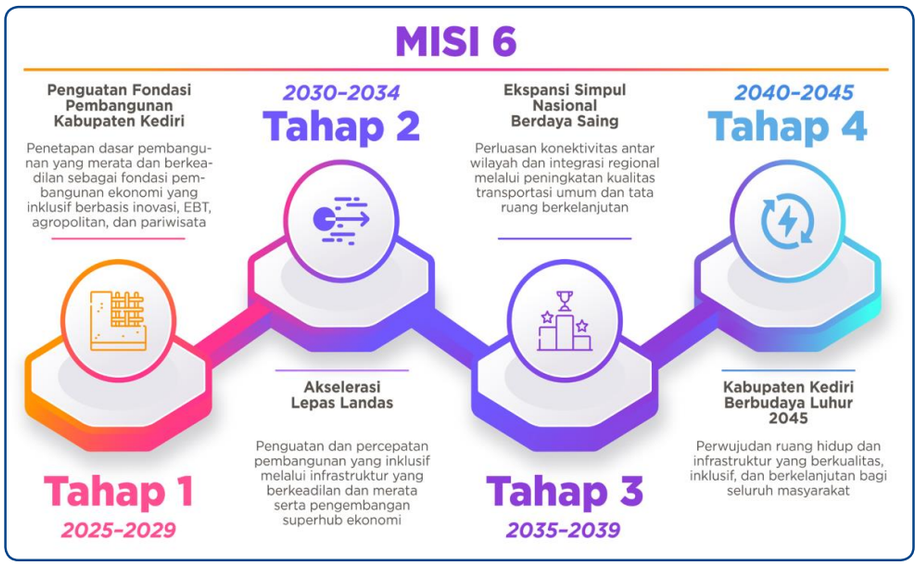


Ketahanan keluarga menjadi hal yang hendak dicapai pula pada misi kelima RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045. Melalui adanya ketahanan keluarga diharapkan akan menciptakan kondisi keluarga yang dapat bertahan, beradaptasi, serta berkembang dalam menghadapi berbagai tekanan pembangunan kedepannya. Sementara itu, ketahanan ekologi pada tahap awal menempatkan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Melibatkan penguatan perlindungan terhadap ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Lebih dari itu, ketahanan ekologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesiapan terhadap risiko bencana, dengan meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan adaptabilitas masyarakat terhadap perubahan alam.

Tahap pertama ini ditujukan untuk penguatan fondasi dan aset utama untuk memperkuat warisan budaya, memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan memprioritaskan ketahanan sosial budaya, keluarga dan ekologi pada awal pembangunan, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keberanian, integritas, dan ketahanan yang lebih baik.

InUse Book 1.indb 235
10/19/2025 12:13:04 AM

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur secara Merata dan Berkelanjutan

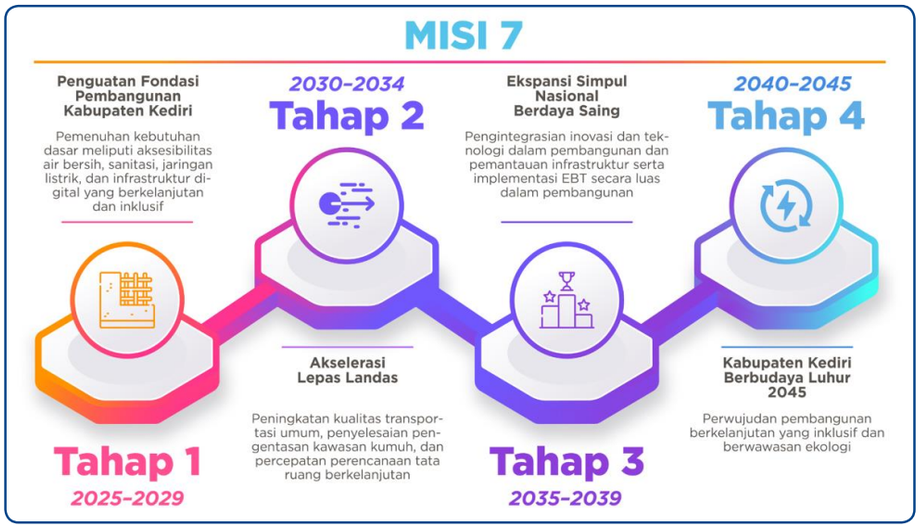


Tahap pertama menekankan pada pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata. Hal ini mengacu pada upaya untuk memperbaiki jaringan transportasi dan komunikasi antarwilayah, baik dalam bentuk jalan raya, jalan tol, rel kereta api, bandara, maupun infrastruktur digital seperti jaringan internet dan telekomunikasi. Tujuan dari arah kebijakan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah yang dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memperbaiki konektivitas antarwilayah, diharapkan aksesibilitas terhadap pasar, sumber daya, dan peluang ekonomi akan meningkat secara merata, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

Selain itu, pemenuhan infrastruktur fisik dan digital juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pengembangan bisnis. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan dapat menjadi lebih menarik bagi investor, sehingga mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang baru. Hal ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga pada peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemenuhan infrastruktur fisik dan digital menjadi langkah awal yang krusial dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata serta integrasi regional yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh negeri.

InUse Book 1.indb 236 10/19/2025 12:13:04 AM

Misi 7. Dukungan Sarana dan Prasarana Layanan Masyarakat yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

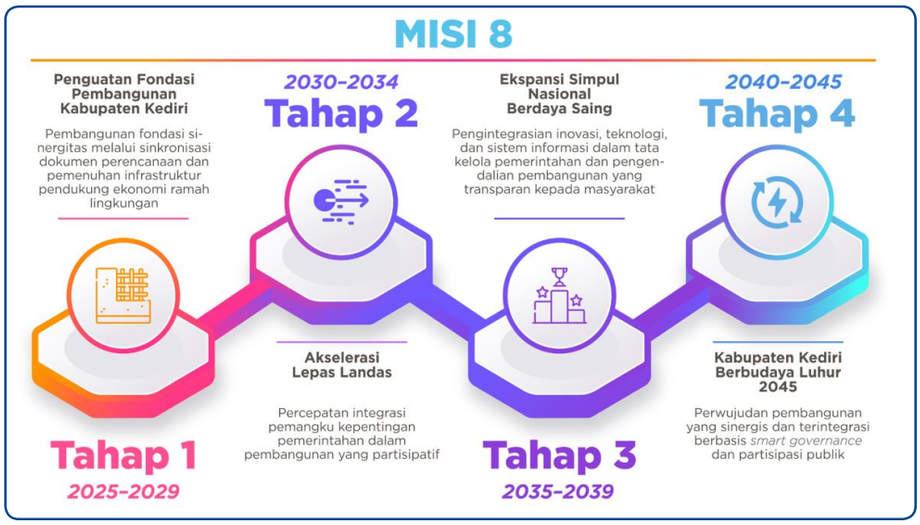


Tahap pertama dalam arah kebijakan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif. Infrastruktur dasar seperti ketersediaan rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi, energi, dan transportasi merupakan fondasi dari kehidupan yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, prioritasnya adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur ini, tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini melibatkan adopsi praktik pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, seperti konservasi sumber daya air, penggunaan energi terbarukan, pemulihan ekosistem yang terdegradasi, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi serta penetapan target *zero waste*, penguatan regulasi guna lahan pertanian berkelanjutan, serta perumahan berkelanjutan dan pelindungan ruang terbuka hijau. Langkah-langkah konkret termasuk investasi dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien, serta peraturan yang mengatur penggunaan sumber daya alam agar tidak melebihi kapasitas. Dengan mengimplementasikan arah kebijakan ini, diharapkan bahwa infrastruktur yang dibangun akan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

InUse Book 1.indb 237 10/19/2025 12:13:04 AM

Misi 8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan



Tahap pertama dalam arah kebijakan ini menekankan pembangunan fondasi sinergitas melalui sinkronisasi dokumen perencanaan dan pemenuhan infrastruktur pendukung ekonomi ramah lingkungan. Penguatan kerja sama dan sinergi antar-*stakeholder* adalah kunci dalam mencapai kesinambungan pembangunan. Hal ini mencakup kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional untuk merancang, melaksanakan, dan memantau program-program pembangunan. Melalui kerja sama yang efektif, berbagai pihak dapat menyatukan sumber daya, keahlian, dan pengalaman mereka untuk mengidentifikasi solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk tantangan pembangunan yang kompleks. Selain itu, sinergi antar-*stakeholder* juga membantu memastikan bahwa berbagai kepentingan dan perspektif masyarakat dipertimbangkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kerja sama dan sinergi antar-*stakeholder*, tahap pertama ini bertujuan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

3.2.1.2 Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Kediri

Pada operasionalisasi periode RPJMD tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan dituangkan secara *cascading* menurut tujuan dan sasaran pembangunan seperti pada tabel di bawah ini.

InUse Book 1.indb 238 10/19/2025 12:13:05 AM

InUse Book 1.indb 239

TABEL 3.10
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2026–2030

w

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing serta nasionalis religius serta nasionalis religius	Sasaran 1: Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan unggul yang merata	Mengelola pendidikan sekolah menengah	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	KL2 Pendidikan inklusif dan terjangkau	Penguatan aksesibilitas dan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan SDM
			Pembangunan perpustakaan sekolah			✓	✓	✓		
			Pengadaan perlengkapan sekolah	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pengadaan perlengkapan peserta didik			✓	✓	✓		
			Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	✓	✓	✓	✓	✓		
			Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana, dan utilitas sekolah		✓	✓	✓	✓		
		Menyediakan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	Penyediaan bantuan pembiayaan bagi pendidikan berupa Beasiswa Kediri Berbudaya	✓	✓	✓	✓	✓		
			Penyediaan insentif guru, tenaga pendidik, guru ngaji, dan guru agama	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	KL1 Keterjangkauan layanan kesehatan KL2 Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Penguatan aksesibilitas dan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan SDM
			Pengadaan alat kesehatan/penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		✓	✓	✓	✓		

10/19/2025 12:13:05 AM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
			Pengembangan rumah sakit		✓	✓	✓	✓		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga			✓	✓	✓		
		Menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓		
			Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)			✓	✓	✓		
			Pengelolaan kawasan tanpa asap rokok		✓	✓	✓	✓		
			Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak, kelanjutusiaan, dan layanan imunisasi	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	✓	✓	✓	✓	✓		
		Mengalokasikan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan yang sesuai standar	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓		
		Mengembangkan mutu dan meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓		

InUse Book 1.indb 240
10/19/2025 12:13:05 AM

InUse Book 1.indb 241

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
			Meningkatkan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/ atau nonformal		✓	✓	✓	✓		
		Advokasi, memberdayakan, kemitraan, meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓		
		Melaksanakan sehat dalam rangka promotif preventif	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		✓	✓	✓	✓		
			Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	✓	✓	✓	✓	✓		
		Mendukung pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah daerah	Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sasaran 3: Terwujudnya pembangunan keluarga dan kesetaraan gender di masyarakat	Melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		✓	✓	✓	✓	KL14 Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Pembangunan ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi
			Penyediaan dan pengembangan materi iBangga	✓	✓	✓	✓	✓		

10/19/2025 12:13:05 AM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
		Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG)	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga		✓	✓	✓	✓	KL12 Daya saing dan daya tarik investasi KL14 Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	
		Menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga			✓	✓	✓		
		Menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak	✓	✓	✓	✓	✓		
		Memberdayakan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Advokasi kebijakan dan pendampingan serta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi		✓	✓	✓	✓		
		Menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		✓	✓	✓	✓		
		Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	✓	✓	✓	✓	✓		
			Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan pencegahan KTA	✓	✓	✓	✓	✓		

InUse Book 1.indb 242
10/19/2025 12:13:05 AM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
	Sasaran 4: Terwujudnya kehidupan masyarakat nasionalis-religius	Mengelola pendidikan dan mengupayakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dukungan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	KL13 Masyarakat yang unggul, nasionalis, dan religius	Pembangunan ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi
			Pengembangan pusat kajian nasionalis-religius di tingkat sekolah dan desa			✓	✓	✓		
			Peningkatan peran pemuda dalam kegiatan sosial akar rumput	✓	✓	✓	✓	✓		
		Harmonisasi hubungan masyarakat	Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional		✓	✓	✓	✓		
			Penegakan toleransi melalui dialog lintas agama dan etnis		✓	✓	✓	✓		
			Pembinaan kegiatan keagamaan dan budaya antarumat beragama	✓	✓	✓	✓	✓		

InUse Book 1.indb 243
10/19/2025 12:13:05 AM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
Tujuan 2: Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal	Sasaran 5: Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal	Menyediakan sarana pertanian	Pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan usaha tani	✓	✓	✓	✓	✓	KL4 Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi berbasis potensi lokal KL5 Penguatan ekonomi hijau berdaya saing KL7 Integrasi ekonomi domestik dan nasional KL8 Pemerataan dan pembangunan berbasis klusterisasi wilayah KL12 Daya saing dan daya tarik investasi	Penguatan simpul kebijakan yang adaptif dalam mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah serta keamanan dan ketahanan wilayah Pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif
			Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya		✓	✓	✓	✓		
			Pembangunan dan rehabilitasi prasarana UPTD pembibitan/ produksi ternak	✓	✓	✓	✓	✓		
			Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani		✓	✓	✓	✓		

InUse Book 1.indb 244
10/19/2025 12:13:05 AM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
			Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan embung pertanian		✓	✓	✓	✓		
		Menyediakan bibit ternak unggul	Pengadaan bibit ternak		✓	✓	✓	✓		
		Melaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas lembaga penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pembentukan kelembagaan ekonomi petani			✓	✓			
		Mengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Fasilitasi dan pembinaan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	✓	✓	✓	✓	✓		
		Menyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang ekspresi, promosi, dan interaksi bagi insan kreatif	Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	✓	✓	✓	✓	✓		
		Mengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan			✓	✓	✓		
			Penyediaan infrastruktur		✓	✓	✓	✓		
			Fasilitasi pemberian insentif			✓	✓	✓		

InUse Book 1.indb 245
10/19/2025 12:13:05 AM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
		Memberdayakan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pemulihan usaha mikro	✓	✓	✓	✓	✓		
			Sertifikasi dan standardisasi usaha mikro		✓		✓			
			Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	✓		✓		✓		
Tujuan 3: Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Sasaran 6: Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik	Mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui pengadaan barang milik daerah penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Pengadaan aset tak berwujud (hak cipta, paten, merek dagang, *software*, dan data)	✓	✓	✓	✓	✓	KL9 Tata kelola yang responsif, adaptif, dan profesional KL11 Stabilitas ekonomi makro daerah	Optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan, dan praktik *smart governance* Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah serta keamanan dan ketahanan wilayah Pembangunan fondasi sinergitas melalui sinkronisasi dokumen perencanaan dan pemenuhan infrastruktur pendukung ekonomi ramah lingkungan

InUse Book 1.indb 246
10/19/2025 12:13:05 AM

InUse Book 1.indb 247

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
Tujuan 4: Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkeadilan	Sasaran 7: Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Menyelenggarakan jalan kabupaten	Pembangunan jalan			✓	✓	✓	KL15 Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif
			Rehabilitasi jembatan	✓	✓	✓	✓	✓		
		Menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		✓		✓	✓	KL15 Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan	Pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	✓	✓					
			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			✓	✓	✓		
		Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah	Pembangunan TPA/ TPST/SPA/TPS3R/TPS di kawasan strategis kabupaten			✓	✓		KL15 Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan	Pembangunan ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi
			Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan strategis kabupaten			✓	✓		KL16 Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif
			Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (IPAL) di kawasan strategis		✓			✓		

10/19/2025 12:13:05 AM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
		Menyediakan sarana pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan		✓	✓	✓		KL13 Masyarakat yang unggul, nasionalis, dan religius KL15 Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan	Pembangunan ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi Pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif
		Mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Pembangunan dan peningkatan SPAM	✓		✓		✓	KL16 Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif
			Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis SPAM	✓	✓	✓				

InUse Book 1.indb 248
10/19/2025 12:13:06 AM

InUse Book 1.indb 249

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
Tujuan 5: Berkembangnya daya tarik pariwisata berbasis seni budaya daerah dan potensi unggulan	Sasaran 8: Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata	Membina dan mengembangkan olahraga rekreasi	Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi		✓	✓	✓	✓	KL4 Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi berbasis potensi lokal KL5 Penguatan ekonomi hijau berdaya saing KL6 Transformasi digital KL7 Integrasi ekonomi domestik dan nasional KL8 Pemerataan dan pembangunan berbasis klusterisasi wilayah KL12 Daya saing dan daya tarik investasi	Penguatan aksesibilitas dan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan SDM Penguatan simpul kebijakan yang adaptif dalam mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah serta keamanan dan ketahanan wilayah Pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata
			Pengembangan olahraga wisata, tantangan, dan petualangan			✓	✓	✓		
			Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat		✓	✓	✓	✓		
			Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan		✓	✓	✓			
		Mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya	Pengembangan atraksi wisata budaya		✓	✓	✓	✓		
			Pengembangan industri kreatif	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pembinaan lembaga penggiat seni			✓	✓	✓		
			Publikasi seni dan budaya daerah		✓		✓			
		Mengelola daya tarik wisata dan destinasi pariwisata	Pengadaan/ pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata unggulan		✓		✓	✓		
			Penetapan, perencanaan, dan perancangana daya tarik wisata unggulan	✓	✓	✓				

10/19/2025 12:13:06 AM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
			Perencanaan, penetapan, dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata			✓	✓	✓		
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata	✓		✓		✓		
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓		
			Perencanaan destinasi pariwisata MICE		✓	✓	✓	✓		
Tujuan 6: Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan	Sasaran 9: Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Penguatan kapasitas pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan dan pembinaan kepada aparatur pemadam kebakaran	✓	✓	✓	✓	✓	KL9 Tata kelola yang responsif, adaptif, dan profesional KL17 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan, dan praktik *smart governance* Pembangunan ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi
			Pemberdayaan desa tangguh bencana	✓	✓	✓	✓	✓		
			Penyusunan peta rawan bencana	✓	✓	✓				
			Pengembangan data dan informasi kebencanaan	✓	✓	✓	✓	✓		
		Peningkatan kesiapsiagaan dan respons darurat bencana	Pengadaaan sarana dan prasaran pencegahan, penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓		Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas
			Standardisasi sarana dan prasaran pencegahan, penanggulangan bencana		✓	✓	✓	✓		
			Penguatan koordinasi dan kolaborasi penangangan darurat bencana		✓	✓	✓	✓		

InUse Book 1.indb 250
10/19/2025 12:13:06 AM

InUse Book 1.indb 251

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
	Sasaran 10: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Pengendalian dan pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup	Optimaliasasi penangangan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	KL10 Hukum berkeadilan, demokrasi, dan ketahanan wilayah	Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah serta keamanan dan ketahanan wilayah
			Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	KL12 Daya saing dan daya tarik investasi	
			Penguatan kapasitas pemantauan dan analisis kualitas lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	KL16 Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Pembangunan ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi
			Peningkatan konservasi lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	KL17 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	
		Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati	Identifkasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati	✓		✓		✓		Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif
			Pemetaan keanekaragaman hayati		✓	✓	✓	✓		
			Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati	✓	✓	✓	✓	✓		
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pelestarian keanekaragaman hayati		✓	✓	✓	✓		
		Peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan	Peningkatan pengelolaan persampahan (pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan daur ulang)	✓	✓	✓	✓	✓		
			Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pengembangan instalasi pengolahan limbah	o		✓	✓			
			Optimalisasi pengawasan persampahan dan penegakan sanksi/ regulasi	✓	✓	✓	✓	✓		

10/19/2025 12:13:06 AM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
Tujuan 7: Terwujudnya pembangunan desa yang merata dan berkeadilan	Sasaran 11: Terwujudnya kemandirian desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Fasilitasi kerja sama antardesa	Fasilitasi kerja sama antardesa dengan pihak ketiga			✓	✓	✓	KL4 Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi berbasis potensi lokal KL8 Pemerataan dan pembangunan berbasis klusterisasi wilayah KL12 Daya saing dan daya tarik investasi	Penguatan simpul kebijakan yang adaptif dalam mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah serta keamanan dan ketahanan wilayah Pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata
			Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan		✓	✓	✓	✓		
		Memberdayakan dan melindungi koperasi	Pembinaan dan pendampingan bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi		✓	✓	✓	✓		
			Fasilitasi akses permodalan koperasi	✓	✓	✓	✓	✓		
			Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standardisasi, dan restrukturisasi usaha			✓	✓	✓		

InUse Book 1.indb 252
10/19/2025 12:13:06 AM

InUse Book 1.indb 253

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan					Keterhubungan RPJPD	
				2026	2027	2028	2029	2030	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
Tujuan 8: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Sasaran 12: Menurunnya angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan di masyarakat	Melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		✓	✓	✓	✓	KL4 Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi berbasis potensi lokal KL6 Transformasi digital KL7 Integrasi ekonomi domestik dan nasional KL8 Pemerataan dan pembangunan berbasis klusterisasi wilayah KL9 Tata kelola yang responsif, adaptif, dan profesional KL12 Daya saing dan daya tarik investasi	Penguatan simpul kebijakan yang adaptif dalam mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal Optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan, dan praktik *smart governance* Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah serta keamanan dan ketahanan wilayah Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif
		Mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah	Fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah		✓	✓	✓	✓		
			Pengelolaan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	✓	✓	✓	✓	✓		
		Menyusun rencana tenaga kerja (RTK) dan melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) makro dan fasilitasi penyusunan rencana tenaga kerja mikro	✓	✓	✓				
			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan dan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi		✓		✓			
		Melayani antarkerja di daerah dan mengelola informasi pasar kerja	Pelayanan antarkerja	✓	✓	✓	✓	✓		
			Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online*	✓	✓	✓	✓	✓		

10/19/2025 12:13:06 AM

3.2.1.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, penentuan arah kebijakan untuk pembangunan wilayah didasarkan pada klusterisasi secara spasial. Secara umum langkah penentuan arah kebijakan ini menjadi esensial untuk mengelola pertumbuhan dan perkembangan wilayah karena memungkinkan tersusunnya perencanaan yang terstruktur dan berkelanjutan, menghindari konflik tumpang-tindih penggunaan lahan, dan mempromosikan pemanfaatan sumber daya yang efisien sesuai dengan kapasitas dan potensi masing-masing wilayah di Kabupaten Kediri. Kebijakan ini membantu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan pedoman jangka panjang, kebijakan ini juga memfasilitasi investasi dan pengembangan infrastruktur yang terencana dengan baik, meningkatkan daya saing wilayah, serta menjaga integritas lingkungan alam.

Arah kebijakan tersebut berangkat dari keselarasan dengan Provinsi Jawa Timur yang juga telah merancang kebijakan kewilayahan dengan merumuskan suatu konsep pengembangan wilayah, didukung dengan kawasan-kawasan pengembangan khusus. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik serta potensi yang dimiliki setiap kawasan. Di mana salah satunya adalah Kawasan Selingkar Wilis dengan kegiatan prioritas berupa jalan akses dalam mendukung pengembangan potensi wisata di Kawasan Selingkar Wilis dan inkubator ekonomi (anjungan cerdas) sebagai pusat kegiatan utama yang didukung dengan adanya Bandara Kediri dan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung sebagai akses konektivitas lintas wilayah serta menjadi tulang punggung perekonomian wilayah.

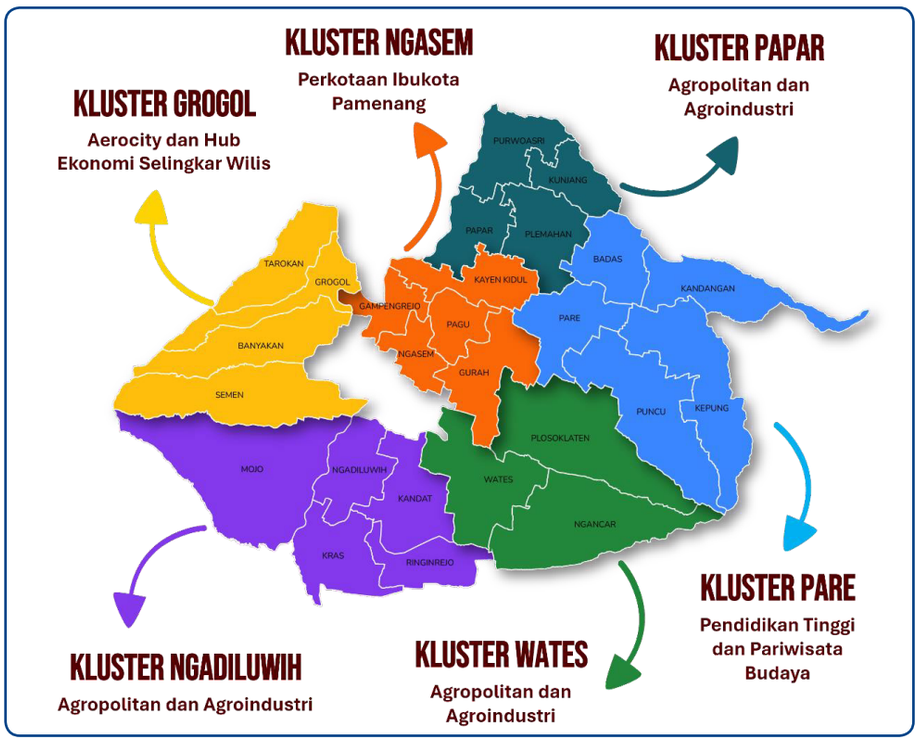


GAMBAR 3.3
Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2045

InUse Book 1.indb 254 10/19/2025 12:13:06 AM

Fokus pengembangan kawasan prioritas berdasarkan lanskap ekonomi eksisting di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan terdiri atas tiga sektor utama, yaitu sentra produksi agro dan hortikultura, kawasan agrowisata domestik, serta industri pengolahan ringan. Fokus pengembangan Kawasan Selingkar Wilis secara lebih lanjut diturunkan dalam kebijakan klusterisasi di Kabupaten Kediri dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Kabupaten Kediri telah membagi wilayahnya ke dalam kluster dengan empat fokus pengembangan yang telah disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya.

GAMBAR 3.4
Kluster Pembangunan di Kabupaten Kediri



Terdapat enam kluster pembangunan seperti pada peta dalam Gambar 3.4 yang meliputi Kluster Grogol (kuning), Kluster Ngadiluwih (ungu), Kluster Wates (hijau muda), Kluster Pare (biru), Kluster Ngasem (jingga), dan Kluster Papar (hijau zamrud). Klusterisasi yang menjadi basis penentuan arah kebijakan wilayah dilakukan dengan pertimbangan yang berasal dari dokumen RTRW Kabupaten Kediri 2023–2043 tentang: (1) zonasi sistem pusat kegiatan (PKL, PPK dan PPL) dan (2) penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Tabel 3.11 di bawah merupakan penjabaran kluster dan cakupan kecamatan beserta dengan status pusat kegiatan dan kawasan strategisnya.

InUse Book 1.indb 255 10/19/2025 12:13:07 AM

TABEL 3.11
Rincian Kluster Pembangunan di Kabupaten Kediri

No.	Kluster	Kecamatan	Status PKL	Kawasan Strategis
1.	Grogol	Grogol	Perkotaan Grogol meliputi Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol (PKL), Perkotaan Grogol – Tarokan dan Perkotaan Semen (PPK)	Agropolitan Segobatam
		Tarokan		
		Banyakan		
		Semen		
2.	Ngadiluwih	Ngadiluwih	Perkotaan Ngadiluwih (PKL) dan Perkotaan Mojo, Perkotaan Kras, dan Perkotaan Ringinrejo–Kandat (PPK)	Agropolitan Ngawasondat dan Agropolitan Segobatam
		Mojo		
		Kras		
		Kandat		
		Ringinrejo		
3.	Wates	Wates	Perkotaan Wates–Ngancar dan Perkotaan Plosoklaten (PPK)	Agropolitan Ngawasondat
		Ngancar		
		Plosoklaten		
4.	Pare	Pare	Perkotaan Pare (PKL), dan Perkotaan Badas, Perkotaan Kandangan-Kepung-Puncu (PPK)	Agropolitan Pakancupung
		Badas		
		Puncu		
		Kepung		
		Kandangan		
5.	Papar	Papar	Perkotaan Papar-Purwoasri, Perkotaan Kunjang, dan Perkotaan Plemahan-Kayenkidul (PPK)	Agropolitan Palempari
		Plemahan		
		Kunjang		
		Purwoasri		
6.	Ngasem	Ngasem	Perkotaan Ngasem (PKL), Perkotaan Gampengrejo, Perkotaan Pagu, Perkotaan Plemahan-Kayenkidul (PPK) dan Perkotaan Gurah (PPL)	Kawasan Ibu Kota Kabupaten "Pamenang" dan Agropolitan Palempari
		Gampengrejo		
		Gurah		
		Pagu		
		Kayenkidul		
		Plosoklaten		

Pemerataan ekonomi menjadi sasaran pembangunan di setiap kluster, kemudian diikuti dengan sektor lain sesuai kondisi kawasan. Fokus arah kebijakan pada setiap kluster berdasarkan RTRW, dokumen sektoral daerah, dan potensi wilayah.

Di sisi lain, pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri tahun 2023-2043 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Kediri adalah untuk mewujudkan wilayah kabupaten sebagai basis pertanian yang didukung oleh pariwisata dan perindustrian berdaya saing dan berkelanjutan. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam sembilan kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu:

a. Pengembangan kawasan agropolitan;
b. Pengembangan pariwisata dan industri, yang mendukung sektor pertanian;
c. Pengembangan wilayah secara berimbang antarwilayah;
d. Pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
e. Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;

InUse Book 1.indb 256 10/19/2025 12:13:07 AM

f. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
g. Pengendalian fungsi kawasan lindung;
h. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; dan
i. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup.

Terdapat sembilan kebijakan penataan ruang kemudian didukung oleh strategi penataan ruang masing-masing kebijakan yang kemudian tertuang pada peta rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Kediri tahun 2023-2043.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kediri mencakup sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat permukiman terdiri atas pusat kegiatan lokal (PKL), pusat pelayanan kawasan (PPK), dan pusat pelayanan lingkungan (PPL), dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 3.12
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat-Pusat Lain di Kabupaten Kediri

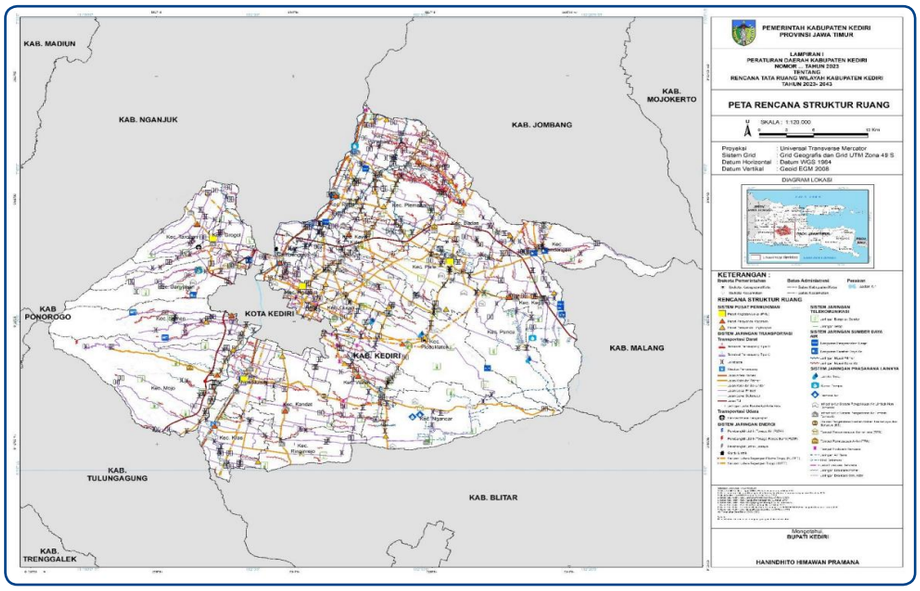
Sumber: Data Diolah, 2024

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Ngasem di Kecamatan Ngasem Perkotaan Pare di Kecamatan Pare Perkotaan Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih Perkotaan Grogol di Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol
Pusat-Pusat Lain:	
1. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	a. Perkotaan Badas di Kecamatan Badas b. Perkotaan Gampengrejo di Kecamatan Gampengrejo c. Perkotaan Grogol-Tarokan di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Tarokan d. Perkotaan Kunjang di Kecamatan Kunjang e. Perkotaan Kandangan-Kepung-Puncu di Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kepung dan Kecamatan Puncu f. Perkotaan Kras di Kecamatan Kras g. Perkotaan Mojo di Kecamatan Mojo h. Perkotaan Papar-Purwoasri di Kecamatan Papar dan Kecamatan Purwoasri i. Perkotaan Plosoklaten di Kecamatan Plosoklaten j. Perkotaan Plemahan-Kayenkidul di Kecamatan Plemahan dan Kecamatan Kayenkidul k. Perkotaan Ringinrejo-Kandat di Kecamatan Ringinrejo dan Kecamatan Kandat l. Perkotaan Semen di Kecamatan Semen m. Perkotaan Wates-Ngancar di Kecamatan Wates dan Kecamatan Ngancar.
2. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	a. Kawasan Perdesaan Blabak Kecamatan Kandat b. Kawasan Perdesaan Bedali Kecamatan Ngancar c. Kawasan Perdesaan Bulupasar Kecamatan Pagu d. Kawasan Perdesaan Brumbung Kecamatan Kepung e. Kawasan Perdesaan Jemekan Kecamatan Ringinrejo f. Kawasan Perdesaan Karangtengah Kecamatan Kandangan g. Kawasan Perdesaan Kedawung-Mondo Kecamatan Mojo h. Kawasan Perdesaan Kepuh Kecamatan Papar i. Kawasan Perdesaan Kuwik Kecamatan Kunjang j. Kawasan Perdesaan Karangpakis dan Desa Sumberjo Kecamatan Purwoasri k. Kawasan Perdesaan Puhsarang Kecamatan Semen l. Kawasan Perdesaan Pranggang Kecamatan Plosoklaten m. Kawasan Perdesaan Sumberagung Kecamatan Wates n. Kawasan Perdesaan Sidomulyo Kecamatan Puncu o. Kawasan Perdesaan Tiru Kidul Kecamatan Gurah p. Kawasan Perdesaan Wonokerto Kecamatan Plemahan

InUse Book 1.indb 257 10/19/2025 12:13:07 AM

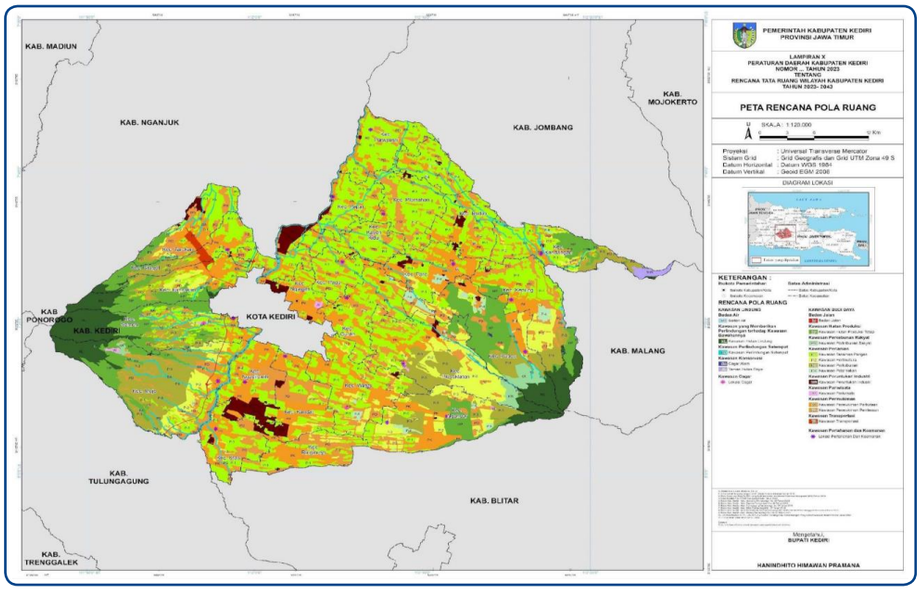
GAMBAR 3.5
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

Sumber: Dinas PUPR, 2024



GAMBAR 3.6
Rencana Pola Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

Sumber: Dinas PUPR, 2024

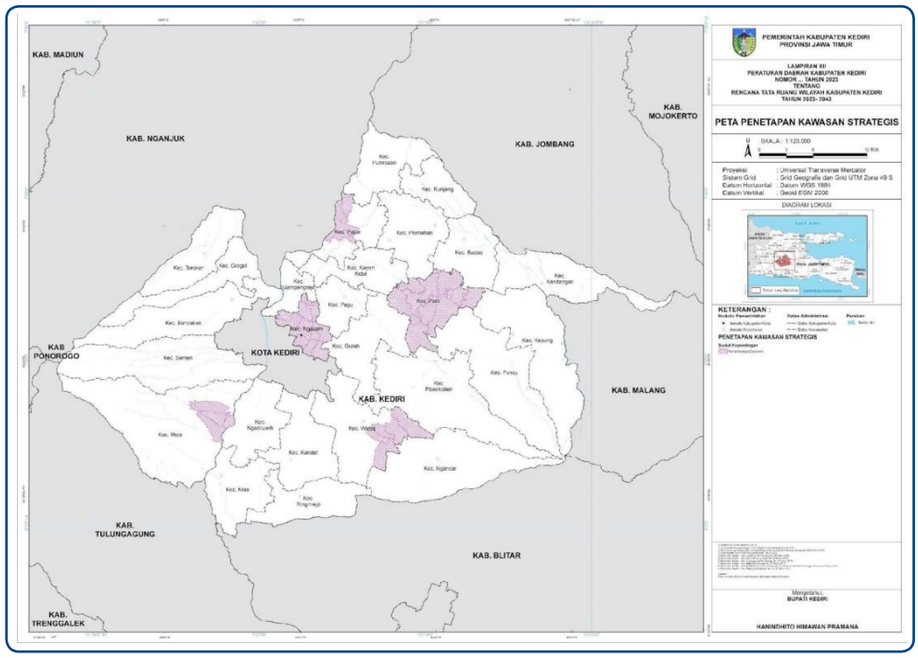


Di dalam RTRW Kabupaten Kediri, beberapa kawasan strategis wilayah kabupaten yang direncanakan terdiri dari kawasan strategis provinsi yang meliputi bagian kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis Kabupaten Kediri mencakup perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut pandang kepentingan ekonomi yang meliputi pengembangan Kawasan Agropolitan dan pengembangan koridor ekonomi. Berikut merupakan peta kawasan strategis Kabupaten Kediri.

InUse Book 1.indb 258 10/19/2025 12:13:07 AM

GAMBAR 3.7
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kediri

Sumber: Dinas PUPR, 2024



Berikut merupakan penjabaran kawasan strategis di Kabupaten Kediri:

- Kawasan strategis provinsi yang berada di Kabupaten Kediri adalah kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi berupa kawasan strategis ekonomi unggulan meliputi Sistem Agropolitan Wilis (Lawu-Wilis) dan Sistem Agropolitan Kelud.
- Kawasan Agropolitan Ngawasondat, meliputi wilayah Kecamatan Ngancar, Wates, Plosoklaten, dan Kandat. Pusat pengembangan kawasan ini terletak di Kecamatan Wates.
- Kawasan Agropolitan Pakancupung, meliputi wilayah Kecamatan Pare, Kandangan, Puncu dan Kepung. Pusat pengembangan kawasan ini berada di kota Pare.
- Kawasan Agropolitan Segobatam yang terdiri dari Kecamatan Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan dan Mojo. Pusat pengembangan kawasan ini ada di kota Banyakan, dengan fokus pada komoditas unggulan seperti mangga podang dan ubi kayu.
- Kawasan Agropolitan Palempari yang meliputi wilayah Kecamatan Papar, Plemahan, Purwoasri, Kayen Kidul, Pagu, Gurah, Kunjang, Gampengrejo dengan pusat pengembangan kawasan ini terletak di Kecamatan Papar.
- Kawasan koridor ekonomi yang meliputi Kawasan CBD di sekitar Simpang Lima Gumul berada di Kecamatan Ngasem dan kawasan edukasi dan pariwisata minat khusus Kampung Inggris berada di Kecamatan Pare.

Tujuan dari pengembangan koridor ekonomi ialah untuk mewujudkan kawasan cepat tumbuh yang diarahkan melalui pengembangan objek wisata dan perdagangan-jasa unggulan serta pengembangan sarana dan prasaran koridor ekonomi.

InUse Book 1.indb 259 10/19/2025 12:13:08 AM

3.2.1.4 Pengarusutamaan Pembangunan

3.2.1.4.1 Pengarusutamaan SDGs

Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek nasional dan daerah melalui: a) Setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (b) Mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (c) Penyusunan rancangan aksi daerah, dan penguatan kolaborasi multipihak; (d) Pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (e) Inklusi sosial dan keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, Peraturan Menteri Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (dokumen RAN dan RAD) dan sesuai dengan kewenangan Kabupaten Kediri terbagi dalam tujuan 1 sampai dengan tujuan 17 dari TPB/SDGs.

Adapun berdasarkan arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, terdapat indikasi program utama jangka menengan 5 (lima) tahunan yang menjadi relevan dengan tahap pembangunan RPJMD. Indikasi program utama memuat program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan. Berdasarkan waktu, maka RPJMD Tahun 2025–2029 selaras dengan indikasi program utama jangka menengah tahap II (2025–2029) dalam RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023–2043. Tabel 3.13 berikut merupakan penjabaran arahan perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Kediri, serta perwujudan kawasan strategis kabupaten.

3.2.3 Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029

Program prioritas merupakan hasil dari proses *cascading* kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level *outcome* yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan sinergis di tingkat pengampu urusan.

InUse Book 1.indb 260 10/19/2025 12:13:08 AM

InUse Book 1.indb 261

TABEL 3.13
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap II (2025–2029)
Sumber: RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahun					Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV	V		
	Rencana Struktur Ruang Wilayah										
	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman										
1.	Sistem Pusat Permukiman	Perwujudan PKL	Pengembangan pusat kegiatan lokal di beberapa kecamatan	Penyusunan dan penetapan RDTR, RTBL, KLHS, pengembangan RTH di Ngasem, Pare, Ngadiuwih, Grogol	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
		Perwujudan pusat-pusat lain	Perwujudan pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan	Perwujudan pusat pelayanan kawasan di Perkotaan Mojo, Badas, Kandangan – Kepung - Puncu	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
				Pengembangan pusat kegiatan pertanian di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓		
	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah										
1.	Sistem Jaringan Jalan	Perwujudan sistem jaringan jalan	Pengembangan jalan penghubung dan jalan tembus/sirip antarwilayah	Jalan penghubung desa dan kota	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga Prov., dan Dinas PUPR
				Jalan penghubung antarkawasan strategis	✓	✓	✓	✓	✓		
				Rencana pengembangan jaringan jalan Selingkar Wilis	✓	✓	✓	✓	✓		
				Peningkatan dan rehabilitasi jalan arah wisata Gunung Kelud dan Kawasan Selingkar Wilis	✓	✓	✓	✓	✓		
				Rencana pengembangan jalan lingkar Kediri	✓	✓	✓	✓	✓		
				Pembangunan jalan tol Kertosono – Kediri, jalan tol Kediri – Tulungagung, jalan tol Sukorejo - Batu-Kediri							

10/19/2025 12:13:08 AM

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahun					Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV	V		
				Pelebaran & peningkatan jalan pendukung bandara, stadion, jalan tol Kertosono -Kediri, jalan tol Kediri-Tulungagung, jalan tol Sukorejo-Batu-Kediri dan jalan antarpusat PKL	✓	✓	✓	✓	✓		
		Pengembangan infrastruktur pendukung	Perwujudan terminal penumpang	Pembangunan terminal di Papar, Ngasem, Grogol, dan Ngadiluwih dan optimalisasi terminal Type B dan Tipe C	✓	✓	✓	✓	✓	APBD Prov., APBD Kab.	Dishub Prov., Dishub, dan Dinas PUPR
2.	Transportasi Kereta Api	Transportasi massal	Pengembangan sistem transportasi massal & infrastruktur pendukungnya	Pengembangan jaringan jalur ganda	✓	✓	✓	✓	✓	BUMN	PT KAI
				Pengembangan Stasiun Penumpang di Kras, Ngadiluwih, Papar, Susuhan, Minggiran, dan Purwoasri	✓	✓	✓	✓	✓		
3.	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Pengembangan bandar udara pengumpul	Pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpul (hub) skala pelayanan primer	Pembangunan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer di Kecamatan Banyakan, Kecamatan Tarokan dan Kecamatan Grogol	✓	✓	✓	✓		Swasta	Swasta
	Perwujudan Sistem Jaringan Energi	Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung	PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Kepung, PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Mojo, dan PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) PG Ngadirejo di Ngadiluwih	✓	✓	✓	✓	✓	APBN	Kementerian ESDM dan PT PLN
			Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung	Pembangunan dan pemeliharaan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET, saluran udara tegangan tingggi (SUTT), pembangunan sistem jaringan transmisi tenaga listrik pada ruang sepanjang jalur SUTT dan SUTET, dan pengembangan dan pembangunan gardu listrik di lokasi yang ditentukan	✓	✓	✓	✓	✓	PT PLN	PT PLN

InUse Book 1.indb 262
10/19/2025 12:13:08 AM

InUse Book 1.indb 263

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahun					Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV	V		
	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi		Jaringan tetap	Pengembangan jaringan tetap, pembangunan jaringan fiber optik dengan memanfaatkan jalur PJU, pembangunan *hot spot* pada area publik di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	PT TELKOM, APBD Kabupaten Swasta	PT TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Swasta
			Jaringan bergerak	Pembangunan dan pengembangan menara *base transceiver station* (BTS) di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	PT.TELKOM, APBD Kabupaten Swasta	PT.TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Swasta
	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Perwujudan sistem jaringan irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder	Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder di lokasi yang relevan	✓	✓	✓	✓	✓		
		Sistem pengendalian banjir	Jaringan pengendalian banjir	Normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, pembangunan tanggul banjir, pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir, penyediaan embung atau pond pengendali banjir, optimalisasi Sungai Brantas, pengembangan *early warning system*, pemberdayaan masyarakat untuk peduli sungai di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	BBWS, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BNPB, BPBD Prov, BPBD Kabupaten
	Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem penyediaan air minum	Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Pemeliharaan unit air baku dan unit distribusi serta jaringannya, sumur pompa, dan terminal air di beberapa kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	APBD Kabupaten, PDAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, PDAM
		Sistem pengelolaan air limbah	Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)	Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik (beberapa kecamatan) dan domestik (seluruh kecamatan)	✓	✓	✓	✓	✓	APBD Kabupaten Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Swasta
		Sistem jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di beberapa kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dinas Kesehatan, Swasta

10/19/2025 12:13:08 AM

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahun					Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV	V		
		Sistem jaringan pengelolaan sampah	Pengembangan jaringan pengelolaan sampah	Pengembangan TPS di seluruh kecamatan, TPA regional di Kecamatan Mojo, optimalisasi dan pengembangan TPA di Kecamatan Badas, pengembangan pengelolaan sampah dengan sistem 3R di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓		
		Sistem jaringan evakuasi bencana	Perwujudan jalur dan tempat evakuasi bencana	Perwujudan jalur dan tempat evakuasi bencana di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten
		Sistem drainase	Perwujudan sistem drainase	Pengembangan jaringan drainase primer di seluruh wilayah perkotaan dan drainase sekunder di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perwujudan Rencana Pola Ruang											
	Perwujudan Kawasan Lindung	Badan air	Pengembangan badan air berupa bendungan, embung, dan/atau sebutan lainnya	Pengembangan badan air berupa bendungan, embung, dan/ atau sebutan lainnya di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Penghijauan kawasan hutan lindung, pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir	Penghijauan dan pengendalian di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
		Perwujudan kawasan perlindungan setempat	Pengendalian kawasan perlidungan setempat berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk dan sempadan mata air	Pengendalian kawasan perlidungan setempat berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan sempadan mata air di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup

InUse Book 1.indb 264
10/19/2025 12:13:08 AM

InUse Book 1.indb 265

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahun					Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV	V		
		Perwujudan kawasan konservasi	Perwujudan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya R. Soerjo	Perwujudan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya R. Soerjo di Kepung, Puncu, dan Kandangan						APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Perwujudan kawasan cagar budaya	Perwujudan lingkungan bangunan nongedung dan gedung	Konservasi sekitar bangunan kawasan cagar budaya, pengembangan bangunan kawasan cagar budaya sebagai objek wisata dan penelitian/ pendidikan, pengembangan jalur wisata antarbangunan kawasan cagar budaya, penataan kawasan sekitar bangunan kawasan cagar budaya, pengembangan dan peningkatan sarana prasarana wisata di dalam kawasan cagar budaya	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Perwujudan Kawasan Budi Daya	Kawasan badan jalan	Pengembangan badan jalan berupa pembangunan dan pengembangan jalan tol	Pengembangan badan jalan berupa pembangunan dan pengembangan jalan tol di Banyakan, Grogol, Mojo, dan Semen	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Kawasan hutan produksi tetap	Perwujudan kawasan hutan produksi tetap	Penetapan batas kawasan hutan produksi tetap di berbagai kecamatan						APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Pemerintah Kabupaten Kediri Perum Perhutani
		Kawasan perkebunan rakyat	Perwujudan kawasan perkebunan rakyat	Pengembangan kawasan perkebunan rakyat di Mojo, Ngancar, Plosoklaten, Puncu	✓	✓	✓	✓	✓	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Swasta
		Kawasan pertanian	Perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan	Pengembangan kawasan tanaman pangan, sentra-sentra tanaman pangan berbasis agropolitan, Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil tanaman pangan, penetapan batas KP2B di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Dinas Pertanian dan Perkebunan

10/19/2025 12:13:08 AM

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahun					Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV	V		
			Perwujudan kawasan hortikultura, perkebunan, peternakan	Pengembangan kawasan hortikultura, perkebunan, sentra peternakan ternak besar sapi potong dan sapi perah, dan sentra peternakan ternak kecil di berbagai kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Kawasan peruntukan industri	Pengembangan kawasan peruntukkan industri	Kajian potensi pengembangan industri dan rencana pengembangan industri di Kecamatan Kandat, Kayen Kidul, Kepung, Kras, Kunjang, Mojo, Ngadiluwih, Ngancar, Ngasem, Pagu, Papar, Pare, Plemahan, Plosoklaten, Puncu, Purwosari, Ringinrejo, Tarokan, dan Wates.	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perdagangan Swasta
		Kawasan pariwisata	Pengembangan kawasan pariwisata, sarana dan prasarana penunjang, pengembangan desa wisata, wisata edukasi, dan BDI	Pengembangan kawasan dan sarana prasarana di Kecamatan Mojo, Badas, Plemahan, Ngancar, Semen, Pagu, Ngasem, Plosoklaten, dan Pare	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Kawasan permukiman perkotaan	Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman, perbaikan lingkungan permukiman kumuh, pengembangan kawasan perdagangan, jasa, rekreasi, pengembangan kawasan wisata pendidikan, peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana	Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman di seluruh kecamatan, perbaikan lingkungan permukiman kumuh, pengembangan kawasan perdagangan, jasa, rekreasi di Purwosari dan Ngasem, kawasan wisata pendidikan di Pare, pembangunan fasilitas olahraga dan rekreasi di Tarokan dan Pagu, serta pengembangan perikanan di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓		
		Kawasan permukiman perdesaan	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana dan pengembangan perikanan di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓		

InUse Book 1.indb 266
10/19/2025 12:13:08 AM

InUse Book 1.indb 267

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahun					Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV	V		
		Kawasan transportasi bandar udara	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan transportasi	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan transportasi di Kecamatan Banyakan, Grogol, Tarokan	✓	✓	✓	✓	✓	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Swasta
		Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan
	Perwujudan Kawasan Strategis	Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi	Kawasan agropolitan	Pengembangan kawasan agropolitan Ngawasondat, Pakancupung, Segobatam, dan Palempari	✓	✓	✓	✓	✓	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengembangan koridor ekonomi	Pengembangan kawasan ekonomi sekitar Simpang Lima Gumul melalui pengembangan objek wisata dan sarana prasarana pendukung di Kecamatan Ngasem	✓	✓	✓	✓	✓	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup
				Pengembangan kawasan wisata edukasi dan minat khusus Kampung Inggris melalui pengembangan objek wisata dan sarana prasarana pendukung di Kecamatan Pare	✓	✓	✓	✓	✓	APBD Kabupaten	

10/19/2025 12:13:08 AM

Program prioritas dibedakan ke dalam klasifikasi prioritas kepala daerah dan prioritas perangkat daerah. Adapun prioritas kepala daerah mencakup 17 prioritas pembangunan daerah, yakni:

1. P1: Makan bergizi gratis bagi 30.000 PAUD.
2. P2: Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.
3. P3: Peningkatan puskesmas rawat inap dan pembangunan rumah sakit di kawasan aerotropolis.
4. P4: Insentif bagi 17 ribu guru, tenaga pendidik (GTK), guru ngaji, dan guru agama.
5. P5: Beasiswa Rp30 miliar per tahun untuk Kediri Berbudaya (pelajar, mahasiswa, dan santri).
6. P6: Bantuan stimulus fasilitas untuk musala, masjid, pondok pesantren, tempat ibadah, dan pendidikan keagamaan.
7. P7: Pupuk tersedia, petani bahagia.
8. P8: 30.000 lapangan pekerjaan baru.
9. P9: Halo Masbup 2.0: respons cepat tanpa batas.
10. P10: Gercep Sahaja (Gerak Cepat Satu Hari Jadi) administrasi kependudukan.
11. P11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa.
12. P12: Revitalisasi pasar.
13. P13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga.
14. P14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan.
15. P15: Peningkatan insentif RT dan RW
16. P16: Peningkatan insentif kader desa dan dusun (posyandu, KB, dan pembangunan manusia).
17. P17: Peningkatan alokasi dana desa (ADD) dan pemberian bantuan keuangan khusus untuk desa sejahtera.

InUse Book 1.indb 268 10/19/2025 12:13:08 AM

InUse Book 1.indb 269

TABEL 3.14
Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Kediri dalam RPJMD Tahun 2025–2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing serta Nasionalis Religius			Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)		
		Terwujudnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Unggul yang Merata		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Program 5: Beasiswa Rp30 miliar per tahun untuk Kediri Berbudaya (Pelajar, Mahasiswa, dan Santri).
				Skor Kemampuan Literasi SD		Program 1: Makan bergizi gratis bagi 30.000 PAUD
				Skor Kemampuan Numerasi SD		
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun		
				Skor Kemampuan Literasi SMP		
				Skor Kemampuan Numerasi SMP		
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun		
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 Tahun Kesetaraan		
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	Program 5: Beasiswa Rp30 miliar per tahun untuk Kediri Berbudaya (Pelajar, Mahasiswa, dan Santri).
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program 4: Insentif bagi 17 ribu guru, tenaga pendidik (GTK), guru ngaji, dan guru agama

10/19/2025 12:13:08 AM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program 5: Beasiswa Rp 30 miliar per tahun untuk Kediri Berbudaya (Pelajar, Mahasiswa, dan Santri).
			Meningkatnya Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	Program 5: Beasiswa Rp 30 miliar per tahun untuk Kediri Berbudaya (Pelajar, Mahasiswa, dan Santri).
			Meningkatnya Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja dan Disiplin	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Program 9: Halo Masbup 2.0: respon cepat tanpa batas
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program 9: Halo Masbup 2.0: respons cepat tanpa batas
			Meningkatnya Pemanfaatan Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian yang Telah Diimplementasikan	5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program 9: Halo Masbup 2.0: respons cepat tanpa batas
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (Tahun)		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program 2: Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu
				Angka Kematian Bayi		
				Jumlah Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		
				Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TBC *Succes Rate*)		
				Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		
				Cakupan Penerima Pemeriksaaan Kesehatan Gratis		

InUse Book 1.indb 270
10/19/2025 12:13:09 AM

InUse Book 1.indb 271

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
				Persentase Puskesmas Rawat Inap		
				Persentase Pelayanan Kesehatan yang Diberikan pada Kondisi Darurat		
				Persentase Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar		
				Persentase Realisasi Ketercapaian Anggaran Program Pemenuhan Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Capaian Akreditasi Rumah Sakit		
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)		
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program 2: Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program 2: Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Mengembangkan UKBM Sesuai Standar	1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program 2: Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu
		Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai)		
				Indeks Ketimpangan Gender (Nilai)		

10/19/2025 12:13:09 AM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya Kualitas Dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase OPD yang Responsif Gender	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program 16: Peningkatan insentif kader desa dan dusun (Posyandu, KB, dan pembangunan manusia)
			Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	Program 16: Peningkatan insentif kader desa dan dusun (Posyandu, KB, dan pembangunan manusia)
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program 16: Peningkatan insentif kader desa dan dusun (Posyandu, KB, dan pembangunan manusia)
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Menurunnya Angka Perkawinan Anak	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program 16: Peningkatan insentif kader desa dan dusun (Posyandu, KB, dan pembangunan manusia)
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	Program 16: Peningkatan insentif kader desa dan dusun (Posyandu, KB, dan pembangunan manusia)
			Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	Program 16: Peningkatan insentif kader desa dan dusun (Posyandu, KB, dan pembangunan manusia)
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)		Program 16: Peningkatan insentif kader desa dan dusun (Posyandu, KB, dan pembangunan manusia)
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program 16: Peningkatan insentif kader desa dan dusun (Posyandu, KB, dan pembangunan manusia)

InUse Book 1.indb 272
10/19/2025 12:13:09 AM

InUse Book 1.indb 273

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
				Proporsi kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern		
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri		
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program 16: Peningkatan insentif kader desa dan dusun (Posyandu, KB, dan pembangunan manusia)
		Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Nasionalis-Religius		Indeks Harmoni Indonesia (Nilai)		
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Kelompok yang Dibina tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terbina	8.01.04 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terkait Isu Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya dan Agama	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	

10/19/2025 12:13:09 AM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
				Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika		
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal	Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal			Pertumbuhan Ekonomi (%)		
		Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal		PDRB Per Kapita (Rp Juta)		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2.17.02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.17.03 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	2.17.05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	2.17.06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga

InUse Book 1.indb 274
10/19/2025 12:13:09 AM

InUse Book 1.indb 275

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omzetnya	2.17.08 Program Pengembangan UMKM	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Investasi	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Minat Investor yang Berinvestasi	2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya produksi perikanan budi daya	Jumlah Produksi Perikanan Budi Daya (Ton)	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga

10/19/2025 12:13:09 AM

InUse Book 1.indb 276

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Dilakukan Monitoring dalam Pemanfaatan Sarana Pertanian	3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program 7: Pupuk tersedia, petani bahagia
				Persentase Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul Pertanian		
				Jumlah Desa yang Melaksanakan Inovasi Tani Organik		
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dengan Kondisi Baik	3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program 7: Pupuk tersedia, petani bahagia
				Cakupan Pemanfaatan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Tersedia		

10/19/2025 12:13:09 AM

InUse Book 1.indb 277

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program 7: Pupuk tersedia, petani bahagia
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra-NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Serangan OPT)	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program 7: Pupuk tersedia, petani bahagia
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	Program 7: Pupuk tersedia, petani bahagia
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Pasar yang Memenuhi Standar	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program 12: Revitalisasi pasar
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program 12: Revitalisasi pasar
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	3.30.05 Program Pengembangan Ekspor	Program 12: Revitalisasi pasar
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Uji Metrologi Legal	3.30.06 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program 12: Revitalisasi pasar
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	3.30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program 12: Revitalisasi pasar
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program 12: Revitalisasi pasar

10/19/2025 12:13:09 AM

InUse Book 1.indb 278

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program 12: Revitalisasi pasar
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Pemenuhan Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Menguatkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif			Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)		
		Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik		Indeks Pemerintahan Digital (Nilai)		
				Indeks Pelayanan Publik (Nilai)		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (*Survey*)	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program 9: Halo Masbup 2.0: respons cepat tanpa batas
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program 9: Halo Masbup 2.0: respons cepat tanpa batas
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program 9: Halo Masbup 2.0: respons cepat tanpa batas
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program 9: Halo Masbup 2.0: respons cepat tanpa batas
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program 6: Bantuan stimulus fasilitas untuk musala, masjid, pondok pesantren, tempat ibadah, dan pendidikan keagamaan

10/19/2025 12:13:09 AM

InUse Book 1.indb 279

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Daerah		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	Program 10: Gercep Sahaja (Gerak Cepat Satu Hari Jadi) administrasi kependudukan
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	Program 10: Gercep Sahaja (Gerak Cepat Satu Hari Jadi) administrasi kependudukan
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program 10: Gercep Sahaja (Gerak Cepat Satu Hari Jadi) administrasi kependudukan
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha/ Sertifikat Standar yang Diterbitkan	3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	Program 7: Pupuk tersedia, petani bahagia
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program 9: Halo Masbup 2.0: respons cepat tanpa batas
				Persentase Pengawasan Tujuan Tertentu yang Diselesaikan		

10/19/2025 12:13:09 AM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Kebijakan Pengawasan yang Ditetapkan	6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program 9: Halo Masbup 2.0: respons cepat tanpa batas
				Persentase Pendampingan/ Asistensi yang Terlaksana Sesuai Rencana		
			Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program 9: Halo Masbup 2.0: respons cepat tanpa batas
Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur	Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkeadilan			Indeks Daya Saing Daerah (Nilai)		
		Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Nilai)		
			Menjamin ketersediaan air untuk mendukung ketahanan pangan	Persentase Luas Layanan Irigasi yang Dipelihara dan Direhabilitasi Persentase Sumber Mata Air yang Dipelihara dan Direhabilitasi	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program 11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa
			Menjamin ketersediaan dan keandalan akses jalan kabupaten	Persentase Jalan Kabupaten yang Dipelihara dan Direhabilitasi	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Program 11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Keikutsertaan Tenaga Kerja Konstruksi dalam Pelatihan/Bimtek	1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program 11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa
			Meningkatkan kualitas pelayanan penataan ruang yang cepat, transparan, dan akuntabel	Persentase Layanan Penataan Ruang yang Diselesaikan	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program 11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga/ KK Mendapatkan Akses Air melalui SPAM	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program 11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa

InUse Book 1.indb 280
10/19/2025 12:13:09 AM

InUse Book 1.indb 281

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.03.04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	1.03.07 Program Kawasan Permukiman	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Program 11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Program 11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	Program 11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pesentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Pencegahan terhadap Tumbuh dan Kembangnya Kawasan Kumuh	1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program 11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa

10/19/2025 12:13:09 AM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Kab./Kota	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program 11: Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa
				Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Inmendagri)		
				Persentase Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan LLAJ		
				Persentase Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan		
Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda	Berkembangnya daya tarik pariwisata berbasis seni budaya daerah dan potensi unggulan			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum (%)		
		Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata		Tingkat Pertumbuhan Wisatawan (%)		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Peningkatan Budaya Lokal yang Dilestarikan	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
				Persentase Peningkatan Kesenian Lokal yang Dilestarikan		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Peningkatan Grup Kesenian yang Dberdayakan	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan	2.22.04 Program Pembinaan Sejarah	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga

InUse Book 1.indb 282
10/19/2025 12:13:09 AM

InUse Book 1.indb 283

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase CB yang Dilestarikan	2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Sarpras Museum yang Dipelihara	2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Objek dan Daya Tarik Wisata	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkompetensi Dasar	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program 13: Pengembangan wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan olahraga
Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan			Indeks Risiko Bencana (Nilai)		
		Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Ketahanan Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

10/19/2025 12:13:09 AM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang Direspons Kurang dari 15 Menit	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggula-ngan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran		
			Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
			Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Laporan Penanganan, Penyelamatan dan Evakuasi yang Ditindaklanjuti		
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana	1.06.06 Program Penanganan Bencana	
			Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

InUse Book 1.indb 284
10/19/2025 12:13:09 AM

InUse Book 1.indb 285

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
				Indeks Kualitas Udara		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.11.07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan

10/19/2025 12:13:10 AM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Program 14: Perluasan RTH dan pelestarian lingkungan
Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya pembangunan desa yang merata dan berkeadilan			Indeks Desa (Nilai)		
		Terwujudnya kemandirian desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Persentase Desa Mandiri (%)		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Tingkat Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02 Program Penataan Desa	Program 15: Peningkatan insentif RT dan RW
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Tingkat Kerja Sama Antardesa yang Terfasilitasi	2.13.03 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Program 15: Peningkatan insentif RT dan RW
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program 15: Peningkatan insentif RT dan RW
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Tingkat Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Dibina	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program 15: Peningkatan insentif RT dan RW

InUse Book 1.indb 286
10/19/2025 12:13:10 AM

InUse Book 1.indb 287

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Pelayanan Pendidikan	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program 17: Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pemberian bantuan keuangan khusus untuk desa sejahtera
				Persentase Alokasi Belanja Pelayanan Kesehatan		
				Persentase Alokasi ADD Sesuai Peraturan yang Berlaku		
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
				Persentase Penurunan SILPA		
				Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		
				Persentase Laporan Keuangan dan Rancangan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu		
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Meningkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		

10/19/2025 12:13:10 AM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program 15: Peningkatan insentif RT dan RW
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program 15: Peningkatan insentif RT dan RW
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			Tingkat Kemiskinan (%)		
		Menurunnya angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan di masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
				Rasio Gini (Nilai)		

InUse Book 1.indb 288
10/19/2025 12:13:10 AM

InUse Book 1.indb 289

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
VISI: KABUPATEN KEDIRI BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN						
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program 8: 30.000 lapangan pekerjaan baru
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program 8: 30.000 lapangan pekerjaan baru
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	Program 8: 30.000 lapangan pekerjaan baru
			Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Jumlah Pekerja di Perusahaan yang Mendapatkan Hak-Hak Perlindungan (Jamsostek dan PP/PKB)	2.07.05 Program Hubungan Industrial	Program 8: 30.000 lapangan pekerjaan baru
			Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Transmigrasi	3.32.03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program 8: 30.000 lapangan pekerjaan baru
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Pesentase Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Program 8: 30.000 lapangan pekerjaan baru
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang Mendapat Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	Program 8: 30.000 lapangan pekerjaan baru
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.04 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program 8: 30.000 lapangan pekerjaan baru

10/19/2025 12:13:10 AM

InUse Book 1.indb 290

TABEL 3.15
Program Prioritas Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

Kode	Tujuan	Kode	Sasaran	Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
	(1)		(2)	(3)	(4)	
T1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing serta nasionalis religius	S1	Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan unggul yang merata	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Rp 30 M per-Tahun Beasiswa Kediri Berbudaya (Pelajar, Mahasiswa, dan Santri). 2. Makan Bergizi Gratis bagi 30.000 PAUD	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Insentif bagi 17 ribu Guru, Tenaga Pendidik (GTK), Guru Ngaji, dan Guru Agama	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		S2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Kesehatan Gratis bagi Warga Kurang Mampu 2. Peningkatan Puskesmas Rawat Inap dan Pembangunan Rumah Sakit di Kawasan Aerotropolis	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		S3	Terwujudnya pembangunan keluarga dan kesetaraan gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		S4	Terwujudnya kehidupan masyarakat nasionalis-religius	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bantuan Stimulus Fasilitas untuk Mushola, Masjid, Ponpes, Tempat Ibadah, dan Pendidikan Keagamaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik		Kesatuan Bangsa dan Politik

10/19/2025 12:13:10 AM

InUse Book 1.indb 291

Kode	Tujuan	Kode	Sasaran	Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
	(1)		(2)	(3)	(4)	
T2	Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal	S5	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pupuk Tersedia, Petani Bahagia	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya		Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	30.000 Lapangan Pekerjaan Baru	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Program Pengembangan UMKM		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
				Program Pengembangan Ekspor		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
T3	Menguatkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	S6	Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Halo Masbup 2.0: Respons Cepat tanpa Batas	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

10/19/2025 12:13:10 AM

InUse Book 1.indb 292

Kode	Tujuan	Kode	Sasaran	Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
	(1)		(2)	(3)	(4)	
				Program Pendaftaran Penduduk	Gercep Sahaja (Gerak Cepat Satu Hari Jadi) Administrasi Kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Administrasi Umum		Unsur Sekretariat Daerah
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Unsur Sekretariat Daerah
				Program Perekonomian dan Pembangunan		Unsur Sekretariat Daerah
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Unsur Sekretariat DPRD
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Unsur Perencanaan
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Unsur Perencanaan
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Unsur Keuangan
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Unsur Keuangan
				Program Kepegawaian Daerah		Unsur Kepegawaian
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Unsur Pendidikan dan Pelatihan
				Program Daerah		Unsur Penelitian dan Pengembangan
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Unsur Kewilayahan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Unsur Kewilayahan
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Unsur Kewilayahan
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Unsur Kewilayahan
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Unsur Kewilayahan

10/19/2025 12:13:10 AM

InUse Book 1.indb 293

Kode	Tujuan	Kode	Sasaran	Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
	(1)		(2)	(3)	(4)	
T4	Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkeadilan	S7	Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kabupaten dan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Penataan Bangunan Gedung		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Kawasan Permukiman		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Revitalisasi Pasar	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
T5	Berkembangnya daya tarik pariwisata berbasis seni budaya daerah dan potensi unggulan	S8	Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan Wisata, UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

10/19/2025 12:13:10 AM

Kode	Tujuan	Kode	Sasaran	Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
	(1)		(2)	(3)	(4)	
T6	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan	S9	Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Nonkebakaran		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Program Penanggulangan Bencana		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		S10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perluasan RTH dan Pelestarian Lingkungan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
T7	Terwujudnya pembangunan desa yang merata dan berkeadilan	S11	Terwujudnya kemandirian desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Insentif RT dan RW	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Insentif Kader Desa dan Dusun (Posyandu, KB, dan Pembangunan Manusia)	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
					Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa Sejahtera	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
T8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	S12	Menurunnya angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan di masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.000 Lapangan Pekerjaan Baru	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja		Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial		Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
				Program Pemberdayaan Sosial		Urusan Pemerintah Bidang Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial		Urusan Pemerintah Bidang Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Urusan Pemerintah Bidang Sosial

InUse Book 1.indb 294
10/19/2025 12:13:10 AM



BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2025–2029 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

InUse Book 1.indb 296 10/19/2025 12:13:10 AM

InUse Book 1.indb 297

TABEL 4.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kediri

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100	100	100	708.336.813.998,00	100	722.520.943.628,00	100	736.543.808.237,00	100	749.675.326.110,00	100	762.903.777.515,00	OPD Urusan Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	99,99	99,99	100	262.061.520.000,00	100	273.592.226.880,00	100	285.630.284.862,00	100	298.198.017.395,00	100	311.318.730.160,00	OPD Urusan Pendidikan
	Skor Kemampuan Literasi SD	67,05	69,55	72,05		74,55		77,05		79,55		82,05		OPD Urusan Pendidikan
	Skor Kemampuan Numerasi SD	59,61	62,51	65,41		68,31		71,21		74,11		77,01		OPD Urusan Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	97,63	98,24	98,84		99,39		99,39		99,39		99,39		OPD Urusan Pendidikan
	Skor Kemampuan Literasi SMP	76,72	77,82	78,92		80,02		81,12		82,22		83,32		OPD Urusan Pendidikan
	Skor Kemampuan Numerasi SMP	66,58	68,08	69,58		71,08		72,58		74,08		75,58		OPD Urusan Pendidikan

10/19/2025 12:13:10 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	84,52	85,54	86,57		87,59		88,62		89,65		90,67		OPD Urusan Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 Tahun Kesetaraan	39,89	48,10	56,31		62,80		69,29		75,78		76,54		OPD Urusan Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100	100	100	150.000.000,00	100	153.003.683,00	100	155.973.216,00	100	158.753.994,00	100	161.555.299,00	OPD Urusan Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	54,91	59,91	64,91	36.950.000.000,00	69,91	38.495.800.000,00	74,91	40.191.533.236,00	79,91	41.961.967.433,00	84,91	43.810.471.090,00	OPD Urusan Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	100	100	100	80.000.000,00	100	81.601.964,00	100	83.185.715,00	100	84.668.796,00	100	86.162.825,00	OPD Urusan Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA														
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	0	0	0	0,00	100	80.000.000,00	100	81.601.964,00	100	83.185.715,00	100	84.668.796,00	OPD Urusan Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														

InUse Book 1.indb 298
10/19/2025 12:13:10 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100	100	100	268.322.709.004,00	100	273.700.760.731,00	100	279.012.812.575,00	100	283.987.210.152,00	100	288.998.327.469,00	OPD Urusan Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu	11 Orang	11 Orang	11 Orang	218.222.937.686,00	11 Orang	227.824.746.944,00	11 Orang	237.849.035.809,00	11 Orang	248.314.393.384,00	10 Orang	259.240.226.692,00	OPD Urusan Kesehatan
	Angka Kematian Bayi	62 Orang	60 Orang	58 Orang		56 Orang		54 Orang		50 Orang		45 Orang		OPD Urusan Kesehatan
	Jumlah Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	16 Orang	20 Orang	30 Orang		35 Orang		40 Orang		45 Orang		50 Orang		OPD Urusan Kesehatan
	Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TBC *Succes Rate*)	83%	84%	85%		86%		87%		88%		90%		OPD Urusan Kesehatan
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	92,14%	93%	94%		95%		95%		95%		95%		
	Cakupan Penerima Pemeriksaaan Kesehatan Gratis	N/A	15%	20%		25%		30%		40%		50%		
	Persentase Puskesmas Rawat Inap	21,6%	32,4%	43,2%		51,35%		56,75%		59,45%		67,50%		

InUse Book 1.indb 299 10/19/2025 12:13:11 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Diberikan pada Kondisi Darurat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	10%	12%	15%		20%		25%		30%		35%		OPD Urusan Kesehatan
														OPD Urusan Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi	1,91	1,92	1,93	2.040.981.200,00	1,94	2.081.850.940,00	1,95	2.122.256.016,00	1,96	2.160.092.791,00	1,97	2.198.208.868,00	OPD Urusan Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	60%	61%	62%	723.157.000,00	63%	737.637.897,00	64%	751.954.155,00	65%	765.360.417,00	66%	778.865.640,00	OPD Urusan Kesehatan
														OPD Urusan Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Puskesmas yang Mengembangkan UKBM Sesuai Standar	85%	86%	88%	926.759.852,00	89%	945.317.805,00	92%	963.664.766,00	94%	980.845.524,00	96%	998.153.106,00	OPD Urusan Kesehatan

InUse Book 1.indb 300
10/19/2025 12:13:11 AM

InUse Book 1.indb 301

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,48	91,53	91,65	250.677.419.356,00	91,72	255.697.123.176,00	91,74	260.659.755.983,00	91,76	265.306.944.929,00	91,79	269.988.438.245,00	RSUD Kabupaten Kediri
	Nilai IKM	86,73	87	87,25		87,5		87,75		88		88,25		
	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	98,86 (Paripurna)	98,98 (Paripurna)	98,99 (Paripurna)		99,00 (Paripurna)		99,05 (Paripurna)		99,10 (Paripurna)		99,15 (Paripurna)		RSUD Kabupaten Kediri
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Realisasi Ketercapaian Anggaran Program Pemenuhan Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	94,74	100	100	6.500.000.000,00	100	6.500.159.608,00	100	6.600.839.380,00	100	6.700.339.775,00	100	6.800.729.673,00	RSUD Kabupaten Kediri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Kenaikan *Cost Recovery Rate* (CRR) Dana BLUD	82	82,5	82,75	108.200.100.000,00	83	110.366.758.874,00	83,25	112.508.784.140,00	83,5	114.514.654.114,00	83,75	116.535.330.911,00	RSUD SLG

10/19/2025 12:13:11 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,25	93,5	93,75	0,00	94	130.000.000,00	94,25	158.000.000,00	94,5	179.000.000,00	94,75	200.000.000,00	RSUD SLG
	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	85,00 (Paripurna)	85,00 (Paripurna)	86,00 (Paripurna)		86,00 (Paripurna)		86,00 (Paripurna)		86,00 (Paripurna)		87,00 (Paripurna)		
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	87	89	91		93		94		95		96		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,82	91	91,25	15.701.365.900,00	91,5	16.015.778.768,00	91,75	16.326.616.950,00	92	16.617.697.072,00	95,25	16.910.925.874,00	OPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
Menjamin ketersediaan air untuk mendukung ketahanan pangan	Persentase Luas Layanan Irigasi yang Dipelihara dan Direhabilitasi	9,19	9,19	13,64	23.601.543.649,00	13,86	24.074.154.062,00	14,13	24.541.391.179,00	14,4	24.978.928.923,00	14,7	25.419.696.460,00	OPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Sumber Mata Air yang Dipelihara dan Direhabilitasi	4,86	4,86	4,86		4,86		5,41		5,41		5,41		

InUse Book 1.indb 302 10/19/2025 12:13:11 AM

InUse Book 1.indb 303

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN JALAN														
Menjamin ketersediaan dan keandalan akses jalan kabupaten	Persentase Jalan Kabupaten yang Dipelihara dan Direhabilitasi	4,40	4,40	4,51	82.767.002.431,00	4,63	86.408.750.537,00	4,74	90.210.735.560,00	4,86	94.180.007.924,00	4,98	98.323.928.272,00	OPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Keikutsertaan Tenaga Kerja Konstruksi dalam Pelatihan/Bimtek	N/A	N/A	16,39	200.000.000,00	32,79	204.004.911,00	49,18	207.964.288,00	65,57	211.671.992,00	87,42	215.407.065,00	OPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PENATAAN RUANG														
Meningkatkan kualitas pelayanan penataan ruang yang cepat, transparan, dan akuntabel	Persentase Layanan Penataan Ruang yang Diselesaikan	76	76	77	2.289.271.600,00	78	2.335.113.245,00	79	2.380.433.698,00	80	2.422.873.410,00	81	2.465.626.401,00	OPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga/KK Mendapatkan Akses Air melalui SPAM	86,08%	86,50%	87,50%	2.000.000.000,00	88,50%	2.040.049.110,00	89,50%	2.079.642.886,00	90,50%	2.116.719.930,00	91,50%	2.154.070.668,00	OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL														

10/19/2025 12:13:11 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Pengelolaan TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	15,37	16,67%	33,33%	650.000.000,00	50%	663.015.960,00	66,67%	675.883.937,00	83,33%	687.933.976,00	100%	700.072.965,00	OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	88,15%	88,24%	88,34%	1.650.000.000,00	88,43%	600.000.000,00	88,53%	610.000.000,00	88,62%	620.000.000,00	88,72%	630.000.000,00	OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	-	-	-	-	88,43%	1.083.040.516,00	88,53%	1.105.705.381,00	88,62%	1.126.293.942,00	88,72%	1.147.108.300,00	OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	71.900.000.000,00	100%	73.339.765.518,00	100%	74.763.161.768,00	100%	76.096.081.526,00	100%	77.438.840.559,00	OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

InUse Book 1.indb 304 10/19/2025 12:13:11 AM

InUse Book 1.indb 305

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	8.313.417.124,00	100%	8.479.889.604,00	100%	8.644.469.392,00	100%	8.798.587.861,00	100%	8.953.843.993,00	OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	25.000.000,00	100%	25.500.613,00	100%	25.995.535,00	100%	26.458.998,00	100%	26.925.882,00	OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	53,22%	10%	28%	2.256.812.893,00	47%	2.302.004.567,00	65%	2.346.682.439,00	84%	2.388.520.415,00	100%	2.430.667.228,00	OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH														
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pesentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Pencegahan terhadap Tumbuh dan Kembangnya Kawasan Kumuh	N/A	16,67%	33,33%	50.000.000,00	50%	51.001.227,00	66,67%	51.991.071,00	83,33%	52.917.997,00	100%	53.851.765,00	OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	N/A	4,30%	8,44%	35.000.000.000,00	12,58%	35.700.859.431,00	16,73%	36.393.750.512,00	20,87%	37.042.598.795,00	25%	37.696.236.711,00	OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

10/19/2025 12:13:11 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	20.059.242.605,00	100%	20.460.920.015,00	100%	20.858.030.595,00	100%	21.229.899.312,00	100%	21.604.513.070,00	OPD Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100%	100%	100%	5.111.531.100,00	100%	5.213.887.236,00	100%	5.315.079.644,00	100%	5.409.839.877,00	100%	5.505.299.606,00	OPD Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		OPD Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	27%	31%	42%		55%		69%		87%		100%		OPD Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	20%	20%	50%		83%		100%		100%		100%		OPD Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

InUse Book 1.indb 306 10/19/2025 12:13:11 AM

InUse Book 1.indb 307

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang Direspons Kurang dari 15 Menit	64,97%	65,00%	65,50%	1.913.395.200,00	66,25%	1.951.710.087,00	67%	1.989.589.357,00	67,50%	2.025.060.876,00	68%	2.060.794.237,00	OPD Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		OPD Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	12,21%	13,37%	16,86%		16,86%		18,60%		20,35%		22,09%		OPD Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	4.520.094.806,00	100%	4.610.607.693,00	100%	4.700.091.503,00	100%	4.783.887.381,00	100%	4.868.301.819,00	OPD Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	176.983.200,00	100%	22.606.025,00	100%	90.533.020,00	100%	94.476.591,00	100%	98.638.750,00	OPD Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

10/19/2025 12:13:11 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	719.930.800,00	100%	770.399.013,00	100%	692.440.450,00	100%	674.854.700,00	100%	655.422.850,00	
Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Laporan Penanganan, Penyelamatan dan Evakuasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	861.993.700,00	100%	1.001.124.006,00	100%	1.045.976.472,00	100%	1.092.226.200,00	100%	1.140.344.141,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	8.303.687.848,00	100	8.469.965.503,00	100	8.634.352.681,00	100	8.788.290.783,00	100	8.943.365.217,00	OPD Urusan Bidang Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Pesentase Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	100	100	100	2.169.387.300,00	100	2.494.795.395,00	100	2.869.014.704,00	100	3.299.366.909,00	100	3.794.271.945,00	OPD Urusan Bidang Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN														
Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	25	35	45	4.588.500,00	60	4.680.382,00	75	4.771.220,00	90	4.856.283,00	100	4.941.974,00	OPD Urusan Bidang Sosial

InUse Book 1.indb 308
10/19/2025 12:13:11 AM

InUse Book 1.indb 309

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang Mendapat Program Rehabilitasi Sosial	96	97	98	2.127.770.400,00	99	2.170.378.055,00	100	2.212.501.287,00	100	2.251.947.006,00	100	2.291.683.903,00	OPD Urusan Bidang Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	98	99	100	18.598.975.468,00	100	18.971.411.678,00	100	19.339.613.513,00	100	19.684.411.035,00	100	20.031.753.765,00	OPD Urusan Bidang Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana	87	90	92	1.022.077.150,00	94	1.042.543.790,00	96	1.062.777.736,00	98	1.081.725.536,00	100	1.100.813.203,00	OPD Urusan Bidang Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN														
Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	98	100	100	233.106.560,00	100	237.774.415,00	100	242.389.199,00	100	246.710.650,00	100	251.064.001,00	OPD Urusan Bidang Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														

10/19/2025 12:13:11 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terealisasi pada Tahun n	100%	100%	100%	6.274.509.655,00	100%	6.400.153.919,00	100%	6.524.369.684,00	100%	6.640.689.821,00	100%	6.757.868.604,00	OPD Urusan Bidang Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	83,23%	60%	83,23%	165.000.000,00	84%	168.304.051,00	84,20%	171.570.537,00	84,60%	174.629.393,00	85%	177.710.828,00	OPD Urusan Bidang Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	15,35%	28,00%	28,50%	8.121.196.000,00	30%	8.478.528.624,00	31%	8.851.583.883,00	32%	9.241.053.573,00	33%	9.647.659.930,00	OPD Urusan Bidang Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan Antarkerja	64,00%	64,80%	65,17%	503.547.000,00	65,50%	513.630.304,00	65,83%	523.598.967,00	66,17%	532.933.984,00	66,50%	542.337.910,00	OPD Urusan Bidang Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Jumlah Pekerja di Perusahaan yang Mendapatkan Hak-Hak Perlindungan (Jamsostek dan PP/ PKB)	5,29%	38,07%	38,29%	635.654.000,00	38,84%	648.382.688,00	39,38%	660.966.659,00	39,91%	672.750.744,00	40,43%	684.621.817,00	OPD Urusan Bidang Tenaga Kerja

InUse Book 1.indb 310 10/19/2025 12:13:12 AM

InUse Book 1.indb 311

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase OPD yang Responsif Gender	100%	100%	100%	23.364.850,00	100%	23.832.720,00	100%	24.295.271,00	100%	24.728.420,00	100%	25.164.767,00	OPD Urusan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana & OPD Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	8.499.300,00	100%	8.669.494,00	100%	8.837.753,00	100%	8.995.317,00	100%	9.154.044,00	OPD Urusan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana & OPD Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														

10/19/2025 12:13:12 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	80%	80%	82%	61.191.900,00	84%	62.417.240,00	86%	63.628.649,00	88%	64.763.056,00	90%	65.905.837,00	OPD Urusan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana & OPD Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Menurunnya Angka Perkawinan Anak	262	262	212	87.389.600,00	162	89.139.537,00	112	90.869.579,00	100	92.489.653,00	90	94.121.686,00	OPD Urusan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana & OPD Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	490.874.700,00	100	500.704.247,00	100	510.422.038,00	100	519.522.129,00	100	528.689.395,00	OPD Urusan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana & OPD Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

InUse Book 1.indb 312 10/19/2025 12:13:12 AM

InUse Book 1.indb 313

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	13.243.576.949,00	100%	13.508.773.686,00	100%	13.770.955.296,00	100%	14.016.471.643,00	100%	14.263.800.329,00	OPD Urusan Bidang Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN														
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	0,00%	0,00%	5,00%	86.802.800,00	6,00%	88.540.987,00	7,00%	90.259.412,00	8.00%	91.868.607,00	9.00%	93.489.681,00	OPD Urusan Bidang Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	91,2	92	92,5	4.379.301.000,00	93	4.466.994.554,00	93,5	4.553.691.085,00	94	4.634.876.854,00	94,5	4.716.661.916,00	OPD Urusan Bidang Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	3,19%	2,91%	2,62%	159.349.500,00	2,33%	162.540.402,00	2,03%	165.695.026,00	1,74%	168.649.130,00	1,45%	171.625.040,00	OPD Urusan Bidang Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	0,00%	80,00%	82,00%	410.844.000,00	84,00%	419.070.968,00	86,00%	427.204.400,00	88,00%	434.820.840,00	90,00%	442.493.503,00	OPD Urusan Bidang Pangan

10/19/2025 12:13:12 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	100%	100%	200.000.000,00	100%	204.004.911,00	100%	207.964.288,00	100%	211.671.992,00	100%	215.407.065,00	OPD Urusan Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*	N/A	17%	40%	200.000.000,00	60%	204.004.911,00	67%	207.964.288,00	83%	211.671.992,00	100%	215.407.065,00	OPD Urusan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	21.649.002.200,00	100	22.082.513.839,00	100	22.511.096.711,00	100	22.912.437.222,00	100	23.316.740.327,00	OPD Urusan Lingkungan Hidup

InUse Book 1.indb 314 10/19/2025 12:13:12 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	8	8	31	1.416.467.000,00	38	1.444.831.121,00	54	1.472.872.759,00	77	1.499.131.964,00	100	1.525.585.007,00	OPD Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air	72,37	72,37	72,47	3.121.572.000,00	72,57	3.589.807.800,00	72,67	4.128.278.970,00	72,77	4.747.520.815,00	72,87	5.459.648.937,00	OPD Urusan Lingkungan Hidup
	2. Indeks Kualitas Udara	79,65	79,65	79,75		79,85		79,95		80,05		80,15		OPD Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGE-LOLAAN KEANE-KARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	0,045%	0,045%	0,062%	8.493.367.500,00	0,063%	8.663.443.406,00	0,065%	8.831.585.651,00	0,067%	8.989.040.134,00	0,069%	9.147.656.906,00	OPD Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	62%	65%	70%	289.443.200,00	75%	295.239.171,00	80%	300.969.245,00	90%	306.335.094,00	100%	311.740.552,00	OPD Urusan Lingkungan Hidup

InUse Book 1.indb 315 10/19/2025 12:13:12 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	27%	27%	31%	458.495.000,00	37,50%	467.676.158,00	42%	476.752.932,00	52%	485.252.751,00	60%	493.815.314,00	OPD Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8,96%	8,96%	13,43%	158.558.000,00	17,91%	161.733.053,00	22,39%	164.872.007,00	26,87%	167.811.438,00	31,34%	170.772.567,00	OPD Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	1,64%	1,64%	3,28%	275.000.000,00	4,92%	280.506.752,00	6,57%	285.950.896,00	8,21%	291.048.989,00	9,85%	296.184.715,00	OPD Urusan Lingkungan Hidup

InUse Book 1.indb 316 10/19/2025 12:13:12 AM

InUse Book 1.indb 317

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	8,621%	8,621%	8,621%	100.000.000,00	8,621%	102.002.455,00	8,621%	103.982.143,00	8,621%	105.835.995,00	8,621%	107.703.531,00	OPD Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	100	100	100	129.191.400,00	100	131.778.400,00	100	134.335.987,00	100	136.731.004,00	100	139.143.701,00	OPD Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	27,11	48	54	14.397.930.800,00	56	14.686.242.960,00	58	14.971.277.184,00	60	15.238.193.546,00	62	15.507.080.217,00	OPD Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	12.724.030.191,00	100%	12.978.823.235,00	100%	13.230.719.436,00	100%	13.466.604.154,00	100%	13.704.230.113,00	OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10/19/2025 12:13:12 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	1,6%	2%	5%	2.237.026.318,00		2.281.821.774,00		2.326.107.933,00		2.367.579.095,00		2.409.356.387,00	OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	55,47%	62%	64%		66%		68%		70%		72%		OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%	431.883.000,00	100%	496.665.450,00	100%	571.165.267,00	100%	656.840.057,00	100%	755.366.065,00	OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	87,5%	100%	100%	453.947.000,00	100%	463.037.086,00	100%	472.023.823,00	100%	480.439.329,00	100%	488.916.956,00	OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

InUse Book 1.indb 318 10/19/2025 12:13:13 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	16.075.000,00	100%	16.396.894,00	100%	16.715.128,00	100%	17.013.134,00	100%	17.313.340,00	OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	6.919.728.100,00	100	7.058.292.577,00	100	7.195.281.659,00	100	7.323.563.193,00	100	7.452.791.668,00	OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Tingkat Penyelenggaraan Penataan Desa	90	90	92	10.055.800,00	94	10.257.162,00	96	10.456.235,00	98	10.642.654,00	100	10.830.449,00	OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA														
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Tingkat Kerja Sama Antardesa yang Terfasilitasi	85	87	89	40.686.800,00	91	41.501.535,00	93	42.307.007,00	95	43.061.280,00	97	43.821.121,00	OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														

InUse Book 1.indb 319 10/19/2025 12:13:13 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	90	90	92	5.493.120.600,00	94	5.603.117.896,00	94	5.711.864.589,00	96	5.813.698.928,00	98	5.916.284.982,00	OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Tingkat Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Dibina	90	90	92	1.580.085.400,00	94	1.611.725.907,00	96	1.643.006.680,00	98	1.672.299.128,00	100	1.701.807.805,00	OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	6.639.675.555,00	100%	6.772.632.104,00	100%	6.904.077.017,00	100%	7.027.166.790,00	100%	7.151.165.181,00	OPD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														

InUse Book 1.indb 320 10/19/2025 12:13:13 AM

InUse Book 1.indb 321

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)	2,13	2,13	2,12	573.351.200,00	2,12	584.832.302,00	2,12	596.182.871,00	2,12	606.811.955,00	2,12	617.519.500,00	OPD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	16,7	16,7	16,6		16,5		16,4		16,4		16,3		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	69,3	69,3	69,5	16.142.675.552,00	69,7	16.465.925.449,00	69,9	16.785.500.189,00	70	17.084.761.540,00	70	17.386.231.963,00	OPD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	89,43	89,43	89,45		89,47		89,49		89,51		89,53		
	3. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	0,79	0,79	0,74		0,69		0,64		0,59		0,54		
	4. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	23,25	23,25	25,25		27,25		29,25		31,25		33,25		
	5. Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dalam 42 Hari Pascapersalinan	-	54,06	55		55,5		56		56,5		57		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														

10/19/2025 12:13:13 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	50	50	52	10.609.064.200,00	54	10.821.505.991,00	56	11.031.532.447,00	58	11.228.208.821,00	60	11.426.337.010,00	OPD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	8.267.688.595,00	100%	8.433.245.381,00	100%	8.596.919.886,00	100%	8.750.190.615,00	100%	8.904.592.750,00	OPD Urusan Perhubungan
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ														
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Kab./Kota	0,58	0,44	0,44	8.988.269.505,00	0,44	9.168.255.603,00	0,44	9.346.195.368,00	0,44	9.512.824.603,00	0,44	9.680.683.853,00	OPD Urusan Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Inmendagri)	32,58%	33,17	33,62		34,49		35,44		36,47		37,53		OPD Urusan Perhubungan
	Persentase Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan LLAJ	87,70	88,19	88,89		89,58		90,28		90,97		91,67		OPD Urusan Perhubungan
	Persentase Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan	92,17	92,78	93,33		93,89		94,44		95,00		95,56		OPD Urusan Perhubungan

InUse Book 1.indb 322
10/19/2025 12:13:13 AM

InUse Book 1.indb 323

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	77,15	79	80	8.239.794.017,00	80,5	8.404.792.227,00	81	8.567.914.506,00	81,5	8.720.668.111,00	82	8.874.549.305,00	OPD Urusan Komunikasi dan Informatika
	Nilai Evaluasi PEKPPP adalah singkatan dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2,54	2,6	2,65		2,75		3		3,25		3,5		
	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Anggaran	91,53	92,03	92,53		93,03		93,53		94,03		94,53		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)	86	87	88	2.000.000.000,00	89	2.040.049.110,00	91	2.079.642.886,00	92	2.116.719.930,00	93	2.154.070.668,00	OPD Urusan Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														

10/19/2025 12:13:13 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika	1 (Cukup)	1 (Cukup)	1,2 (Baik)	3.000.000.000,00	1,4 (Baik)	3.132.000.000,00	1,6 (Baik)	3.269.808.000,00	1,8 (Baik)	3.413.679.552,00	2 (Baik)	3.563.881.452,00	OPD Urusan Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	91%	92%	7.237.946.660,00	93%	7.382.883.322,00	94%	7.526.172.141,00	94%	7.660.352.977,00	95%	7.795.524.301,00	OPD Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM														
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,00001%	0	0,0005%	33.073.173,00	0,0007%	33.735.448,00	0,0009%	34.390.193,00	0,0011%	35.003.320,00	0,0014%	35.620.973,00	OPD Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI														
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	69,44%	70,88%	71,54%	140.123.750,00	71,86%	142.929.665,00	71,96%	145.703.679,00	72,39%	148.301.366,00	72,81%	150.918.228,00	OPD Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI														

InUse Book 1.indb 324
10/19/2025 12:13:13 AM

InUse Book 1.indb 325

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	62,97%	63,01%	63,79%	18.374.350,00	64,17%	18.742.288,00	64,76%	19.106.042,00	65,05%	19.446.675,00	66,50%	19.789.822,00	OPD Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	31,25%	31,59%	31,96%	201.192.800,00	32,53%	205.221.596,00	32,98%	209.204.587,00	33,58%	212.934.404,00	34,07%	216.691.753,00	OPD Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	4,76%	8,60%	8,64%	391.050.590,00	9,13%	398.881.204,00	9,61%	406.622.788,00	10,10%	413.872.288,00	10,58%	421.175.302,00	OPD Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	12,85%	13,09%	13,39%	4.208.159.937,00	13,72%	4.292.426.467,00	14,08%	4.375.734.938,00	14,46%	4.453.748.005,00	14,89%	4.532.336.944,00	OPD Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omzetnya	35,20%	35,27%	35,38%	13.463.045.300,00	35,66%	14.055.419.293,00	35,89%	14.673.857.741,00	36,04%	15.319.507.481,00	36,20%	15.993.565.810,00	OPD Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														

10/19/2025 12:13:13 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	7.109.891.094,00	100%	7.252.263.500,00	100%	7.393.017.218,00	100%	7.524.824.093,00	100%	7.657.603.932,00	OPD Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Investasi	25%	100%	100%	203.434.000,00	100%	207.507.675,00	100%	211.535.035,00	100%	215.306.400,00	100%	219.105.605,00	OPD Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Minat Investor yang Berinvestasi	100%	100%	20%	349.987.300,00	20%	356.995.640,00	20%	363.924.299,00	20%	370.412.546,00	20%	376.948.687,00	OPD Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	649.278.507,00	100%	662.280.020,00	100%	675.133.713,00	100%	687.170.377,00	100%	699.295.892,00	OPD Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														

InUse Book 1.indb 326
10/19/2025 12:13:14 AM

InUse Book 1.indb 327

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	101,76%	100%	100%	275.886.200,00	100%	281.410.698,00	100%	286.872.386,00	100%	291.986.908,00	100%	297.139.184,00	OPD Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	189.093.040,00	100%	192.879.544,00	100%	196.622.997,00	100%	200.128.502,00	100%	203.659.884,00	OPD Urusan Penanaman Modal
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	5,86	7,36	8,86	220.000.000,00	10,36	224.405.402,00	11,86	228.760.717,00	13,36	232.839.191,00	14,86	236.947.772,00	OPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	22,67	24,67	26,67	2.563.645.900,00	28,67	2.948.192.785,00	30,67	3.390.421.702,00	32,67	3.898.984.957,00	34,67	4.483.832.700,00	OPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN														

10/19/2025 12:13:14 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	4,25	4,50	4,75	75.000.000,00	5,00	76.501.841,00	5,25	77.986.607,00	5,50	79.376.996,00	5,75	80.777.648,00	OPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN STATISTIK SEK-TORAL														
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	30	40	45	574.000.000,00	50%	585.494.094,00	55%	596.857.507,00	60%	607.498.618,00	65%	618.218.279,00	OPD Urusan Statistik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PEN-GAMANAN INFOR-MASI														
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	4,17	3,8	4,0	501.000.000,00	4,1	511.032.302,00	4,2	520.950.542,00	4,3	530.238.341,00	4,4	539.594.700,00	OPD Urusan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														

InUse Book 1.indb 328
10/19/2025 12:13:14 AM

InUse Book 1.indb 329

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Peningkatan Budaya Lokal yang Dilestarikan	21,73	27	29	2.631.695.731,00	31	2.684.394.267,00	33	2.736.493.652,00	35	2.785.281.402,00	39	2.834.429.290,00	OPD Urusan Kebudayaan
	Persentase Peningkatan Kesenian Lokal yang Dilestarikan	22,2	25	28		31		33		36		39		OPD Urusan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Peningkatan Grup Kesenian yang Dberdayakan	20	25	25	950.000.000,00	30	969.023.327,00	30	987.830.370,00	35	1.005.441.966,00	35	1.023.183.566,00	OPD Urusan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan	100	100	100	117.500.000,00	100	119.852.885,00	100	122.179.019,00	100	124.357.295,00	100	126.551.650,00	OPD Urusan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase CB yang Dilestarikan	100	100	100	416.500.000,00	100	424.840.227,00	100	433.085.630,00	100	440.806.924,00	100	448.585.215,00	OPD Urusan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN														
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Sarpras Museum yang Dipelihara	100	100	100	310.000.000,00	100	316.207.612,00	100	322.344.647,00	100	328.091.588,00	100	333.880.952,00	OPD Urusan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														

10/19/2025 12:13:14 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya ketermanfatan perpustakaan oleh masyarakat	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	12,95	12,95	13,13	450.000.000,00	13,3	459.011.049,00	13,48	467.919.648,00	13,65	476.261.983,00	13,83	484.665.899,00	OPD Urusan Perpustakaan
Meningkatnya ketercukupan koleksi perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	64,5	64,5	65,06		65,48		65,56		66,04		66,52		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya indikator program yang tercapai	Persentase Indikator Program yang Tercapai	95%	95%	95%	3.831.643.016,00	95%	3.908.369.963,00	95%	3.984.224.570,00	95%	4.055.257.569,00	95%	4.126.814.916,00	OPD Urusan Kearsipan
Meningkatnya realisasi anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	94%	94%	94%		94%		94%		94%		94%		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP														
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	90%	90%	91%	343.375.200,00	92%	350.251.135,00	93%	357.048.895,00	94%	363.414.563,00	95%	369.827.221,00	OPD Urusan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP														
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1,16	1,16	2,33	40.987.600,00	3,49	41.808.358,00	4,65	42.619.784,00	5,81	43.379.633,00	6,98	44.145.091,00	OPD Urusan Kearsipan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP														

InUse Book 1.indb 330
10/19/2025 12:13:14 AM

InUse Book 1.indb 331

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	-	-	100	1.637.200,00	100	1.669.984,00	100	1.702.395,00	100	1.732.746,00	100	1.763.321,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	5.855.474.417,00	100	5.972.727.687,00	100	6.088.647.858,00	100	6.197.199.701,00	100	6.306.552.846,00	OPD Urusan Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	81.697	81.750	81.775	100.000.000,00	81.800	102.002.455,00	81.850	103.982.143,00	81.900	105.835.995,00	81.950	107.703.531,00	OPD Urusan Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budi Daya (Ton)	24.687,82	25.449	25.479,53	1.880.000.000,00	25.511,53	1.917.646.163,00	25.545,53	1.954.864.312,00	25.580,53	1.989.716.734,00	25.616,53	2.024.826.427,00	OPD Urusan Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														

10/19/2025 12:13:14 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati	Persentase Pelaku yang Dibina Kepatuhannya Sesuai Kewenangan Kab./Kota	N/A	0	50	50.000.000,00	50	51.001.227,00	50	51.991.071,00	50	52.917.997,00	50	53.851.765,00	OPD Urusan Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	12,34	12,83	13,35	1.035.940.000,00	13,88	1.056.684.237,00	14,44	1.077.192.625,00	15,01	1.096.397.421,00	15,61	1.115.743.982,00	OPD Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93	93	93	11.000.607.022,00	94	11.220.889.284,00	94	11.438.667.069,00	94	11.642.602.068,00	94	11.848.042.463,00	OPD Urusan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Objek dan Daya Tarik Wisata	10,46	11	11,5	3.196.210.445,00	12,5	3.336.843.704,00	14	3.483.664.826,00	15	3.636.946.078,00	16	3.796.971.705,00	OPD Urusan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	15,7	16	16	1.200.000.000,00	17	1.224.029.466,00	17	1.247.785.731,00	18	1.270.031.957,00	18	1.292.442.399,00	OPD Urusan Pariwisata

InUse Book 1.indb 332
10/19/2025 12:13:14 AM

InUse Book 1.indb 333

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkompetensi Dasar	2,752	2,752	29	171.172.871,00	29	196.848.801,00	3	226.376.121,00	3	260.332.539,00	3,25	299.382.419,00	OPD Urusan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99%	99%	99%	32.846.635.066,00	99%	33.504.374.322,00	99%	34.154.635.479,00	99%	34.763.563.558,00	99%	35.376.986.589,00	OPD Urusan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Dilakukan Monitoring dalam Pemanfaatan Sarana Pertanian	100%	100%	100%	12.301.120.266,00	100%	12.842.369.557,00	100%	13.407.433.817,00	100%	13.997.360.904,00	100%	14.613.244.783,00	OPD Urusan Pertanian
	Persentase Pemanfaatan Benih /Bibit Unggul Pertanian	82,21%	83,31%	85,07%		85,15%		85,25%		85,50%		85,75%		OPD Urusan Pertanian
	Jumlah Desa yang Melaksanakan Inovasi Tani Organik	60	70	80		85		90		95		100		OPD Urusan Pertanian

10/19/2025 12:13:15 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dengan Kondisi Baik	74%	75%	76%	17.725.000.000,00	77%	18.079.935.240,00	78%	18.430.835.080,00	79%	18.759.430.389,00	80%	19.090.451.305,00	OPD Urusan Pertanian
PROGRAM PEN-GENDALIAN DAN PENANGGULAN-GAN BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Serangan OPT)	94%	95%	96%	1.190.000.000,00	96%	1.213.829.220,00	96%	1.237.387.516,00	97%	1.259.448.357,00	98%	1.281.672.046,00	OPD Urusan Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	100%	100%	100%	6.273.910.000,00	100%	6.399.542.257,00	100%	6.523.746.150,00	100%	6.640.055.170,00	100%	6.757.222.754,00	OPD Urusan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	1,50%	1,50%	1,50%	16.543.255.000,00	1,50%	16.874.526.322,00	1,50%	17.202.031.289,00	1,50%	17.508.718.791,00	1,50%	17.817.670.183,00	OPD Urusan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Pemanfaatan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Tersedia	100,00%	100,00%	100,00%	268.530.200,00	100,00%	273.907.397,00	100,00%	279.223.459,00	100,00%	284.201.612,00	100,00%	289.216.512,00	OPD Urusan Pertanian

InUse Book 1.indb 334 10/19/2025 12:13:15 AM

InUse Book 1.indb 335

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	65,00%	70,00%	75,00%	1.680.159.800,00	80,00%	1.713.804.252,00	85,00%	1.747.066.187,00	90,00%	1.778.213.867,00	95,00%	1.809.591.471,00	OPD Urusan Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra-NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	20,00%	25,00%	30,00%		35,00%		40,00%		45,00%		50,00%		OPD Urusan Pertanian
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN														
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha/Sertifikat Standar yang Diterbitkan	0,00%	75%	78%	129.570.000,00	81%	132.164.581,00	84%	134.729.663,00	87%	137.131.699,00	90%	139.551.466,00	OPD Urusan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	12.158.199.419,00	100,00%	12.401.661.954,00	100,00%	12.642.356.466,00	100,00%	12.867.751.517,00	100,00%	13.094.810.377,00	OPD Urusan Perdagangan

10/19/2025 12:13:15 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Pasar yang Memenuhi Standar	46,67%	53,33%	56,67%	12.034.917.794,00	60,00%	12.564.454.176,00	66,67%	13.117.290.159,00	73,33%	13.694.450.925,00	86,67%	14.297.006.765,00	OPD Urusan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4,08%	≤ 10%	≤ 10%	570.444.700,00	≤ 10%	581.867.601,00	≤ 10%	593.160.630,00	≤ 10%	603.735.831,00	≤ 10%	614.389.096,00	OPD Urusan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR														
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	48.149,65	48.318.177	48.492.122	716.812.600,00	48.671.543	731.166.453,00	48.856.495	745.357.111,00	49.047.035	758.645.757,00	49.243.223	772.032.496,00	OPD Urusan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN														
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Uji Metrologi Legal	62,71%	62,71%	63,24%	197.521.900,00	63,63%	201.477.188,00	64,01%	205.387.506,00	64,39%	209.049.270,00	65,16%	212.738.064,00	OPD Urusan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	20%	22,50%	25%	225.000.000,00	27,50%	229.505.524,00	30%	233.959.823,00	32,50%	238.130.990,00	35%	242.332.947,00	OPD Urusan Perdagangan

InUse Book 1.indb 336 10/19/2025 12:13:15 AM

InUse Book 1.indb 337

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	50%	50%	60%	1.980.176.500,00	70%	2.019.828.653,00	75%	2.059.029.985,00	80%	2.095.739.531,00	85%	2.132.720.057,00	OPD Urusan Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	50%	50%	55%	20.413.000,00	60%	20.821.761,00	65%	21.225.874,00	70%	21.604.300,00	75%	21.985.520,00	OPD Urusan Perindustrian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAWASAN TRANSMIGRASI														
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Transmigrasi	14,29%	10%	12%	45.440.000,00	14%	46.349.915,00	15%	47.249.485,00	17%	48.091.875,00	20%	48.940.483,00	OPD Urusan Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
SEKRETARIAT DAERAH														

10/19/2025 12:13:15 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	36.133.725.000,00	100%	37.723.608.900,00	100%	39.383.447.691,00	100%	41.116.319.389,00	100%	42.925.437.442,00	Unsur Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Pemenuhan Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	4.975.000.000,00	100%	5.074.622.162,00	100%	5.173.111.680,00	100%	5.265.340.828,00	100%	5.358.250.788,00	Unsur Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan sekretariat daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	66.506.513.022,00	100%	67.838.276.363,00	100%	69.154.898.355,00	100%	70.387.830.834,00	100%	71.629.864.508,00	Unsur Sekretariat Daerah
UNSUR PENGELOLAAN PERBATASAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN														

InUse Book 1.indb 338
10/19/2025 12:13:15 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Perbatasan	100%	100%	100%	28.275.000,00	100%	28.841.194,00	100%	29.400.951,00	100%	29.925.127,00	100%	30.453.173,00	
SEKRETARIAT DPRD														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan sekretariat DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,15	95,25	95,35	42.999.345.460,00	95,45	43.860.388.226,00	95,55	44.711.641.454,00	95,65	45.508.785.781,00	95,75	46.311.814.425,00	Unsur Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Perda	100%	100%	100%	33.346.974.500,00	100%	34.014.732.831,00	100%	34.674.899.152,00	100%	35.293.102.784,00	100%	35.915.869.839,00	Unsur Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Fungsi Anggaran	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Unsur Sekretariat DPRD
	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Fungsi Pengawasan Pemerintahan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Unsur Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
PERENCANAAN														

InUse Book 1.indb 339 10/19/2025 12:13:15 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	8.567.633.674,00	100%	8.739.196.727,00	100%	8.908.809.211,00	100%	9.067.640.479,00	100%	9.227.644.199,00	OPD Unsur Perencanaan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	1.733.842.623,00	100%	1.768.562.050,00	100%	1.802.886.738,00	100%	1.835.029.618,00	100%	1.867.409.768,00	OPD Unsur Perencanaan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	2.321.828.803,00	100%	2.368.322.392,00	100%	2.414.287.376,00	100%	2.457.330.651,00	100%	2.500.691.660,00	OPD Unsur Perencanaan
KEUANGAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

InUse Book 1.indb 340
10/19/2025 12:13:16 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	15.418.462.000,00	100%	15.727.209.843,00	100%	16.032.447.409,00	100%	16.318.282.911,00	100%	16.606.228.378,00	OPD Unsur Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Pelayanan Pendidikan	20%	20%	20%	683.953.637.794,00	20%	697.629.230.454,00	20%	711.146.817.399,00	20%	723.799.298.888,00	20%	736.543.714.671,00	OPD Unsur Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Pelayanan Kesehatan	10%	10%	10%		10%		10%		10%		10%		OPD Unsur Keuangan
	Persentase Alokasi ADD Sesuai Peraturan yang Berlaku	-	-	10%		10%		10%		10%		10%		OPD Unsur Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	-	-	10%	599.185.093,00	10%	617.160.647,00	10%	635.675.465,00	10%	654.745.730,00	10%	674.388.101,00	OPD Unsur Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA	-	-	3%		3%		3%		3%		3%		
	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	-	-	100%	1.433.276.930,00	100%	1.476.275.236,00	100%	1.520.563.495,000	100%	1.566.180.399,00	100%	1.613.165.814,00	OPD Unsur Keuangan
	Persentase Laporan Keuangan dan Rancangan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawa-ban APBD Tepat Waktu	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		OPD Unsur Keuangan
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah penunjang urusan kewenangan	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		OPD Unsur Keuangan

InUse Book 1.indb 341 10/19/2025 12:13:16 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		OPD Unsur Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4%	4%	4%	7.851.656.400,00	4%	8.008.882.326,00	4%	8.164.320.688,00	4%	8.309.878.795,00	4%	8.456.511.375,00	OPD Unsur Keuangan
	Persentase Pemanfaatan Aset untuk Tanah dan/ atau Bangunan	1%	1%	1%		1%		1%		1%		1%		
	Persentase Pensertifikatan Aset Atas Nama Pemerintah	2,50%	2,50%	2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		
	Penyajian Laporan kepada BPK yang Benar, Lengkap, dan Tepat Waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,19%	92,50%	92,60%	21.781.781.158,00	92,70%	22.217.951.637,00	92,80%	22.649.163.120,00	92,90%	23.052.965.157,00	93,00%	23.459.747.958,00	OPD Unsur Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,50%	25,22%	25,25%	2.513.884.670,00	25,30%	2.564.224.092,00	25,35%	2.613.991.185,00	25,40%	2.660.594.892,00	25,45%	2.707.542.615,00	OPD Unsur Keuangan

InUse Book 1.indb 342 10/19/2025 12:13:16 AM

InUse Book 1.indb 343

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Persentase Temuan Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		OPD Unsur Keuangan
KEPEGAWAIAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	8.325.076.674,00	100%	8.491.782.631,00	100%	8.656.593.241,00	100%	8.810.927.861,00	100%	8.966.401.740,00	OPD Unsur Kepegawaian
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja dan Disiplin	29,97	29,97	29,98	1.558.627.300,00	30,10	1.589.838.118,00	30,20	1.620.694.088,00	30,30	1.649.588.735,00	30,40	1.678.696.675,00	OPD Unsur Kepegawaian
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	51,65	52,03	52,12	1.700.063.000,00	52,13	1.734.106.005,00	52,25	1.767.761.961,00	52,40	1.799.278.616,00	52,55	1.831.027.919,00	OPD Unsur Pendidikan dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

10/19/2025 12:13:16 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,00%	97,25%	97,50%	5.050.165.300,00	97,75%	5.151.292.613,00	98%	5.251.270.170,00	98,25%	5.344.892.772,00	98,50%	5.439.206.472,00	OPD Unsur Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
Meningkatnya pemanfaatan Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Hasil Penelitian yang Telah Diimplementasikan	100%	100%	100%	1.438.235.000,00	100%	1.467.035.016,00	100%	1.495.507.593,00	100%	1.522.170.344,00	100%	1.549.029.913,00	OPD Unsur Penelitian dan Pengembangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
INSPEKTORAT DAERAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84%	86%%	88%%	13.580.625.300,00	90%	13.852.571.280,00	92%	14.121.425.398,00	94%	14.373.190.123,00	96%%	14.626.813.312,00	OPD Unsur Pengawasan
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PENGAWASAN														
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	1. Persentase Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	60%	62%	64%	508.856.000,00	66%	519.045.615,00	68%	529.119.380,00	70%	538.552.818,00	72%	548.055.891,00	OPD Unsur Pengawasan
	2. Persentase Pengawasan Tujuan Tertentu yang Diselesaikan	73%	75%	77%		79%		81%		83%		85%		OPD Unsur Pengawasan

InUse Book 1.indb 344 10/19/2025 12:13:16 AM

InUse Book 1.indb 345

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Persentase Kebijakan Pengawasan yang Ditetapkan	68%	70%	72%	999.980.000,00	74%	1.020.004.154,00	76%	1.039.800.646,00	78%	1.058.338.797,00	80%	1.077.013.792,00	OPD Unsur Pengawasan
	2. Persentase Pendampingan/ Asistensi yang Terlaksana Sesuai Rencana	68%	70%	72%		74%		76%		78%		80%		OPD Unsur Pengawasan
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.016.173.500,00	100%	2.056.546.477,00	100%	2.096.460.438,00	100%	2.133.837.315,00	100%	2.171.490.099,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsiF	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	7.525.700,00	100%	7.676.398,00	100%	7.825.383,00	100%	7.964.898,00	100%	8.105.443,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo

10/19/2025 12:13:16 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	55.818.500,00	100%	56.936.240,00	100%	58.041.272,00	100%	59.076.064,00	100%	60.118.495,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	2.000.000,00	100%	2.040.049,00	100%	2.079.642,00	100%	2.116.719,00	100%	2.154.069,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	61.499.400,00	100%	62.730.898,00	100%	63.948.394,00	100%	65.088.501,00	100%	66.237.024,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	4.500.600,00	100%	4.590.722,00	100%	4.679.819,00	100%	4.763.253,00	100%	4.847.303,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Mojo

InUse Book 1.indb 346
10/19/2025 12:13:17 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.658.758.060,00	100%	2.711.998.507,00	100%	2.764.633.642,00	100%	2.813.923.087,00	100%	2.863.576.374,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	13.000.000,00	100%	13.260.319,00	100%	13.517.678,00	100%	13.758.678,00	100%	14.001.457,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	67.500.000,00	100%	68.851.657,00	100%	70.187.946,00	100%	71.439.296,00	100%	72.699.883,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	3.000.000,00	100%	3.060.073,00	100%	3.119.463,00	100%	3.175.078,00	100%	3.231.104,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras

InUse Book 1.indb 347 10/19/2025 12:13:17 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	51.000.000,00	100%	52.021.252,00	100%	53.030.893,00	100%	53.976.357,00	100%	54.928.800,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	5.000.000,00	100%	5.100.122,00	100%	5.199.106,00	100%	5.291.798,00	100%	5.385.174,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kras
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.640.058.875,00	100%	2.692.924.879,00	100%	2.745.189.828,00	100%	2.794.132.618,00	100%	2.843.436.691,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	4.500.000,00	100%	4.590.110,00	100%	4.679.195,00	100%	4.762.618,00	100%	4.846.657,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih

InUse Book 1.indb 348
10/19/2025 12:13:17 AM

InUse Book 1.indb 349

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	45.300.000,00	100%	46.207.112,00	100%	47.103.911,00	100%	47.943.706,00	100%	48.789.700,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	1.500.000,00	100%	1.530.036,00	100%	1.559.731,00	100%	1.587.538,00	100%	1.615.551,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	49.500.000,00	100%	50.491.215,00	100%	51.471.160,00	100%	52.388.816,00	100%	53.313.246,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	8.000.000,00	100%	8.160.196,00	100%	8.318.571,00	100%	8.466.879,00	100%	8.616.281,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngadiluwih

10/19/2025 12:13:17 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.915.921.299,00	100%	1.954.286.770,00	100%	1.992.216.049,00	100%	2.027.734.398,00	100%	2.063.514.935,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	3.850.000,00	100%	3.927.094,00	100%	4.003.312,00	100%	4.074.685,00	100%	4.146.585,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	34.650.000,00	100%	35.343.850,00	100%	36.029.812,00	100%	36.672.171,00	100%	37.319.272,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	1.150.000,00	100%	1.173.028,00	100%	1.195.794,00	100%	1.217.113,00	100%	1.238.589,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat

InUse Book 1.indb 350
10/19/2025 12:13:17 AM

InUse Book 1.indb 351

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	53.500.000,00	100%	54.571.313,00	100%	55.630.446,00	100%	56.622.256,00	100%	57.621.388,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	2.500.000,00	100%	2.550.061,00	100%	2.599.553,00	100%	2.645.899,00	100%	2.692.587,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.896.561.100,00	100%	2.954.563.447,00	100%	3.011.906.342,00	100%	3.065.604.304,00	100%	3.119.698.651,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates

10/19/2025 12:13:17 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	10.809.400,00	100%	11.025.853,00	100%	11.239.845,00	100%	11.440.235,00	100%	11.642.104,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	64.805.500,00	100%	66.103.201,00	100%	67.386.148,00	100%	68.587.546,00	100%	69.797.812,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	6.265.000,00	100%	6.390.453,00	100%	6.514.480,00	100%	6.630.623,00	100%	6.747.624,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	60.500.000,00	100%	61.711.485,00	100%	62.909.196,00	100%	64.030.776,00	100%	65.160.635,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates

InUse Book 1.indb 352 10/19/2025 12:13:17 AM

InUse Book 1.indb 353

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	5.202.700,00	100%	5.306.881,00	100%	5.409.878,00	100%	5.506.328,00	100%	5.603.490,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Wates
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.244.148.399,00	100%	2.289.086.472,00	100%	2.333.513.626,00	100%	2.375.116.821,00	100%	2.417.027.120,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	41.101.600,00	100%	41.924.641,00	100%	42.738.324,00	100%	43.500.286,00	100%	44.267.873,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	19.234.300,00	100%	19.619.458,00	100%	20.000.237,00	100%	20.356.812,00	100%	20.716.019,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar

10/19/2025 12:13:18 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.020.024,00	100%	1.039.820,00	100%	1.058.358,00	100%	1.077.033,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	66.500.000,00	100%	67.831.632,00	100%	69.148.125,00	100%	70.380.936,00	100%	71.622.848,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	52.000.000,00	100%	53.041.276,00	100%	54.070.714,00	100%	55.034.717,00	100%	56.005.836,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngancar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	2.577.048.924,00	100,00%	2.628.653.182,00	100,00%	2.679.670.731,00	100,00%	2.727.445.410,00	100,00%	2.775.572.749,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu

InUse Book 1.indb 354
10/19/2025 12:13:18 AM

InUse Book 1.indb 355

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100,00%	100,00%	100,00%	4.500.000,00	100,00%	4.590.110,00	100,00%	4.679.195,00	100,00%	4.762.618,00	100,00%	4.846.657,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	41.783.800,00	100,00%	42.620.502,00	100,00%	43.447.691,00	100,00%	44.222.300,00	100,00%	45.002.627,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00%	100,00%	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.530.036,00	100,00%	1.559.731,00	100,00%	1.587.538,00	100,00%	1.615.551,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	100,00%	100,00%	62.000.000,00	100,00%	63.241.522,00	100,00%	64.468.929,00	100,00%	65.618.317,00	100,00%	66.776.189,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu

10/19/2025 12:13:18 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	100,00%	100,00%	8.000.000,00	100,00%	8.160.196,00	100,00%	8.318.571,00	100,00%	8.466.879,00	100,00%	8.616.281,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Puncu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100%	2.178.186.184,00	100%	2.221.803.393,00	100%	2.264.924.701,00	100%	2.305.305.054,00	100%	2.345.983.484,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100,00%	100,00%	100%	4.500.000,00	100%	4.590.110,00	100%	4.679.195,00	100%	4.762.618,00	100%	4.846.657,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten

InUse Book 1.indb 356
10/19/2025 12:13:18 AM

InUse Book 1.indb 357

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00%	100,00%	100%	58.600.000,00	100%	59.773.438,00	100%	60.933.535,00	100%	62.019.892,00	100%	63.114.268,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00%	100,00%	100%	500.000,00	100%	510.012,00	100%	519.910,00	100%	529.179,00	100%	538.516,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	100,00%	100%	67.000.000,00	100%	68.341.645,00	100%	69.668.036,00	100%	70.910.116,00	100%	72.161.365,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	100,00%	100%	3.000.000,00	100%	3.060.073,00	100%	3.119.463,00	100%	3.175.078,00	100%	3.231.104,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plosoklaten
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah

10/19/2025 12:13:18 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.291.693.038,00	100%	2.337.583.171,00	100%	2.382.951.561,00	100%	2.425.436.163,00	100%	2.468.234.376,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	38.566.600,00	100%	39.338.879,00	100%	40.102.377,00	100%	40.817.344,00	100%	41.537.589,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	21.181.200,00	100%	21.605.344,00	100%	22.024.665,00	100%	22.417.333,00	100%	22.812.899,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	4.575.000,00	100%	4.666.612,00	100%	4.757.182,00	100%	4.841.995,00	100%	4.927.434,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah

InUse Book 1.indb 358 10/19/2025 12:13:18 AM

InUse Book 1.indb 359

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	58.255.400,00	100%	59.421.938,00	100%	60.575.213,00	100%	61.655.182,00	100%	62.743.123,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	7.548.084,00	100%	7.699.231,00	100%	7.848.659,00	100%	7.988.589,00	100%	8.129.552,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gurah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.273.259.780,00	100%	2.318.780.795,00	100%	2.363.784.264,00	100%	2.405.927.141,00	100%	2.448.381.106,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	6.000.000,00	100%	6.120.147,00	100%	6.238.928,00	100%	6.350.159,00	100%	6.462.211,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu

10/19/2025 12:13:18 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	62.000.000,00	100%	63.241.522,00	100%	64.468.929,00	100%	65.618.317,00	100%	66.776.189,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	6.000.000,00	100%	6.120.147,00	100%	6.238.928,00	100%	6.350.159,00	100%	6.462.211,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	40.000.000,00	100%	40.800.982,00	100%	41.592.857,00	100%	42.334.397,00	100%	43.081.411,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	5.000.000,00	100%	5.100.122,00	100%	5.199.106,00	100%	5.291.798,00	100%	5.385.174,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo

InUse Book 1.indb 360 10/19/2025 12:13:19 AM

InUse Book 1.indb 361

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.084.315.450,00	100%	2.126.052.939,00	100%	2.167.315.898,00	100%	2.205.956.026,00	100%	2.244.881.386,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	4.500.000,00	100%	4.590.110,00	100%	4.679.195,00	100%	4.762.618,00	100%	4.846.657,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	45.460.000,00	100%	46.370.316,00	100%	47.270.282,00	100%	48.113.043,00	100%	48.962.025,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	4.000.000,00	100%	4.080.098,00	100%	4.159.285,00	100%	4.233.439,00	100%	4.308.140,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo

10/19/2025 12:13:19 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	40.000.000,00	100%	40.800.982,00	100%	41.592.857,00	100%	42.334.397,00	100%	43.081.411,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	8.000.000,00	100%	8.160.196,00	100%	8.318.571,00	100%	8.466.879,00	100%	8.616.281,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Gampengrejo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.102.429.500,00	100%	2.144.529.715,00	100%	2.186.151.276,00	100%	2.225.127.212,00	100%	2.264.390.858,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	21.708.750,00	100%	22.143.458,00	100%	22.573.223,00	100%	22.975.671,00	100%	23.381.089,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol

InUse Book 1.indb 362
10/19/2025 12:13:19 AM

InUse Book 1.indb 363

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	49.000.000,00	100%	49.981.203,00	100%	50.951.250,00	100%	51.859.637,00	100%	52.774.730,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	5.500.000,00	100%	5.610.135,00	100%	5.719.017,00	100%	5.820.978,00	100%	5.923.692,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	60.000.000,00	100%	61.201.473,00	100%	62.389.286,00	100%	63.501.597,00	100%	64.622.119,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	32.675.170,00	100%	33.329.475,00	100%	33.976.341,00	100%	34.582.090,00	100%	35.192.310,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Grogol

10/19/2025 12:13:19 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.685.749.300,00	100%	2.739.530.235,00	100%	2.792.699.713,00	100%	2.842.489.536,00	100%	2.892.646.895,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	710.000,00	100%	724.217,00	100%	738.272,00	100%	751.434,00	100%	764.693,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	28.622.300,00	100%	29.195.448,00	100%	29.762.080,00	100%	30.292.695,00	100%	30.827.226,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	1.461.200,00	100%	1.490.459,00	100%	1.519.386,00	100%	1.546.474,00	100%	1.573.762,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar

InUse Book 1.indb 364 10/19/2025 12:13:19 AM

InUse Book 1.indb 365

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	36.316.400,00	100%	37.043.619,00	100%	37.762.570,00	100%	38.435.822,00	100%	39.114.044,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	8.422.300,00	100%	8.590.952,00	100%	8.757.687,00	100%	8.913.823,00	100%	9.071.112,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Papar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.801.527.300,00	100%	2.857.626.638,00	100%	2.913.088.160,00	100%	2.965.024.336,00	100%	3.017.343.892,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	22.000.900,00	100%	22.441.458,00	100%	22.877.007,00	100%	23.284.871,00	100%	23.695.745,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri

10/19/2025 12:13:19 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	110.953.500,00	100%	113.175.294,00	100%	115.371.828,00	100%	117.428.741,00	100%	119.500.838,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	4.055.200,00	100%	4.136.403,00	100%	4.216.683,00	100%	4.291.860,00	100%	4.367.592,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	56.086.700,00	100%	57.209.811,00	100%	58.320.153,00	100%	59.359.917,00	100%	60.407.356,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	18.344.800,00	100%	18.712.146,00	100%	19.075.315,00	100%	19.415.400,00	100%	19.757.995,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Purwoasri

InUse Book 1.indb 366 10/19/2025 12:13:19 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.429.874.272,00	100%	2.478.531.423,00	100%	2.526.635.371,00	100%	2.571.681.649,00	100%	2.617.060.447,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	3.400.000,00	100%	3.468.083,00	100%	3.535.392,00	100%	3.598.422,00	100%	3.661.918,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	50.725.000,00	100%	51.740.745,00	100%	52.744.942,00	100%	53.685.308,00	100%	54.632.616,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	1.740.000,00	100%	1.774.842,00	100%	1.809.288,00	100%	1.841.545,00	100%	1.874.040,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan

InUse Book 1.indb 367 10/19/2025 12:13:20 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	61.254.000,00	100%	62.480.584,00	100%	63.693.222,00	100%	64.828.780,00	100%	65.972.721,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	27.000.000,00	100%	27.540.662,00	100%	28.075.177,00	100%	28.575.717,00	100%	29.079.951,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Plemahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	3.400.303.600,00	100%	3.468.393.167,00	100%	3.535.708.596,00	100%	3.598.745.200,00	100%	3.662.247.124,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare

InUse Book 1.indb 368
10/19/2025 12:13:20 AM

InUse Book 1.indb 369

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	8.000.000,00	100%	8.160.196,00	100%	8.318.571,00	100%	8.466.879,00	100%	8.616.281,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	851.795.000,00	100%	868.851.815,00	100%	885.714.705,00	100%	901.505.725,00	100%	917.413.310,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	1.200.000,00	100%	1.224.029,00	100%	1.247.785,00	100%	1.270.031,00	100%	1.292.441,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	38.000.000,00	100%	38.760.933,00	100%	39.513.214,00	100%	40.217.677,00	100%	40.927.340,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare

10/19/2025 12:13:20 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	3.500.000,00	100%	3.570.085,00	100%	3.639.374,00	100%	3.704.258,00	100%	3.769.621,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Pare
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.650.262.015,00	100%	2.703.332.333,00	100%	2.755.799.273,00	100%	2.804.931.214,00	100%	2.854.425.835,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	4.000.000,00	100%	4.080.098,00	100%	4.159.285,00	100%	4.233.439,00	100%	4.308.140,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	13.000.000,00	100%	13.260.319,00	100%	13.517.678,00	100%	13.758.678,00	100%	14.001.457,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung

InUse Book 1.indb 370 10/19/2025 12:13:20 AM

InUse Book 1.indb 371

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	3.000.000,00	100%	3.060.073,00	100%	3.119.463,00	100%	3.175.078,00	100%	3.231.104,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	50.000.000,00	100%	51.001.227,00	100%	51.991.071,00	100%	52.917.997,00	100%	53.851.765,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	9.500.000,00	100%	9.690.233,00	100%	9.878.303,00	100%	10.054.418,00	100%	10.231.833,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kepung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100%	3.042.181.221,00	100%	3.103.099.546,00	100%	3.163.325.267,00	100%	3.219.722.811,00	100%	3.276.536.667,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan

10/19/2025 12:13:20 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100,00%	100,00%	100%	5.550.000,00	100%	5.661.136,00	100%	5.771.008,00	100%	5.873.896,00	100%	5.977.544,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00%	100,00%	100%	63.208.200,00	100%	64.473.916,00	100%	65.725.241,00	100%	66.897.027,00	100%	68.077.463,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00%	100,00%	100%	2.521.600,00	100%	2.572.093,00	100%	2.622.012,00	100%	2.668.758,00	100%	2.715.849,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	100,00%	100%	53.547.800,00	100%	54.620.070,00	100%	55.680.149,00	100%	56.672.846,00	100%	57.672.870,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan

InUse Book 1.indb 372
10/19/2025 12:13:21 AM

InUse Book 1.indb 373

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	15.442.000,00	100%	15.751.219,00	100%	16.056.922,00	100%	16.343.193,00	100%	16.631.578,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kandangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.180.750.560,00	100%	2.224.419.119,00	100%	2.267.591.193,00	100%	2.308.019.086,00	100%	2.348.745.407,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	5.313.000,00	100%	5.419.390,00	100%	5.524.570,00	100%	5.623.065,00	100%	5.722.287,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan

10/19/2025 12:13:21 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	38.488.000,00	100%	39.258.705,00	100%	40.020.647,00	100%	40.734.157,00	100%	41.452.934,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	18.478.500,00	100%	18.848.523,00	100%	19.214.339,00	100%	19.556.903,00	100%	19.901.995,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	41.832.000,00	100%	42.669.667,00	100%	43.497.810,00	100%	44.273.313,00	100%	45.054.541,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	47.510.000,00	100%	48.461.366,00	100%	49.401.916,00	100%	50.282.681,00	100%	51.169.947,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Tarokan

InUse Book 1.indb 374 10/19/2025 12:13:21 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.790.067.500,00	100%	2.845.937.360,00	100%	2.901.172.013,00	100%	2.952.895.741,00	100%	3.005.001.281,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	4.500.000,00	100%	4.590.110,00	100%	4.679.195,00	100%	4.762.618,00	100%	4.846.657,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	51.155.427,00	100%	52.179.791,00	100%	53.192.509,00	100%	54.140.855,00	100%	55.096.201,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	1.500.000,00	100%	1.530.036,00	100%	1.559.731,00	100%	1.587.538,00	100%	1.615.551,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang

InUse Book 1.indb 375 10/19/2025 12:13:21 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	54.275.200,00	100%	55.362.036,00	100%	56.436.516,00	100%	57.442.697,00	100%	58.456.306,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	13.551.000,00	100%	13.822.352,00	100%	14.090.619,00	100%	14.341.834,00	100%	14.594.903,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kunjang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.867.565.824,00	100%	2.924.987.554,00	100%	2.981.756.433,00	100%	3.034.916.866,00	100%	3.088.469.715,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	10.000.000,00	100%	10.200.245,00	100%	10.398.213,00	100%	10.583.598,00	100%	10.770.351,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan

InUse Book 1.indb 376
10/19/2025 12:13:21 AM

InUse Book 1.indb 377

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	45.500.000,00	100%	46.411.117,00	100%	47.311.875,00	100%	48.155.377,00	100%	49.005.106,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	3.500.000,00	100%	3.570.085,00	100%	3.639.374,00	100%	3.704.258,00	100%	3.769.621,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	62.000.000,00	100%	63.241.522,00	100%	64.468.929,00	100%	65.618.317,00	100%	66.776.189,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	8.000.000,00	100%	8.160.196,00	100%	8.318.571,00	100%	8.466.879,00	100%	8.616.281,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Banyakan

10/19/2025 12:13:21 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.868.569.150,00	100%	1.905.986.416,00	100%	1.942.978.270,00	100%	1.977.618.780,00	100%	2.012.514.998,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	2.430.000,00	100%	2.478.659,00	100%	2.526.765,00	100%	2.571.813,00	100%	2.617.194,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	45.307.100,00	100%	46.214.354,00	100%	47.111.293,00	100%	47.951.219,00	100%	48.797.345,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	3.000.000,00	100%	3.060.073,00	100%	3.119.463,00	100%	3.175.078,00	100%	3.231.104,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo

InUse Book 1.indb 378 10/19/2025 12:13:22 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	71.696.600,00	100%	73.132.292,00	100%	74.551.661,00	100%	75.880.810,00	100%	77.219.770,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	6.000.000,00	100%	6.120.147,00	100%	6.238.928,00	100%	6.350.159,00	100%	6.462.211,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ringinrejo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.990.952.214,00	100%	2.030.820.146,00	100%	2.070.234.804,00	100%	2.107.144.116,00	100%	2.144.325.883,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	10.000.000,00	100%	10.200.245,00	100%	10.398.213,00	100%	10.583.598,00	100%	10.770.351,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul

InUse Book 1.indb 379 10/19/2025 12:13:22 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	58.550.000,00	100%	59.722.437,00	100%	60.881.544,00	100%	61.966.974,00	100%	63.060.416,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	3.000.000,00	100%	3.060.073,00	100%	3.119.463,00	100%	3.175.078,00	100%	3.231.104,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	47.000.000,00	100%	47.941.154,00	100%	48.871.607,00	100%	49.742.917,00	100%	50.620.659,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	6.000.000,00	100%	6.120.147,00	100%	6.238.928,00	100%	6.350.159,00	100%	6.462.211,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Kayen Kidul

InUse Book 1.indb 380 10/19/2025 12:13:22 AM

InUse Book 1.indb 381

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.152.663.820,00	100%	2.195.769.955,00	100%	2.238.385.999,00	100%	2.278.293.205,00	100%	2.318.494.996,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	9.200.000,00	100%	9.384.225,00	100%	9.566.356,00	100%	9.736.910,00	100%	9.908.723,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	36.792.500,00	100%	37.529.253,00	100%	38.257.629,00	100%	38.939.707,00	100%	39.626.820,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	5.000.000,00	100%	5.100.122,00	100%	5.199.106,00	100%	5.291.798,00	100%	5.385.174,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem

10/19/2025 12:13:22 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	66.874.200,00	100%	68.213.326,00	100%	69.537.227,00	100%	70.776.975,00	100%	72.025.875,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	73.700.000,00	100%	75.175.809,00	100%	76.634.839,00	100%	78.001.128,00	100%	79.377.502,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Ngasem
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.256.660.929,00	100%	2.301.849.560,00	100%	2.346.524.423,00	100%	2.388.359.582,00	100%	2.430.503.557,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	4.207.500,00	100%	4.291.753,00	100%	4.375.048,00	100%	4.453.048,00	100%	4.531.624,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas

InUse Book 1.indb 382
10/19/2025 12:13:22 AM

InUse Book 1.indb 383

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	74.355.500,00	100%	75.844.435,00	100%	77.316.442,00	100%	78.694.883,00	100%	80.083.499,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	1.201.000,00	100%	1.225.049,00	100%	1.248.825,00	100%	1.271.089,00	100%	1.293.518,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	41.875.000,00	100%	42.713.528,00	100%	43.542.522,00	100%	44.318.822,00	100%	45.100.853,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	3.680.100,00	100%	3.753.792,00	100%	3.826.646,00	100%	3.894.869,00	100%	3.963.596,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Badas

10/19/2025 12:13:22 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.097.710.798,00	100%	2.139.716.523,00	100%	2.181.244.668,00	100%	2.220.133.126,00	100%	2.259.308.649,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	8.600.000,00	100%	8.772.211,00	100%	8.942.464,00	100%	9.101.895,00	100%	9.262.503,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas desa dan kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	84.000.000,00	100%	85.682.062,00	100%	87.345.000,00	100%	88.902.235,00	100%	90.470.965,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen
Terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	3.500.000,00	100%	3.570.085,00	100%	3.639.374,00	100%	3.704.258,00	100%	3.769.621,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen

InUse Book 1.indb 384
10/19/2025 12:13:23 AM

InUse Book 1.indb 385

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENYE-LENGGARAAN URUSAN PEMER-INTAHAN UMUM														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen
Terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum di kecamatan	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	61.113.500,00	100%	62.337.270,00	100%	63.547.127,00	100%	64.680.080,00	100%	65.821.397,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	4.863.500,00	100%	4.960.889,00	100%	5.057.171,00	100%	5.147.333,00	100%	5.238.160,00	OPD Unsur Kewilayahan-Kecamatan Semen
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	5.164.825.240,00	100%	5.268.248.568,00	100%	5.370.496.035,00	100%	5.466.244.263,00	100%	5.562.699.280,00	OPD Unsur Pemerintahan Umum

10/19/2025 12:13:23 AM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														OPD Unsur Pemerintahan Umum
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Kelompok yang Dibina tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%	85%	85%	1.611.011.300,00	90%	1.643.271.084,00	90%	1.675.164.094,00	90%	1.705.029.863,00	90%	1.735.116.093,00	OPD Unsur Pemerintahan Umum
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														OPD Unsur Pemerintahan Umum
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	100%	100%	5.410.959.800,00	100%	5.519.311.863,00	100%	5.626.432.028,00	100%	5.726.743.227,00	100%	5.827.794.898,00	OPD Unsur Pemerintahan Umum
PROGRAM PEM-BERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE-MASYARAKATAN														OPD Unsur Pemerintahan Umum
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terbina	80%	80%	85%	3.611.746.000,00	85%	3.684.069.607,00	90%	3.755.570.938,00	90%	3.822.527.372,00	90%	3.889.978.061,00	OPD Unsur Pemerintahan Umum
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														OPD Unsur Pemerintahan Umum

InUse Book 1.indb 386 10/19/2025 12:13:23 AM

InUse Book 1.indb 387

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR/ *OUTCOME*	*BASE LINE* 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
Meningkatnya partisipasi aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait isu sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	85%	85%	85%	475.077.000,00	85%	484.590.205,00	90%	493.995.251,00	90%	502.802.476,00	90%	511.674.714,00	OPD Unsur Pemerintahan Umum
	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	85%	85%	85%		85%		90%		90%		90%		OPD Unsur Pemerintahan Umum
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														OPD Unsur Pemerintahan Umum
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	85%	85%	85%	4.077.894.800,00	90%	4.159.552.984,00	90%	4.240.282.764,00	90%	4.315.881.059,00	90%	4.392.037.408,00	OPD Unsur Pemerintahan Umum
GRAND TOTAL					**3.595.257.424.549,00**		**3.684.856.292.425,00**		**3.775.313.097.123,00**		**3.863.732.387.462,00**		**3.954.252.294.331,00**	

10/19/2025 12:13:23 AM

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kerangka penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Kediri disajikan pada tabel di bawah ini.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi hal esensial yang mengukur perwujudan dari kinerja pembangunan sekaligus merupakan *core areal business*. Dengan demikian, kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran pembangunan dan IKU menjadi instrumen pengukur keberhasilan pemerintah daerah.

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Adapun penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang di dalamnya juga mencakup Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome*. IKD dan IKK mencerminkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada prioritas kepala daerah. Pada tingkat kabupaten, IKD mencakup indikator pembangunan daerah yang memastikan pembangunan di Kabupaten Kediri berkontribusi dan sinergis dengan capaian pembangunan regional di tingkat provinsi serta nasional. Di sisi lain, IKK yang merupakan bagian dari IKD merupakan parameter kinerja pada setiap urusan yang upayanya dikerjakan oleh setiap OPD terkait. Seluruh indikator berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 tetap berlaku, akan tetapi pencapaiannya menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan RPJMD lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kediri.

Pemilihan indikator dalam IKD meliputi indikator yang strategis, berdampak luas, serta berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik. Indikator lain kemudian tetap akan diakomodasi dalam rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) sebagai bagian dari perencanaan operasional masing-masing sektor. Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

InUse Book 1.indb 388 10/19/2025 12:13:23 AM

InUse Book 1.indb 389

TABEL 4.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kediri

No.	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	75,18	76,00-76,35	76,11-76,71	76,42-77,32	76,73-77,93	77,04-79,24	77,45-80,01	
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95	4,05-5,00	4,11-5,02	4,12-5,15	4,15-5,17	4,23-5,18	4,22-5,13	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	87,09	87,10-87,80	87,50-88,20	88,00-88,70	88,50-89,20	89,00-89,70	89,50-90,20	
4.	Indeks Daya Saing Daerah (Nilai)	3,73	3,90-3,92	3,98-4,00	4,06-4,08	4,14-4,17	4,22-4,25	4,30-4,33	
5.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum (%)	1,77	1,71-1,91	1,72-2,00	1,73-2,07	1,75-2,14	1,77-2,20	1,79-2,26	
6.	Indeks Risiko Bencana (Nilai)	117,51	115,55-112,73	112,73-110,05	110,05-107,49	107,49-105,05	105,05-102,71	102,71-99,63	
7.	Indeks Desa (Nilai)	0,779	0,775-0,780	0,783-0,791	0,791-0,802	0,799-0,813	0,807-0,824	0,815-0,835	
8.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,95	8,29-9,74	8,23-9,43	8,08-9,01	7,90-8,70	5,49-8,18	5,18-7,15	

10/19/2025 12:13:23 AM

InUse Book 1.indb 390

TABEL 4.3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kediri

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,6	82	82,41	82,83	83,24	83,66
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	7,65	7,35	7,04	6,37	6,43	6,12
3.	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/Kapita	1.411	1.432	1.456	1.478	1.523	1.576
4.	Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	15,67	20,88	26,1	31,31	36,52	40
5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	7,14	7,8	8,46	9,12	9,77	10,43
6.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	11,94	12,4	12,86	13,32	13,77	14,23
7.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	22,7	22,9	23,1	23,3	23,5	23,7
8.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73
9.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,9	0,86	0,79	0,76	0,72	0,68
10.	Rasio Penduduk	Persen	101,9	101,7	101,4	101,2	100,98	100,97
11.	Kepadatan Penduduk	Ribu Jiwa/Km2	1.082	1.086	1.091	1.093	1.095	1.098
12.	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,18	75,44	75,69	75,95	76,21	76,47
13.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,66	71,74	71,82	71,9	71,97	72,05
14.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 Eq	420.407,47	428.815,62	437.391,94	446.139,78	455.062,57	464.163,82
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,47- 4,75	5,45-4,50	5,44-4,26	5,33-4,08	5,27-3,97	5,21-3,89
16.	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,29	0,32	0,37	0,43	0,47	0,51
17.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	83	83,5	84	84,5	85	85,5
18.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	31,77	33,31	35,81	37,35	39,86	41,66
19.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	72,15	74,32	75,31	77,09	78,67	80,25
20.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,68	8,76	8,85	8,99	9,06	9,09
21.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,64	13,66	13,73	13,82	13,88	13,92
22.	Prevalensi Stunting	Persen	16,23	15,65	15,07	14,49	12,49	11,97
23.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	42,98 - 53,38	40,98 - 52,38	38,98 - 51,38	36,98 - 50,38	34,98 - 49,38	32,98 - 48,38
24.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	63	63,85	64,71	65,56	66,42	67,27
25.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,365	0,345	0,335	0,326	0,316	0,306

10/19/2025 12:13:24 AM

InUse Book 1.indb 391

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
26.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,12	7,13	7,14	7,15	7,16	7,17
27.	Rasio Gini (Nilai)	Indeks	0,278 -0,312	0,272 -0,306	0,267 -0,301	0,261 -0,295	0,256 - 0,290	0,250 - 0,284
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
28.	Angka Ketergantungan	Nilai	47,03	46,43	45,82	45,22	44,61	44,01
29.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	22,31	23,09	23,1	23,11	23,13	23,14
30.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,11	70,92	71,57	72,33	73,06	73,79
31.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	46,80	47	47,52	47,83	48,3	48,62
32.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,02	6,32	6,62	6,92	7,22	7,52
33.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	Persen	31,92 - 32,60	31,95 - 32,71	32,05 - 32,72	32,09 - 32,73	32,11 - 32,75	32,13 - 32,76
34.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	88	89,2	91,06	92,92	94,6	96,45
35.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,63	0,67	0,7	0,74	0,77	0,81
36.	Tingkat Inflasi	Persen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
37.	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32,68 – 34,20	32,97 – 35,14	33,15 – 36,08	33,76 – 37,02	34,01 – 38,95	34,29 – 39,89
38.	Tingkat Pertumbuhan Wisatawan	Persen	7	8	9	10	11	12
39.	Persentase Desa Mandiri	Persen	37,9	38,78	39,65	40,23	40,82	41,66
40.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,88	3,91	3,94	3,97	4,00	4,02
41.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	56,22	56,68	57,14	57,6	58,06	58,52
42.	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	1,51	1,56	1,61	1,66	1,72	1,78
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
43.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,68	2,03 - 2,4	2,13 - 2,55	2,23 - 2,69	2,33 - 2,84	2,43 - 2,98
44.	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100	100
45.	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	100	100	100	100	100	100
46.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	80	82	85	87	90	93
47.	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9
48.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,46	3,49	3,52	3,55	3,58	4
49.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	70	72	74	76	78	80

10/19/2025 12:13:24 AM

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah (IKK)							
A	**Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar**							
1.	Pendidikan							
	Indeks SPM Bidang Pendidikan	Indeks	82,98	83,48	83,98	84,48	84,98	85,48
2.	Kesehatan							
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98	98	98	98	98	98
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	Persen	87,48	88,87	90,26	91,65	93,04	94
	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Persen	14,57	15,47	16,37	17,27	18,15	19,09
	Persentase Capaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	82,16	84,57	89,01	92,57	96,56	97,8
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	Cakupan Rumah Tangga dengan Layanan Utilitas Hunian	Persen	87,37	87,92	88,47	89,01	89,56	90,11
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	97,71	97,76	97,81	97,86	97,91	97,96
	Cakupan Layanan Penanganan Kasus Kebakaran dan Nonkebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase Capaian SPM Trantibumlinmas dalam Rangka Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
6.	Sosial							
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,71	57,75	57,8	57,85	57,9	57,95
B	**Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Nondasar**							
1.	Ketenagakerjaan							
	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Layanan Antarkerja	Persen	64,8	65,17	65,50	65,83	66,17	66,5
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Nilai	0,0065	0,0060	0,0058	0,0055	0,0053	0,0050
3.	Pangan							
	Ketersediaan Energi Per Kapita	Kkal/Kapita/Hari	3.329 Kkal/ Kapita/Hari	3.362 Kkal/ Kapita/Hari	3.396 Kkal/ Kapita/Hari	3.430 Kkal/ Kapita/Hari	3.464 Kkal/ Kapita/Hari	3.499 Kkal/ Kapita/Hari
	Ketersediaan Protein Per Kapita	Gram/Kapita/Hari	17,51 Gram/ Kapita/hari	18,04 Gram/ Kapita/Hari	18,58 Gram/ Kapita/Hari	19,13 Gram/ Kapita/Hari	19,71 Gram/ Kapita/Hari	20,30 Gram/ Kapita/Hari

InUse Book 1.indb 392
10/19/2025 12:13:24 AM

InUse Book 1.indb 393

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.	Pertanahan							
	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
5.	Lingkungan Hidup							
	Indeks Kualitas Air	Indeks	72,37	72,47	72,57	72,67	72,77	72,87
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,65	79,75	79,85	79,95	80,05	80,15
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	55,67	55,67	55,67	55,67	55,67	55,7
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	96,75	93,75	94	94,25	94,5	94,75
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	90	92	94	96	98	100
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	90,25	90,5	90,75	91	91,25	91,5
9.	Perhubungan							
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan	Indeks	81	81,5	82	82,5	83	83,5
10.	Komunikasi dan Informatika							
	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)	Indeks	52,35	56,6	60,85	65,1	69,35	73,6
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
	Rasio Kewirausahaan	Persen	2,18	2,23	2,28	2,32	2,36	2,39
12.	Penanaman Modal							
	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	3	3,01	3,15	3,29	3,43	3,57
13.	Kepemudaan dan Olahraga							
	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks	48,3	55,3	62,3	69,3	76,3	83,3
14.	Statistik							
	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1
15.	Persandian							
	Indeks KAMI	Indeks	400	450	471	492	513	534
16.	Kebudayaan							
	Persentase Cakupan *Event* Pariwisata dan Budaya yang Diikuti	Persen	38	40	43	45	48	50

10/19/2025 12:13:24 AM

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.	Perpustakaan							
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	65,6	66,6	67,6	68,6	69,6	70,6
18.	Kearsipan							
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	80,75	81	81,3	81,6	81,9	82,2
C	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**							
1.	Pariwisata							
	Pertumbuhan Pendapatan Sektor Kepariwisataan	Persen	15	16	17	18	19	20
2.	Kelautan dan Perikanan							
	PDRB Subsektor Perikanan	Miliar Rupiah	855,29	859,57	863,87	868,19	872,53	876,89
3.	Pertanian							
	Nilai Tukar Petani	Nilai	105	106	107	108	109	110
4.	Perdagangan							
	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4,95	4,96	4,97	4,98	4,99	5
5.	Perindustrian							
	Persentase PDRB Sektor Industri	Persen	3,87	3,88	3,89	3,9	3,91	3,92
6.	Transmigrasi							
	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Transmigrasi	Persen	10	12	14	15	17	20
D	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan**							
1.	Perencanaan Pembangunan							
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	76	78	80	81	82	83
2.	Keuangan							
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	64,45	66,45	68,45	70,45	72,45	74,45
	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	25,22	25,25	25,3	25,35	25,4	25,45
3.	Kepegawaian							
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	81,78	81,94	82,2	82,45	82,7	82,95
4.	Penelitian dan Pengembangan							
	Persentase Hasil Penelitian yang Telah Diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100
5.	Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100

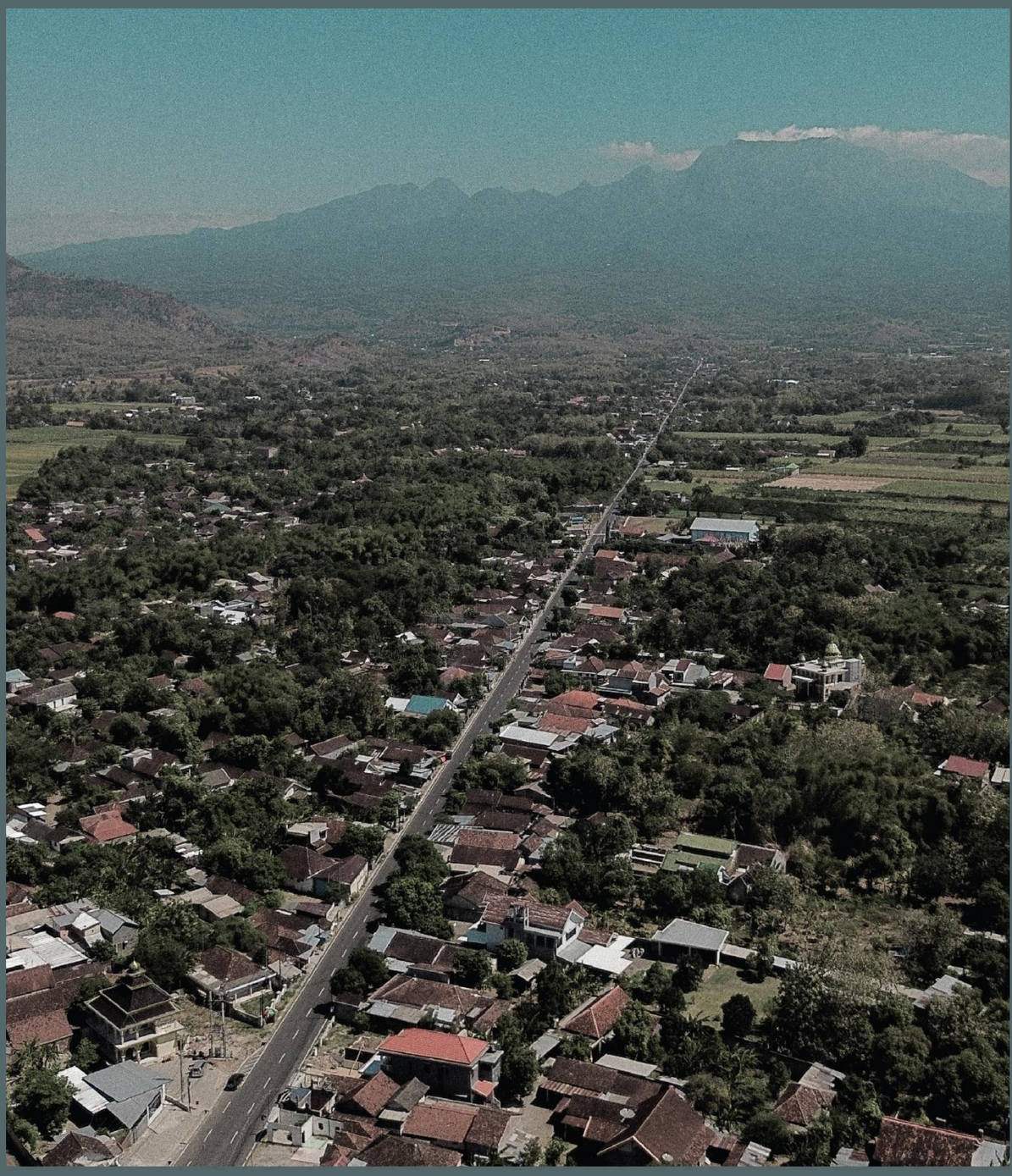
InUse Book 1.indb 394
10/19/2025 12:13:24 AM

InUse Book 1.indb 395

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.	Pengawasan							
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Level 3 3,205	Level 3 3,207	Level 3 3,209	Level 3 3,211	Level 3 3,213	Level 3 3,215
	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	Indeks	88	89	90	91	92	93
7.	Sekretariat Dewan							
	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Persen	93 (Puas)	93,25 (Puas)	93,50 (Puas)	93,75 (Puas)	94 (Puas)	94,5 (Puas)
8.	Kesekretariatan Daerah							
	Persentase Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang Direalisasikan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Nilai LPPD	Nilai	3	3	3	3	3	3
	Persentase Produk Hukum yang Sesuai dengan Kaidah Hukum	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Direalisasikan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Indeks Matriks UKPBJ	Indeks	0,89	0,89	0,89	1	1	1
	Nilai SAKIP	Nilai	75,37	76,12	76,63	77,12	77,63	78,37
	Nilai IKM	Nilai	88,74	88,81	88,81	88,87	88,87	88,94
9.	Kecamatan							
	Nilai IKM	Nilai	86	87	88	89	90	91
	Persentase Dokumen Administrasi Kecamatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100

10/19/2025 12:13:25 AM

InUse Book 1.indb 396 10/19/2025 12:13:25 AM



BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas pembangunan yang diterjemahkan dari janji kampanye Bupati Kediri (H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H.) dan Wakil Bupati Kediri (Hj. Dewi Maria Ulfa, S.T.). Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Kediri periode 2025–2029. RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 disusun dengan tujuan akhir untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kediri melalui pencapaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. Karena itu, RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 harus dijabarkan lebih lanjut dalam rencana strategis perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri untuk menjadi pedoman dalam penyusunan (Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kediri. RPJMD dan RKPD Kabupaten Kediri merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kediri.

Penguatan pengendalian dan evaluasi di tiap perangkat daerah harus lebih dioptimalkan dan diinstitusionalisasi untuk memastikan pencapaian target indikator kinerja daerah. Pengendalian dan evaluasi itu harus menjadi instrumen untuk (*prove*) kinerja serta untuk perbaikan (*im-prove*) pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Selain itu, pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah pada RPJMD sangat ditentukan kualitas sinergitas kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (korbinwas) untuk peningkatan sinergitas antarsektor (urusan) pun harus diperkuat dan diinstitusionalisasi.

Sama seperti di tingkat nasional, dalam rangka mengawal implementasi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dilaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi *ex-ante* dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan kecukupan desain kebijakan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan mencakup penelaahan konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kaidah kerangka kerja logis, kesiapan pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi risiko. Pengendalian dan evaluasi dalam tahap perencanaan memperhatikan kedudukan RPJMD sebagai (1) Instrumen operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (2) Pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta (3) Pedoman perumusan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/masterplan/*grand design* atau sebutan lainnya. Sementara pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan pelaksanaan intervensi dan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat dilakukan sepanjang periode pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat periode pelaksanaan rencana dan tahun

InUse Book 1.indb 398 10/19/2025 12:13:25 AM

terakhir periode pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD menjadi penekanan dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 secara intensif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut.

1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta prioritas program APBD masa transisi, yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih;
3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan program prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2025–2029 merupakan pedoman bagi setiap kepala perangkat daerah menyusun rencana strategis perangkat daerah, pedoman untuk menyusun RKPD, dan perencanaan penganggaran Kabupaten Kediri setiap tahunnya. Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029. Kaidah pelaksanaan ini dibuat dengan tujuan agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas waktu pelaksanaan dan pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Bupati Kediri dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dengan menggerakkan secara optimal seluruh potensi dan kekuatan daerah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029;
3. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan, sub-kegiatan, beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah serta disahkan oleh bupati;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi, dan mediasi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah di Kabupaten Kediri;

InUse Book 1.indb 399 10/19/2025 12:13:25 AM

5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Kediri;
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Kediri dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
7. RKPD Kabupaten Kediri harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD dengan pendekatan berbasis kinerja;
8. Berkaitan dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Kediri merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
9. Dalam hal pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 menunjukkan adanya hal-hal yang perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Kediri dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, maka strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 sangat krusial dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagai bagian dari implementasi aktivitas tersebut, dilakukan pengendalian Program Prioritas Bupati yang secara spesifik mengawal fokus kebijakan Bupati. Pengendalian pada tahap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dilakukan untuk mengawal ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, termasuk menyusun rekomendasi penyesuaian kebijakan. Pengendalian tahap pelaksanaan dilakukan secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Implementasi pengendalian tersebut melalui aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem berbasis digital dalam periode pembangunan 2025–2029. Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri melalui sinergi dengan perangkat daerah pelaksana.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri juga dilakukan dengan berbasis Manajemen Risiko Pembangunan Daerah pada proses pengendalian tahunan. HaI ini memperkuat pendekatan *problem-oriented* yang selama ini dilakukan (*backward looking*) melalui antisipasi risiko ke depan (*forward looking*). Level risiko yang telah diidentifikasi dan upaya mitigasinya perlu terus dipantau agar kebijakan pembangunan berjalan dengan baik. ldentifikasi risiko perlu dilakukan agar antisipasi kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat. Dengan demikian, pengendalian berbasis manajemen risiko akan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

InUse Book 1.indb 400 10/19/2025 12:13:25 AM

Seperti pada pengendalian pelaksanaan RPJMN, pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menghasilkan tindakan korektif berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam periode RPJMD dimaksud. (1*) Pertama*, tindakan konstruktif untuk penyesuaian operasional tahunan dalam rangka memastikan pelaksanaan intervensi pemerintah daerah sesuai dengan rencana. Penyesuaian operasional ini meliputi dan tidak terbatas pada perbaikan strategi percepatan pelaksanaan dan penyesuaian teknis lainnya. (2*) Kedua*, tindakan korektif dilakukan dalam konteks kebijakan, yakni dalam kerangka perencanaan antartahun dalam periode RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Penyesuaian kebijakan dalam kerangka pengendalian RPJMD ini fokus pada perencanaan kebijakan antartahun yang meliputi dan tidak terbatas pada terminasi program/proyek, penyesuaian strategi, desain dan sasaran, serta penyesuaian tata kelola pelaksanaan.

Pemantauan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 mencakup dua hal, yaitu: (a) pemantauan atas perkembangan pelaksanaan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dan (b) pemantauan atas perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko pembangunan daerah. Pemantauan pelaksanaan RPJMD dilakukan secara rutin dan berkala sesuai kebutuhan selama periode pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan melalui pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil pemantauan akan menjadi dasar pengendalian operasional pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Evaluasi saat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 mencakup dua hal, yaitu: (a) evaluasi tahunan melalui evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta pelaksanaan program/kegiatan/proyek dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan (b) evaluasi paruh waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 yang akan memberikan *feedback* bagi penyesuaian kebijakan dalam periode RPJMD. Evaluasi RPJMD dilakukan dengan mengedepankan koordinasi terpadu yang dilakukan seluruh *stakeholders* pelaksana RPJMD dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri sebagai koordinator dan penanggung jawab. Evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dilakukan pada tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD, dan dapat dimutakhirkan satu tahun setelah periode pelaksanaan RPJMD berakhir pada triwulan pertama. Evaluasi akhir RPJMD dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta bertujuan untuk mengidentitikasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah selama periode 5 tahun. Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang dapat mencakup evaluasi kinerja pembangunan serta evaluasi kebijakan/program strategis. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya dalam kerangka RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Evaluasi akhir dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.

InUse Book 1.indb 401 10/19/2025 12:13:26 AM

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Kediri, serta kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Kabupaten Kediri akan menjadi Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan pada tahun 2029. Selain itu, sebagai tahapan pertama pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025–2045, RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi jembatan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, yaitu KEDIRI BERBUDAYA LUHUR (Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan) 2045 dapat tercapai. Berbagai doa dan dukungan dari seluruh pihak menjadi daya dorong untuk merealisasikan berbagai program prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 dan diharapkan akan memberikan hasil terbaik demi tercapainya visi dan misi jangka menengah Kabupaten Kediri yang telah dirumuskan.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 - 8 - 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 139-4/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH,

MOHAMAD SOLIKIN

InUse Book 1.indb 402 10/19/2025 12:13:26 AM